

Syafhendry

Perilaku Pemilih Teori dan Praktek

Pengantar :
Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si
Dosen IPDN

Syafhendry

**Perilaku Pemilih
Teori dan Praktek**

Penerbit:
Alaf Riau
2016

Perilaku Pemilih

Teori dan Praktek

Penulis
Syafhendry

Sampul dan Perwajahan
SYAMSUL ANWAR

Cetakan I
Juli 2016

Penerbit:
Alaf Riau

ISBN : 978-602-6982-23-0

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Sekapur Sirih Penulis

Pemungutan suara adalah sebuah institusi dasar bagi masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu, perhatian pada pemilihan dan perilaku pemilih dalam pemungutan suara meningkat sejalan dengan keberhasilan demokrasi di Eropa dan Negara barat lainnya sejak abad 19 hingga abad 21. Partai-partai politik di Eropa merupakan produk dari konflik-konflik dalam masyarakat selama masa revolusi industry dan proses pembentukan bangsa sejak abad ke 19. Di Indonesia semenjak reformasi 1998 perhatian masyarakat terhadap proses demokrasi semakin meningkat dengan adanya perubahan paradigm dari sistem pemilihan melalui perwakilan menjadi pemilihan secara langsung. Buku ini merupakan kesempatan untuk mempelajari apa yang mungkin bermanfaat bagi perkembangan kontek politik lokal di Indonesia.

Dengan selesainya buku ini, Alhamdulillah penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas limpahan rahmat dari Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, ruang dan waktu, pemikiran dan kesehatan hingga buku ini sampai ditangan pembaca yang budiman.

Pada kesempatan ini penulis ingin ucapan terimakasih kepada Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si dosen IPDN Jatinangor dan sebagai dosen Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Di tengah kesibukan yang terbilang luar biasa, prof Sadu Wasistiono masih menyisihkan waktunya untuk menulis dan menyelesaikan Kata Pengantar buku ini. Tidak terbantahkan, pengantar yang ditulis memberikan bobot tersendiri pada buku ini. Terimakasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. Ali Embi atas pemikirannya dalam memberi bimbingan dan arahan dalam penyelesaian

disertasi penulis, yang kemudian dari naskah tesis tersebut terinspirasi menjadi buku yang ada ditangan pembaca. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu penulis juga mengucapkan terimakasih atas perhatian dan dukungannya.

Terakhir, sosok yang luar biasa yang selalu menjadi bagian hidup penulis ialah ayahnda H. Rusli Hamzah (alm) dan Ibunda Hj. Rosma, terimakasih atas didikan, bimbingan dan doa yang berikan. Hal yang sama juga disampaikan kepada semua keluarga Kakak dan Adik penulis. Kepada isteri penulis Dewi Suryani, S.Pd dan ananda Puan Putri Muthia, terimakasih atas segala pengertian dan pengorbannya selama ini. Wassalam ...

Pekanbaru, 26 Juni 2016
21 Ramadhan 1437 H

Dr. H. Syafhendry, M.Si

Kata Pengantar

Pada negara demokrasi dikenal adagium “Vox Populi – Vox Dei”, yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Demikian berharga dan sucinya suara rakyat sehingga perlu dihormati, karena suara rakyat akan menentukan masa depan bangsa. Suara rakyat akan menentukan siapa wakil-wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan mereka di parlemen maupun pada saat menentukan siapa yang akan duduk pada tampuk pimpinan pemerintahan untuk kurun waktu tertentu.

Adagium tersebut berlaku pada negara demokrasi dengan masyarakat berpendidikan tinggi serta memiliki pendapatan perkapita yang masuk kategori kelas menengah ke atas. Pada negara demokrasi berpendidikan rendah dan berpendapatan terbatas, suara rakyat seringkali dimanipulasi oleh para elit politik maupun elit pemerintahan. Rakyat dengan mudah dimanipulasi untuk memilih tokoh-tokoh yang berparas tampan, atau tokoh selebriti karena sering muncul di televisi. Rakyat dengan kondisi semacam itu akan mudah digiring dengan isu-isu bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan), sehingga tidak mampu menggunakan suaranya secara obyektif. Pada sisi lain, partai politik umumnya belum menjalankan pendidikan politik secara masif dan berkelanjutan agar rakyat menjadi “paham politik”.

Karena demikian berharganya suara rakyat dalam sistem demokrasi, maka buku karya Dr. Syafhendry, kolega dosen di Universitas Islam Riau Pekanbaru menjadi sangat penting untuk dibaca dan dipelajari. Buku ini mengupas secara tuntas perilaku pemilih di Indonesia dari beberapa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, ditinjau dari teori dan praktek. Dikatakan demikian, karena sejak reformasi Indonesia telah

menjadi negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat, dilihat dari kuantitas rakyat yang menggunakan hak suaranya, belum pada kualitas demokrasinya. Oleh karena itu berbagai tulisan tentang demokrasi Indonesia yang ditulis oleh ahli-ahli dari Indonesia perlu didukung penerbitannya. Sudah saatnya negara Indonesia memberi kontribusi pemikiran untuk kepentingan dunia, bukan hanya sebagai konsumen saja. Banyak *best practice* maupun *bad practice* demokrasi di Indonesia yang dapat dijadikan contoh bagi negara lain.

Penggunaan sistem "*one man- one vote*" dalam demokrasi di Indonesia menggantikan sistem musyawarah dan mufakat telah menimbulkan dampak negatif berupa terjadinya politik uang (*money politics*). Rakyat yang berpendidikan rendah dan berpendapatan terbatas diberi iming-iming uang, bahan makanan dan sejenisnya agar mau menggadaikan kedaulatannya kepada mereka yang memiliki uang. Apabila praktek semacam ini dibiarkan, maka demokrasi di Indonesia akan bermutasi menjadi plutokrasi, yakni pemerintahan oleh orang-orang berharta, karena yang dapat mencalonkan jadi pemimpin nasional maupun daerah hanyalah orang-orang kaya atau orang yang didukung oleh orang-orang kaya. Tidaklah berlebihan apabila Huffington menyebutkan bahwa sistem "*one man-one vote*" telah berubah menjadi "*one dollar-one vote*".

Ada kaitan yang erat antara politik uang dengan perilaku wakil-wakil rakyat di parlemen dan pemimpin pemerintahan. Mereka yang duduk dengan menggunakan uang mengalami defisit moral dalam menjalankan tugas sucinya sebagai wakil rakyat. Tidaklah berlebihan apabila Tullock, Seldon, and Brady (2013) dalam bukunya "*Government Failure*" mengkritik sistem demokrasi dengan membuat formula baru yakni : "*It is government " of the Busy (political activists), by the Bossy (government managers), for the Bully (lobbying activists)*". Formula baru ini menggantikan formula Abraham Lincoln dengan pandangan "*The Gettysburg Formula*" yang menyebutkan bahwa demokrasi adalah : "*Government of the people, by the people, for the people*".

Mempelajari perilaku pemilih menjadi sangat penting

pada era demokrasi saat ini. Terlebih lagi setelah revolusi informatika dan telekomunikasi yang melanda dunia kemudian menciptakan *cyberdemocracy*, yakni demokrasi yang berbasis pada IT. *Cyberdemocracy* itu sendiri akan mendorong munculnya *cyber-decentralization* yang bertumpu pada kekuatan warga negara (*citizen*). Penyampaian aspirasi ataupun petisi yang selama ini disalurkan melalui para wakil-wakilnya yang ada di parlemen, secara bertahap akan disalurkan melalui petisi *online*, seperti *change.org* dan lain sebagainya.

Perubahan perilaku pemilih perlu dicermati secara sungguh-sungguh oleh partai politik maupun calon pemimpin yang akan tampil melalui jalur independen. Fenomena Ahok yang akan maju dalam pertarungan Pilkada Gubernur DKI 2017-2022 melalui jalur independen, diikuti oleh gerakan yang sama di Yogyakarta melalui *Joint (Jogyaindependent2017)* sebaiknya tidak ditanggapi hanya sebagai gerakan anti partai politik, melainkan juga sebagai gerakan menuju demokrasi dunia siber yang lebih bebas dari ikatan organisasi formal. Seperti dikemukakan oleh Kakabadse dkk sebagai editor buku "*Citizenship – A Reality Far From Ideal*" (2009), yang mengatakan ada enam konsep kewarganegaraan, dan bergerak dari "*political citizenship*" yang dikembangkan jaman Aristoteles pada era empat abad sebelum Masehi menuju era "*virtual citizenship*" yang berbasis pada internet.

Melalui studi perilaku pemilih, partai politik dituntut untuk menyusun strategi baru dalam melakukan pendidikan politik maupun dalam menjaring suara dalam pemilihan umum. Buku karya Dr. Syafhendry memberikan gambaran yang lengkap mengenai hal tersebut, sehingga menarik untuk dibaca dan perlu dimiliki untuk bahan diskusi politik dengan para warganegara.

Jatinangor, Medio Juni 2016

Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MSi
(Dosen IPDN)

Daftar Isi

Sekapur Sirih Penulis	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix

BAB 1 Pendahuluan

1.1. Perubahan Peta Politik	4
1.3. Perubahan Paradigma	8

BAB 2 Sejarah Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

2. 1. Perilaku pemilih Pada Zaman Penjajahan Hindia Belanda	15
2.2. Perilaku pemilih Waktu Pemerintahan Kolonial Jepun..	17
2. 3. Perilaku pemilih Pada Masa Orde Lama.....	19
2.4. Perilaku pemilih Pada Masa Orde Baru	24
2.5. Masa Reformasi	26
2.6. Parameter Perilaku pemilih.....	29
2.7. Tata Cara Pencalonan Kepala daerah.	33
2.8. Penelaah Persyaratan Administratif Calon Kepala daerah.....	34
2.9. Penetapan Pasangan Calon Kepala daerah.....	35

BAB 3 Teori Perilaku Pemilih

3.1. Mengenali Perilaku pemilih	37
3.2. Tipologi Perilaku Pemilih	70
3.3. Perilaku pemilih Dalam Pemberian Suara	81
3.4 Perilaku pemilih Dalam Pendekatan Ilmu Politik	87
3.5 Perilaku pemilih perspektif sikap.....	126

BAB 4 Perilaku Pemilih di Indonesia

4.1. Perilaku Pemilih Sebelum Pemilu 2004	140
4.2. Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2004.....	143
4.3. Perilaku Pemilih dalam Pemilu 2004	145
4.4. Pemilih Muslim Semakin Bersifat Sederhana.....	150
4.5. Perilaku pemilih Pemilihan Kepala daerah Di Riau.....	153

BAB 5 Orientasi Faktor Pemilihan

5.1. Orientasi Agama	157
5.2. Orientasi Isu.....	160
5.3. Orientasi Kandidat.....	161
5.4. Perilaku pemilih Sebelum Pemilu 2009	164
5.5. Perilaku pemilih Menjelang Pemilu 2009	167
5.6. Perilaku pemilih Pada Pemilu 2009.....	170
5.7. Pemilih Muslim Semakin Moderat.....	176

Bab 6 Realisasi Pemilih Rasional dan Irasional

6.1. Pemilih Rasional.....	181
6.2. Pemilih Irasional	188
6.3. Perilaku Pemilih Orientasi Karakter Tokoh.....	197
6.4. Perilaku pemilih Orientasi Keakraban Hubungan	201

Daftar Pustaka	209
-----------------------------	------------

BAB 1

Pendahuluan

Mengapa perilaku pemilih? Karena perilaku pemilih senantiasa menarik untuk dikaji, ketertarikan tersebut disebabkan perilaku pemilih selalu mengubah pilihannya politiknya dari pemilu ke pemilu lainnya, dari pemilu legislatif ke pemilu kepala daerah. Perilaku yang berubah tersebut bisa saja dulu memilih sekarang tidak, dulu perilaku konsisten sekarang tidak, dulu perilaku masa bodoh saja sekarang ikut berpartisipasi.

Perilaku pemilih seperti ini tentu mempengaruhi perolehan suara dan kekuatan partai politik. Apalagi kasus di Indonesia dengan terjadinya perubahan paradigama dalam sistem pemilihan kepala daerah. Perubahan itu terjadi sejak runtuhnya pemerintahan orde baru [1966-1988] dan diganti dengan pemerintahan masa reformasi yang banyak memberikan pencerahan terhadap kondisi politik . Salah satu nilai perubahan tersebut dalam dibidang politik adalah masalah sistem pemilihan langsung baik untuk anggota legislatif, presiden dan kepala Daerah. Jika pada masa pemerintahan orde baru dikenal dengan sistem pemilihan perwakilan, maka pada masa pemerintahan reformasi dikenal dengan sistem pemilihan langsung.

Perubahan paradigma ini, tentu memberi peluang terhadap partisipasi politik masyarakat. Jika pada masa pemerintahan orde baru masyarakat pemilih bergantung pada keputusan partai politik, maka masa pemerintahan reformasi ini masyarakat pemilih dalam menentukan keputusan politiknya dapat dilakukan dengan sendiri secara langsung. Inilah kebebasan demokrasi yang dirasakan masyarakat pemilih Indonesia saat ini.

Hal ini sejalan dengan esensi dari demokrasi itu sendiri yakni kekuasaan berada ditangan rakyat, tetapi bagaimana demokrasi itu diimplikasikan dalam kehidupan berpolitik sehari-hari boleh sangat berbeda, tergantung dari seberapa besar keikutsertaan rakyat didalamnya. Dalam konteks pemilih merupakan satu institusi yang menentukan masa depan mereka dan Negara dengan memilih calon-calon yang akan memerintah dan memimpin Negara/daerah.

Keadaan ini menyatakan bahwa pemilu itu merupakan satu proses yang kompleks karena melibatkan keputusan individu dan kumpulan yang mampu memberi kesan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung kepada sistem politik Negara. Salah satu nilai dari sistem politik tersebut adalah pergantian pemimpin secara teratur [*orderly succession of the rulers*]¹. Nilai-nilai tersebut tampaknya berlaku juga pada jabatan kepala daerah sebagai pemipinan pemerintahan di daerah. Karena dalam masa lima tahun waktu masa kepala daerah berakhir pada prinsipnya akan dilakukan pergantian. Pergantian kepemimpinan tersebut di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan paradigma dari sistem *demokrasi perwakilan* kepada *demokrasi langsung*.

Pengamalan demokrasi langsung [*direct democracy*]² telah menjadi tekad di Indonesia sejak masa reformasi 1998. Disini terjadi perubahan paradigma pada sistem pemilu. Dari sistem pemilihan tidak langsung (sistem Perwakilan)³ kepada sistem pemilihan langsung.,

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah [Pilkada] langsung membawa proses keterlibatan masyarakat secara langsung

1 Henri B. Mayo, *Introduction to Democratic Theory*, dalam Djohaermansyah Djohan, *Problematik Pemerintahan dan Politik local*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 96.

2 Demokrasi langsung [*direct democracy*] adalah sistem pemerintahan yang diterapkan setelah reformasi yang terjadi di beberapa city-states [Negara Kota] di Yunani sekitar pertengahan abad kelima sebelum masehi, Sistem pemerintahan yang dikota-kota tersebut sebelumnya bersifat aristokrasi, oligarki, monarki, atau tirani, berubah menjadi suatu sistem yang melibatkan secara langsung sejumlah besar warga dalam pembuatan hukum, penentuan kebijakan penting, termasuk memilih orang yang akan memerintah sebagai pemimpin mereka, lihat Hetifah Sj Sumarto, *Demokrasi Partaisipatif dan Prospek Penerapannya di Indonesia*, dalam *Jurnal analisis social*, Vol.9 No.3, Desember 2004, Bandung, hlm.1-2

3 Inggris adalah Negara pertama yang menciptakan suatu parlemen "work able" yaitu sebuah dewan perwakilan yang dipilih oleh rakyat, menggantikan "civil war dengan civil vote, lihat Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*, Bina aksara, Jakarta, 1988, hlm. 42

dalam proses seleksi jabatan politik [political recruitment].⁴ Seleksi politik ini secara tidak langsung boleh diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses perumusan pembuatan kebijakan umum. Mengapa demikian, karena pada azasnya calon yang bertanding ialah orang-orang yang akan bekerja membuat kebijakan kebijakan umum.

Secara yuridis formal Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 56 jo pasal 119⁵ dan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Pada pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan : *“Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.”*

Pasal diatas memiliki makna bahwa mulai tahun 2005 rakyat diikutsertakan dalam proses pemilihan kepala daerah, yang mana pada sebelum undang-undang ini diberlakukan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya diwakilkan kepada DPRD. Sehingga mengakibatkan banyak pilihan atau keinginan rakyat tidak tersalurkan dengan keputusan yang diambil oleh DPRD.

Studi perilaku pemilih pilkada pasca reformasi masih jarang di Indonesia. Hal ini dapat di makhlumkan, karena reformasi sistem pilkada langsung baru bergulir 2005 lalu. Tentu berbeda di Eropa atau Amerika yang sudah menerapkan demokrasi langsung pemilihan umum gubernur dan wali kota sejak lama. Memahami perilaku pemilih sangat penting bagi semua stakeholders. Bukan sekadar menjadi referensi memenangkan pilihan kepala daerah, tapi yang lebih penting menjadi

4 Dalam ilmu politik, dikenal dua model dalam rekrutmen politik, yaitu *sistem terbuka dan sistem tertutup*. Dalam sistem terbuka, semua warga Negara yang memenuhi syarat tertentu mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan jabatan politik. Sementara, dalam sistem tertutup, pengisian jabatan politik hanyalah melibatkan sekelompok kecil kalangan elite, lihat Moshe Czudnowki, *Political Recruitment*, dalam Fredrick Greensteein-Nelson W. Polsby, *Handbook of Political Science*, Vo.2 Addison Wesley, Reading Massachussets, 1975.

5 UU No.32/2004 tentang *Pemerintah Daerah* merupakan revisi UU No.22/1992, yang secara final diputuskan DPRD [DPR] dalam rapat Paripurna DPR tanggal 29 September 2004.

bahan pendidikan politik pemilih dan mendorong pilihan kepala daerah, khususnya Pilihan Bupati dan Walikota agar lebih demokratis dan rasional.

Rasionalitastas menjadi penting dewasa ini, karena dari sikap pemilih pilkada di berbagai tempat memperlihatkan bahwa pemilih telah menggempleng kita untuk tidak cepat underestimate. Anggapan bahwa pemilih umumnya bodoh, paternalistik, mudah dimobilisasi, dan dirayu itu semua banyak yang keliru.

1.1. Perubahan Peta Politik

Dengan berakhirnya masa jabatan seorang pemimpin sudah sepatasnya dilakukan pemilihan dengan merekrut calon pemimpin yang baru. Beberapa kecenderungan di Indonesia antara tahun 1950 hingga tahun 1998 ditandai secara terus menerus berkembangnya pengaruh militer dalam urusan pemerintahan⁶. Tetapi sejak bergulirnya reformasi di Indonesia tahun 1998 fenomena militer masuk dalam urusan pemerintahan sudah sangat kecil sehingga peluang sipil untuk menjadi calon pemimpin sangat besar.

Dengan peluang yang sangat besar ini suhu persaingan semakin meningkat. Dipilihnya sistem Pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendinamisir kehidupan demokratis di tingkat lokal⁷. Keberhasilan Pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitastas rakyat sendiri. Pada titik itulah, pesimisme terhadap pilkada langsung menemukan relevansinya.

Keputusan politik untuk daerah selalu lahir dalam suasana tarik menarik antara berbagai kepentingan, seperti elite dan

6 Monte Palmer, *Dilemmas of Political Development*, Florida : F.E. Peacock Publishers, Inc., 1973, hlm. 223

7 Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, sistim dan Problema Penerapan di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat [LP3M] Universitas Wahid Hasyim, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 2

publik, pusat dan daerah, partai dan non partai. Implementasi Pilkada langsung juga tidak lepas dari persoalan tersebut. Artinya, antara harapan [das sain] dan kenyataan memiliki jarak [das sollen]. Problem utamanya adalah bagaimana mendekatkan jarak tersebut? Bagaimana menemukan titik optimal? Keputusan politik di daerah dipengaruhi perubahan politik nasional dan bahkan perubahan hukum ketatanegaraan. Perubahan peta politik yang terjadi dalam Pemilu legislatif serta Pemilu Presiden tahun 2004, dan arah perubahan hukum ketatanegaraan juga mempengaruhi proses demokrasi daerah.

Sebagai lompatan demokrasi Pilkada langsung di Indonesia bisa diartikan positif maupun negative.⁸ Dalam pengertian positif, Pilkada langsung sebagai sarana demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat sebagai infrastruktur politik untuk memilih kepala daerahnya secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara. Sarana ini akan membuat keseimbangan dengan suprastruktur politik, karena melalui pemilihan langsung rakyat dapat menentukan jalannya pemerintahan dengan memilih pemimpin yang dikehendaki secara bebas dan rahasia. Meskipun rakyat tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan pemerintah sehari-hari, mereka dapat melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan yang sudah mendapat mandat langsung dari rakyat.

Dalam pengertian yang negatif, pilkada langsung mencerminkan penafsiran sepihak atas manfaat dan proses pilkada. Proses ini sering dianggap sebagai "*pesta demokrasi rakyat*" [fenomena tidak rasional] dimana rakyat berhak untuk berbuat apa saja, termasuk tindakan-tindakan anarki, baik atas inisiatif sendiri maupun yang dimobilisasi oleh kandidat dan pendukungnya atau karena dengan partai politik sebagai pihak yang mengajukan kandidat calon pemimpin. Eforia ini juga sering direspon khalayak sebagai kesempatan untuk meraih keuntungan materi dalam pilkada langsung.

Pemilihan kepala daerah dimata masyarakat hanya dijadikan ajang perebutan kekuasaan oleh segelintir elite partai politik untuk mendapatkan kekuasaan di lembaga eksekutif

8 Amirudin dan A. Zaini Bisri, *Pilkada Langsung Problem dan prospek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 2.

daerah. Hal ini dapat dilihat dari fenomena bahwa tidak semua pemilih menggunakan hak pilihannya. Partai politik yang seharusnya sekadar instrument yang menyajikan calon yang paling baik bagi masyarakat, cenderung lebih mementingkan calon-calon yang loyal kepada atasan daripada calon diluar partai yang mungkin dianggap masyarakat lebih berkualitas dan pantas menjadi kepala daerah.

Terkait dengan keputusan politik ini, maka masalah perilaku pemilih kadangkala tidak rasional dan tidak konsisten dalam menentukan pilihannya. Hal ini didasarkan pada pengetahuan, yaitu terkait dengan pendidikan politik atau lebih khusus terkait dengan pendidikan pemilih. Hanya saja hambatan proses pendidikan politik yang berkaitan dengan pemilih adalah mengenai *biaya* dan *waktu*. Masalah biaya berhubungan dengan krisis ekonomi dan beratnya beban hidup masyarakat terutama di pedesaan amat rawan terhadap jual beli suara (*money politics*). Tidak jarang para calon kepala daerah menggunakan uang sebagai umpan untuk memilih dirinya, uang diberikan secara tunai maupun berupa barang, baik kepada perseorangan dengan cara mendatangi rumah ke rumah maupun melalui ikatan primordial seperti kelompok tani, nelayan, kumpulan wirid pengajian, masjid, pemuda, paguyuban-paguyuban dengan cara memberi bantuan berupa uang dan barang organisasi yang bersangkutan. Berkaitan dengan waktu adalah waktu yang disediakan untuk sosialisasi atau kampanye kurang begitu panjang sehingga para pemilih kurang mendapatkan informasi yang maksimal tentang apa yang menjadi program para calon kepala daerah. Akibatnya pemilih yang bersangkutan tidak rasional, tidak tahu calon kepala daerah mana yang layak jadi pemimpin, akibatnya pemilih yang bersangkutan memilih sesuai dengan apa yang menjadi pilihan orang banyak.

Jika dilihat dari hasil perolehan suara pemilu legislatif, ada daerah Kabupaten/Kota Partai Golkar memperoleh suara terbanyak di daerah tersebut, tetapi pada saat dilakukan pemilu untuk pemilihan Kepala Daerah calon yang di usung oleh partai Golkar malah tidak menang. Ini membuktikan bahwa perilaku pemilih tidak konsisten dan tidak rasional atas apa

yang pernah dilakukannya pada saat pemilu legislatif. Artinya, perilaku pemilih tidak lagi mengantungkan pada kebesaran nama partai tetapi sudah melirik faktor lain dari seorang calon Kepala Daerah.

Disamping itu meningkatnya kekerasan dalam masyarakat, akibat melemahnya wibawa hukum, kondisi ini juga merupakan ancaman bagi para pemilih. Apalagi kalau mereka sudah mengelompok, watak massa ini adalah tidak rasional, emosi mudah dihasut, akibatnya para pemilih menjadi tidak objektif dan apriori (masa bodoh), siapapun yang menang dalam pemilihan tersebut mereka tetap saja seperti itu.

Faktor yang memotivasi dan mempengaruhi seseorang memilih, bahkan mendukung aktif calon atau partai tertentu disebut sebagai perilaku pemilih. Dengan demikian maka perilaku pemilih boleh didefinisikan sebagai taraf keaktifan dan kekonsistenan seorang individu dalam mendukung suatu partai atau calon kepala daerah pada masa pemilu. Oleh karena itu, maka buku ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pemilih dalam menentukan keputusan politik pilihannya pada pemilihan kepala daerah.

Apakah keputusan politik yang ditetapkan pemilih atas pilihan rasional berdasarkan pendekatan visi, misi, dan program kerja dari calon kepala daerah. Apakah keputusan politik yang diambil pemilih dalam menetapkan pilihannya lebih bersifat irasional, dengan pendekatan kesamaan sifat, kesamaan karakter tokoh, dan kedekatan tanpa melihat atribut partai. Sifat manakah yang lebih dominan diantara rasional dengan irasional bagi pemilih di dalam membuat keputusan politiknya.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



1.3. Perubahan Paradigma

Secara khusus buku ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengenal pasti perilaku pemilih yang rasional dan yang irasional dalam menentukan pilihannya pada pemilu Kepala Kerajaan Tempatan di provinsi Riau
2. Untuk Mengesankan bagaimana pendekatan rasional atau irasional dapat terjadi.

Studi tentang perilaku pemilih semakin mendapat tempat dan mempunyai peran penting dalam merekam opini publik, termasuk kecendrungan perilaku pemilih. Bahkan di negara-negara maju, lembaga jajak pendapat justru dijadikan sebagai sokoguru demokrasi kelima, di samping lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers.⁹ Kedua, pemilu di Indoensia saat ini lebih menarik karena menempatkan rakyat sebagai "*hakim tertinggi*" dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [MPR] dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD], massa sekarang ini pemilih mempunyai kesempatan untuk secara langsung dan penuh dalam memilih calon pemimpin negara dan calon pimpin daerah yang dikehendaknya. Tentunya banyak kalangan yang ingin mengetahui bahkan berkepentingan mengetahui kecendrungan arah suara pemilih dalam peliharaanya tersebut, terutama aktor-aktor politik yang ikut terbabit.

Pemberian suara (*voting behavior*) merupakan bentuk partisipasi politik aktif sekaligus sebagai tindakan untuk memperoleh dukungan rakyat terhadap sistem politik. Voting behavior lebih praktis diartikan sebagai perilaku memberikan suara [vote], dimana individu memberikan suaranya dalam proses pemilihan, dan lebih besar lagi dalam pemilu legislatif, senat, presiden dan termasuk gubernur, bupati dan walikota.

Sebagai proses dari transpormasi politik, makna pemilihan kepala daerah selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme checks and balances di antara lembaga-lembaga politik

9 Saiful Mujani, "Survei dan Perilaku Pemilih," Kompas, 14 Juni 2004.

dari tingkat pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Masyarakat mengharapkan agar pemilihan kepala daerah dapat menghasilkan kepala daerah yang lebih akuntabel, berkualitas, legitimet, aspiratif dan peka terhadap kepentingan masyarakat.¹⁰

Pemilu sebagai kontrak sosial menjamin hak dan kewajiban para pemilih dan pemimpin. Mekanisme kontrak antara pemilih dan calon pemimpin berhubungan dengan saling percaya. Objek dari percaya diri itu sendiri di dalam pemilu adalah moral/kesusilaan. Konsistensi kontrak sosial berdasarkan kepercayaan adalah dasar untuk membangun suatu Negara sebagai kesatuan moral yang dibentuk oleh manusia secara moral. kontrak sosial sebagai perjanjian antara masyarakat dengan kaum elit yang diawali oleh penguasa, berakar kepada pemikiran politik dari abad 16 sampai abad ke 18 di Eropa Barat, terutama karya *Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan Jean Jacques, Rousseau*¹¹

Keberhasilan suatu pemilihan dapat dilihat dari apakah pemilihan tersebut menghasilkan pemimpin-pemimpin politik yang tidak hanya mampu menenangkan konflik-konflik kepentingan diantara pendukungnya, tetapi juga mampu menjaga kelangsungan sistem itu sendiri. Profesionalisasi pemimpin-pemimpin politik akan terbuka, akan akses bagi transpor-masi kepemimpinan non politik ke pemimpin politik. Dengan demikian pemilihan akan berfungsi sebagai seleksi tingkat profesionalisasi pemimpin politik dan sebagai garis pemisah antara pemimpin politik dan pemimpin non politik.¹²

Terdapat interaksi antara pemerintah, masyarakat, diantara lembaga pemerintah, diantara kelompok dan individu dalam masyarakat yang berada pada proses politik yang terjadi pada suatu sistem politik. Dalam interaksi tersebut terdapat perilaku politik, yakni sikap, tindakan, perbuatan yang dilandasi oleh orientasi atau yang bersangkutan paut dengan kepen-

10 J. Kristiadi, *Pilkada, Pers, dan perkembangan Demokrasi*, dalam Amirudin dan A. Zaini Bisri, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Pustaka Pelajar, 2006, h.xi

11 Arbi Sanit, *Kontrak Sosial dan Pemilihan Umum*, dalam Jurnal Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Vol.1, No.1, Tahun 2004.

12 Ichlasul Amal, *Kedudukan dan Peran Parpol sebagai Komponen Pelaksanaan Demokrasi Pancasila*, Yogyakarta, 1988, h. 3.

tingan politik.¹³

Ketika melakukan kajian perilaku politik, ada tiga kemungkinan unit analisis yang dipakai, yakni individu sebagai aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik.¹⁴ Studi perilaku politik yang lebih dikenal dengan pendekatan behavioral ketika memfokuskan kajian pada perilaku individu untuk melihat fenomena politik, diyakini bahwa individu memiliki pengaruh yang signifikan pada lembaga-lembaga politik bahkan pada proses politik yang ada. Hal ini ditandai dengan tidak ada jaminan partai besar yang sudah berpengalaman akan senantiasa menang jika sudah dihadapkan pada perilaku pemilih. Perilaku pemilih kadangkala bersifat rasional dan konsisten, tapi tidak jarang pula perilaku pemilih menjadi tidak rasional dan tidak konsisten, hal ini sangat dipengaruhi situasi dan kondisi saat pemilu berlangsung.

Studi mengenai perilaku pemilih mulai marak dilakukan pasca tumbanganya Orde Baru. Pemilu 1999 adalah Pemilu pertama setelah tumbanganya pemerintahan Orde Baru, dan Pemilu 1955 yang dilakukan secara demokratis. Pemilih mempunyai otonomi untuk menentukan partai apa yang didukung.

Ada banyak studi mengenai Pemilu di Indonesia, tetapi sebagian besar menyoroti aspek institusi atau proses Pemilu — seperti kajian mengenai partai politik, dinamika Pemilu, konflik di dalam partai politik, konflik Pemilu dan sebagainya. Jarang penelitian yang memusatkan perhatian pada perilaku pemilih, seperti apa alasan seseorang memilih partai politik, faktor apa yang menjelaskan ia memilih partai tertentu dibanding partai lain, dan sebagainya. Pada hal, penelitian dari sisi pemilih ini justru sangat penting. Hingga saat ini, paling tidak terdapat enam studi penting mengenai perilaku pemilih di Indonesia seperti jadwal berikut ini.

¹³ Lihat Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992, hlm.132-133

¹⁴ *ibid*

Jadwal. I 2. Studi Perilaku Pemilih Yang Pernah Dilakukan di Indonesia

STUDI	OBJEK PEMILU	METODE
Affan Gaffar [1992]	1997	Survey
Andi Mallarangeng [1997]	1977, 1982, 1987, 1992	Data Agregat
Ananta [2004)	1999	Data Agregat
Dwight Y King [2003]	1999	Data Agregat
Liddle dan Mujani [2000]	1999	Survey
Lidlle dan Mujani [2007]	2004	Survey

Keterangan : di luar enam studi mengenai perilaku pemilih ini, kemungkinan banyak studi lain dalam penelitian di kampus (skripsi, thesis ataupun disertasi). Meski demikian, enam studi inilah yang hingga saat ini sering disebut, dan banyak dikutip untuk menjelaskan pola perilaku pemilih di Indonesia.

Semua studi ini melihat pemilih pada titik sentral dan menjelaskan faktor dan alasan pemilih memilih partai politik tertentu. Penelitian pertama yang dapat dikategorikan sebagai studi perilaku pemilih adalah studi Gaffar (1992)¹⁵. Gaffar berupaya menjelaskan mengenai perilaku pemilih di kalangan masyarakat Jawa. Mengapa masyarakat memilih partai politik tertentu dalam Pemilu Orde Baru. Faktor apa yang menyebabkan seseorang memilih Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Studi selanjutnya dilakukan oleh Mallarangeng (1997)¹⁶. Studi ini berusaha menjelaskan faktor yang mempengaruhi pilihan seseorang pada partai politik di masa Orde Baru— Pemilu 1977, 1982, 1987, dan 1992. Penelitian yang dilakukan oleh Gaffar (1992) dan Mallarangeng (1997) ini menarik karena konteks Pemilu yang diteliti adalah Pemilu di masa Orde Baru. Kebanyakan pakar dan pengamat tidak tertarik menyelidiki perilaku pemilih karena menganggap pilihan seseorang pada partai di masa Orde Baru tidaklah alamiah, sebaliknya telah dikendalikan lewat sistem yang represif. Pemilu Orde Baru juga

15 Gaffar, Affan, 1992, *Javanes Voters, Case Study of Election Under Hegemonic Party sistim*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

16 Mallarangeng, Andi, 1997, *Contextual Analysis on Indonesian Electoral Behavior*, Disertasi doktoral pada Departement of Political Science, Northern Illinois University Illinois University

secara sengaja dirancang untuk memenangkan partai tertentu. Baik Gaffar (1992) ataupun Mallarangeng (1997) berpendapat studi mengenai perilaku pemilih tetap penting dilakukan justru untuk membuktikan apakah sistem hegemonik Orde Baru bekerja secara maksimal.

Studi yang sama juga dilakukan King (2003)¹⁷, Ananta (2004)¹⁸ dan Liddle dan Mujani (2000)¹⁹ adalah salah satu contoh dari penelitian mengenai perilaku pemilih yang menggunakan objek Pemilu tahun 1999. King (2003) berusaha melihat apakah ada persamaan pilihan antara pemilih tahun 1955 dengan pemilih pada Pemilu 2004.

Fakta-fakta empiris yang diajukan oleh King ini menunjukkan adanya suatu kontinuitas, korelasi signifikan antara daerah-daerah pendukung partai-partai tertentu pada tahun 1955 dan daerah-daerah pendukung partai-partai tertentu pada 1999. King berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pilihan pemilih pada suatu partai politik. Analisis King ini didasarkan pada hasil Pemilu 1999. King mengembangkan suatu model yang disebut sebagai konteks sosio ekonomik. Dengan kata lain, King ingin menguji apakah konteks sosial ekonomi punya pengaruh terhadap pilihan seseorang terhadap partai politik. Sedangkan Ananta (2004) mengembangkan lebih lanjut studi dan temuan King (2003). Ananta menggunakan data-data yang lebih baru.

Studi ekstensif mengenai perilaku pemilih dilakukan oleh Liddle dan Mujani (2000, 2007). Studi ini menggunakan konsep mutakhir mengenai perilaku pemilih yang biasa dilakukan di Amerika. Studi ini juga menggunakan metode survei dengan populasi nasional, sehingga hasilnya representatif dan bisa mewakili pendapat dari seluruh masyarakat Indonesia.

Apa yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah jika peneliti sebelumnya melihat perilaku pemilih lebih pada pemilihan partai

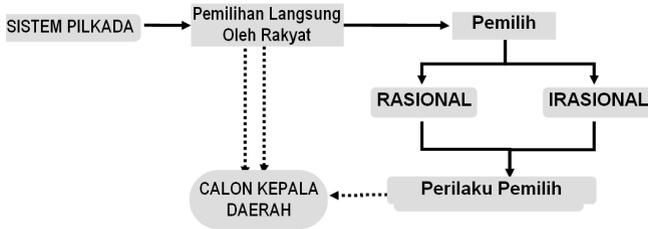
17 King, Dwight Y, *Half-Halted Reform: Electoral Institution and the Struggle for Democracy in Indonesia*, Westport, Connecticut, Praeger, 2001

18 Ananta, Aris, Evi Nurvidya Arifin dan Leo Suryadinata, *Indonesian Electoral Behavior: A Statistical Perspective*, Indonesia's Population Series No. 7, Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 2004,

19 Liddle dan Mujani, *The Power of Leadership: Explaining Voting Behavior in the New Indonesian Democracy*, Laporan penelitian, 2003

politik dan dilakukan dengan sistem pemilihan tidak langsung , maka perilaku yang akan penulis lakukan adalah perilaku pada pemilihan kandidat calon kepala daerah dengan sistem pemilihan langsung. Sebagaimana model kajian dibawah ini.

Gambar 1.2 Model Kajian Perilaku Pemilih



BAB 2

Sejarah Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

2.1. Perilaku pemilih Pada Zaman Penjajahan Hindia Belanda

Desentralisasi pemerintahan semasa penjajahan Hindia Belanda bermula dengan undang-undang *De Wet Houdende Decentralisatie van Bestuur in Nederlands-Indie* pada 23 Julai 1903 atau lebih dikenali sebagai *Decentralisatie Wet 1903*¹. *Decentralisatie Wet 1903* menyerahkan sepenuhnya kepada pejabat Gabenor Jeneral Hindia Belanda dan *Raad van Indie*-nya² kuasa membuat keputusan dan menggubal ordinan.

Dari segi retorik, desentralisasi pada waktu itu ialah kehendak untuk mengalihkan setidak-tidaknya sebahagian daripada kekuasaan dan kemudahan [*authority of devolution*] pemerintahan kepada daerah-daerah. Namun secara realitinya ia merupakan peralihan daripada penggubal *wet* (undang-undang) dan *koninklijk besluit* di s'Gravenhage kepada pembuat ordinan di Batavia. Untuk ke *gewesten*³ masih perlu menunggu pertimbangan pihak yang berkuasa *De Hogere Regering te Batavia* dan para *bestuurmannennya* yang bertempat di Bogor [waktu itu disebut *Buitenzorg*].

Berdasarkan kuasa kehakiman *Decentralisatie Wet 1903*, lahirlah *Koninklijk Besluit* pada 20 Disember 1904 [dikenali

1 Joko, J. Prihatmoko, *Pemilih Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Prolema Penerapan di Indonesia*, LP3M Universitas Wahid Hasyim, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 37

2 Apabila desentralisasi diberikan kepada *gewesten* atau *gedeelten van gewesten* yang mana, dengan omvang seluas itu, semuanya masih akan ditentukan "naarmate de omstandigheden toelaten". Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Desentralisasi dalam tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda- Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia {1900-1940}*, Malang: Bayumedia, April 2004.

3 *Gewesteen* yang dimaksud disini adalah kawasan atau daerah yang pada awalnya disebut sebagai *residentie* atau *landrost*.

dengan *Decentralisatie Besluit 1904*]. *Decentralisatie Besluit 1904* mengupayakan pembentukan raden; pemilihan anggota raad [dewan rakyat] setempat, hak dan kewajiban anggota dan ketua serta sekretaris, serta memudahkan cara kerja badan tersebut. Selanjutnya, dalam tahun 1905, disahkan pula lokal *Raden Ordonantie* yang dikenali sebagai *Besluit 1905* yang bertanggungjawab mengatur lebih lanjut dasar-dasar yang sebelumnya telah diatur dalam *Besluit 1904*. Dalam *Besluit 1905* dibezakan *de local raden* dalam dua ragam, yakni *de Plaatselijke Raad* yang dibentuk untuk suatu *gewest*, dan *De Plaatselijke Raad* yang dibentuk untuk suatu *gedeelte van gewesten*.

Pada tahun 1908, dikeluarkan *Koninklijk Besluit* baru yang memungkinkan pembentukan satu jenis *plaatselijke raad* yang dibentuk khusus untuk penyatuan daerah yang berstatus kota.

Semasa *Kiesordinantie 1908* dimaklumkan, telah terbentuk tidak kurang daripada 15 *gemeenten* dan enam *gewesten* ordinar. Secara sederhana, pada zaman Hindia Belanda aturan pemerintahan di daerah dibezakan antara daerah Jawa dan Madura dengan daerah luar Jawa dan Madura sesuai dengan politik penjajahan. Kerajaan *pangrehpraaja* pada waktu itu bersifat hierarki dan berpusat, mulai dari *Gewest* [provinsi] yang dipimpin gabenor; karesidenan yang dipimpin residen; *Afdeling* [penolong residen]. Pada tingkat *pamong praja* terdapat kabupaten [bupati], daerah atau kawedanan [wedana], dan *Onder District* atau Kecamatan [camat].⁴

Pada waktu itu, pemilihan kepala daerah sudah diamalkan. Politik kolonial Belanda dalam menguasai daerah jajahan menerapkan sistem pemerintahan daerah yang bertujuan untuk kepentingan mereka. Oleh itu, sama ada untuk daerah Jawa dan Madura atau daerah luar Jawa dan Madura, jabatan gabenor, residen, penolong residen dan *kontrollir* dijabat oleh orang-orang Belanda, sedangkan untuk jabatan-jabatan lainnya dipegang oleh pribumi bangsa Indonesia.⁵

Untuk semua jabatan tersebut, pemilihan kepala daerah dilakukan dengan sistem perlantikan oleh penguasa kolonial

4 Joko J. Prihatmoko, *op. cit.*, 2005, hlm. 40

5 J. Kaloh, *Kepala daerah-Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala daerah, dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 26.

atau lebih tepat oleh Gabenor Jeneral, dengan kewajiban pribumi yang mengepalai jabatan membayar ganti rugi ekonomi [upeti] dan politik. Implikasi sistem perlantikan tersebut sangat besar, mulai daripada perletakan syarat kelayakan hingga kepada pemberhentian kepala daerah. Berbeza dengan perlantikan anggota raad yang mempunyai syarat yang begitu ketat sehingga penduduk pribumi tidak berkesempatan untuk menduduki kursi raad ⁶, perlantikan kepala daerah tidak mempunyai syarat yang jelas dan hanya berdasarkan selera dan kepentingan politik dan ekonomi penguasa kolonial. Begitu juga dengan pemberhentian. Kepala daerah daripada penduduk pribumi diberhentikan apabila tidak menguntungkan kerajaan kolonial.

2.2. Perilaku pemilih Waktu Pemerintahan Kolonial Jepun

Kerajaan tentera Jepun memperkenalkan 3 *Osamu Sirei*, atau dalam bahasa Indonesia disebut Undang-Undang. Ketiga undang-undang tersebut adalah Undang-undang No.27 tentang Perubahan Pemerintahan tanggal 5 Agustus 2602; Undang-Undang No.28 tentang Aturan Pemerintahan *Syuu* tanggal 7 Agustus 2602; dan Undang-Undang No. 30 tentang Mengubah nama Negeri dan Nama Daerah tanggal 1 September 2602.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (2004), Undang-Undang No. 28 harus dipandang sebagai hasil pemerintahan tentera yang paling lama bertahan.⁷ Melalui Undang-Undang tersebut, berakhirlah dasar pemerintahan desentralisasi kolonial Hindia-Belanda. Pembahagian pulau Jawa kepada tiga provinsi tidak lagi diteruskan dan sebagai gantinya pembahagian daerah atas karesidenan dihidupkan.

6 Syarat utama menjadi anggota *raad* adalah memiliki kematangan politik yang cukup supaya dapat dipercaya mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Menurut J.J Schrieke (dikutip daripada Soetandyo Wignjosoebroto, 2004, hal. 22-23) yang disebut kematangan politik adalah suatu kondisi akan dipenuhinya syarat-syarat kejujuran, kepawaian, dan kewarasan nalar dalam ikhwal politik, termasuk kemampuan menguasai diri. Kematangan politik akan memungkinkan seseorang dalam hal berpolitik bekerja dengan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau partainya, berani dalam hal membuat keputusan, kesadaran untuk menjaga kehormatan dirinya, dan tidak bertele-tele dalam menyelesaikan persoalan, yang pada akhirnya hanya akan menghambat jalannya proses kerja. Ukuran persyaratan tersebut pada saat itu terlalu berat bagi pribumi, dan disengaja agar posisi kursi *raad* tersebut diduduki mereka dari golongan Eropa.

7 Soetandyo Wignjosoebroto, *op. cit.*, hlm. 77

Undang-Undang No. 27 memberi nama baru pada *de regentschappen* dan *de stadsgemeenten*, masing-masing dalam versi baru, yaitu *ken* dan *Si*. Kedua daerah tersebut diketuai oleh pembesar Negara yang masing-masing disebut *Kentyoo* dan *Sityoo*. Sementara kewujudan kawedanan, keasistenan, dan desa diganti dengan nama-nama baru iatu *Gun*, *Son*, dan *Ku*. Kepala daerah disebut *Guntyoo*, *Sontyoo*, dan *Kutyoo*. Jabatan ini selalu dipegang oleh orang pribumi Indonesia, sementara jabatan *Sityoo* dan *Syuutyoo* lebih dipertanggungjawabkan kepada para pegawai tentera berbangsa Jepun.⁸

J. Kaloh berbeza pandangan dengan menyatakan bahwa kerajaan kolonial Jepun masih mempertahankan asas dekon-sentralisasi dengan memperkenalkan sedikit variasi; nama-nama daerah beserta jabatannya diganti dengan bahasa Jepun, jabatan-jabatan yang mulanya diduduki orang Belanda diganti dengan pegawai-pegawai Jepun, dengan bangsa Indonesia hanya diberi sedikit kesempatan; wilayah provinsi beserta Gabenornya dihapuskan di daerah Jawa maupun daerah luar Jawa; *Afdeling* beserta penolong residen dihapuskan di daerah Jawa. Kota Praja dilepaskan daripada pemerintahan para bupati, sedangkan para walikota menjadi petugas *pangrehpraja* yang tunduk pada residen.⁹

Seperti kerajaan kolonial lainnya, sistem perjabatan kepala daerah pada waktu itu mengabaikan nilai-nilai demokrasi, ketelusan dan akauntabiliti karena berlaku secara perlantikan oleh penguasa Jepun. Sistem perlantikan itu boleh bersifat hierarki, dan boleh juga memotong struktur hierarki.

Sampai akhir kekuasaan tentera Jepun di Indonesia, sistem pemilihan kepala daerah dan susunan daerah tidak diubah. Hanya berlaku sedikit perubahan dari segi pembentukan dewan-dewan perwakilan rakyat, yaitu *Tyoo Sangiin* di Jakarta,

8 Penempatan para pejabat yang dilakukan dengan memerhatikan kebangsaan (yang boleh diduga melalui kesetiaan) ini jelas bertujuan untuk dapat mengawal daerah-daerah dengan cara mendekatkan jarak antara yang mengawal dengan yang dikawal. Menjelang tanda-tanda kekalahan Jepun pada Perang Dunia II, dua orang Syuutyoo diangkat dari kalangan pribumi Indonesia, yaitu untuk Jakarta dan Bojonegoro Syuu; baca dalam Sijito, *Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jilid I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal.109. Pada masa itu terjadi proses Indonesiasi dalam proses pengangkatan *Sityoo*; baca dalam P.D Milone, *Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concepts*, [Berkeley:Institute of International Studies, University of California, 1966, hlm. 45.

9 J.Kaloh, *op.cit.*, hlm. 30

Syuu Sangikai di residensi dan *Tokubetsu si-Sangkikai* di Kota Jakarta.

2. 3. Perilaku pemilih Pada Masa Orde Lama

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945.

Hasil perundangan pertama yang menyinggung kedudukan kepala daerah adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1945, yaitu peraturan mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. Undang-Undang tersebut diluluskan pada 23 November 1945 sesuai dengan penjelasan kerajaan bahwa Undang-Undang ini bersifat sementara sambil menunggu diselenggarakan pemilu.¹⁰

Istilah kepala daerah hanya disebut sekali daripada 6 [enam] pasal yang terkandung dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1945, yaitu pasal 2 yang berbunyi : *“Komite Nasional Daerah menjadi badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan dan mengatur rumah tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Kerajaan Pusat dan Kerajaan Daerah yang lebih luas daripadanya.”*

Daripada pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa kepala daerah menganggotai lembaga eksekutif dan legislatif. Selain menjalankan fungsi eksekutif sebagai pemimpin Komite Nasional Daerah, kepala daerah juga menjadi anggota dan ditetapkan sebagai ketua legislatif dalam Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun mengenai mekanisme dan prosedur perlantikan dan pemberhentian, tanggungjawab kepala daerah tidak diterangkan dengan jelas, termasuk dalam penjelasan UU No.1 Tahun 1945 yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri.¹¹

Berkaitan dengan hal tersebut, kepala daerah sewaktu pengenalan UU No.1 Tahun 1945 adalah ketua-kepala daerah yang diangkat pada masa sebelumnya. Karena situasi politik, keamanan dan hukum ketatanegaraan pada saat itu, mereka dilantik begitu sahaja untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah sebagai sebahagian pemerintahan pusat

10 Joko J. Prihatmoko, *op cit.*, hlm. 46

11 Lihat Winarna Surya Adisubrata, *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia- Sejak Proklamasi sampai Awal Reformasi*, jilid 1, Aneka Ilmu, Semarang, 2003.

yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, kewujudan Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan yang mendasari daerah-daerah, menjadi sangat penting. Seperti pada masa kolonial, mereka diberhentikan dan bertanggungjawab kepada kerajaan pusat.

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948.

Undang-Undang No.1 Tahun 1945 hanya bertahan selama 3 [tiga] tahun. Pada tahun 1948, ia digantikan dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang merujuk kepada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang ini lebih lengkap dan terperinci, termasuk mencantumkan ketentuan mengenai kepala daerah yang mencakup sistem pengisian, tugas, dan tanggungjawab.

Sesuai dengan susunan pemerintahan daerah, yang dimaksudkan dengan kepala daerah dalam ketentuan UU No.22 Tahun 1948 adalah kepala daerah Provinsi; Kabupaten [kota besar]; dan desa [kota kecil], Nagari atau Marga. Kepala daerah diangkat oleh presiden, Menteri Dalam Negeri atau Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD]. Sebagaimana pasal 18 ayat 1 yang berbunyi *“Kepala daerah Provinsi diangkat oleh Presiden dari sedikit-dikitnya dua atau sebanyak-banyaknya empat calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi”*

Presiden juga berkuasa untuk mengangkat Kepala daerah Istimewa, sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat 4 yang berbunyi : *“Kepala daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan yang berkuasa di jaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan dengan meningat adapt-istiadat di daerah itu.”*

Sementara Menteri Dalam Negeri berkuasa untuk mengangkat kepala daerah Kabupaten, sebagaimana pasal 18 ayat 2 disebutkan : *“Kepala daerah Kabupaten [kota besar] diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat calon orang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten [Kota besar].”*

Adapun Kepala daerah Desa atau kota kecil diangkat oleh Gubernur. Dalam pasal 18 ayat 3 disebutkan : “*Kepala daerah Desa [kota kecil] diangkat oleh Kepala daerah Provinsi dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa [Kota Kecil].*”

Undang-Undang ini tidak menggabungkan peraturan mengenai syarat kepala daerah.¹² Sebaliknya, ketentuan mengenai masa jabatan Kepala daerah tidak dibatasi terlihat dalam bahagian penjelasan. Kepala daerah boleh diberhentikan oleh pejabat yang mengangkatnya atas usul DPRD. Ketentuan ini terlihat pada pasal 18 ayat 4 yang menyebutkan : “*Kepala daerah dapat diberhentikan oleh yang berkewajiban atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.*”

Mekanisme pemberhentian semestinya melalui usulan DPRD. Namun pada bahagian penjelasan dikatakan bahwa pejabat yang mengangkat tersebut dapat mengambil keputusan lain dengan usul pertimbangan DPRD. Dalam erti kata lain, sekalipun DPRD mengusulkan pemberhentian, jika pejabat yang mengangkat mempunyai pertimbangan lain, penolakan boleh dilakukan. Pejabat kerajaan pusat yang berkuasa juga dapat melakukan mutasi Kepala daerah.

Tentang pelaksanaannya, *Ateng Syafrudin* memberi komen bahwa Undang-Undang tersebut memang mencanangkan Pemilihan Kepala daerah [Pilkada] oleh DPRD tetapi sesuai dengan suasana ketika itu “untuk sementara waktu” masih dirangkap pejabat pamongpraja tanpa pemilihan.¹³

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.

Tingkatan-tingkatan daerah secara hukum mulai diperkenalkan dalam Undang-undang ini. Sesuai dengan hierarki yang terdiri daripada 3 [tiga] tingkatan, gabenor memimpin Daerah Tingkat I, bupati/walikota memimpin Daerah Tingkat II, dan

¹² Bandingkan dengan persyaratan menjadi anggota DPRD yang tercantum pada pasal 4, yakni (a) Warga Negara Indonesia; (b) Telah berumur 21 tahun; (c) Bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan sedikitnya enam bulan terakhir; (d) Cakap menulis dan membaca dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin; (e) Tidak karena keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi kehilangan hak mengenai atau mengurus harta bendanya; (f) Tidak dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dipecat dari hak memilih atau hak dipilih; (g) tidak terganggu igatannya.

¹³ Ateng Syafrudin, *Kepala daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 76.

Camat untuk Daerah Tingkat III.

Penentuan mengenai kepala daerah diatur dalam bahagian 5, antara pasal 23-30, yang mencakupi mekanisme pemilihan, penetapan, perlantikan, persyaratan serta sumpah dan janji. Kepala daerah yang karena jabatannya adalah ketua dan anggota Dewan Pemerintahan Daerah [DPD] yang berfungsi menjalankan pemerintahan, dipilih menurut Undang-Undang khusus yang akan ditetapkan kemudian. Sebagaimana kutipan pasal 23 ayat 1 berikut ini : *“Kepala daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”*, sedangkan pada ayat 2 menyatakan bahwa *“Cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah ditetapkan dengan Undang-Undang.”*

Keadaan demikian terjadi karena kepala daerah adalah orang yang dekat dengan dan dikenali oleh rakyat di daerahnya. Oleh itu kepala daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Atas dasar itu, jika dibandingkan dengan Undang-Undang terdahulu kelihatan terdapat bibit-bibit demokrasi, bermaksud penglibatan rakyat lebih tampak dalam pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang ini.

Selain soal pemilihan langsung, Undang-Undang ini juga pertama kali memperkenalkan persyaratan kepala daerah walaupun hanya dengan istilah *“memperhatikan kecekapan dan pengetahuan yang diperlukan bagi jabatan tersebut.”*[pasal 4 ayat 1].

d. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959.

Sebagai suatu ketentuan perundangan, Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 tentang Kerajaan Daerah ini boleh dianggap satu kontrovers.¹⁴ Penetapan Presiden ini hanya mengatur mekanisme dan prosedur pelantikan kepala daerah, dan sama sekali tidak menyentuh persoalan-persoalan lain, seperti masa jabatan dan mekanisme perlantikan lebih lanjut. Menurut Undang-Undang ini, kepala daerah dilantik dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri, daripada calon yang diusulkan DPRD. Seperti yang tertulis dalam pasal 4 ayat

¹⁴ Aturan tersebut dianggap menyimpang dari UUD 1945 pasal 18, yang menyatakan bahwa Peraturan Kerajaan diatur dengan Undang-Undang, dalam arti dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat [DPR], sedang Penetapan Presiden tanpa persetujuan DPR, *Joko J. Prihatmoko, op.cit., hlm .55*

1 yang berbunyi : “Kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh a. Presiden bagi Daerah Tingkat I; dan b. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Daerah Tingkat II.”

Jika dibandingkan dengan ketentuan perundangan terdahulu, persyaratan calon kepala daerah dalam Penetapan Presiden ini lebih luas sifatnya. Pendidikan, kecekapan dan pengalaman dalam pemerintahan merupakan syarat khusus yang harus dipenuhi Kepala daerah. Peranan DPRD dalam hasil perundangan ini terbatas. DPRD hanya berkuasa mengajukan calon Kepala daerah. Mekanisme pencadangan calon oleh DPRD tidak ditentukan sama ada melalui pemilihan atau permufakatan. DPRD juga tidak diminta mengajukan pertimbangan, bahkan, DPRD tidak memiliki akses untuk meminta penjelasan jika calon yang diajukan ditolak Presiden atau Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Sebaliknya, kedudukan kepala daerah menjadi semakin strategik karena kuasa yang cukup besar. Kepala daerah menjalankan fungsi sebagai alat kerajaan pusat dan kerajaan daerah (pasal 14 ayat 1).¹⁵ Kepala daerah juga mempunyai kekuasaan untuk mempertangguhkan atau menunda keputusan DPRD, apabila dirasakan bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.

e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965

Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah merupakan undang-undang pemerintahan daerah yang lahir semasa Demokrasi Terpimpin, setelah keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Julai 1959. Semangat dan prinsip-prinsip pemerintahan dalam UU No. 18/1965 bertentangan dengan UU No. 1/1957 karena perubahan format pemerintahan negara hasil daripada perubahan perlembagaan.

¹⁵ Sebagai alat kerajaan pusat, Kepala daerah memiliki tugas : a. mengurus ketertiban dan keamanan umum di daerah; b. menyelenggarakan koordinasi antara jabatan-jabatan Kerajaan Pusat di daerah dan antara jabatan-jabatan tersebut dengan kerajaan daerah; c. melakukan pengawasan terhadap perjalanan kerajaan daerah; d. menjalankan lain-lain kewenangan umum yang terletak dalam bidang urusan kerajaan pusat. Sampai saat dicabutnya UU ini. Tugas-tugas tersebut dilakukan Gabenor untuk Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota untuk Daerah Tingkat II. Adapun sebagai alat kerajaan daerah, kepala daerah bertindak sebagai pemegang kuasa eksekutif, baik dalam hal urusan daerah [otonomi] maupun dalam urusan membantu pemerintahan.

Pada waktu UU No. 1/1957 diluluskan, kerajaan Indonesia menganut sistem federasi [Republik Indonesia Serikat] sedangkan sistem kesatuan atau *unitarian* kembali digunakan apabila lahir UU No.18/1965.

Penentuan mengenai pemilihan kepala daerah dinyatakan dalam 10 pasal antara pasal 11 sampai pasal 21. Dalam ketentuan tersebut, kekuasaan pusat sangat besar karena Kepala daerah dilantik dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri. Sebagaimana termaktub dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan : *"Kepala daerah Tingkat I diangkat oleh Presiden dan sedikitnya dua dan sebanyaknya empat orang calon yang diajukan DPRD yang bersangkutan."* Sedangkan pasal 13 ayat 1 menyebutkan : *"Kepala daerah Tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan."*

Adapun Kepala daerah Tingkat III diangkat oleh Kepala daerah Tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri daripada bilangan calon antara dua orang hingga empat orang yang diajukan DPRD setempat [pasal 14 ayat 1].

2.4. Perilaku pemilih Pada Masa Orde Baru Undang-Undang No.5 Tahun 1974

Sebagai ketentuan perundangan, materi yang mengatur pemilihan kepala daerah dalam undang-undang ini dapat dikatakan lengkap dan terperinci. Undang-undang tersebut mengatur syarat kepala daerah, mekanisme pengisian, bidang kuasa kepala daerah, perhubungan kepala daerah dengan DPRD, mekanisme perlantikan dan pemberhentian kepala daerah dan tempoh jabatan.

Pemilihan Gabenor/Kepala daerah Tingkat I diatur dalam pasal 15 ayat 1 yang berbunyi : *"Kepala daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 [tiga] orang dan sebanyak-banyaknya 5 [lima] orang yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Menteri Dalam Negeri."* Pada ayat 2 disebutkan bahwa : *"Hasil pemilihan*

yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sedikit-dikitnya 2 [dua] orang untuk diangkat alah se-orang diantaranya."

Daripada kedua pasal di atas dapat dilihat campur tangan mendalam kerajaan pusat dalam pemilihan kepala daerah. Pusat tidak hanya menjadi pintu terakhir penentuan calon. Menteri Dalam Negeri juga terlibat dalam proses pencalonan. Calon kepala daerah harus dipersetujui oleh Menteri Dalam Negeri. Lebih daripada itu, dalam pemilihan calon, Presiden memiliki kuasa pemutus untuk mengabaikan hasil pemilihan DPRD. Dalam penjelasan pasal 15 dikatakan bahwa Presiden dalam mengangkat kepala daerah daripada calon-calon yang diajukan oleh DPRD, tidak terikat dengan jumlah suara yang diperoleh calon, karena hal ini merupakan hak prerogatif Presiden.

Menurut Agus Pramusinto (2004), aturan tersebut boleh dikaitkan dengan kepentingan kerajaan pusat untuk mendapatkan kepala daerah [Gabenor atau Bupati/Walikota] yang mampu bekerjasama dengan kerajaan pusat.¹⁶ Walau bagaimanapun, gabenor atau bupati/walikota menurut Undang-undang ini adalah kepala daerah sekaligus ketua wilayah yang merupakan wakil kerajaan pusat di daerah. Bahkan pasal 80 mempertegaskan kedudukan tersebut sebagai penguasa tunggal. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi "*Kepala Wilayah sebagai wakil kerajaan adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan di segala bidang."*

Afan Gaffar dan rakan-rakan memberikan kesimpulan yang sangat terbuka mengenai realiti pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masa Orde Baru. Menurut mereka, rekrutmen politik tempatan ditentukan sepenuhnya oleh Jakarta, khususnya pejabat Departemen Dalam Negeri untuk pengisian jabatan bupati, walikota, sekretaris daerah, dan ketua-ketua dinas di provinsi.

¹⁶ Agus Pramusinto, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala daerah dalam mencermati Hasil Pemilu 2004*, Jakarta, Jurnal Analisis CSIS Vol.33, No.2. Juni 2004, hlm. 240.

Untuk jabatan gabenor ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia [TNI], dan Sekretariat Negara. Menurut Agus Pramusinto, peranan tentara di daerah menjadi sangat kuat karena penempatan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia [ABRI] sebagai kepala daerah.¹⁷

2.5. Masa Reformasi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Reformasi membawa perubahan dalam pemilihan kepala daerah, dengan lahirnya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut merupakan sebahagian daripada pakej liberalisasi politik oleh pemerintahan Presiden BJ Habibie. Ia boleh dikatakan dilaksanakan secara terburu-buru pada saat isu desentralisasi dibincangkan secara meluas dalam wacana awam. Kesan buruk pelaksanaan pemilihan kepala daerah masa Orde Baru ditandai dengan campur tangan berlebihan oleh pusat, menjadi semangat para pembuat undang-undang.

Ihwal kepala daerah diatur dalam pasal 34 sampai pasal 40, yang secara tegas memuatkan ketentuan mengenai tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Ketentuan lebih terperinci termaktub dalam Peraturan Kerajaan No. 151 Tahun 2000 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kepala daerah dipilih oleh DPRD, seperti dinyatakan dalam pasal 34 ayat 1 yang menyebut bahwa : *“ Pengisian jabatan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersama.”* Selanjutnya pada ayat 2 dikatakan : *“ Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah ditetapkan oleh DPRD melalui tahapan pencalonan dan pemilihan.”*

Kedudukan DPRD dalam undang-undang ini sangat penting karena siapapun calon kepala daerah yang memperoleh suara mayoritas secara otomatis akan mendapat kedudukan

¹⁷ H. Syauckani, HR, Prof. Dr. Afan Gaaffar, MA, Prof. Dr. M.Ryaas Rasyid, MA, *op.cit.*, hlm.164-165.

sebagai kepala daerah. Kerajaan Pusat hanya mengesahkan hasil yang telah diputuskan DPRD.¹⁸

Berdasarkan model dalam rekrutmen politik dapat dikatakan bahwa ketentuan perundangan dan pengalaman empiris pemilihan kepala daerah selama ini bersifat tertutup karena hanya memberi peluang kepada sekelompok elit untuk bertanding sebagai calon kepala daerah atau "*pemilih*". Istilah pemilih yang dimaksudkan ialah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] sahaja dan tidak melibatkan rakyat.

Daripada kajian terhadap ketentuan-ketentuan perundangan di atas, daripada UU No.1/1945 hingga kepada UU No.22/1999, implementasinya telah diguna pakai 3 [tiga] jenis sistem tak langsung. Ketiga jenis sistem tak langsung tersebut memiliki ciri atau sifat tersendiri yaitu :¹⁹

(1) Perlantikan Kerajaan/Pejabat Pusat.

Perlantikan kepala daerah oleh penguasa pusat yang dilakukan semasa penjajahan Belanda dan Jepun, secara implisitnya masih dipertahankan pada permulaan masa pemerintahan Orde Lama. Ciri utama sistem perlantikan ini adalah:

- a. Mekanisme pemilihan kepala daerah sangat tertutup dan rakyat tidak memiliki akses kepada maklumat dan penglibatan;
- b. Kekuasaan dan kewenangan pejabat pusat sangat besar dan sebaliknya kekuasaan atau kewenangan kepala daerah sangat kecil dan tergantung [*dependent*];
- c. Kepala daerah lebih sebagai alat kerajaan pusat daripada kerajaan daerah;
- d. Peranan DPRD sangat kecil, bahkan dinafikan/diabaikan.
- e. DPRD tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepala daerah atau sebaliknya Kepala daerah bertanggungjawab pada kerajaan pusat.

18 Pasal 40 UU No. 22 Tahun 1999 berbunyi : "*pasangan calon Kepala daerah dan Calon Wakil Kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan, ditetapkan sebagai Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden*

19 Joko J. Prihatmoko, op.cit., hlm. 72-75.

(2) Pemilihan Perwakilan Semu.

Pemilihan semu adalah mekanisme atau sistem pemilihan kepala daerah yang seolah-olah dilakukan oleh DPRD namun penentu sebenarnya ialah kerajaan pusat. Pemilihan perwakilan semu ini terdapat dalam Penetapan Kerajaan No.6/1959, Undang-Undang No.18/1965, Undang-Undang No.5/1974. Sistem perwakilan semu mempunyai ciri sebagai berikut :

- a. Mekanisme yang digunakan seakan-akan demokratik, bahkan tidak teratur;
- b. Kekuasaan atau kewenangan pusat menentukan kepala daerah sangat besar;
- c. Kepala daerah bertanggungjawab pada kerajaan pusat;
- d. DPRD mempunyai peranan yang terbatas;
- e. Penglibatan rakyat sangat terbatas atau secara formal sahaja.

(3) Pemilihan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengisian jabatan kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai pemilih adalah berdasarkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah seperti dalam UU No.22/1999, hal yang menyatakan kepala daerah dipilih dengan sistem melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Mekanisme pemilihan terbuka;
- b. Akses masyarakat untuk mengambil bahagian dan melakukan kawalan terbuka secara terbatas;
- c. Partai mulai berperanan penting, khususnya dalam tahap penyaringan calon;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] melakukan pemilihan;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] dapat meminta pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. Penetapan calon terpilih menggunakan sistem majoritas sederhana [*simple majority*, calon yang memperoleh suara terbanyak];
- g. Kerajaan pusat hanya mengesahkan.

2.6. Parameter Perilaku pemilih

Ada 3 [tiga] petunjuk yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan kepala daerah yang kemudian diharapkan akan menjadi pemimpin ikutan masyarakat yakni *Akseptabilitas, Kapabilitas, Kompabilitas*²⁰.

Akseptabilitas adalah tingkat penerimaan pemilih terhadap calon. Kemenangan seorang calon dengan perolehan suara terbanyak dalam konteks demokrasi memang sangat diharapkan apalagi didukung oleh kekuatan politik yang besar. Namun ini sahaja tidak sempurna jika tidak disokong oleh kemampuan dan bakat. Kemampuan dan bakat dapat kita lihat melalui pemikiran calon dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kapabilitas, yaitu kemampuan diri calon baik secara intelektual maupun moral dapat dilihat daripada catatan jejak [*track record*] seperti pendidikannya, sikap dan perilakunya selama ini. Pemimpin yang baik tidak akan muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses, dengan jejak tersebut dapat menggambarkan kemampuan dan pengalaman kepemimpinannya selama ini baik dalam hal pemerintahan atau penyertaan dalam organisasi sosial, politik, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya.

Kompatabilitas ialah kemampuan untuk menyesuaikan diri secara bijak dengan pemerintahan yang lebih tinggi dan kemampuan mengakomodasikan pemerintahan dengan mengambil kira aspirasi masyarakat bawahan. Tingkat kepercayaan masyarakat akan menjadi tinggi terhadap pemimpin yang memberi perhatian lebih kepada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam menentukan sikap memilih dapat dilihat daripada keseriusan calon dalam menyampaikan visi, misi dan program kerjanya.²¹ Sekarang, hampir semua calon mengunjungi serata pelosok desa untuk mendapatkan simpati masyarakat dengan cara membungkus kampanye ke dalam suatu acara “silaturahmi”.

20 Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, cetakan IV, Penerbit Fokus Media, Bandung. 2003, hlm, 118-119

21 *ibid*

Ada calon dalam penyampaian programnya, atau semasa berdialog dengan orang ramai terus terang menyatakan: “saya tidak menjanjikan sesuatu tapi kita lihatlah nanti seandainya saya dipercayai masyarakat”. Itu bermakna, calon itu tidak bertanggungjawab kerana tidak menjelaskan jenis tindakan yang akan diambil untuk kemajuan daerah dan kemakmuran rakyat di tempat yang dikunjungnya.

Ada pula calon yang dalam penyampaianya penuh dengan keraguan dan tanpa kepastian, mengungkapkan “biaya sekolah akan kita bebaskan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah”. Jika ingin diberikan, berikan sahaja, jangan pula dikaitkan dengan kemampuan daerah dan jelaskan juga tempoh pelaksanaannya. Adakah 6 [enam] bulan setelah dilantik atau setelah akhir masa jabatan?

Ungkapan di atas masih berupa tanda tanya sama ada benar atau tidak, dan lebih bertujuan untuk mencari simpati pemilih tanpa mempunyai rencana program kerja yang jelas. Ada pula calon yang tahu semua permasalahan daerah masing-masing tetapi tidak mempunyai penyelesaiannya. Calon seperti ini hanya mengutamakan kemenangan tetapi tidak berniat untuk membela kepentingan rakyat.

Sebaiknya, seorang calon kepala daerah harus berani berjanji, menghadapi cabaran masa depan dan bertanggungjawab atas amanah ini. Ini semua diiringi dengan perancangan pembangunan dengan usaha membanteras kemiskinan dengan cara yang tersusun. Ramai orang mengaku miskin kerana kerajaan tidak punya petunjuk [indikator] kemiskinan²², sehingga perangkaan kemiskinan juga lesap entah ke mana.

Calon harus mempunyai standard yang jelas dan konkrit, berusaha membanteras kebodohan dengan meningkatkan sumber daya manusia, bersedia dengan perancangan yang tersusun lagi terukur, mempercepat pembangunan infrastruktur dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan bukannya kepentingan perniagaan daerah sahaja. Ini semua dapat dibuktikan dengan program yang nyata, bukan slogan semata-mata. Yang lebih menyedihkan, pelan pembangunan seorang calon biasanya disiapkan oleh perpilihng.

22 *ibid*

Bagaimana untuk membuat pilihan akhir? Pilihan itu terletak pada calon yang menguasai pelan pembangunan di samping keseriusan calon dalam menyampaikan pemikirannya. Oleh itu, masyarakat harus mencatat semu ucapan seorang calon.

Kehebatan seorang calon kepala daerah bukan terletak pada kemenangan tetapi terletak pada *hasil pilihanraya*, yaitu tahap kemajuan daerah yang dicapai berbanding dengan waktu sebelum menjawat jabatan, yaitu keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan dalam pelbagai sektor. Kemajuan yang dicapai tentu didasari oleh niat yang tulus untuk kemajuan daerah dan memakmurkan rakyat. Tetapi kalau niatnya untuk mendapat kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan, maka hancurlah daerah. Dana yang sudah dikeluarkan untuk pemilu menjadi sia-sia sahaja. Yang berjaya hanyalah demokrasi, penderitaan rakyat semakin bertambah dan kemiskinan semakin menular. Oleh karena itu, pemilih harus lebih berhati-hati semasa memilih. Jangan terpengaruh dengan uang, senyuman, gaya, maupun partai. Harus dicari orang yang benar-benar punya konsep, arah dan sasaran dan aplikasi untuk membangun.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah ialah jabatan politik atau jabatan awam yang di dalamnya terdapat mekanisme dan nilai-nilai demokratik [terbuka dan akunjadwal] dalam proses pemilihan, pertanggungjawaban tugas, serta pemberhentian.

Mekanisme pemilihan kepala daerah disebut demokratik apabila memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington (1993) dan Bingham Powel (1978), Affan Gaffar dan kawan-kawan, yang menyatakan parameter untuk mengamati wujudnya demokrasi antara lainnya ialah: (1) pemilu; (2) penggantian kekuasaan; (3) rekrutmen secara terbuka; (4) akauntabiliti awam.²³

Untuk rekrutmen jabatan politik atau awam harus dilakukan dengan pemilu yang diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan adil. Pemilu

23 H. Syaukani, HR, Prof. Dr. Afan Gaaffar, MA, Prof. Dr. M.Ryaas Rasyid, MA, *Otonomi Daerah dan Negara Kesatuan*, Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, Yogyakarta, Maret 2002, hlm.34 -37.

merupakan gerbang pertama yang harus dilepasi karena melalui pemilu, demokrasi dapat dibentuk. Setelah pemilihan, orang akan melihat dan menilai sama ada calon yang terpilih memenuhi janji-janjinya.

Penilaian terhadap kinerja pejabat politik itu akan digunakan sebagai bekal untuk memberikan ganjaran atau hukuman [reward and punishment] dalam pemilu akan datang. Pejabat yang tidak dapat memenuhi janji-janjinya dan tidak menjaga moralnya tidak akan dipilih, sebaliknya pejabat yang berkenan di hati masyarakat akan dipilih kembali.

Penggantian kekuasaan mengandaikan bahwa kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak mungkin dipegang terus menerus oleh seseorang seperti dalam sistem monarki. Artinya, kalau hanya seorang atau satu partai berterusan berkuasa, sistem itu kurang layak disebut demokrasi. Dengan kata lain, demokrasi memberikan peluang peralihan kekuasaan atau penggantian pejabat politik secara teratur dan damai daripada seorang kepala daerah kepada kepala daerah yang lain dan daripada satu partai kepada partai lain.

Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan pertandingan karena semua orang atau kelompok mempunyai hak dan peluang yang sama. Oleh itu, dalam mengisi jabatan politik sudah seharusnya peluang dibuka kepada semua yang memenuhi syarat. Pertandingan dijalankan dengan wajar dan sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

Para pemegang jabatan awam harus dapat memikul tanggungjawab kepada umum, baik sebagai individu maupun sebagai pejabat awam. Seorang kepala daerah atau pejabat politik harus dapat menjelaskan kepada umum sebab sesuatu keputusan itu diambil.

Pasang surut kekuasaan nasional mempengaruhi pelaksanaan pemilihan kepala daerah selama ini. Setiap penguasa atau regim mengambil keputusan yang berbeza. Adakah parameter demokrasi tersebut di atas sudah diwujudkan dalam pemilihan kepala daerah selama ini?

2.7. Tata Cara Pencalonan Kepala daerah.

Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat dan selanjutnya memproses bakal calon tersebut melalui mekanisme yang demokratis dan telus. Yang dimaksudkan dengan mekanisme yang demokratis dan telus ialah mekanisme yang digunakan dalam partai politik atau gabungan partai politik yang mencadangkan calon. Proses penyelenggaraan serta keputusannya dapat diakses oleh umum.

Partai politik atau gabungan partai politik harus memberi perhatian kepada pendapat dan tanggapan masyarakat dalam proses penetapan pasangan calon. Dengan demikian, aspirasi rakyat diharapkan benar-benar didengar.

Masa pendaftaran pasangan calon yang paling lama ialah 7 [tujuh] hari sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon. Sesuai dengan ketentuan peraturan dalam pasal 59 ayat (5), partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon wajib menyerahkan²⁴:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik/pimpinan partai politik yang bergabung²⁵.
- b. kesepakatan tertulis di antara partai politik yang bergabung, untuk mencalonkan pasangan calon
- c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung.
- d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan.
- e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon
- f. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan undang-undang.

24 Daniel S. Salossa, *Pilkada Langsung menurut UU No.32 Th.2004*, Media Pressindo, Yogyakarta, th. 2005, hlm 49-50

25 Yang dimaksud dengan "*pimpinan partai politik*" adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/ anggaran partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonan.

- g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri²⁶ bagi calon yang berasal daripada Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. surat pernyataan tidak aktif daripada jabatannya, dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] tempat yang bersangkutan menjadi calon dalam daerah yang menjadi wilayah kerjanya.
- i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat [DPR], Dewan Perwakilan Daerah [DPD], dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- j. kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 58.
- k. naskah visi, misi, dan program daripada pasangan calon secara bertulis.

2.8. Penelaah Persyaratan Administratif Calon Kepala daerah.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 60 ayat (1) UU No,32/2004, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik hendaklah diteliti persyaratan administratifnya dengan menjelaskan kepada agensi kerajaan yang berwenang dan menerima pandangan daripada masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon.

Hasil penelitian tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, paling lewat 7 (tujuh) hari daripada tarikh penutupan pendaftaran.

Jika pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat, maka partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan

²⁶ Yang dimaksud dengan "*jabatan negeri*" dalam ketentuan ini adalah jabatan struktur dan jabatan fungsional.

calon baru, paling lewat 7 hari daripada tarikh pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah [KPUD]. Kemudian KPUD melakukan penelitian semula kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon. Dan jika hasil penelitian bekas pasangan calon tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik atau gabungan partai politik tidak lagi dapat mengajukan pasangan calon.

2.9. Penetapan Pasangan Calon Kepala daerah.

Institusi yang berwenang menetapkan pasangan calon yang berhak maju kepada tahap pemungutan suara oleh rakyat secara langsung adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah [KPUD], berdasarkan hasil penelitian terhadap pasangan calon. KPUD menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon. Ketetapan itu diwartakan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon.

Pasangan calon yang telah ditetapkan itu harus sudah diumumkan secara luas paling lewat 7 (tujuh) hari setelah selesai proses penelitian. Selanjutnya, untuuk pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, dilakukan pilihan secara terbuka untuk menetapkan nombor urutan pasangan calon. Pilihan tersebut wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik, pihak akhbar dan wakil masyarakat.

Penetapan dan pengumuman pasangan calon tersebut bersifat muktamad. Apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat mula berkampanye hingga hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tempoh pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

Namun apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat mula berkampanye hingga hari pemungutan suara, sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, maka tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lewat selama 30 hari.

Partai politik atau gabungan partai yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lewat 3 (tiga) hari semenjak pasangan calon berhalangan tetap. Kemudian KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lewat 4 (empat) hari semenjak pasangan calon pengganti didaftarkan.

BAB 3

Teori Perilaku Pemilih

Bab ini akan menguraikan kaedah-kaedah teori yang diaplikasikan diantaranya perilaku pemilih rasional dan non rasional, orientasi pemilih, tipologi Perilaku pemilih, perilaku pemilih dalam pemberian suara, serta perilaku pemilih dalam pendekatan ilmu politik.

3.1. Mengenal Perilaku pemilih

Studi tentang perilaku pemilih pada dasarnya masih merupakan persoalan baru dalam konteks politik di Indonesia. Di Amerika Serikat sendiri, kajian tentang perilaku pemilih dalam bidang ilmu politik baru muncul tahun 1937 yang ditandai dengan terbitnya buku "*Political Behavior: Studies in Election*

Statistics" karya Herbert Tingsten. Sebab, sebelumnya banyak ilmuwan politik di Amerika yang memfokuskan dan lebih puas dengan metode penelitian ilmu politik tradisional, seperti analisis tekstual filsafat politik, proses pembuatan kebijakan legislatif, deskripsi-deskripsi tentang lembaga-lembaga politik, dan semacamnya. Oleh karenanya, dalam konteks ini, munculnya penelitian-penelitian tentang perilaku pemilih dalam kajian ilmu politik merupakan reaksi atau pemberontakan atas ketidakpuasan terhadap penelitian-penelitian tradisional tersebut.

Kajian sebelumnya dapat digunakan sebagai sumber informasi dan juga sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian *Hernoe [1994]* dan *suwondo [1997]* tentang perilaku pemilih perkotaan memperkuat kesimpulan Gaffar [1992] yaitu orientasi sosio religius mempunyai korelasinya terhadap perilaku pemi-

lih Partai Persatuan Pembangunan [PPP] dan Partai Demokrasi Indonesia [PDI]. Santri cenderung memilih partai Islam dan kaum abangan memilih partai yang tidak membela dan memajukan Islam. Walaupun pada saat itu semua kekuatan organisasi politik telah sepakat untuk berazaskan Pancasila, Partai Persatuan Pembangunan tetap dipandang pendukung dan pemilih sebagai partai Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi pilihan diantara masing-masing agama. Responden yang Islam cenderung memilih Partai Persatuan Pembangunan ketimbang memilih Golongan Karya [Golkar] dan Partai Demokrasi Indonesia. Sementara responden non Islam tak satupun memilih Partai Persatuan Pembangunan, tetapi lebih dominant memilih Partai Demokrasi Indonesia dan sebagian memilih Golkar. Hal ini menunjukkan pola aliran keagamaan masih cukup berpengaruh pada seseorang dalam menentukan pilihannya. Kajian ini lebih mengarah pada *pendekatan sosiologis*.

Penelitian *Pomper* pada pemilu 1946, 1964, dan 1972¹ menghasilkan kesimpulan yang mirip dengan catatan Kanvanagh tentang perilaku pemilih di Inggris. *Pertama*, hubungan antara pembolehubah-pembolehubah sosial-ekonomi dengan pilihan pemilih semakin melemah dari pemilu ke pemilu, dan sampai tingkat yang rendah pada tahun 1972. faktor-faktor demografis ketika dihubungkan dengan pilihan pemilih juga mengalami hal yang sama. *Kedua*, posisi isu-isu politik dalam menentukan perilaku politik meningkat secara tajam, baik dampaknya secara langsung terhadap pilihan pemilih maupun secara tidak langsung melalui penilaian calon kandidat. *Ketiga*, terjadi penurunan pengaruh identifikasi partai terhadap pilihan pemilih secara terus menerus mulai dari pemilu 1956, 1964, dan puncaknya pemilu 1972.

Dalam studi tentang perilaku pemilih pada pemilu 1999, *Liddle dan Mujani*² menemukan dua kesimpulan penting dalam memahami perilaku pemilih yaitu semakin mudarnya politik aliran di tingkat massa pemilih. Massa pemilih cenderung kurang memperdulikan aliran masing-masing partai politik.

1 Jurnal *Ilmu Politik*, 16. Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

2 *Lihat*, Ida Rifda, *op.,cit*, hlm.43.

Beberapa kajian tingkah laku memilih lain yang penting diketahui antaranya dilakukan oleh *Gazali Mayudin (1993)*.³ Kajian yang dilakukan Mayudin ini mau menguji pengaruh uang, media dan jentera partai terhadap tingkah laku memilih di Kelantan. Dalam kajian ini, Gazali Mayudin mendapatkan bahwa pemilih Melayu Kelantan lebih tertarik pada Pas oleh karena isu rohani dan keagamaan dan kenegerian, berbanding terpengaruh oleh uang, media, jentera partai Umno BN.

Studi yang sama juga dilakukan oleh *Willy Wirman (2007)*⁴ tentang politik memilih pada Pemilu 2004 terhadap partai Amanat Nasional menghasilkan perilaku memilih dalam menentukan pilihan lebih didasarkan pada faktor keagamaan, sedangkan hubungan orientasi calon anggota DPRD lebih kepada kharisma dan asal kesukuan atau daerah calon legislatif. Kajian ini berbeda dengan apa yang pernah dikaji di Malaysia. Kajian tingkah laku memilih di Negara Malaysia yang pernah dilakukan antaranya yaitu kajian yang dibuat oleh Mohd Faisal Syam Abdol Hazis, Neilson Ilan Mersat dan Ahli Sarok. Kajian ini bertajuk *Tingkah laku Pemilihan Dalam Pemilu DPRD Sarawak (2002)*,⁵ mendapati bahwa perilaku memilih di Sarawak tidaklah static, sebab perilaku memilih masyarakat dipengaruhi oleh faktor calon dan partai. Faktor inilah yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi memilih.

Kajian lain tentang perilaku memilih yang pernah dilakukan disemenanjung adalah kajian oleh *Nor Azimah (1992)* tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku pilih di Kota Tinggi Melaka. Beliau secara khas ingin menguji pengaruh ibu-bapa terhadap tingkah laku memilih anak-anaknya. Kajian ini menemukan bahwa tidak ada pengaruh tidak ada pengaruh ibubapa dalam memilih. Baginya tingkah laku memilih lebih dipengaruhi oleh faktor lain.

Selain kajian yang dilakukan Nor Azimah di Kota Tinggi Melaka, Dodi Hendrik juga pernah dilakukan di Kota Bharu negeri Kelantan, yang bertajuk *Perilaku Memilih Belia pada Pemilu Tahun 2004*. Hasil didapati menyata-

3 *Lihat* Hairany, Naffis, (penyt), *Amalan Politik Malaysia*, Bangi, UKM, 1993.

4 *Lihat*, *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Volume 5/Nomor 1/Juni 2007

5 *Lihat*, Mohd Faisal Syam Abdol Hazis, 2002, *Tingkah Laku Pemilihan Dalam Pemilu Parlemen Sarawak*, Samarahan Sarawak Universiti Malaysia Sarawak.

kan bahwa tidak terdapat hubung kait antara jenis jentina belia dengan pola memilih belia. Kajian ini juga menyimpulkan bahwa tidak ada hubung kait antara tingkat umur belia dengan pola memilih belia.

Sebagaimana kajian yang pernah dilakukan di Sabah oleh Neilson Mersat (1999)⁶ menyimpulkan bahwa faktor etnik yang mempengaruhi perilaku memilih di Sabah. Dimana pemilih bumi putra Islam lebih cenderung memilih Umno-BN. Sedangkan kaum Cina lebih cenderung memilih LDP dan SAPP. Namun hal ini juga tidak mesti berperanan mutlak karena didapati pula pemilih Cina yang memilih PBS, yaitu partai yang dikenal sebagai partainya masyarakat Kadazam Dusun.

Terlepas dari tujuan suatu partai politik atau kontestan individual, suatu hal yang pasti ialah Mereka membutuhkan suara para pemilih agar boleh berkiprah di dalam dunia politik. Untuk itu, mereka harus memahami pemilih. Tanpa pemahaman ini, mereka tidak akan diterima oleh masyarakat dan gagal untuk menyelenggarakan tujuan mereka berkiprah di politik. Jadi, suatu partai politik atau kontestan individual harus berusaha memahami pemilih mereka. Untuk itu sejumlah hal terutama yang menyangkut perilaku pemilih sebagai konsumen politik.

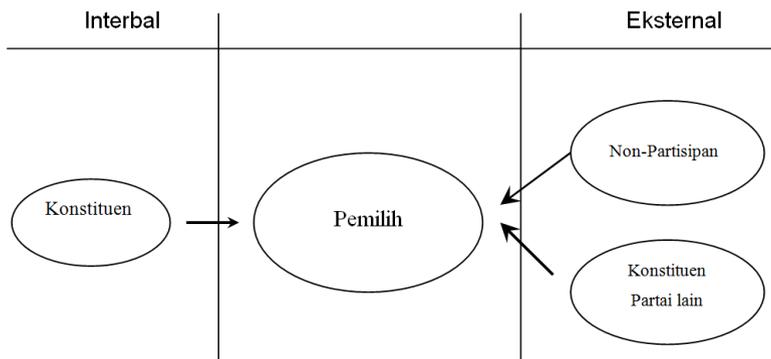
Dalam era demokratisasi sekarang ini, hubungan antara kandidat dengan pemilih adalah hubungan yang tidak stabil, karena semakin kritisnya masyarakat dan semakin lunturnya ikatan tradisional maupun primordonal. Padahal, kandidat tak akan bisa memenangkan persaingan politik tanpa mendapatkan dukungan pemilih. Sehingga tidak mengherankan apabila menjelang pemilu, kandidat ramai-ramai mendekati pemilih untuk memberikan pilihannya. Hubungan pasif seperti ini, telah diungkapkan, membuat pemilih menjadi objek politik. Padahal keberadaan pemilih seharusnya dijadikan subjek dan kandidat sebaiknya menempatkan diri sebagai pelayan serta agen pembaruan dalam masyarakat. Pada kenyataannya, hubungan antara kandidat dengan pemilih selalu beda dengan apa yang diharapkan pemilih. Setelah memenangkan pemilu,

6 Mohd Faisal Syam Abdol Hazis, , op. cit, 2002

kandidat melupakan janji dan harapan politik yang telah mereka sampaikan di hadapan para pemilih. Mereka begitu sibuk mengurus kekuasaan untuk mengamankan posisi yang telah didapat.

Sementara itu, di sisi lain, para pemilih juga seringkali memindah-mindahkan dukungan mereka dari satu partai ke partai lain. Dengan semakin meningkatnya massa mengambang dan non-partaisan, harus disadari bahwa ikatan ideologi yang dulu sangat kuat itu sekarang telah luntur. Pemilih semakin hari menjadi sangat kritis dan selalu mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan partai pemenang pemilu. Ketika mereka melihat bahwa program kerja yang dilaksanakan partai atau kandidat pemenang pemilu ternyata tidak sesuai dengan janji mereka sewaktu masa kampanye, pemilih dapat 'menghukum' partai atau kandidat dengan tidak memilihnya kembali pada pemilu berikutnya.

Gambar 2. 1. Pembagian Jenis Pemilih



Ada baiknya dalam gambar ini kita lebih dulu mendefinisikan apakah yang dimaksudkan dengan pemilih. Secara garis besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para partai atau kandidat untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan pilihannya kepada partai atau kandidat yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini adalah masyarakat pada umumnya. Pemilih adalah kelompok masyarakat yang merasa

diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasi dalam institusi politik seperti partai politik. Dengan kata lain, partai politik harus memiliki basis pendukung yang memiliki kesamaan ideologi dan tujuan politik. Kelompok-kelompok pendukung atau konstituen ini secara jelas mendefinisikan keterkaitan mereka dengan partai politik tertentu. Disamping itu, pemilih merupakan bagian masyarakat luas yang boleh saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu tetapi tertarik dengan kandidat/calon kepala daerah yang diajukan oleh partai tersebut. Masyarakat terdiri dari berbagai kelompok, ada kelompok masyarakat yang non-partai, di mana ideologi dan tujuan politik mereka tidak diikatkan kepada suatu partai politik yang boleh menawarkan program kerja yang terbaik menurut mereka, sehingga partai tersebutlah yang akan mereka pilih.

Upaya untuk menjelaskan karakteristik pemilih telah menjadi diskusi dan analisis para politikus maupun kalangan akademisi. Semenjak Downs⁷ kita semua sadar bahwa keputusan memilih (*to vote*) berbeda secara signifikan dengan keputusan ekonomi dan komersial pada umumnya. Keputusan memilih selama pemilu dapat dianalogikan sebagai perilaku pembelian (*purchasing*) dalam dunia bisnis dan komersial. Dalam dunia bisnis dan komersial, keputusan pembelian yang salah akan berdampak langsung terhadap subjek dengan kehilangan utilitas (*utility loss*) barang atau jasa yang dibelinya. Sedangkan keputusan yang salah dalam pemilu tidak memiliki efek langsung bagi pengambil keputusan, karena keputusan individu tidak akan berarti apa-apa kecuali dalam jumlah besar. Keputusan individu adalah bagian kecil dari keputusan kolektif. Hanya individu-individu dengan posisi yang dapat mempengaruhi persepsi dan opini publiklah yang memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh sangat luas. Sehingga tidaklah mengherankan jika para figur publik sangat diperebutkan oleh partai politik untuk menjadi kader mereka termasuk mencalonkan mereka sebagai calon kepala daerah. Kekuatan popularitas dan ketenaran diharapkan dapat menjadi magnet yang mampu menyedot perhatian pemilih secara

7 Downs, A., *an economic theory of democracy*, New York : Harper-Row, 1957

luas. Menurut Downs, partisipasi politik lebih dilihat sebagai aksi masing-masing individu untuk mempertahankan dan memperkuat institusi demokrasi.

Perilaku pemilih dalam pemilu juga dianalisis oleh Schumpeter⁸. Menurut dia, pemilih mendapatkan informasi politik dalam jumlah besar (*overload*) dan beragam, seringkali berasal dari berbagai macam sumber yang sangat mungkin bersifat kontradiktif. Di tengah-tengah informasi yang melimpah ini, pemilih dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit untuk memilih-milih informasi. Misalnya apakah informasi yang diterima berasal dari sumber yang memiliki kredibilitas yang baik atau hanya sekadar rumor politik yang tidak memiliki landasan kuat dan hanya berdasarkan persepsi serta *judgement* saja. Sehingga tidak aneh bila diskusi tentang perilaku pemilih bermuara pada perdebatan apakah pemilih bersifat rasional atau tidak rasional dalam pemilu.

Sementara itu, Brennan dan Lomasky⁹ serta Fiorina¹⁰ menyatakan bahwa keputusan memilih selama pemilu adalah perilaku 'ekspresif'. Perilaku ini tidak jauh berbeda dengan perilaku *supporter* yang memberikan dukungannya pada sebuah tim sepakbola. Menurut mereka, perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh loyalitas dan ideologi. Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada partai politik jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan pilihannya kalau mereka menganggap bahwa suatu partai politik tidak loyal serta tak konsisten terhadap janji dan harapan yang telah mereka berikan. Jadi, konsep loyalitas di sini harus dilihat dua arah, yaitu dari pemilih kepada partai politik dan dari partai politik ke pemilih. Selain itu, perilaku pemilih juga sarat dengan kedekatan ideologi antara pemilih dengan partai politik. Masing-masing pemilih membawa ideologi yang berbeda satu dengan yang lain. Sementara

8 Schumpeter, A., *Capitalism socialism and democracy*, London : Unwin University Books, 1966

9 Brennan, G., & Lomasky, L. *Democracy and decision*, Cambridge : Cambridge University Press, 1977

10 Fiorina, M, P. *Retrospective voting in American nation elections*, New Haven : Yale University Press, 1981

itu, dalam struktur masyarakat juga terdapat beragam ideologi yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul kristalisasi dan pengelompokan antara ideologi yang dianut oleh masyarakat dengan ideologi yang dibawa pemilih. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada pemilih yang memiliki ideologi sama dengan mereka anut sekaligus juga menjauhkan diri dari ideologi yang berseberangan dengan mereka.

Ketidakhadiran insentif ekonomi ketika pemilih menentukan pilihan politik membuat banyak kalangan berpendapat bahwa, secara individual, memilih lebih merupakan keputusan konsumsi ketimbang keputusan investasi¹¹. Insentif ekonomi dilihat sebagai 'keuntungan' secara ekonomis ketika pemilih memberikan dukungan kepada suatu partai politik atau kandidat. Dalam perspektif individual, keputusan pemilih akan dilihat sebagai perilaku konsumsi dan pembelajaran yang dengan cepat hilang dan habis, bukan sebagai aktivitas yang akan dituai hasilnya dalam jangka panjang. Selain itu, perilaku pemilih dalam pemilu juga memiliki biaya ekonomis berupa sedikit waktu dan usaha, seperti yang diungkapkan oleh Niemi¹² dan Aldrich¹³. Menurut mereka, usaha untuk memberikan dukungan berupa pencoblosan dalam bilik-bilik pilihan nyaris tanpa biaya secara ekonomis. Dengan tidak terdapatnya biaya ekonomis ini, tak heran apabila pemilih dapat menjatuhkan pilihannya kepada siapapun. Pemilih dalam posisi *indifferent* secara ekonomis. Artinya memilih suatu kandidat tidak menjadi lebih mahal atau murah dibandingkan dengan memilih kandidat lain secara ekonomis pada saat 'membeli' (kendati harus diingat bahwa sesungguhnya pilihan salah yang dilakukan oleh banyak orang akan berakibat pada kebijakan politik dan selanjutnya pada perekonomian masyarakat secara umum, termasuk perekonomian individu). Hal ini juga yang mengarahkan pada pemahaman bahwa memilih selama pemilu lebih didorong oleh alasan-alasan non-ekonomis seperti ideologi dan budaya.

11 Aidt, T.S., *Economic voting and information*, electoral studies, (19) 2-3, 2000, hlm 349, 2000

12 Niemi, R.G. *Costs of voting and nonvoting*, "Public Choice, (17), 1976, hlm 115-119

13 Aldrich, J.H. *Rational Choice and Turnout*, American Journal of Political Science, (37), 1993, hlm 246

Kompleksitas, ketaatan, kebimbangan dan ketidakpastian adalah ciri khas yang selalu hadir pada saat pemilih harus menentukan pilihannya¹⁴. Menurutny, hal ini lebih sering disebabkan oleh penggunaan slogan dan peristilahan politik yang sudah dimengerti oleh banyak kalangan, sempitnya waktu untuk berpikir karena harus segera menentukan pemilihan, keterbatasan kemampuan analisis masing-masing individu untuk melihat konsekuensi logis dari program yang diajukan oleh masing-masing kontestan. Sejumlah kontestan, baik partai politik atau kandidat perseorangan, sering memposisikan diri dan mengangkat isu politik seluas mungkin sehingga dapat mewakili masyarakat seluas-luasnya¹⁵. Hal ini dimaksudkan agar peserta pemilu bersangkutan boleh diterima oleh segenap golongan yang memiliki skala prioritas berbeda-beda atas sebuah isu politik. Namun di sisi lain, topik dan isu politik yang terlalu umum menciptakan tidak jelasnya keberpihakan partai politik bersangkutan. Konsekuensinya, masing-masing kelompok masyarakat akan menginterpretasikan topik dan isunya secara berlainan, berdasarkan kondisi dan situasi kontekstual yang mereka hadapi. Selain itu, kebimbangan masyarakat juga dipengaruhi oleh kurangnya kemampuan partai dalam memposisikan dirinya atas sebuah permasalahan politik, sehingga pesan politiknya menjadi mengambang dan sukar dipahami masyarakat.

Melimpahnya informasi dan pesan politik menjelang kampanye pemilu menyulitkan pemilih untuk mengolah dan menganalisisnya. Di samping itu, informasi yang tersedia sering kali bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini bisa diakibatkan oleh teknik manipulasi politik untuk menyudutkan lawan politik, janji-janji politik, penggunaan konsep dan bahasa yang rumit serta pesan propaganda di satu sisi, sedangkan di sisi lain para pemilihnya mengidap keterbatasan kognitif (*bouded rationality*)¹⁶. Konsep ini melihat bahwa pengambil keputusan memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas memproses informasi, mengikat kejadian masa lalu

14 Aldrich, J.H. et al., 1982

15 Franklin, C.H. *Eschewing obfuscation? Campaigns and the perceptions of U.S. senate incumbents*," *American Political Review*, (85), 1991, hlm 1193

16 Simon, H.A. *The new science of management decision*. Prentice-Hall inc. New Jersey, 1960

dan keterbatasan kemampuan kalkulasi. Karena itu, penyederhanaan (*heuristic*)¹⁷ juga sering menandai proses penentuan pilihan politik. Penggunaan teknik penyederhanaan diyakini akan mempermudah pemilih untuk menentukan pilihan dengan informasi yang tersedia tanpa harus menunggu kelengkapan informasi.

Secara garis besar keputusan politik memiliki beberapa karakteristik khusus sebagai salah satu cabang ilmu pengambilan keputusan (*decision science*). Kebanyakan keputusan politik tidak terlalu mahal biaya (*low-cost*), dengan sedikit efek atas individu pengambil keputusan. Dalam hal ini, keputusan individual adalah bagian dari keseluruhan sebuah sistem di mana gabungan keputusan pribadi dalam jumlah besar (kolektif) memiliki pengaruh besar ke semua orang. Menganalisis keputusan politik membutuhkan ilmu lintas disiplin. Fenomena keputusan politik adalah fenomena kompleks dimana faktor sosial, budaya, geografis, sejarah, dan psikologis perlu dimobilisasi secara komprehensif. Keterkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya semakin meningkatkan kompleksitas analisis perilaku pemilih.

Mencoba memahami faktor yang melatarbelakangi mengapa dan bagaimana pemilih menyuarakan pendapatnya adalah sesuatu yang penting, baik dalam teori maupun praktek¹⁸. Salah satu model psikologis yang boleh digunakan untuk menganalisis perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya adalah model kesamaan (*similarity*) dan daya tarik (*attraction*)¹⁹. Menurut model ini, setiap individu akan tertarik pada suatu hal atau seseorang yang memiliki sistem nilai dan keyakinan yang sama dengan dirinya sendiri²⁰. Dalam bahasa lain, semakin dua pihak terbagi karakteristik yang sama (*Similarity*), akan semakin meningkat pula rasa saling tertarik (*attraction*) satu sama lain. Menurut perspektif ini, kelompok-kelompok

17 Schwenk, C.R. *Cognitive Simplification Process in Strategic Decision Making*," *Strategic Management Journal*, (5), 2, 1984, hlm 111

18 Quist, R.M., & Crano, W.D. *Assumed policy similarity and voter preference*, "The journal of social Psychology, (143),2, 2003, hlm.149-162

19 Newcomb, T.M., "The acquaintance process : looking mainly backward", *Journal of Personality and Social Psychology*, (36), 1978, hlm.1075-1083

20 Byrne, D., Clore., & Worchel, P. "The effect of economic similarity-dissimilarity on interpersonal attraction," *Journal of Personality and social Psychology*, (4), 1986, hlm.220-224

yang tercipta dalam masyarakat lebih disebabkan oleh kenyataan bahwa masing-masing individu dalam suatu kelompok memiliki kesamaan, sehingga kemudian mereka mengingatkan diri dengan yang lain untuk membuat grup-grup dalam masyarakat. Menggunakan perspektif ini dalam dunia politik berarti ketertarikan pemilih kepada kontestan pemilu merupakan fungsi dari seberapa besar derajat kesamaan ideologi dan tujuan yang ingin dicapai kedua pihak. Semakin besar kesamaan ideologis dan program kerja antara individu dengan kontestan, semakin tertarik juga individu tersebut kepada kontestan pemilu. Terdapat dua hal yang dapat dilakukan oleh kontestan menurut perspektif ini. *Pertama*, kontestan pemilu berusaha memetakan kemudian mencoba memahami karakteristik di setiap kelompok masyarakat. *Kedua*, kesamaan karakteristik ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencari pendukung. Tema kampanye dan slogan politik harus memiliki derajat kesamaan yang tinggi dengan apa yang dialami oleh masyarakat agar masyarakat tertarik kepada kandidat tersebut. Semakin isu politik mencerminkan apa yang dialami masyarakat, semakin besar pula kemungkinan kontestan bersangkutan memenangkan pemilu.

Dalam dunia politik, keterkaitan pemilih kepada kontestan dapat dijelaskan dengan menggunakan model kedekatan (*proximity*) atau model 'spatial'²¹. Dalam model ini, pemilih akan cenderung memberikan suaranya kepada partai politik atau seorang kandidat yang dianggap memiliki kesamaan serta kedekatan sistem nilai dan keyakinan. Berangkat dari hal-hal di atas, saya membagi dua hal yang bisa dijadikan ukuran mengenai cara pemilih dalam menilai dari kedekatannya dengan partai politik atau seorang kandidat: (1) *kesamaan mengenai cara pemecahan masalah (policy-problem-solving)*, dan (2) *kesamaan dalam paham serta nilai dasar ideologi (ideology) dengan salah satu partai politik atau seorang kandidat*.

a. Perilaku pemilih Antara rasional dan non-rasional

Literatur tentang pengambilan keputusan terfokus pada perdebatan apakah kandidat atau pemilih dalam pengambil

21 Downs, A., et al

keputusannya rasional atau tidak rasional. Padahal, kata 'rasional' sendiri adalah kata yang sangat sulit dipahami. Seperti diungkapkan Popper²² tentang rasionalitastas '*I have a deep ingrained fear of big wordes, such as rationality.*' Weber²³ membedakan *rasionalitastas nilai (valoerational)* dengan *rasionalitastas tujuan (goal-rational)*. Rasionalitastas nilai diartikan sebagai orientasi aksi berdasarkan nilai apakah itu etika, moralitas, agama, hal-hal yang bersifat estetika, kesukaan, atau asal-usul. Rasionalitastas seseorang individu dinilai sejauh mana individu tersebut mengambil keputusan atas nilai-nilai dia pegang, dan bukan dari tujuan yang hendak dicapai. Rasionalitastas tujuan, di sisi lain, diartikan sebagai orientasi keputusan dan aksi berdasarkan kesesuaian dengan tujuan akhir, metode pencapaiannya dan konsekkuensinya. Individu akan dinilai rasional ketika keputusan dan aksinya mendukung tujuan akhir.

Don Bryne²⁴ mengemukakan teori afek respon [*respon affect theori*] tentang perilaku voting. Byrne mengemukakan bahwa ada dua asumsi tentang manusia, yaitu *manusia sebagai makhluk yang rasional dan yang tidak rasional*. Dalam perilaku voting, pemilih dikatakan *rasional* jika ia memberikan suara atau pilihan suatu partai atau calon kepala daerah didasarkan pada komponen belief, yaitu atribut yang melekat pada suatu partai atau calon Kepala Daerah; apa visi dan misi partai atau Calon Kepala Daerah ke depan; apa programnya [political program], dan apa [platformnya].

Rasionalitastas merupakan suatu sikap dan tindakan yang mempertimbangkan segala sesuatu secara rasional dan logic. Dalam kontek perilaku politik, maka rasionalitasti politik termasuk pula rasionalitasti perilaku pemilih. Berdasarkan rasionalitasti itu, individu melakukan sesuatu tindakan politik berdasarkan faedah yang boleh ia dapat daripada apa-apa yang ia lakukan tersebut. Dengan andaian atau asumsi bahwa pertimbangan-pertimbangan yang logic dan rasional ialah salah satu ciri-ciri masyarakat modern serta individu yang ber-

22 Popper, K.R., "*Bernay's plea for a wider notion of rasionalitasty,*" in Schilpp, P>A [ed.], *The Philosophy of Karl Popper*, open Court : La Salle. 1974

23 Weber, M., *Economy and society : an outline of interpretative sociology*, Edited by Roth, G., & Mittich, C. Berkely : Univercity of California Press, 1978

24 Lihat, Ancok, J. *Psikologi Politik*. Hand Out, [tidak diterbitkan], Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM

pendidikan tinggi.

Sebaliknya seorang pemilih dikatakan *tidak rasional* atau emosional apabila ia memilih suatu partai atau kandidat hanya didasarkan pada kesamaan [similarity] sifat, karakteristik tokoh dan juga kedekatan [proximity] tanpa melihat terlebih dahulu segala atribut partai atau calon tersebut. Seseorang dikatakan irasional jika ia memilih partai karena pimpinan partai atau calon pemimpin tersebut adalah orang berasal dari daerah yang sama dengannya, atau karena ia adalah orang yang pernah menolongnya sebelumnya, tanpa ada pertimbangan atribut partai atau calon pemimpin.

Sementara itu, Evans dan Over²⁵ membedakan dua konsep rasionalitastas. *Pertama*, rasionalitastas diartikan sebagai berpikir, dan beraksi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (R1). Rasionalitastas jenis ini lebih mengendepankan alasan-alasan pribadi guna mencapai tujuan personal. *Kedua*, rasionalitastas diartikan sebagai berpikir, berbicara, berargumentasi, mengambil keputusan, dan beraksi berdasarkan sebuah sistem normatif tertentu (R2). Rasionalitas jenis ini lebih menekankan pada seberapa besar derajat kesamaan (konformitas) antara keputusan individu dengan 'best-practice' yang terdapat dan diyakini kebenarannya dalam masyarakat. Semakin sesuai keputusan individu dengan standar sosial, dia semakin dianggap rasional pula. Begitujuga sebaliknya, semakin tidak sesuai antara apa yang ingin dicapai dan diwujudkan dengan tujuan masyarakat pada umumnya, individu tersebut semakin dianggap tidak rasional. Kedua makna rasionalitastas ini tak berhubungan satu dengan yang lain. Seseorang boleh sangat rasional dalam usaha mencapai tujuannya (rasionalitastas pertama), namun boleh jadi berlawanan dengan standar umum yang ada dalam masyarakat (perilaku penyimpangan sosial). Dengan menganut sistem perbedaan ini, individu boleh mencapai tujuannya sendiri terlepas dari perdebatan apakah tujuannya rasional atau tidak. Soalnya, masing-masing orang akan mendefinisikan tujuan yang hendak dicapainya dengan cara berlainan.

²⁵ Evans, J.St.B.T., & Over, D.E. "Rationality in reasoning, Hove, Sussex: Psychology Press., 1996.

Defenisi rasionalitas serupa juga diungkapkan oleh Chater²⁶. Mereka membedakan *rasionalitastas kalkulasi* dan *rasionalitastas deskripsi*. Rasionalitastas kalkulasi didefenisikan sebagai proses berpikir yang menggunakan teknik/ metode probabilistik, logika dan proses pengambilan keputusan. Sementara rasionalitastas deskripsi diartikan sebagai derajat keputusan atau perilaku dibandingkan dengan sebuah standar hasil yang ditelorkan rasionalitastas kalkulasi. Gigerenzer dan Goldstein²⁷ mempercayai pandangan klasik rasionalitastas (bahwa aturan 'rasional' adalah standar yang harus digunakan dalam proses pengambilan keputusan) harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa metode probabilistic, statistik, *game theory*, dan kalkulasi adalah metode yang harus digunakan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Lindenberg²⁸, konsep rasionalitastas berangkat dari konsep individu yang memiliki preferensi dan dihadapkan pada kendala (*constraints*) ketika harus mengambil keputusan. Biasanya, premis dasarnya adalah bahwa individu memiliki sifat egois, penuh kalkulasi, dan bermaksud memaksimalkan keuntungan dan sekaligus menekan biaya (*cost*), dia dianggap semakin rasional. Sebaliknya, ketika pemilih tidak menggunakan rumus dan perhitungan untung-rugi dalam proses pengambilan keputusannya, oleh perspektif ini dia dicap sebagai makhluk yang sembrono dan tidak rasional.

Rasionalitastas klasik yang berlandaskan pada hitung-hitungan untung rugi dan maksimalisasi (*economic perspective*) serta teknik ilmiah dalam sistem pengambilan keputusan ini telah menuai banyak kritikan. Para sosiolog berpendapat bahwa para actor mengambil keputusan dan beraksi berdasarkan sistem nilai dan keyakinan (*beliefs*) yang mereka pegang serta bukannya berdasarkan kalkulasi untung-rugi²⁹.

26 Chater, N., Oaksford, M., Naksia, R., & Redington, M., "Fast, frugal, and rational : how raional norms explain behavior," *Organisational Behavior and Human Decision Process*, (90),1, 2003, hlm.63-68

27 Gigerenzer, G., & Goldstein, D., *Reasoning the fast and frugal way: models of bounded rationality*, "Psychological Review", (103), 1996, hlm. 650-669

28 Lindenberg, S., "An assessment off the new political economy : its potential for the social sciences and sciology in partaicular," *Sociological Theory*, (3), 1985, hlm.229-239

29 Breen, R., "Beliefs rationa choice and Bayesian Learning," *Rationality and Society*, (11), 4 1999, hlm, 463-479

Sistem nilai dan kepercayaan diyakini menuntun setiap individu untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini sistem nilai dan kepercayaan memiliki kekuatan lebih untuk mengarahkan keputusan seperti apa yang akan diambil dibandingkan dengan logika dan perhitungan kalkulatif. Seperti diungkapkan Boudon³⁰ bahwa dalam tradisi Freud, Marx dan Durkheim, keyakinan atau 'beliefs' adalah hasil dari proses non-rasional. Dimasukkannya sistem keyakinan (*beliefs sistim*) dalam studi proses pengambilan keputusan didasarkan pada kenyataan bahwa manusia atau aktor tidak pernah memiliki informasi yang benar-benar lengkap. Ketika mereka dihadapkan pada situasi ini, sistem keyakinanlah yang akan menuntun mereka untuk memilih. Seseorang akan memilih X ketimbang Y' hanya karena dia percaya dan dia yakin bahwa X lebih baik ketimbang Y'.

Pendapat yang sama dikatakan Converse³¹ juga mengungkapkan bahwa keyakinan pada politik pada kelas masyarakat yang kurang berpendidikan secara mayoritas terfragmentasi dan 'chaotic.' Dia menemukan bahwa, dalam banyak kasus, keyakinan ini bukanlah hasil dari analisis logis dan kalkulatif. *Keyakinan tumbuh dan berkembang dari suatu proses pengalaman in-vivo* serta internalisasi (dogmatisasi) keyakinan yang dipegang teguh oleh masyarakat pada umumnya. Orang yang meyakini sesuatu sangat sulit untuk diminati alasan dan argumen yang melatarbelakangi keyakinan tersebut. Selain itu, kebenaran dari suatu keyakinan bersifat baku dan sulit diganggu-gugat. Masyarakat melihat keyakinan sebagai sesuatu yang 'taken-for-granted' atau memang sudah begitu adanya. Setiap usaha yang ditunjukkan untuk mempertanyakan kebenaran dan alasan suatu keyakinan akan dengan mudah ditandai sebagai perilaku penyimpangan, kurang ajar, tidak tahu diri, bermoral rendah, dan semua stereotipe negative lainnya.

30 Boudon, R., "The 'cognivist model': a generalized 'rational-choice model', *Rationality and society*, (8), 1996, hlm. 123-150

31 Converse, P., "The nature of Belief sistims in mass publics." In : Luttbeg, N. [ed.], *Public opinion and public policy*, Homewood Ill: The Dorsery Press. 1968

Dalam dunia politik, Popkins³² menggunakan terminology 'low information rationality,' yang menekankan bahwa keputusan politik didominasi oleh proses 'shortcut' kognitif. Sangat sulit menelusuri kebenaran dan reliabilitas informasi politik yang diterima setiap individu. Sangat sulit membedakan mana rumor, stereotipe, propaganda, dan manipulasi tentang suatu hal. Setiap individu menerima informasi dari banyak sumber dengan kadar yang berbeda dan sering kali bertentangan satu sama lain.

Pada diri setiap individu telah ada suatu sistem nilai dan kepercayaan yang dianut teguh oleh masing-masing. Di sisi lain, kemampuan masyarakat untuk mengelolah semua informasi yang didapat juga terbatas. Sehingga jalur pintas dan mengadopsi pemahaman umum menjadi salah satu cara untuk penyederhanaan proses informasi politik. Apa yang dianggap sebagai kebenaran umum akan diterima sebagai kebenaran mutlak. Dalam hal ini, mana yang benar dan mana yang salah sangat tergantung pada jumlah. Semakin banyak orang yang menganggap bahwa sesuatu benar, hal tersebut menjadi benar tanpa melihat substansinya. Begitu juga sebaliknya, hal itu menjadi salah tanpa melihat substansinya. Kebenaran adalah produk sosial.

Sedikitnya biaya untuk memilih dan tidaknya signifikan atas kepentingan individu dalam pengambil keputusan mengindikasikan bahwa kepentingan memilih lebih dimotivasi oleh keyakinan moral (*moral beliefs*) atau oleh menifestasi dukungan politik, ketimbang kalkulasi matematis untuk memuaskan pertimbangan pribadi (*self-interest*) individu pengambil keputusan³³. Hal ini membuka kemungkinan bahwa keputusan politik lebih sensitif terhadap faktor-faktor seperti emosi, intuisi dan prinsip moralitas ketimbang kalkulasi untung-rugi ekonomis. Akibatnya, kepentingan politik berkaitan erat dengan kesalahan dalam keputusan.

Keabsahan pendekatan rasionalitas klasik mengenai perilaku pemilih ketika memilih partai politik atau seorang kan-

32 Popkins, S.L., *The reasoning voter: voter communication and persuasion in presidential elections*, Chicaga: University of Chicaga Press, 1991.

33 Brennan, G., & Hamlin, A., 2000, et al.

didat selama pemilu itu sangat ditentang Green & Shapiro³⁴. Menurut mereka, terdapat dua kelemahan mendasar pada konsep rasionalitas klasik ini. *Pertama*, pendekatan ini sama sekali tidak memperhitungkan bahwa seorang individu, sebagai aktor politik, mampu menganalisis dan mengambil keputusan berdasarkan alasan non-rasional. Kritik dalam hal ini mempertimbangkan bahwa aktivitas politik tidak bisa dianalogikan secara langsung dengan realitas ekonomi di mana kalkulasi kepentingan pribadi melandasi hubungan antara produsen dan konsumen. Lebih dari itu, dikeluarkannya aspek non-rasional ekonomis akan mengurangi kualitas analisisnya sendiri. Kenyataan telah banyak menunjukkan bahwa pemilih lebih banyak menggunakan *faktor non-rasional seperti intuisi, keyakinan, sistem nilai, anggapan umum, masyarakat, dan stereotipe* dalam proses pengambilan keputusan untuk memberikan pilihannya. Masyarakat lebih menekankan aspek yang mereka rasakan ketimbang pertimbangan logis kalkulatif.

Kelemahan *kedua*, dalam banyak kasus, alasan non-rasional ekonomis seperti pertimbangan (*judgment*), intuisi, emosi, kesukaan, loyalitas, budaya, norma, agama, dan kondisi sosial lebih mampu untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap atas perilaku pemilih. Politik bukanlah dunia ekonomi klasik yang mengendepankan kalkulasi untung-rugi. Di dalam politik terdapat juga alasan-alasan sosial, ideologis serta kepentingan bangsa dan negara. Membahas politik menggunakan rasionalitas ekonomis akan semakin menjauhkan pemahaman kita tentang apakah sesungguhnya politik itu.

Individu adalah produk sosial yang dibentuk dan berkembang melalui interaksi sosial. Aksi individu tidak dapat dipisahkan (diisolasi) dari komunitas di mana dia berada. Aksi individu lebih merupakan hasil interaksi dengan struktur sosial di mana dia berada dari pada hasil kontemplasi individu³⁵. Hal-hal yang bisa berkembang dalam masyarakat sedikit banyak membentuk cara berpikir dan bertindak setiap individu.

34 Green, D., & Shapiro, I., "*Pathologies of rational choice theory: a critique of applications in political science*, New Haven, CT: Yale University Press, 1994.

35 Granovetter, M., "*Economic action and social structure : the problem of embeddedness.*," *American Journal of Sociology*, (78), 1985, hlm. 481-510

Dia tidak berdiri sendiri dan bebas menentukan sikap yang terlepas dari pemahaman sosial. Dengan demikian, konsep rasionalitas yang menjadikan individu sebagai inti sistem sosial (*classcal rationality concept*) merupakan konsep yang mengangku- kut kelemahan mendasar bila dipandang dengan kaca mata interaksi sosial. Rasionalitas individu, menurut perspektif ini, merupakan turunan dari rasionalitas masyarakat. Apa yang dianggap benar dan salah dalam masyarakat akan dianggap benar dan salah bagi individu.

Di sini saya sepakat dengan *Boudon*³⁶ bahwa dibalik keputusan dan aksi terhadap alasan-alasan (*reasons*) yang mendasarinya. Rasionalitas pemilih tidak bisa diukur dengan kesesuaian terhadap standar normatif yang berkembang di masyarakat. Salah-benar sebuah keputusan sangat ditentukan oleh beberapa jauh hal tersebut sesuai dengan nilai dasar dan tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing individu. Rasionalitas lebih diartikan sebagai konsep mikroskopis ke- timbang makroskopis. Individu dalam hal ini memiliki 'kebe- basan memilih' (*free-choice*) Child,³⁷.

Memang benar bahwa lingkungan mempengaruhi indivi- du, namun bukan menentukan keputusan yang diambil oleh individu (*non-deterministic environment*). Mencoblos di bilik suara dilakukan secara pribadi tanpa disaksikan oleh masya- rakat. Karena itu, proses yang terjadi dalam bilik suara lebih merupakan hasil internal dalam diri masing-masing pemilih. Adanya prinsip pemungutan suara yang bebas dan rahasia menjadikan proses pencoblosan sebagai persoalan individu dengan pilihan-pilihannya sendiri.

Konsep rasionalitas ini sesuai dengan definisi rasiona- litastast tujuan dan rasionalitas nilai Weber, dan rasionali- tastast pertama (R1) dari Evans. dan Over di atas. Argumentasi atau alasan masing-masing individu sangat kontekstual, dapat berubah hitungan-hitungan ekonomi atau alasan yang lebih bersifat emosi, intuisi dan afektif. Jadi, definisi rasionalitas- tas ditentukan oleh sejauh mana seorang pemilih mengambil

36 Boudon, *et. Al.*

37 Child, J., "Organizational structure and strategies control: a replication of the Aston study, "Administrative Science Quarterly, (17), 1972, hlm, 163-176

keputusan konsisten (dalam motivasi dan metode) terhadap tujuan yang hendak dicapai, terlepas dari apakah tujuannya sesuai dengan standar normatif yang ada dimasyarakat atau tidak. Dalam hal ini, standar normatif masyarakat dilihat sebagai akumulasi dari standar yang dianut oleh masing-masing individu. Ketika terdapat pergeseran nilai pada diri setiap individu-sebagai penyusun utama masyarakat sosial-keyakinan masyarakat secara umum pun akan berubah.

Dalam pendekatan rasional terdapat dua orientasi yang menjadi daya tarik pemilih, yaitu orientasi isu dan orientasi kandidat. Orientasi isu berpusat pada pertanyaan: apa yang seharusnya dilakukan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara? Sementara orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa memperdulikan label partainya. Meski demikian, ketertarikan para pemilih terhadap isu-isu yang ditawarkan oleh partai ataupun kandidat bersifat situasional. Sehingga dengan sendirinya ketertarikan pemilih pada keduanya tidak permanen, melainkan berubah-ubah. Pengaruh terhadap isu dan kandidat tersebut berkaitan erat dengan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi, politik, hukum atau suatu peristiwa tertentu yang kontekstual dan dramatis.

Dampak peristiwa tertentu, pengaruh isu dan kandidat yang ditawarkan terhadap perubahan situasional perilaku pemilih membuat beberapa pakar melirik model peristiwa konsumen produk bisnis sebagai salah satu pendekatan dalam memahami perilaku pemilih. Bahwa perilaku pemilih, menurut Him Melweit, merupakan pengambilan keputusan cepat dan pengambilan keputusan tersebut tergantung situasi sosial politik tertentu yang tidak berbeda dengan pengambilan keputusan lainnya. Sedangkan dalam menilai kandidat, terdapat dua variabel yang perlu dipunyai oleh seorang kandidat. **Pertama**, kualitas instrumental, yakni tindakan yang diyakini pemilih akan direalisasikan oleh kandidat bila kelak menang pemilu. **Kedua**, kualitas simbolis, yakni kualitas kepribadian seseorang yang berkaitan dengan integritas diri, ketegasan, kejujuran, ke taatan pada norma dan aturan, kebaikan, sikap merakyat dan lain sebagainya.

Pendekatan rasional mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa para pemilih benar-benar rasional. Para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap visi, misi dan program kerja partai dan kandidat. Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan, dan tidak semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan umum, menurut pikiran dan pertimbangannya yang logis. Perbedaan antara pendekatan rasional dengan lainnya bahwa pemilih rasional adalah pemberi suara yang responsif dan tidak permanen. Pilihan politiknya bisa berubah-ubah seiring dengan bergulirnya waktu, isu dan perubahan peristiwa politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa ia merupakan pemilih yang pragmatis yang berorientasi pada visi, misi dan program partai atau kandidat.

Namun muncul pertanyaan terhadap pendekatan rasional ini: sejauh manakah sebenarnya para pemilih sudah mendapatkan informasi yang valid tentang kandidat dan isu yang ditawarkannya? Untuk menjawab hal ini perlu dirujuk pendapat Popkin yang mengatakan para pemilih memang menyerap informasi seputar isu yang ditawarkan oleh para kandidat sekaligus profil kandidat tersebut. Akan tetapi ia tidak mengolahnya secara aktif. Umumnya mereka mendapatkan informasi sebagai produk sampingan dari berbagai aktivitas sehari-hari. Dengan kata lain, umumnya mereka kurang mendapatkan informasi yang cukup. Mereka juga tidak mempunyai waktu untuk memeriksa akurasi informasi yang diserapnya. Fenomena inilah yang dipostulatkan oleh Popkin sebagai hukum *low information rationality* (rasionalitas berdasarkan informasi terbatas).³⁸

Pada bahagian lain dalam ilmu politik dikenal sebuah pendekatan yang mencoba menjelaskan realita politik yang ada dengan fokus perhatian pada perilaku aktor-aktor politik yang bermain dalam arena politik, yang dikenal dengan *pendekatan*

38 S.L. Popkin, "The Reasoning Voter Communication and Persuasion in Presidential Campaign," dalam Adman Nursal, *op.cit.*, hal. 68-69

behavioral. Robert Dahl³⁹ mengatakan bahwa pendekatan behavioral merupakan :

.....attempt to improve our understanding of politics by seeking to explain the empirical aspects of political life by means of methods theories, and criteria of proof that are acceptable according to the canons, and assumptions of modern empirical sciences.

Perhatian utama perilaku pemilih terletak pada hubungan antara pengetahuan politik dan tindakan politik, termasuk bagaimana proses pembentukan pendapat politik, bagaimana kecakapan politik diperoleh, dan bagaimana orang menyadari peristiwa-peristiwa politik. Behavioral memiliki landasan filosofis empirisme, volunterisme, tindakan-tindakan individual, serta hubungan antara kesadaran dan tujuan.⁴⁰ Level analisis dari pendekatan ini terletak pada manusia dan perilakunya, dengan focus perhatian pada individu dan perilaku dan sikap. Hal ini jelas berbeda dengan pendekatan yang dianggap tradisional, yaitu pendekatan kelembagaan.

Dua pendekatan diatas menempatkan pemilih pada waktu dan ruang kosong baik secara implisit maupun eksplisit. Pemilih ibarat wayang yang tidak mempunyai kehendak bebas kecuali atas kemauan dalangnya. Pemilih seakan-akan pion catur yang mudah ditebak langkah langkahnya. Mereka beranggapan bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika ada di bilik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelum kampanye dimulai. Karakteristik sosiologis, latar belakang keluarga, pembelahan kultural atau identifikasi partai melalui proses sosialisasi dan pengalaman hidup, merupakan variabel yang secara sendiri-sendiri maupun komplementer mempengaruhi perilaku atau pilihan politik seseorang.

Tetapi pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi pili-

39 L. Hurwitz, *Introduction to Politics, Traditionalism to Postbehavioralism in Theory and Practice*, Nelson-Hall, Chicago, 1979, hlm. 138-149.

40 David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, LP3ES, Jakarta, th.1996, hlm.209-210

han politik seseorang.⁴¹ Hal ini berarti menunjukkan bahwa ada variabel-variabel lain yang ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku pemilih seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan *Buler dan Stokes*⁴² ada faktor *Short Time Candidate dan Short Time Issue* sebagai penentu tindakan seseorang menentukan pilihannya. Mereka mengatakan bahwa tanggapan partai terhadap isu yang berkembang dalam masyarakat, yang tercermin dari kualitas kandidat yang ditampilkan akan sangat mempengaruhi keputusan pemilih. Bahkan pengujian yang dilakukan *Page dan Jones maupun Schulman dan Pomper*⁴³ menunjukkan bahwa isu akan mempengaruhi keputusan partai dalam menentukan kandidatnya. Dengan begitu, pemilih bukan hanya pasif, melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak terbelenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertindak. Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, mempunyai peranan yang penting dalam menentukan pilihan politik seseorang. Oleh karena itu, dalam pendekatan rasional ini penilaian terhadap isu-isu politik dan kandidat merupakan faktor yang sangat penting dalam menjelaskan pilihan politik seseorang. Di sinilah para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional.⁴⁴

Berbeda dengan Butler dan Stokes, maupun Page dan Jones, *Schulman dan Pomper*⁴⁵ membedakan isu ke dalam dua jenis, yaitu pertama *Short Term Issue* yakni persoalan dalam masyarakat yang menuntut pemecahan segera, seperti kenaikan harga. Kedua, *Long Term Issue*, yakni persoalan yang menyangkut masa depan bangsa dan negara, seperti kebijakan industrialisasi. Kedua jenis isu ini sama penting. Hanya dalam masyarakat

41 Lihat Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*, Jakarta : PT. Gramedia, 2003. Hal. 60-61

42 Lihat Riswanda Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997, hal 48

43 Ibid, hal 48

44 Lihat Muhammad Asfar, "Beberapa Pendekatan dalam Memahami Perilaku Pemilih", *Jurnal Ilmu Ilmu Politik*, 16. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 47.

45 Lihat dalam Riswandha Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 48

sedang berkembang seperti Indonesia yang mengacu kepada pertumbuhan ekonomi, tampaknya isu jangka pendeklah yang lebih berpengaruh terhadap keputusan perilaku pemilih.

Dalam pendekatan rasional terdapat dua orientasi yang menjadi daya tarik pemilih, yaitu orientasi isu dan orientasi kandidat. Orientasi isu berpusat pada pertanyaan: apa yang seharusnya dilakukan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara? Sementara orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa memperdulikan label partainya. Meski demikian, ketertarikan para pemilih terhadap isu-isu yang ditawarkan oleh partai ataupun kandidat bersifat situasional. Sehingga dengan sendirinya ketertarikan pemilih pada keduanya tidak permanen, melainkan berubah-ubah. Pengaruh terhadap isu dan kandidat tersebut berkaitan erat dengan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi, politik, hukum atau suatu peristiwa tertentu yang kontekstual dan dramatis.

Dampak peristiwa tertentu, pengaruh isu dan kandidat yang ditawarkan terhadap perubahan situasional perilaku pemilih membuat beberapa pakar melirik model peristiwa konsumen produk bisnis sebagai salah satu pendekatan dalam memahami perilaku pemilih. Bahwa perilaku pemilih, menurut Him Melweit, merupakan pengambilan keputusan cepat dan pengambilan keputusan tersebut tergantung situasi sosial politik tertentu yang tidak berbeda dengan pengambilan keputusan lainnya. Sedangkan dalam menilai kandidat, terdapat dua variabel yang perlu dipunyai oleh seorang kandidat. *Pertama*, kualitas instrumental, yakni tindakan yang diyakini pemilih akan direalisasikan oleh kandidat bila kelak menang pemilu. *Kedua*, kualitas simbolis, yakni kualitas kepribadian seseorang yang berkaitan dengan integritas diri, ketegasan, kejujuran, ke taatan pada norma dan aturan, kebaikan, sikap merakyat dan lain sebagainya.

Pendekatan rasional mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa para pemilih benar-benar rasional. Para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap *visi, misi dan program kerja* partai dan kandidat. Pemilih rasional memiliki motivasi,

prinsip, pengetahuan, dan informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan, dan tidak semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan umum, menurut pikiran dan pertimbangannya yang logis. Perbedaan antara pendekatan rasional dengan lainnya bahwa pemilih rasional adalah pemberi suara yang responsif dan tidak permanen. Pilihan politiknya bisa berubah-ubah seiring dengan bergulirnya waktu, isu dan perubahan peristiwa politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa ia merupakan pemilih yang pragmatis yang berorientasi pada visi, misi dan program partai atau kandidat.

Namun muncul pertanyaan terhadap pendekatan rasional ini: sejauh manakah sebenarnya para pemilih sudah mendapatkan informasi yang valid tentang kandidat dan isu yang ditawarkan? Untuk menjawab hal ini perlu dirujuk pendapat Popkin yang mengatakan para pemilih memang menyerap informasi seputar isu yang ditawarkan oleh para kandidat sekaligus profil kandidat tersebut. Akan tetapi ia tidak mengolahnya secara aktif. Umumnya mereka mendapatkan informasi sebagai produk sampingan dari berbagai aktivitas sehari-hari. Dengan kata lain, umumnya mereka kurang mendapatkan informasi yang cukup. Mereka juga tidak mempunyai waktu untuk memeriksa akurasi informasi yang diserapnya. Fenomena inilah yang dipostulatkan oleh Popkin sebagai hukum *low information rationality* (rasionalitas berdasarkan informasi terbatas).⁴⁶

Lebih lanjut Lanoue dan Bowler⁴⁷ menambahkan bahwa pilihan untuk memilih dapat dihasilkan dari kondisi ekonomi, gambaran tokoh, pengaruh kampanye, isu yang dibawa, serta semua yang sengaja dimanipulasi oleh partai. Mereka mengatakan juga bahwa konsep lain yang terpenting dalam perilaku memilih adalah identifikasi partai. Hal yang sama dikatakan David Easton⁴⁸ berkenaan dengan perilaku pemilih Easton me-

46 S.L. Popkin, "The Reasoning Voter Communication and Persuasion in Presidential Campaign," dalam Adman Nursal, *op.cit.*, hal. 68-69

47 Lanoue, J.D dan Bowler, S, *New Party Challeges and Partaisan Change: The Effects of Party Competition on Party Loyalty*. Political Behavior, Vol.18, No.4, Th.1996

48 David Easton, *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm.8-10

rincikan Karakteristik utama pendekatan behaviorisme, sebagai berikut :

- a. *Regularity*, yakni perilaku politik memiliki keberaturan dan kebersamaan yang dapat diamati dan dikaji. Hal tersebut dapat digeneralisasi dan diteorikan untuk menjelaskan perilaku saat ini dan masa mendatang.
- b. *Verification*, yakni validitas dari generasi perilaku yang sama (*uniform*) pada prinsipnya harus dapat diuji dengan mengacu pada perilaku dan *construct* yang dapat diamati.
- c. *Techniques*, yakni penelitian dengan pendekatan behavioral memerlukan teknis menganalisa dan mengumpulkan data dengan baik. Teknik yang digunakan harus secara konstan mengalami revisi dan penyaringan sehingga menghasilkan ketepatan dalam pengumpulan dan penganalisaan data.
- d. *Qualification*, konsep dasar dari behavior politik adalah keyakinan terhadap substansi politik, perilaku dan sikap politik yang dapat diukur, diklasifikasi. Behavioralis mencari ketepatan ketika menghadapi data dan konsep.
- e. *Values*, yaitu adanya perbedaan nilai fakta yang jelas antara satu dengan lainnya [dengan ruang dan waktu yang berbeda]. Kejelasan harus mencatat perbedaan yang analitis.
- f. *Systematization*, sebuah penelitian behavioralis harus bersifat sistematis. Teori dan penelitian secara logis jalin menjalin dan koheren dalam sebuah pengetahuan yang utuh.
- g. *Pure Science*, berusaha mentransformasikan ilmu politik ke ilmu pengetahuan murni. Hal ini dilakukan untuk dapat memahami dan menjelaskan perilaku politik secara logis serta menetapkan dasar bagi usaha memanfaatkan ilmu politik untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial.
- h. *Integration/Interdisciplisme/Approach*, adalah pendekatan behavioralis percaya akan kesatuan ilmu pengetahuan social dan meminjam orientasi serta tehnik-tehnik dari disiplin lainnya.

Dari perdebatan panjang mengenai dua kutub ilmu politik positivisme dan non-positivisme, ternyata bahwa pendekatan behaviorisme berada pada sisi positivisme yang antara lain

cenderung melihat realita sebagai fenomena alam, empirisme, mengutamakan pengamatan, kuantifikasi yang mengadopsi metode ilmu pengetahuan alam [natural science].

Sementara kritik antipositivisme menyatakan bahwa fenomena sosial tidak bisa dinilai dan dianalisis hanya dengan melakukan pengamatan yang bersifat permukaan. Fenomena sosial memiliki khas dimana selalu memiliki perbedaan ruang dan waktu dimana realita itu terjadi yang membuatnya saling berbeda.⁴⁹ Untuk itu diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk menjelaskan realitas, yakni dengan mengetahui hal-hal yang tersembunyi dibalik apa yang tampak oleh pengamatan.

Pendekatan rasional berkaitan dengan orientasi isu dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah, dari partai yang berkuasa kelak, sementara orientasi kandidat mengaju pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa peduli dari partai mana ia berasal.

Daya tarik isu dan kandidat tidaklah selalu permanen, melainkan berubah-ubah. Pengaruh isu dan kandidat berkaitan erat dengan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi, dan politik tertentu yang kontekstual. Sementara, pendekatan rasional terhadap kandidat bisa didasarkan pada kedudukan, informasi, prestasi, dan popularitas pribadi kandidat.

Kualitas kandidat memiliki dua variabel.⁵⁰ *Pertama*, kualitas instrumental yakni tindakan yang diyakini pemilih akan direalisasikan oleh kandidat bila kelak menang, misalnya keyakinan pemilih terhadap kandidat akan memberantas korupsi, sekalipun kandidat tersebut tidak menyatakan demikian. *Kedua*, kualitas simbolis, yakni kualitas kepribadian seseorang yang berkaitan dengan integritas diri, ketegasan, ketaatan pada norma dan aturan, kebaikan, sikap merakyat, dan sebagainya.

Ciri-ciri pemberi suara (voters) yang rasional⁵¹ meliputi :

- a. Dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternative;

49 Perdebatan tentang positivisme dan non-positivisme, lihat affan Gaffar, *Dua Tradisi*, makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan oleh fispol Universitas 17 Agustus 45 Semarang, 30 September 1989.

50 Adnan Nursal, *op., cit.*, hlm.65

51 Adnan Nursal, *op., cit.*, hlm 67

- b. Dapat membandingkan apakah sebuah alternative lebih disukai, sama saja, atau lebih rendah dibandingkan dengan alternative lain;
- c. Menyusun alternative dengan cara transitif: jika A lebih disukai daripada B, dan B lebih baik daripada C, maka A lebih disukai dari pada C.
- d. Selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan pada alternative yang sama.

Pengertian rasionalitastas beragam dan memiliki padanan kata yang lain. sebagaimana dikatakan Gellner,⁵² membedakan kata-kata yang hampir memiliki persamaan yaitu *reason* [nalar], *rationality* [rasionalitastas], dan *rationalism* [rasionalitassme]. Nalar adalah kemampuan manusia yang mampu melihat, mengenali, merumuskan dan melancarkan kritik terhadap berbagai kebenaran, lawan dari nalar adalah irasional. Lebih jauh dikatakan *Anshari*⁵³ mengartikan rasional sebagai sesuatu yang berkenaan dengan akal, dan hal yang memiliki kemampuan untuk berpendapat.

Hal yang senada dikatakan *kuper dan kuper*⁵⁴ rasionalitastas adalah sifat bawaan yang ditujukan oleh individu atau kelompok dalam pemikiran, perbuatan, atau lembaga-lembaga social. Dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Bertindak hanya setelah melakukan pengembangan atau perhitungan.
- b. Bertindak sesuai dengan rencana jangka panjang.
- c. Satu pengendalian terhadap perbuatan melalui aturan-aturan yang bersifat abstrak dan umum
- d. Seleksi sarana-sarana secara murni dengan efektif dalam rangka meraih tujuan yang ditentukan secara jelas
- e. Mensistematisasikan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai dengan sistim koheran tunggal
- f. Menemukan dengan kemampuan intelektual bukan dengan emosi.

52 Lihat Kuper, A dan Kuper, J, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial: Machiavelli-World sistim.*, edisi kedua, Raja Gafindo, Jakarta, 2000.

53 Lihat, *Kamus Psikologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1996.

54 Lihat, Arief Yanwar, *Jurnal An-Nafs Vol.02 No.001*, Mei 2007, Fakultas Psikologi UIR.

Rasionalitassme merupakan sejumlah doktrin. Pertama, merupakan desakan otoritas yang dimiliki oleh individu dan tindakan kognitif yang tidak terikat. Kedua, penilaian yang lebih tinggi terhadap pemikiran dan eksperimen dalam aktivitas kognitif. Ketiga, pandangan yang menyatakan bahwa kelompok atau individu harus menjalani kehidupan dengan rencana-rencana eksplisit yang dipilih secara intelektual, bukan dengan adat istiadat atau secara coba-coba kemudian gagal.

Durkheim menyatakan⁵⁵ menyatakan bahwa manusia bersifat rasional, rasionalitastas terwujud dalam kewajiban konseptual, tetapi bentuk yang diambil secara rasional bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Berbeda dengan *Weber*⁵⁶ yang menyatakan bahwa sejumlah manusia lebih rasional daripada yang lain. Rasional menurut *Weber* yaitu kemampuan menyeleksi sarana-sarana karena efektivitasnya, menghormati aturan-aturan, bukan karena kecocokannya dengan adat.

Sementara *Schopenhauer, Nietzsche, dan Freud*⁵⁷ sependapat dengan menyatakan manusia didominasi oleh kehendak irasional yang buta. *Freud* mengalihkannya dalam konteks klinis dan psikiatri, yang dikenal dengan mekanisme mempertahankan egonya, yaitu rasionalitassasi. Rasionalitassasi diartikan sebagai suatu proses membenarkan menuntun seseorang dengan menawarkan pendapat yang dapat dipercaya atau social yang dapat diterima dalam menempatkan pendapat-pendapat nyata.⁵⁸

Dari berbagai pengertian yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan berbagai sudut pandang dan latar belakang pendidikan, setidaknya ada beberapa point yang dapat diambil, yaitu rasionalitastas berkaitan dengan proses kognitif atau aktivitas intelektual, di mana dalam aktivitas atau proses menentukan pilihan sebagai suatu keputusan politik atas keterlibatannya dalam partisipasi politik terdapat pertimbangan

55 Lihat Kuper A, *op.,cit*, 2000.

56 Lihat Arief, *op.,cit*. hlm.41

57 Lihat Kuper A, *op., cit*.

58 Lihat, *Kamus Psikologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1996.

gan-pertimbangan atau alasan-alasan, dan bukan berdasarkan karena kecocokan dengan adat atau lingkungan.

Lebih jauh dikatakan *Kristiadi*⁵⁹ dalam sejarah ilmu politik belum pernah dikemukakan grand theory mengenai perilaku pemilih. Menurutnya, ada tiga macam teori perilaku memilih yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga mazhab besar. *Pertama*, teori perilaku memilih dari mazhab sosiologis. Teori ini menggunakan pendekatan sosiologis yang deterministic; *Kedua*, teori perilaku memilih dari mazhab psikologis, pendekatan teori ini menekankan bahwa voting ditentukan oleh tiga aspek yaitu keterkaitan, seseorang kepada partai politik tertentu, orientasi seseorang kepada presiden atau anggota parlemen serta orientasinya terhadap isu-isu politik. Identifikasi kepartaian adalah inti dari pendekatan psikologi untuk menjelaskan perilaku seseorang memberikan suara dalam pemilihan umum; *ketiga*, merupakan teori penolakan terhadap kedua teori tersebut diatas, teori ini menggunakan pendekatan ekonomi atau rasional yang menekankan bahwa pemberian suara atau voting ditentukan berdasarkan perhitungan untung rugi.

Menurut pandangan psikologi sosial terutama pendekatan psikologi kognitif perilaku memilih atau voting behavior dapat dijelaskan dengan *theory of choice* dari *Stoner*, *theori attitude and behavioral intention* dari *Fishbein*⁶⁰. Dalam *theory of choice* seseorang bebas memilih, namun tidak mampu mengendalikan hasil dari pilihan tersebut, *decision control* termasuk pula perasaan "mempunyai pilihan". Dalam teori ini ada dua istilah yang harus dibedakan yaitu antara *decision control* dengan *outcome control*. *Decision control* menunjukkan pada proses memiliki suatu tindakan memilih berbagai pilihan yang ada, sedangkan *outcome control* menunjukkan pada kemampuan untuk mengontrol hasil dari pilihan tersebut.

Menurut teori motivasi dan reinforcement, *voting behavior* didasari oleh proses pembuatan keputusan oleh individu terhadap objek, yaitu calon Kepala Daerah. Dalam pengambilan keputusan terhadap calon Kepala Daerah berdasarkan te-

59 Lihat *Analisis CSIS*, Tahun XXVIII, No.2.

60 Lihat, Mustaqfirin, *Teori-teori Utama Psikologi Kognitif*. Makalah Sosial II [tidak terbit], Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, th. 2003

ori reinforcement dikemukakan dua konsep yaitu stimulus tak bersyarat [*unconditioned stimulus*] dan stimulus bersyarat [*conditioned stimulus*].⁶¹ Stimulus tak bersyarat adalah satu perangsang yang dapat membangkitkan satu reaksi tanpa perlu melewati proses belajar, artinya bagi pemilih pemula atau pemilih untuk kali pertama secara tidak langsung dan tanpa melalui pendidikan politik akan dapat menentukan pilihan/keputusan politiknya. Sedangkan stimulus bersyarat adalah rangsangan netral atau biasa yang menjadi efektif dalam memunculkan reaksi bersyarat melalui proses pengkondisian.

Dalam perilaku voting, individu akan melakukan penilaian terhadap dua hal diatas, apakah akan mendekati atau menjauhi objek. Misalnya Seorang calon Bupati atau Walikota terpilih menjadi Bupati atau Walikota karena ayahnya adalah seorang Bupati/Walikota yang hebat, berani, dan terkemuka. Dalam hal ini sang ayah akan memberikan imbas pada anaknya, artinya status ayah dalam teori ini sebagai *unconditioned stimulus* dan anak sebagai *conditioned stimulus*.

*Fishbein dan Ajzen*⁶² menjelaskan bagaimana hubungan antara pengetahuan [belief], sikap, niat dan perilaku. Hubungan empat konsep dijelaskan sebagai berikut : Pertama, keyakinan akan akibat perilaku; adalah komponen yang berisikan aspek pengetahuan tentang perilaku. Kedua, sikap terhadap perilaku; sikap tergantung pada komponen pengetahuan. Makin banyak segi positif dari komponen pengetahuan makin positif sikap yang dibentuk. Ketiga, keyakinan normative akan akibat perilaku. Komponen ini berkaitan dengan pengetahuan . berbeda dengan pengetahuan pada komponen. Komponen di sini berkaitan dengan merupakan pandangan orang-orang lain yang berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Keempat, norma subjektif tentang perilaku. Komponen ini berisikan keputusan yang dibuat individu setelah mempertimbangkan pandangan-pandangan orang-orang yang mempengaruhi norma subjektif tentang perilaku.

Komponen-komponen diataslah yang nantinya akan mem-

61 Lihat, Arief dalam Jurnal An-Nafs, *op.,cit.*

62 Fishbein, W. dan Ajzen, D. *Belief, Attitude, Intention, and Behaviour*, Philipines : Addison-Wesley, 1975

pengaruhi niat dan perilaku. Perilaku merupakan niat yang sudah direalisasikan ke dalam bentuk tingkah laku yang tampak.

*Fishbein dan Azjen*⁶³ menjelaskan ada empat aspek yang mendasari seseorang melakukan tindakan beralasan.

Pertama, Behavioural belief, aspek ini berkaitan dengan pengetahuan bahwa perilaku membawa konsekuensi utama. Asumsi rasional jika pilihan didasarkan pada program calon Kepala Daerah, kredibilitas anggota, kemampuan para calon Kepala Daerah serta visi dan misi partai, sedangkan asumsi irasional jika pilihan didasarkan pada kharisma tokoh, kedekatan, serta adanya persamaan daerah, profesi, serta yang lainnya.

Kedua, Outcome Evaluation, aspek ini berkaitan dengan evaluasi terhadap keyakinan atau pengetahuan utama. Dari berbagai pengetahuan yang ada, maka diadakan evaluasi. Kedua aspek diataslah yang nantinya akan membentuk sikap. Sikap positif muncul karena pengetahuan dan evaluasi dari pengetahuan tersebut positif. Begitu pula dengan pilihan rasional, sikap rasional dalam memilih calon Kepala Daerah muncul jika pengetahuan dan evaluasi terhadap asumsi pilihan rasional banyak dan tinggi.

Ketiga, normative belief atau signifikan other, aspek ini berkaitan dengan pandangan orang-orang terdekat yang mempengaruhi perilaku. Orang terdekat yang biasa memberikan pandangan adalah ayah, ibu, mertua, guru, kepala desa, alim ulama, dan siapa saja yang berpengaruh terhadap individu. *Keempat, motivation to comply*, aspek ini berkaitan dengan motivasi untuk patuh terhadap pendapat dan pandangan orang berpengaruh. Dalam asumsi pilihan rasional calon Kepala Daerah. Artinya, pilihan yang ditujukan kepada calon Kepala Daerah tertentu bukan karena patuh pada orang-orang yang berpengaruh.

Dari berbagai pengertian diatas ada beberapa catatan yang dapat diambil, rasionalitas berkaitan dengan proses kognitif atau *aktivitas intelektual*, di mana dalam aktivitas atau proses tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan atau alasan-al-

63 Lihat, Samin.R dan Fiedler.K, *Applied Social Psychology*, London : Sage Publication Thousand Oaks, 1996.

san, dan bukan berdasarkan karena kecocokan dengan adat atau lingkungan.

b. Perilaku pemilih berdasarkan Rational Actor Theory [RAT]

Perilaku menentukan pilihan pada calon kepala daerah merupakan perilaku politik pada tingkat individu yang tentu saja melibatkan proses-proses psikologis. Perilaku pemilih sebagai salah satu bentuk partisipasi politik dari perspektif psikologis dapat dijelaskan dari dua teori yaitu *rational actor theory* [RAT] dan *self categorization theory*.

Teori RAT menyatakan bahwa perilaku pemilih adalah proses kalkulasi untung-rugi [cost-benefit]⁶⁴. Teori kedua adalah *self-categorization theory* atau juga dikenal sebagai *social-identity theory*. Teori ini menyebutkan kalau perilaku politik adalah bentuk dari proses identifikasi diri individu dengan kelompok sosial. Kelompok sosial dalam hal ini dapat disejajarkan dengan partai politik.

Teori aktor rasional mengungkapkan bahwa individu dalam peristiwa politik seperti dalam Pilkada akan melakukan analisis untung-rugi dalam menentukan pilihannya terhadap calon kepala daerah. Kalkulasi untung-rugi dalam hal ini tidak saja dalam arti untung-rugi finansial atau material, tetapi dapat saja untung-rugi sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk kebaikan atau keuntungan individu. Sumber daya yang dapat dikalkulasi dalam lingkup politik sebahagian diantaranya adalah imbal akses sosial-politik, ekonomi dan jabatan.

Social identity theory memandang keputusan memilih adalah hasil dari proses identifikasi individu dengan satu kelompok. Identifikasi ini dapat terjadi jika individu menentukan dan mengidentifikasikan kesamaan dirinya dengan calon kepala daerah pada beberapa dimensi diantaranya berdasarkan kesamaan norma, ideologi, kepentingan, kesamaan etnis, atau suku bangsa.

Perilaku memilih dalam Pilkada sebagai satu proses psikologi sosial yang merupakan proses persepsi pemilih pada

⁶⁴ Hopkins, N., & Kahani-Hokins, V, Identity Construction and British Muslims' Political activity Beyond Rational Actor Theory, *the British Journal of Social Psychology*, 43, 2004., hlm. 339-356

calon pemimpin yang dianggap paling sesuai menjadi kepala daerah. Persepsi pemilih dalam hal ini adalah persepsi tentang layak tidaknya calon kepala daerah menjadi seorang pemimpin yang pantas untuk dipilih. Teori kepemimpinan [*leadership*] menjelaskan ada empat perspektif dalam proses lahirnya seorang pemimpin yaitu teori sifat [*trait theory*], teori situasional [*situational theory*], teori transaksional [*transactional theory*], dan teori identitas sosial [*social identity theory*]⁶⁵

Dalam *Teori sifat* menyatakan bahwa individu menjadi seorang pemimpin akan ditentukan oleh sifat-sifat kepemimpinan pribadinya. Sehingga sifat yang dianggap sebagai sifat-sifat khas seorang pemimpin adalah keterbukaan [*extraversion*], kemampuan untuk bersepakat [*agreeableness*], kepekaan nurani [*conscientiousness*], terbuka pada pengalaman-pengalaman baru, dan memiliki emosi yang stabil. Teori sifat tentang pemimpin ini meskipun mampu mengidentifikasi hubungan antara satu sifat dengan kemampuan kepemimpinan seseorang namun para ahli sepakat bahwa kepribadian sahaja, sebagai faktor tunggal, merupakan faktor pengaruh yang buruk terhadap kepemimpinan. Sementara dalam *Teori situasional* menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki kapasitas seorang pemimpin, dan seseorang akan menjadi pemimpin jika situasi menjadikan dan memungkinkan dirinya tampil sebagai pemimpin.

Sedangkan Perspektif yang ketiga memandang bahwa kepemimpinan adalah hasil transaksi antara seorang pemimpin dan pengikutnya [*followers*]. Transaksi ini terjadi dalam lingkup dinamika kelompok. Contoh transaksi yang mungkin terjadi adalah ketika seorang individu dalam satu kelompok dianggap memiliki peran dan kontribusi yang besar dalam pencapaian tujuan kelompok, maka anggota dalam kelompok tersebut akan mengidentifikasi individu tersebut sebagai seorang pemimpin, sekaligus melimpahkan status kekuasaan sebagai seorang pemimpin.

65 Chan, K., & Drasgow, F. Toward a Theory of Individual Differences and Leadership : Understanding the Motivation to Lead, *Journal of Applied Psychology*, 86, 2001, hlm 481-498

Hal yang sama terjadi pada *konsep identitas sosial* untuk menggambarkan bagaimana individu merumuskan dirinya dalam konteks hubungan dalam satu kelompok [intergroup], yaitu bagaimana satu sistem kategorisasi sosial menciptakan dan mendefinisikan kedudukan individu dalam masyarakat. Individu dalam teori identitas sosial digambarkan menyesuaikan sikap, kecenderungan, perasaan, dan tingkahlakunya dengan sikap, kecenderungan, perasaan, dan tingkahlaku yang hidup dalam kelompok.

3.2. Tipologi Perilaku Pemilih

Analisis mendalam dan lebih komprehensif sangat dibutuhkan untuk memahami perilaku pemilih. Sebelumnya kita telah membahas jenis-jenis pemilih berdasarkan analisis mereka terhadap partai politik atau kandidat. Sementara itu pada kenyataannya pemilih adalah dimensi yang sangat kompleks. Begitu banyaknya karakteristik dan dimensi yang harus dianalisis membuat analisis karakteristik pemilihnya menjadi terbatas jika hanya didasarkan pada pendukung atau masa mengambang.

Para pendukung maupun non pendukung sebenarnya sama-sama memiliki karakteristik sebagai pemilih yang rasional dan non-rasional. Dua dimensi ini akan selalu ditemukan dalam masing-masing individu pemilih. Hanya saja kadar dan derajatnya satu sama lain memang berbeda. kedua dimensi ini diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang cara pemilih menentukan pilihannya. Selain itu, tipologi ini amat menentukan cara suatu partai politik dan kandidat dalam mengembangkan hubungan dengan masing-masing konfigurasi yang muncul.

Disini saya mencoba membangun 'tipologi pemilih' berdasarkan pertimbangan bahwa pemilih mengangkut pandangan yang objektif sekaligus subjektif ketika memilih sebuah partai atau seorang kandidat. Bahwa dalam diri masing-masing pemilih terdapat dua orientasi sekaligus yaitu ; (1) *orientasi 'policy-problem-solving,'* dan (2) *orientasi 'ideology'.*

Ketika pemilih menilai partai politik atau seorang kandidat dari kecamata '*policy-problem-solving*,' yang terpenting bagi mereka adalah sejumlah mana para kontestan mampu menawarkan program kerja atas solusi bagi suatu permasalahan yang ada. Pemilih akan cenderung secara objektif memilih partai politik atau kandidat yang memiliki kepekaan terhadap masalah nasional dan kejelasan program kerja. Partai politik atau kandidat yang arah kebijakannya tidak jelas akan cenderung tidak dipilih.

Sementara pemilihan yang lebih mementingkan ikatan '*ideology*' suatu partai atau seorang kontestan, akan lebih menekankan aspek-aspek subjektivitas seperti kedekatan nilai, budaya, agama, moralitas, norma, emosi, dan psikografis. Semakin dekat kesamaan partai politik atau calon kandidat, pemilih jenis ini akan cenderung memberikan suaranya ke partai dan kandidaat tersebut.

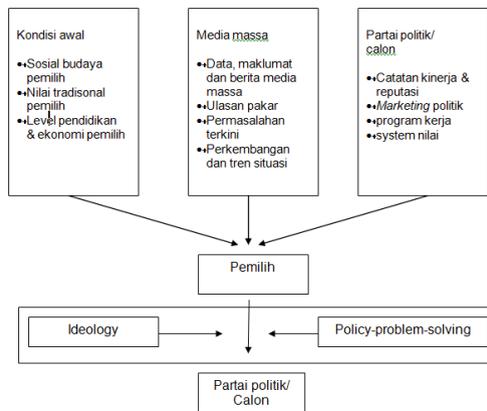
Selain itu, ada baiknya kita memahami mengapa seorang pemilih sampai dapat membuat analisis dan judgement atas partai atau kandidat yang akan mereka pilih. Dalam hal ini, saya berkeyakinan tentang adanya faktor-faktor yang dapat memengaruhi keputusan pemilih atas partai mana yang akan dipilih. Saya bermaksud mengajukan argumen bahwa faktor internal maupun eksternal individu secara simultan mempengaruhi cara individu dalam berpikir dan mengikatkan dirinya secara politik dengan partai tertentu. Saya mencoba menggabungkan dua perspektif antara *environmentdeterminist* dengan *free-choice*.

Menurut paradigma *pertama*, individu dianggap sebagai produk masyarakat. Sistem nilai dan perilaku yang muncul pada masing-masing individu merupakan hasil bentukan lingkungan. Menurut perspektif ini, kita dapat menganalisis karakter suatu masyarakat melalui perilaku individunya, karena perilaku individu merupakan cerminan dari masyarakat secara luas.

Sementara paradigma kedua melihat dalam perspektif yang sama sekali berbeda. Individu dianggap memiliki derajat kebebasan yang cukup tinggi untuk berbeda dari lingkungannya.

Individu bukanlah produk lingkungan, karena setiap individu memiliki sistem nilai, kemampuan, cara berpikir, dan perilaku yang berbeda satu dengan yang lain. Lingkungan bukan menentukan perilaku individu, melainkan hanya mempengaruhinya. Keputusan akhir dari perilaku yang akan diambil ditentukan sendiri oleh setiap individu. Jadi, menurut perspektif ini, tidaklah mengherankan apabila adanya perbedaan antara apa yang diwajibkan oleh lingkungan dengan apa yang dilakukan individu.

Gambar 3. 2. Faktor determinan memilih



Seperti terlihat pada gambar diatas, pertimbangan (*judgment*) pemilih dipengaruhi tiga faktor pada saat bersamaan : (1) *kondisi awal pemilih*, (2) *media massa*, dan (3) *partai politik atau kontestan*. Kondisi awal diertikan sebagai karakteristik yang melekat pada diri pemilih. Masing-masing individu mewarisi dan memiliki sistem nilai serta kepercayaan yang berbeda satu sama lain. Di samping itu, masing-masing individu mewarisi dan memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan yang lain. Hal-hal ini sangat memengaruhi proses dalam diri masing-masing individu ketika hendak menentukan pilihannya. Tingkat pendidikan dan ekonomi, misalnya, diyakini dapat mempengaruhi pemilih dalam membuat keputusan Chapman & Palda⁶⁶.

66 Chapman, R.G., & Palda, K.S., "Elektoral turnout in rational voting and consumptions perspectives," *Strategic Management Journal*, (9),3, 1983, hlm. 337-346

Individu yang tidak memiliki tingkat pendidikan tinggi akan cenderung menggunakan aspek non-rasional dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor emosional, rumor, isu, stereotipe, dan pendapat umum merupakan hal penting dalam proses pengambilan keputusan politik mereka. Sementara itu, orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan relatif tinggi akan cenderung lebih berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan.

Kebenaran informasi yang diperoleh tidak begitu saja diterima. Mereka akan mencoba memverifikasi apakah informasi berasal dari sumber-sumber yang terpercaya atau tidak, sebelum mereka menganalisisnya. Lokasi geografis juga mempengaruhi cara setiap individu dalam menganalisis sesuatu. Mereka yang hidup di daerah perkotaan relatif sudah terbiasa dengan mengkonsumsi informasi beragam dan kontradiktif dibanding dengan individu yang hidup di pedesaan.

Selain itu, faktor lingkungan di mana pemilih berada dan berinteraksi pun sangat penting dalam hal ini, umpamanya kondisi sosial budaya dan nilai tradisional. Apa yang terjadi di lingkungan eksternal mempengaruhi cara berpikir dan bertindak individu. Keluarga, misalnya. Ketika seorang pemilih dibesarkan dalam keluarga yang memiliki paham liberal, terdapat kecenderungan pemilih tersebut untuk mengadopsi nilai-nilai liberal tersebut, karena dia sudah terbiasa dengan prinsip-prinsip liberal dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor *kedua* yang memengaruhi pemilih adalah media massa Hofstetter⁶⁷. Kemampuan media massa untuk mendistribusikan informasi merupakan kekuatan untuk pembentukan opini publik. Opini publik sendiri sangat ditentukan oleh seberapa besar informasi yang diberikan kepada masyarakat. Ketika semua pemberitaan media massa tentang suatu partai politik bersifat positif.

Masyarakat cenderung melihat keberadaan partai politik tersebut sebagai sesuatu yang positif. Begitu juga sebaliknya, ketika media massa ramai-ramai memberitakan keburukan partai politik atau kandidat, masyarakat cenderung menilainya

67 Hofstetter, C.R., Zukin, C., & Buss, T., "Political imagery and information in an age of television," *Journalism Quarterly*, (55), 1978, hlm. 562-569

negatif. Padahal, hubungan antara media massa dengan partai politik tidak selalu netral dan objektif. Terkadang media massa dapat memberikan gambaran keliru yang menyangkut informasi tentang sebuah partai politik atau seorang kandidat⁶⁸.

Kekeliruan pemberitaan ini dapat disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Misalnya, wartawan dan jurnalis yang akan menulis berita memiliki tingkat pendidikan, sistem nilai, moralitas, dan budaya yang dapat mempengaruhi analisis yang akan ditulis. Selain itu, sumber informasi yang tidak reliable juga dapat memicu munculnya kesalahan persepsi. Ada juga wartawan yang memang berpihak pada suatu partai tertentu karena menjadi kader partai. Memang selalu dikatakan bahwa wartawan harus jujur dan tidak memihak. Tetapi, ketika wartawan-atau pimpinannya menjadi tokoh suatu partai politik, berita yang disajikan pantas dikeritisi pula. Dalam keadaan seperti ini, berita dan informasi yang dibaca oleh masyarakat boleh jadi tidak mencerminkan keadaan aktual. Media massa dalam hal ini berpotensi sebagai alat propaganda dan manipulasi melalui pemberitaan yang sama sekali tidak mencerminkan kondisi aktual. Dengan kata lain, informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat menyesatkan dan menjauhkan masyarakat dari inti permasalahan sebenarnya.

Faktor *ketiga* ialah karakteristik partai politik dan kandidat yang bersangkutan. Atribut kandidat seperti reputasi, *image*, citra, latar belakang, ideologi, dan kualitas para politikusny akan sangat mempengaruhi penilaian masyarakat atas partai/kandidat bersangkutan. Seringkali masyarakat mencampur adukkan kualitas figus kandidat dengan partai politik yang menjadi mencolokkan dirinya. Hal yang paling mudah dinilai oleh masyarakat memang setiap aktivitas dan perilaku yang diperbuat para politikusny. Kualitas orasi, program kerja, kepedulian, sikap yang ditunjukkan oleh politikus sering sekali menjadi barometer untuk mengukur kualitas para partai politik/kandidat.

68 Trent, J.S., Short-Thompson, C., Mongeeau, P.A., Nusz, A.K., & Trent, J.D., "Image, media massa, and voter characteristics," *the American Behavioral Scientist*, (44), 12, 2001, hlm. 2101-2124

Sementara itu, Fiorina (*at. Al*, 1981) menyatakan bahwa pembangunan reputasi sebuah partai politik atau seorang kontestan membutuhkan waktu yang tidak sekejap dan merupakan hasil dari akumulasi informasi serta kinerja dalam jangka waktu yang lama. Karp⁶⁹, berpendapat bahwa peranan seorang pemimpin dalam partai politik sangat penting. Seorang *leader* dapat memberikan gambaran dan petunjuk singkat tentang kualitas partainya. Hal ini menjadi sangat penting bagi pemilih, ketika mereka dihadapkan pada situasi ketidakpastian (*uncertainty*) tentang partai mana yang harus dipilih⁷⁰.

Ketika hal di atas akan memengaruhi '*judgment*' pemilih tentang kedekatan dan ketertarikan mereka terhadap suatu partai politik. Cara mempengaruhinya akan sangat tergantung pada kadar masing-masing faktor. Ketika media massa sangat berperan dalam pembentukan opini publik dalam suatu masyarakat, faktor ini sangat mempengaruhi cara bersikap dan bertindak masyarakat. Sedangkan ketika faktor keluarga yang lebih kuat dan masing-masing individu hidup didalamnya, pendidikan dalam keluarga sangat menentukan pilihan-pilihan politik.

Sementara itu, terdapat banyak kasus di mana sistem politik dan kualitas pendidikan dalam masyarakat sangat tinggi, sehingga mereka tidak begitu saja percaya dengan pemberitaan yang dihasilkan media massa. Selanjutnya, bisa digunakan dua variabel yang telah kita bahas di atas untuk melihat kedekatan tersebut, (1) '*policy-problem-solving*' yang lebih menekankan aspek kognitif, dan (2) ideologi yang lebih menekankan aspek afektif serta emosi. Kedua faktor tersebut diasumsikan penggunaannya oleh pemilih untuk menentukan pilihannya. Orientasi pemilih pada '*policy-problem-solving*' berkisar antara rendah (*low*) dan tinggi (*high*). Hal yang sama juga terdapat pada orientasi pemilih pada '*ideology*', yakni berkisar dari intensitas rendah (*low*) dan intensitas tinggi (*high*). Konfigurasi dari kedua faktor tersebut dapat dilihat dalam gambar di berikut ini :

69 Karp, J.A., Vowles, J., Banducci, S.A., & Donovan, T. "Strategic voting, party activity, and candidate effect: testing explanation for split voting in New Zealand's new mixed sistem," *Electoral Studies*, (21), 1 2002, hlm. 1-22

70 Sniderman, P.M., Brody, R.A., & Tetlock, P.E., *Reasoning and choice: exploration in political psychology*, Cambridge: Cambridge University Press. 1991.

Gambar 3.3. Konfigurasi pemilih

	tinggi		
Orientasi 'Policy-Problem-solving'		Pemilih rasional	Pemilih kritis
	rendah	Pemilih skeptis	Pemilih tradisional
		rendah	tinggi
		Orientasi 'Ideology'	

a. Pemilih Rasional

Dalam konfigurasi pertama terdapat pemilih rasional (*rational voter*). Dalam konfigurasi ini, pemilih memiliki orientasi tinggi pada '*policy-problem-solving*' dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kandidat dalam program kerjanya. Program kerja atau '*platform*' partai dapat dianalisis dalam dua hal: (1) *kinerja partai di masa lampau (backward-looking)*, dan (2) *tawaran kerja untuk menyelesaikan permasalahan rasional yang ada (backward-looking)*.

Kedua hal tersebut sama-sama mempengaruhi pemilih. Mereka tidak hanya melihat program kerja atau '*platform*' partai yang berorientasi ke masa depan, tetapi juga menganalisis apa saja yang telah dilakukan oleh partai tersebut di masa lampau. Kinerja partai atau kandidat biasanya termanifikasikan pada reputasi dan '*citra*' (*image*) yang berkembang dimasyarakat. Dalam konteks ini yang lebih utama bagi partai politik dan kandidat adalah mencari cara agar mereka dapat membangun reputasi di depan publik dengan mengedepankan kebijakan untuk mengatasi permasalahan nasional .

Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kandidat. Faktor seperti paham, asal usul, nilai tradisional, budaya , agama dan psikografis memang dipertimbangkan juga, tetapi bukan hal yang signifikan. Pemilih dalam hal ini ingin melepaskan hal-hal yang bersifat dogmatis, '*tradisional*' dan ikatan lokasi dalam kehidupan politiknya. Analisis kognitif dan pertimbangan logis sangat dominan

dalam proses pengambilan keputusan. Hal yang terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang dapat (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kandidat, dari pada paham dan nilai partai atau kandidat.

Oleh karena itu, ketika sebuah partai politik atau calon kandidat ingin menarik perhatian pemilih dalam matriks ini, mereka harus mengedepankan solusi logis akan permasalahan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, sosial-budaya, hubungan luar negeri, pemerataan pendapatan, disintegrasi nasional, dan lain-lain. Pemilih tipe ini tidak akan segan-segan 'pindah kelain hati', dengan beralih dari sebuah partai politik atau seorang kandidat ke partai politik atau kandidat lain ketika mereka dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan nasional. Pemilih jenis ini mulai banyak terdapat di Indonesia, terutama sejak lengsernya Soeharto dari pucuk pimpinan negara karena digusur hembusan angin reformasi.

b. Pemilih Kritis

Dalam bagian kedua terdapat pemilih yang kritis. Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kandidat dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai atau seorang kandidat cukup tinggi dan tidak mudah 'rational voter' untuk berpaling kepartai lain. Proses untuk menjadi pemilih jenis ini dapat terjadi melalui dua mekanisme.

Pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai politik mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. *Kedua*, dapat juga terjadi sebaliknya, pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai/kandidat baru kemudian memahami nilai-nilai dan paham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan.

Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis. Artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem nilai partai

(ideologi) dengan kebijakan yang dibuat. Tiga kemungkinan akan muncul ketika terdapat perbedaan antara nilai ideologi dengan 'platform' partai: (1) *memberikan kritik internal*, (2) *frustasi*, (3) *membuat partai baru yang memiliki kemiripan karakteristik ideologi dengan partai lama*.

Ketika pemilih merasa kritiknya tidak di fasilitasi oleh mekanisme internal partai politik, mereka cenderung menyuarakannya melalui mekanisme eksternal partai, umpamanya melalui media massa seperti televisi, radio, dan sebagainya. Frustrasi adalah posisi yang paling sulit bagi pemilih jenis ini. Di satu sisi, mereka merasa bahwa ideologi suatu partai atau seorang kandidat adalah yang paling sesuai dengan karakter mereka, di sisi lain mereka merasakan adanya ketidaksesuaian dengan kebijakan yang akan dilakukan partai. Biasanya pemilih jenis ini akan melihat-lihat dulu (*wait-and-see*) sebelum munculnya ide kemungkinan ketiga, yaitu bentuk partai baru. Pembentukan partai selalu dipelopori oleh tokoh-tokoh yang tidak puas dengan kebijakan sebuah partai. Mereka memiliki kemampuan untuk menggalang massa, ide, konsep, dan reputasi untuk membuat partai tandingan dengan nilai ideologi yang biasanya tidak berbeda jauh dengan partai sebelumnya.

Pemilih jenis ini harus '*manage*' sebaik mungkin oleh sebuah partai politik atau seorang kandidat. Pemilih memiliki kegiatan dan kemampuan untuk terus memperbaiki kinerja partai, sementara kemungkinan kekecewaan yang dapat berakhir ke frustrasi dan pembentukan partai politik tandingan juga besar. Apalagi ketika suatu negara menganut sistem multipartai, dimana negara selalu memfasilitasi berdirinya partai baru, hal ini semangkin memperbesar tekanan pada sebuah partai politik untuk memfasilitasi dialog antara pemilih dengan kebijakan partainya. Hal ini dilakukan untuk meringankan risiko negatif karena kekecewaan yang muncul. Disisi lain, kritikan mereka juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan sebuah partai politik.

c. Pemilih Tradisional

Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kandidat sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Kebijakan semisal ekonomi, kesejahteraan, pemerataan pendapatan dan pendidikan, dan pengurangan angka inflasi dianggap sebagai parameter kedua. Mereka tidak selalu memusingkan diri pada kebijakan apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan partai politik/kandidat yang mereka dukung. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan keperibadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang kandidat. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat kelulusan yang rendah dan sangat konservatif dalam memegang nilai serta paham yang dianut.

Pemilih tradisional adalah jenis pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye⁷¹. Loyalitas tinggi merupakan salah satu ciri khas yang paling kelihatan bagi pemilih jenis ini. Apa saja yang dicakup dan yang dikatakan oleh seorang *liard-er* politik merupakan sebuah kebenaran yang sulit dibantah. Ideologi dianggap sebagai suatu landasan dalam membuat suatu keputusan serta bertindak, dan terkadang kebenarannya tidak bisa diganggu gugat. Oleh sebab itu, apa saja yang diutarakan pemimpin politik dianggap sebagai petunjuk dalam bersikap dan bertindak. Meskipun ideologi, dalam hal ini, diasumsikan sulit sekali berubah, bukan berarti tidak dapat mengalami evolusi seiring dengan perjalanan waktu. Sehingga menjadi penting juga bagi partai politik atau kandidat untuk terus memupuk mitos, imajinasi, fantasi, dan paham sebuah partai politik, karena faktor-faktor tersebut yang menjadi parameter terpenting bagi jenis pemilih semacam ini.

Untuk Indonesia, pemilih model ini masih merupakan mayoritas. Secara umum, masyarakat masih berpegang pada

71 Rohrchneider, R., "Mobilizing versus chasing: how do parties target voters in election campaigns?" *Electoral Studies*, (21), 3, 2002, hlm. 367-382

idiologi, kendati terlihat gejala-gejala semakin berkurangnya antusiasme para pendukung yang fanatik terhadap suatu partai. Bengkoknya para pemimpin partai membuat para pemilih tradisional menjadi kritis. Dahulu mereka mudah sekali dimobilisasi (digerakkan) oleh para pemimpin. Sekarang juga masih mudah, tapi harus ada 'imbalan'. Mobilisasi politik di Indonesia saat ini diwarnai dengan uang. Dalam pawai kampanye, banyak sekali orang yang ikut terjun untuk partai apa pun karena mendapatkan bayaran.

d. Pemilih Skeptis

Pemilih keempat adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kandidat, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilihan model ini sangat kurang, karena ikatan ideologis mereka memang rendah sekali. Mereka juga kurang mempedulikan '*platform*' dan kebijakan sebuah partai politik. Golongan putih (golput) di Indonesia ataupun dimanapun sangat didominasi oleh jenis pemilih ini. Walaupun berpartisipasi dalam pemungutan suara, biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapa pun dan partai apapun yang memenangkan pemilu tidak dapat membawakan bangsa ke arah perbaikan yang mereka harapkan. Selain itu, mereka tidak memiliki ikatan emosional dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan.

Menjadi tanggung jawab bersama untuk memberikan kepercayaan bagi jenis pemilihan ini, karena pemilu dianggap sebagai salah satu pilar bagi berjalannya sebuah sistem demokrasi⁷². Legitimasi sebuah sistem demokrasi memerlukan ritual pemilu yang bersih dan beribawa. Akan timbul sebuah persoalan nasional ketika struktur pemilih didominasi oleh jenis pemilih skeptis.

Ketika terdapat banyak pemilih skeptis, meningkat pula keengganan pemilih untuk memberikan suaranya dan yang terjadi adalah tingginya angka golput. Tingginya angka gol-

⁷² Golder, M., Democratic electoral systems around the world, 1946-2000, "*Electoral Studies*, (24), 1, 2005, hlm. 103-121

put merupakan salah satu indikasi atas ketidakpercayaan masyarakat pada intruksi-intruksi politik di sebuah negara. Merekapun beranggapan bahwa proses pemilu yang akan memilih wakil-wakil mereka atau memilih presiden atau kepala daerah tidak akan dapat membawa ke perubahan yang berarti. Hal ini akan mengurangi legitimasi hasil pemilu dengan rendahnya angka partisipasi pemilih selama pemilu.

Dengan demikian, pihak-pihak yang kalah dapat mengklaim bahwa hasil pemilu tidak representatif. Stabilitas nasional (politik, ekonomi dan sosial-budaya) bisa terganggu. Jadi, adalah suatu kepentingan bersama (negara, LSM, partai politik, dan lembaga penyelenggara pemilu) bila dapat mengurangi jumlah pemilih yang skeptis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan beribawa melalui proses penegakan hukum yang benar, sehingga masyarakat melihat adanya sistem keadilan bagi semuanya.

3.3. Perilaku pemilih Dalam Pemberian Suara

Dengan dilengkapi berbagai agregat dan teknik kajian survei, para ilmuwan politik dan sarjana komunikasi telah mempelajari pola pemberian suara pada para pemilih bangsa Amerika selama beberapa dasawarsa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abram, diantara studi tertua mengenai pemberian suara banyak yang menerangkan perilaku dilihat dari segi sosiopsikologis, yaitu dengan menekankan pengaruh kelompok pada, dan kecenderungan (predisposisi) politik dari para pemilih⁷³. Studi yang diselenggarakan oleh Biro Penelitian sosial Terapan (Bureau of Applied Social Research, BASR) dari University Columbia mengemukakan kesimpulan bahwa pada hakekatnya, pemberian suara adalah pengalaman kelompok⁷⁴. Perangkat peneliti yang kedua, yaitu Pusat Penelitian Survei (Survey Research Center, SRC) dari University Michigan, menekankan faktor psikologis sebagai determinan pemberian suara, terutama sikap politik para pemberian suara yang menetap,

73 Robert, Abrams, *Some Conceptual Problems of Voting Theory*, Sage Publications, Beverly Hill, 1973

74 Paul, Lazarsfeld., *The People's Choice*, Columbia University Press, New York, 1944, hlm. 37; lihat juga Bernard Berelson., *Voting*, University of Chicago Press, Chicago, 1954.

termasuk ikatan afektif mereka kepada salah satu partai politik⁷⁵.

Baik studi BASR maupun SRC tidak memandang kampanye politik sebagai pengaruh yang sangat penting terhadap pemberian suara. Kesimpulan umumnya ialah bahwa orang yang paling banyak terpa komunikasi persuasif kampanye adalah yang paling cenderung telah sampai kepada putusan pemberian suara; yang paling besar kemungkinannya dipengaruhi oleh imbauan persuasif adalah yang paling sedikit minatnya terhadap politik dan, karena itu paling sedikit kemungkinannya memperhatikan komunikasi kampanye. Namun, pada tahun-tahun terakhir muncul trend ketiga dalam studi tentang pemberian suara, yaitu *perspektif revisionis* yang memberikan peran yang penting kepada komunikasi kampanye.

Studi-studi yang terbaru itu berfokus pada kegunaan dan pemuasan yang diberikan oleh media komunikasi kepada para pemilih. Mengapa orang memperhatikan kampanye, dan hubungan antara pengharapan pemilih terhadap pengaruh yang mungkin ada dan perilaku mereka yang nyata yang berbentuk pemberian suara.⁷⁶ Dari tradisi sosiopsikologis, psikologis, dan berorientasikan komunikasi dalam studi pemberian suara ini kita dapat menurunkan empat cara alternatif dalam memikirkan bagaimana pemberian suara bertindak. Perspektif ini membantu kita dalam merumuskan pandangan tentang pemberian suara sebagai tindakan komunikasi.

a. Pemberian Suara Rasional

Pemberian suara yang rasional pada hakekatnya aksional diri, yaitu sifat yang instrinsik pada setiap karakter personal pemberian suara yang turut memutuskan pemberian suara pada kebanyakan warga negara. Orang rasional : (1) selalu dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif; (2) memilih alternatif-alternatif sehingga masing-masing apakah lebih disukai, sama saja, atau lebih rendah bila diband-

⁷⁵ Lihat, Angus Campbell., *The Voter Decides*, Row, Peterson, Evanston, Ill., 1954, *The American Voter*, John Wiley and Sons, New York, 1960; dan *Election and the Political Order*, John Wiley and Sons, New York, 1966

⁷⁶ Lihat, Harold Mendelsohn dan Garret J. O'Keefe, *The People Choose a President*, Praeger Publishers, New York, 1976

ingkan dengan alternatif yang lain; (3) menyusun alternatif-alternatif dengan cara transitif : jika A lebih disukai daripada B, dan B daripada C, maka A lebih disukai daripada C; (4) selalu memilih alternatif yang peringkat preferensinya paling tinggi; (5) selalu mengambil putusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama.⁷⁷

Dengan penjelasan demikian, maka tindakan rasional itu terdiri atas perhitungan cara atau alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Apakah tujuan tindakan itu rasional, tidak dipermasalahkan; kita hanya berurusan dengan alat dan cara untuk mencapainya. Bila ditempatkan dalam arena politik, gagasan tentang tindakan rasional itu menetapkan persyaratan yang ketat untuk memberikan kualifikasi sebagai pemberian suara yang rasional. Pemberian suara yang rasional selalu dimotivasi untuk bertindak jika dihadapkan pada pilihan politik, berminat secara aktif terhadap politik sehingga memperoleh informasi cukup dan berpengetahuan tentang berbagai alternatif, berdiskusi tentang politik sebagai cara untuk mencapai suatu peringkat alternatif, dan bertindak berdasarkan prinsip, "bukan secara kebetulan, atau serampangan, atau impulsif, atau kebiasaan, melainkan berkenaan dengan standar yang tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan umum⁷⁸ dengan demikian, pemberian suara rasional yang bermotivasi diri, terinformasi, dan berprinsip itu bertindak secara konsisten dalam menghadapi tekanan dan kekuatan politik.

Studi tentang pemberian suara kepada konsepsi pemberian suara rasional dari perilaku dalam pilihannya benar-benar hampir mematikan. Berbagai survei tentang populasi yang telah berusia untuk memilih yang dilakukan pada tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, berulang kali mendokumentasikan bahwa perhatian pemilih kepada politik sedang-sedang saja, jarang termotivasi untuk memberikan suara.

77 Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy*, Harper and Row, New York, 1957

78 Berelson, *et al.*, *Voting*, hlm. 308-310

b. Pemberian Suara Reaktif

Gambaran tentang pemberian suara yang reaktif bukan gambaran yang bersifat memuji. Gambaran itu diturunkan dari asumsi fisikalistik bahwa manusia bereaksi terhadap stimulus dengan cara pasif dan terkondisi. Dalam kampanye politik, kandidat dan partai menyajikan isyarat yang menggerakkan para pemilih dengan memicu faktor-faktor jangka panjang yang menetapkan arah perilaku dalam memberikan suara.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, studi yang lama oleh BASR tentang pemberian suara memandang faktor-faktor sosial. Para peneliti mengumpulkan banyak sekali data yang mengesahkan tentang atribut sosial dan demografi yang berkorelasi dengan keputusan dalam pemberian suara. Ukuran kelas sosial termasuk pekerjaan, pendidikan dan pendapatan, usia, jantina, ras, agama, wilayah tempat tinggal, dan sebagainya⁷⁹ sebagai contoh pandangan bahwa pemberian suara beraksi terhadap pemilu berdasarkan faktor-faktor sosial dan demografi jangka panjang, yakni pemberian suara lagi-lagi merupakan saksi diri. Perhatian Indeks Predisposisi Politik, yaitu rumus dari salah satu studi yang paling dini tentang pemberian suara⁸⁰

Hal terpenting dalam pemberian suara reaktif ialah ikatan emosional kepada partai politik/kandidat. Dalam kompetisi suara yang mencapai yang dicapai perseorangan, partai politik merupakan agen pembentuk opini yang sangat penting. Studi-studi SRC mencirikan ikatan emosional kepada partai politik/kandidat sebagai 'identifikasi partai', yakni sumber utama aksi diri pemberi suara yang reaktif: "sekedar mengasosiasikan lambang partai" dengan nama kandidat "mendorong mereka yang mengidentifikasi diri dengan partai untuk mengembangkan citra yang lebih menguntungkan tentang catatan dan pengalamannya, kemampuannya, dan atribut perswonalnya". Oleh karena itu, identifikasi dengan partai meningkatkan tabir perseptual; melalui tabir tersebut individu melihat apa yang menguntungkan bagi orientasi kepartainya.

79 Lihat Seymour Martin Lipset, *Political Man*, Doubleday and Co., Garden City, N.Y., 1959

80 Lazarsfeld *et al.*, *The People's Choice*

Semakin kuat ikatan partai tersebut, semakin dibesar-besarkan proses seleksi dan distorsi persepsi⁸¹. Semakin banyak orang yang menamakan diri mereka independen dan bahkan mendemonstrasikan independen itu melalui meningkatnya pemberian suara "*split ticket*" (memberikan suara kepada kandidat lebih dari satu partai). Didorong oleh bukti bahwa sedang terjadi perubahan dalam politik pemilu, para pengamat merumuskan pandangan yang lain lagi tentang seperti apa pemberian suara yang semacam itu, maka pemberian suara semacam itu dinamakan pemberian suara responsif.

c. Pemberian Suara Responsif

Ilmuan politik Gerald Pomper membuat gambaran tentang pemberi suara yang responsif⁸² apabila karakter pemberian suara yang reaktif (yang oleh Poper disebut pemberi suara yang "dependen") tetap stabil, dan kekal, maka karakter pemberian suara yang responsif adalah impermanen, berubah mengikuti waktu, peristiwa politik, dan pengaruh yang berubah-ubah terhadap pilihan para pemberi suara. Ada perbedaan lain, tulisan Pomper, yang membedakan pemberi suara yang responsif dengan yang reaktif : (a) Meskipun pemberi suara yang responsif dipengaruhi oleh karakteristik sosial dan demografis mereka, pengaruh yang permanen ini tidak deterministik. Seperti dalam argumentasi Key dan Munger,⁸³ karakteristik ini bergerak keluar masuk wilayah yang mempunyai relevansi politik, dan karena itu menentukan preferensi politik, ciri ini menghadapi banyak sekali gesekan; (b) pemberian suara yang responsif juga memiliki kesetiaan kepada partai, tetapi afiliasi ini lagi-lagi tidak menentukan perilaku pemilih. Sebenarnya ikatan kepada partai lebih rasional ketimbang emosional. Sebab, dengan mengasosiasikan partai dengan isu, pemberi suara yang responsif secara rasional mengurangi ongkos partaisipasi perilaku pemilih. Apabila pemberi suara yang reaktif mengidentifikasi dirinya dengan partai sebagai pengganti

81 Campbell *et al.*, *The American Voter*, hlm. 128-133

82 Gerald Pomper, *Voter' Choice, Dodd, Mead and Co.*, New York, 1975, hlm. 7-12

83 V.O. Key, Jr., dan Frank Munger, "Social Determinism and Electoral Decision : The Case of Indiana", dalam Leugene Burdick dan Arthur Brodbeck, ed., *American Voting Behavior*, The Free Press, New York, 1959, hlm 297-298

untuk melakukan pertimbangan yang independen, maka identifikasi partai pada pemberian suara yang responsif membantunya dalam tugas membuat pilihan.; (c) pemberi suara yang responsif lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor jangka pendek yang penting dalam pemilu, ketimbang oleh kesetiaan jangka panjang kepada kelompok dan atau kepada partai.

Banyak warga negara yang menggantikan pilihan dari satu pemilu kepada pemilu lainnya, hal ini disebabkan fungsi dari posisinya terhadap isu dan sebagai penghargaan kepada kandidat. Pomper mengutip V.O Key, Jr., pemberian suara yang responsif "bukanlah gambaran tentang pemilih yang dibelenggu oleh determinasi sosial atau digerakkan oleh dorongan bawah sadar yang dipicu oleh propaganda, tetapi ia lebih merupakan gambaran tentang pemilih yang digerakkan oleh perhatiannya terhadap masalah pokok dan relevan tentang kebijakan umum, tentang prestasi pemerintah, dan tentang kepribadian eksekutif.⁸⁴ Bahagian yang dominan dari gambaran pomper tentang wajah pemberi suara yang responsif terdiri atas pilihan yang dapat dipilih oleh pemilih dalam setiap kampanye. Variasi stimulus yang diberikan oleh pimpinan politik, partai, dan kandidat sangat penting dalam pandangan pemberi suara karena tanggapan rakyat akan sangat dikondisikan oleh stimulus yang diberikan. Oleh karena itu perilaku pemberi suara bervariasi menurut karakter pilihan tersedia.⁸⁵

d. Pemberian Suara Aktif

Pemilih yang aktif adalah pemilih yang menghadapi dunia dengan menginterpretasikan dan diberi makna untuk bertindak bukan hanya lingkungan pilihan yang telah diatur sebelumnya. Isu kampanye politik yang membangkitkan tanggapan tidak dapat dianggap sama dalam pikiran orang. Ada yang memperhatikan kampanye dengan cermat, bahkan terbabit secara langsung, yang lainnya hanya melirik judul berita atau berita televisi, dan banyak juga yang tidak menghiraukannya. Demikianlah, orang memilih diri mereka dalam hubungannya

84 V.O. Key, Jr., *The Responsible Electorate*, The Belknap Press, Cambridge, Mass., 1966, hlm. 7-8; dikutip oleh Pomper, *Voter'Choice*, hlm. 10.

85 Pomper, *et al.*, hlm. 9

dengan apa yang diperhitungkan oleh mereka dalam kampanye, mereka mentransformasikan masukan yang tak bermakna menjadi lambang politik dengan makna yang tumbuh, yang tetap tidak berubah, yang mengecil, atau bahkan yang menghilang ketika mencapai berbagai sektor publik⁸⁶.

Bila dipandang seperti ini, maka isu, pilihan yang diberikan kepada pemberi suara dalam kampanye politik tidak lagi tetap atau terbagi merata keseluruhan pemilih ketimbang atribut sosial dan kecenderungan pemilih. Akan tetapi, isi komunikasi kampanye bervariasi dalam penyajian oleh media, banyak peristiwa yang sama dan menanggapi penyajian satu sama lain. Yang disajikan oleh media itu disaring dan diatur dengan berbagai cara dalam pengalaman orang, dengan banyak diantaranya yang dipilih dan digunakan dalam arena komunikasi lokal. Susunan proses komunikatif dianggap memberikan pengaruh yang nyata, yang dapat tetap dipisahkan dan diukur dengan beberapa kekuatan.⁸⁷

Jika disederhanakan kampanye politik mengambil bentuk dan memperoleh makna bagi pemberi suara melalui komunikasi. Keterlibatan pemberi suara tidak dibatasi, baik dalam mendaftarkan atribut dan atau sikap yang tetap maupun dalam menanggapi imbauan kampanye yang ditetapkan sebelumnya. Keterlibatan aktif mencakup orang yang menginterpretasikan peristiwa, isu, partai, dan personalitas, dengan demikian menetapkan dan menyusun maupun serangkaian pilihan yang diberikan. Para pemberi suara merumuskan citra tentang apa yang diperhitungkan oleh mereka, citra yang sangat bervariasi dan secara terus menerus. Dengan demikian pemberian suara adalah tindakan komunikasi.

3.4 Perilaku pemilih Dalam Pendekatan Ilmu Politik

Ada tiga pendekatan utama Ilmu Politik yakni : filsafat politik klasik [mashab tradisional], strukturalisme [termasuk analisis institusional dan structural – fungsional, dan behavioral.⁸⁸

86 Goegory, Casey, 'Popular Perceptions of Supreme Court Rulings:', *American Politics Quarterly*, 4 Januari 1976, hlm. 4-5

87 Herbert, Blumer, "Suggestions for the Study of Mass Media Effects, dalam Burdick dan Brodbeck, ed., *American Voting Behavior*, hlm.201.

88 Untuk analisa atas ketiga pendekatan ini, lihat David Apter dan Charles F.Andrian, ed.

Masing-masing pendekatan memusatkan perhatiannya pada variable-variabel personal dan situasional dengan mengabaikan variable lain. Dari ketiga pendekatan ilmu politik diatas yang paling berdampak langsung dalam kajian ini adalah pendekatan behavioral. Berikut ini akan diuraikan sedikit ketiga pendekatan ilmu politik tersebut.

Filsfat politik klasik merupakan orientasi yang paling tua di dalam ilmu politik. Bermula dari Yunani Kuno, orientasi ini masih berpengaruh sampai saat ini. Tidak semua filsuf politik memiliki pandangan yang sama terhadap masalah-masalah politik. Machiavelli dan Hobbes dalam hal-hal penting berbeda pandangan Plato dan Aristoteles. Bagi Plato dan Aristoteles teori politik bersifat deskriptif maupun preskriptif; teori politik harus memberikan gambaran dan menjelaskan mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dapat terjadi di dalam dunia politik, disamping memberikan resep mengenai tatanan politik yang ideal.⁸⁹ Walaupun Plato dan Aristoteles mencari pengetahuan dan kebijakan sebagai tujuannya, mereka menekankan perlunya pengetahuan tersebut memiliki relevansi politik praktis, agar dapat dilaksanakan. Keduanya memandang teori itu lebih tinggi (superior) ketimbang tindakan. Seperti halnya Plato percaya bahwa teori masih "riil" [tidak berubah, abadi, murni] ketimbang tindakan, demikian pula Aristoteles menegaskan bahwa berfikir tentang tujuan-tujuan akhir merupakan bentuk kegiatan yang lebih murni daripada berurusan dengan orang lain. meskipun demikian, Plato menunjukkan penilaian yang lebih rendah bagi dunia politik nyata dan merumuskan peranan yang lebih mulia bagi filsuf. Hanya filsuplah yang memiliki pengetahuan yang sesungguhnya mengenai bentuk-bentuk yang abadi, tidak berubah, dan ideal. Karena itu, filsuf mem-

Contemporary Analytical Theory (Englewood N.J.: Prentice Hall, 1972); David E.Apter dan Charles F. Andrian, : "Comperative Government: Developing New Nations." Dalam David E.Apter, *Political Change: Collected Essays* (London: Frank Cass, 1973), hlm.180-238; Heinz Eulau, *The behavioral Persuasion in politics* (New York: Random House, 1963) hlm. 38-109; David Easton, *A Framework for Political Analysis* (Englewood Cliff, N.J.: Prentice Hall, 1965, hlm.1-22; David Easton, "Political Science," *International Encyclopedia of social science*, vol.12, hlm. 289-291; Albert Somit dan Joseph Tanenhaus, *The Developmrrnt of Amerika Political Science* (Boston: Allyn and Bacon, 1967), hlm 176-183; Sheldon S. Wolin, "Political Theory Trends and Goals," *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol.12, hlm. 318-331.

89 Lihat, Charles F. Andrain, dalam Luqman Hakim, (terj), *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992. hlm. 420.

punyai tanggungjawab untuk merombak kembali dunia yang korup berdasarkan nilai-nilai ideal. Bila fiksuf telah menjadi raja maka akan berakhir ketegangan antara teoriwan politik dan praktisi politik, antara tindakan politik dan pengetahuan teoritis.⁹⁰

Ketika mengamati situasi politik, para filsuf politik klasik menolak kemungkinan pemisahan fakta dengan nilai. Mereka yakin bahwa kehidupan politik berkisar pada pilihan-pilihan moral; pelakunya harus memilih tujuan dan sasaran tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Pilihan-pilihan ini tidak hanya berasal dari soal kelayakan [pilih mana yang memungkinkan] tetapi juga dari soal buruk baiknya [pilihan-pilihan mana yang harus dicapai]. Karena itu, bagi seorang teoriwan politik klasik, pilihan-pilihan yang dihadapi pengamat politik, seperti yang dihadapi aktor politik, berlandaskan pada konsep-konsep abstrak mengenai hal-hal yang baik yang mengarahkan pemilihan data-data faktual.

Jika kalangan filsuf politik klasik menekankan pada fakta dan nilai maka, kalangan *institutional* seperti ilmuwan politik Inggris *James Bryce (1838-1922)*, di dalam riset mereka mengkombinasikan tujuan factual dengan tujuan moral. Mereka berusaha menggambarkan sejarah pertumbuhan Negara dan distribusi kekuasaan yang ada sekarang. Dengan memberikan gambaran yang sangat rinci mengenai struktur-struktur kongkret formal lembaga perundang-undangan, pengadilan, staf administrasi, dan sistem pemerintahan federal dan local, mereka yakin akan dapat memahami bagaimana bekerjanya suatu sistem politik.

Secara moral, golongan institusionalis ini juga menegaskan gagasan mereka tentang kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan oleh Negara, dengan menetapkan bahwa tujuan etis utama terpusat pada keperluan untuk mencegah pemusatan kekuasaan yang tidak semestinya. Pengawasan struktural dan legal atas kekuasaan adalah sarana untuk merealisasikan tu-

90 Terence Ball, *Theory and Practice: An Examination of the Platonic and Aristotelean Conceptions of Political Theory*, western Political Quaterly, 1972, hlm. 534-545.

juan tersebut⁹¹. Ilmuan politik yang belakangan berpaling dari lembaga-lembaga formal untuk mempelajari partai politik dan kelompok penekan tetap menganjurkan tujuan moral tersebut.

Meskipun mereka mengaku memiliki realisme yang lebih besar dalam analisa atas kekuasaan dan kekayaan, mereka juga dibimbing oleh suatu perspektif etis yakni bagaimana rakyat dapat merealisasikan demokrasi yang lebih besar di dalam suatu masyarakat yang mengaku mempunyai hokum-hukum dan lembaga-lembaga demokratis, sementara masih dikendalikan oleh kelompok kecil oligarkis yang bekerja dibelakang layar.

Di dalam model *Huntington*⁹², lembaga-lembaga politik yang kuat, terpadu, fleksibel, kompleks [tidak tergantung pada seseorang], dan bebas dari kelompok-kelompok sosial, memberikan ketertiban, sedangkan kelompok-kelompok sosial, jika tidak terkontrol dapat menimbulkan kekacauan, kerusuhan, dan instabilitas. Pandangan Huntington ini berbeda dengan orientasi golongan institusional. Sementara mereka menyamakan kepentingan umum dengan hukum yang lebih tinggi, yakni konstitusi, maka mereka menghubungkan kepentingan umum dengan “apapun yang memperkuat lembaga-lembaga pemerintah” jika mereka menerima kekangan hukum atas ekuasan eksekutif, maka mereka merasa keperluan akan perluasan sentralisasi kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan.

Dibandingkan dengan golongan institusional, para analisis structural-fungsional meremehkan tujuan-tujuan yang dikaitkan dengan kebijakan untuk memperjelas maksud-maksud analitis tertentu. Bagi mereka, tugas analitis yang paling pokok adalah mengkaji hubungan antara berbagai struktur masyarakat dan menunjuk kegiatan-kegiatan apa yang dijalankan oleh struktur dalam mempertahankan sistim social. Baik struktur maupun fungsi mempunyai makna yang berbeda. Sebagaimana diketahui struktur terdiri dua tipe yakni

91 Lihat, Albert Somit dan Joseph Tanenhaus, *The development of Amerika Political Science*, (Boston : Allyn and Bocon, 1967), hlm. 24

92 Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1968), hlm. 1-92, 397-461

kongkret dan analitis.⁹³ Struktur-struktur [pola-pola tindakan] dianggap mempunyai konsekuensi [fungsi-fungsi] yang menjurus pada stabilitas ataupun instabilitas.

Para ilmuwan politik menyelidiki ketegangan-ketegangan yang mengganggu hubungan struktur yang ada serta konsekuensi-konsekuensinya. Dalam hal ini, mereka menelaah kegunaan struktur analitis tertentu demi kelangsungan hidup, perubahan, dan kesejahteraan masyarakat, misalnya pengalokasian kekuasaan. Disamping menyelidiki juga bagaimana struktur-struktur kongkret tertentu, seperti pengadilan dan partai-partai politik. Demikian pula, dengan pemboleh ubah kajian ini yang merupakan struktur kongkret pada kegiatan yang sama seperti, individu yang ikut memilih, penyelenggara pemilu, masa kampanye, partai politik, para kandidat, semuanya dalam tingkat tertentu terlibat dalam pendidikan politik.

Karena itu para analisis structural-fungsional ingin menemukan hukum-hukum fungsi social, terutamanya dengan mengkaji interaksi antara berbagai struktur, kegiatan yang mereka jalankan dan konsekuensi-konsekuensinya bagi penyelenggaraan sistem social.⁹⁴ Sejalan dengan orientasi analitis mereka, golongan structural-fungsional tidak menekankan masalah kebijakan Negara. Bagi mereka, pemahaman adalah tujuan akhir itu sendiri. Bahasa mereka mengekspresikan bukannya keinginan moral dari aktor politik melainkan nilai-nilai yang berkaitan dengan ketakacuhan, kendali emosional, impersonalitas, dan universalisme.⁹⁵

Meskipun begitu, orientasi teoritis mempengaruhi pemahaman mereka mengenai proses kebijakan. Jika analisis institusional bermula dari studi mengenai Negara, yang menyatakan gagasan Negara yang otonom dari masyarakat. sedangkan

93 Untuk suatu perbedaan antara struktur analitis dan kongkret, lihat Marion J. Levy Jr., *Modernization and the Structure of Societies* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1968) hlm. 175.

94 Untuk analisis kritis atas pendekatan structural-fungsional, lihat A.R. Radcliffe Brown, "On the Concept of Function in Social Science," *American Anthropologist*, 37 (Juli-September 1935), 394-402; Pierre van den Berghe, "Dialectic and Functionalism," *American Sociological Review*, 28 (October 1963), 695-705; Marion J. Levy., "Structural-Functional Analysis," *International Encyclopedia of Social Science*, vol 6 hlm.21-28; Arthur L., Stinchcombe, *Constructing Social Theories* (New York: Harcourt Brace, and World, 1968) hlm. 80-93.

95 William C. Mithcell, *Sociological Analysis and Politics: The Theories of Talcott Parsons* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1967), Hlm. 173.

struktural-fungsional mulai dengan studi antropologis mengenai komunitas-komunitas kecil yang tidak bernegara, menemukan adanya aspek politik yang tersimpan dalam aspek sosial.

Tidak seperti golongan institusional yang menitikberatkan pada data dengan mengorbankan teori atau golongan struktural-fungsionalis, yang menguraikan kerangka-kerangka konseptual yang abstrak tanpa menghubungkan dengan bukti kongkret, para ilmuwan behavioral telah berusaha menggunakan teori sebagai suatu sarana untuk menjelaskan dan memperdiksi kegiatan-kegiatan politik. Penjelasan menjadi lebih penting daripada semata-mata deskripsi mengenai peristiwa-peristiwa.

Jika suatu pernyataan deskriptif menunjuk pada kondisi-kondisi yang agak spesifik, maka suatu generalisasi penjelasan menyatakan suatu hubungan antara sejumlah variable [sifat-sifat analitis yang disimpulkan dari kegiatan-kegiatan yang diamati]. Sebaliknya, suatu prediksi menyatakan bahwa kondisi spesifik atau hubungan umum akan terjadi pada beberapa waktu yang akan datang.⁹⁶ Perhatian pemboleh ubah yang dihubungkan dengan perilaku pemilih menggambarkan suatu pernyataan deskriptif. Pemboleh ubah apa yang menjelaskan perilaku pemilih spesifik ini? Ilmuwan behavioral menelaah faktor-faktor tertentu seperti status pekerjaan, kuatnya identifikasi partai, sikap-sikap terhadap persamaan rasial, pendapat-pendapat tentang peranan yang cocok bagi pemerintah di dalam perekonomian, dan derajat komitmen terhadap keyakinan-keyakinan agama.

Generalisasi-generalisasi yang dibuat oleh para ilmuwan behavior adalah pernyataan-pernyataan probabilitas. Mereka menyatakan bahwa jika terdapat kondisi-kondisi tertentu, maka konsekuensi-konsekuensi tertentu mungkin juga akan terjadi. Manakala ilmuwan-ilmuan behavior di dalam studi mereka menyadari bahwa generalisasi-generalisasi teoritis mereka bersifat parsial dan sementara, bukannya pasti atau absolut. Menurut salah seorang ilmuwan behavior, *Edward L. Welker*, hubungan antara teori dan tindakan dapat dianalogikan dengan

96 Lihat, Morris Zelditch Jr., "Intelligible Comparisons," dalam Ivan Vallier, ed. *Comparative Methods in Sociology* (Berkeley, Calif.: The University of California Press, 1971), hlm. 270.

bunga-bunga yang sedang tumbuh.⁹⁷ Riset teoritis menyerupai akar, sementara riset yang ditujukan pada masalah-masalah kongkret menyerupai bunganya. Seperti halnya bunga membutuhkan landasan yang kuat pada akar, maka tindakan-tindakan yang dikaitkan dengan kebijakan memerlukan landasan teoritis. Sebagaimana dinyatakan oleh Welker, “riset akar juga harus memenuhi criteria relevansi social, terlalu banyak memberikan perhatian pada masalah praktis yang dekat boleh dengan mudah melupakan akar-akarnya dan arena itu dapat mematikan tananam.”⁹⁸

Dengan demikian, maka teori politik behavior mempunyai relevansi langsung bagi penyelesaian masalah-masalah sosial. Ilmuan behavior dapat memainkan suatu peranan dalam proses kebijakan dengan memberikan informasi tentang alternatif-alternatif yang tersedia kepada pembuat keputusan politik, termasuk keputusan politik pemilih dalam mencoplos calon Kepala Daerah.

Dari uraian ke tiga pendekatan ilmu politik diatas, dapat dirangkumkan dalam suatu yang memberikan ringkasan tentang ketiga pendekatan berdasarkan teori dan metode-metode sebagai berikut

SUBJEK	FILSAPAT POLITIK KLASIK	STRUKTURALISME		ILMU BEHAVIORAL
		ANALISA INSTITUSIONAL	ANALISA STRUKTURAL-FUNGSIONAL	
Tujuan Teori	Mendeskripsikan dan menjelaskan peristiwa dalam politik; merumuskan tatanan politik yang dicita-citakan	Menjelaskan sejarah pertumbuhan Negara dan distribusi kekuasaan; menjelaskan jalannya lembaga-lembaga pemerintah; mengevaluasi kegiatan lembaga tersebut.	Mengkaji hubungan antara struktur social yang berbeda; menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh struktur tersebut; memastikan konsekuensi fungsional untuk mempertahankan sistim social	Menjelaskan dan meramalkan tingkah laku politik

97 Lihat, Charles F. Andrain., *Op.,cit*, hlm. 435

98 Edward L., Walker, “*Relevant Psycology is a Snark*” *American Psycologist*, 25 (December, 1970), 1085-1086. untuk pandangan yang sama oleh seorang ilmuan politis, lihat David Easton, *The Political Sistim*, ed, 2 (New York: Alfred A. Knopf, 1971) hlm. 369-372.

Hubungan Teori dengan tindakan	Pengetahuan adalah tujuan akhir dari pengusutan teoritis, tetapi pengetahuan ini harus diterapkan. Para filsuf perlu memberikan nasehat umum kepada para pengusaha	ilmu politik harus mempunyai focus kebijakan, merekomendasikan sasaran-sasaran bagi pemimpin politik, dan menyarankan metode-metode untuk tujuan tersebut	Pemusatan perhatian pada kebijakan tidak ditekankan, melainkan memahami berlakunya hukum-hukum secara social adalah tujuan utama.	Pengetahuan teoritis mengenai tingkah laku politik adalah tujuan utama karena generalisasi bersifat parsial dan sementara, ada bahaya dalam menerapkan pengetahuan bagi masalah praktis yang langsung. Riset terapan harus memenuhi landasan teoritis yang mauk akal.
Metode-metode untuk mengamati dunia	Nilai-nilai pengamat dan pengamatan factual tidak dapat dipisahkan; keduanya jalin menjalin dalam kehidupan politik yang berkaitan dengan pilihan moral	Nilai-nilai pengamat tidak dapat dipisahkan dari pengamatan factual	Pengamat dapat tetap mengambil jarak dan impersonal ketika melihat dunia politik	Nilai-nilai personal dan pengamatan empiris secara analisis harus tetap dapat dibedakan, ilmuian harus mengontrol kecondongan pribadi dari pengamat
Metode-metode untuk merekam dan menganalisa data	Tidak ada teknis kuantitatif yang eksplisit; menekankan pada penilaian dokumen dan pengamatan informasi atas peristiwa politik	Metode kualitatif; membaca konstitusi, mempelajari prosedur-prosedur legislatif, terlibat dalam pengamatan yang tidak sistematis	Menggunakan metode kualitatif dimasa lalu, menggunakan lebih banyak teknik kuantitatif di masa yang akan datang.	Metode-metode kuantitatif, eksplisit, dan berhati-hati, menggunakan kebiasaan-kebiasaan statistic.

Dalam kajian politik, khususnya yang menyangkut perilaku pemilih dalam berpolitik, dikenal adanya dua model⁹⁹, pertama aliran *Columbia School* yang memandang bahwa status sosial ekonomi, aliran ini sangat percaya bahwa nilai-nilai kelompok akan sangat mempengaruhi perilaku pemilih. Kedua aliran *Michigan School*, aliran ini mengatakan bahwa memilih adalah hak individu, indentitas ke partai dijadikan dasar untuk menentukan pilihan.

a. Pendekatan sosiologis atau *social structural*

Pendekatan sosialogis atau lebih tepatnya pendekatan *social structural* untuk menerangkan perilaku pemilih pada pemilih, secara logis terbagi atas model mikrososiologis dan model makrososiologis. Model penjelasan mikrososiologis senantiasa

⁹⁹ Lihat, Dua Tradisi, dalam Riswandha Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997, hal, 93.

dikaitkan dengan sosiolog Paul F. Lazarsfeld dan rekan sekerjanya Bernard Berelson dan Hazel Gaudet dari Columbia University, oleh karena itu model ini juga disebut mazhab Colombia [Colombia School]. Model penjelasan makrososial dari Seymour Martin Lipset dan Stein Rokkan didasarkan atas pengamatan perilaku pemilu diseluruh tingkatan atau lapisan masyarakat secara keseluruhan, hal mana pada akhirnya menjadikan suatu penjelasan mengenai terbentuknya sisten partai di Eropa Barat¹⁰⁰

Dasar model penjelasan mikrososiologis berasal dari teori lingkaran social yang diformulasikan oleh Georg Simmel¹⁰¹ pada akhir abad lalu. Menurut teori ini, setiap manusia terkait didalam berbagai lingkaran social, contohnya keluarga, lingkaran teman-teman, tempat kerja dan sebagainya. Paul F. Lazarsfeld¹⁰² menerapkan cara pikir ini kepada para pemilih. Seorang pemilih hidup dalam kontek tertentu : status ekonominya, agamanya, tempat tinggalnya, pekerjaannya dan usianya mendefinisikan lingkaran social yang mempengaruhi putusan sang pemilih. Setiap lingkaran social memiliki norma tersendiri, kepatuhan terhadap norma-norma tersebut menghasilkan integrasi. Namun konteks ini turut mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar sang individu menyesuaikan diri, sebab pada dasarnya setiap orang ingin hidup dengan tentram, tanpa bersitegang dengan lingkaran sosialnya¹⁰³

Secara empiris, Paul Lazarsfeld et al. mendasarkan teorinya atas pemikiran segi geografis pemilu dari Andre Siegfried¹⁰⁴ dan juga atas dasar penelitian dari Rice¹⁰⁵. Melalui studinya Rice menemukan bahwa ide-ide politis berkembang paling cepat sepanjang jalur transportasi/lalu lintas terbesar. Dasar empiris peneliti-peneliti ini sendiri berasal dari sebuah studi panel tersohor yang diadakan di Erie County di negara bagian Ohio.

100Lihat, Prof. Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris*, Lembaga Survei Indonesia, Jakarta Friedrich-Naumann-Stiftung Fur die Freiheit, 2008, hal 23-24

101 Lihat, Georg Simmel dalam Dieter Roth, *ibid*, hal 24

102Paul F. Lazarsfeld; Bernard Berelson; Hazel Gaudet, : *The People's Choice. How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign*. New York, 1968

103*Ibid*, hal 148

104Andre, Siegfried, 1913-1949, *Tableau politique de La France de l'Ouest sous La Troisieme Republique*, Paris: Aemand Colin.

105Stuart A Rice, 1928, *Quantitative Methods in Politics*, New York

Studi penel ini diadakan sepanjang berlangsungnya kampanye pemilihan presiden pada tahun 1940. dalam studi ini, 600 warga Erie County yang memiliki hak suara dipilih berdasarkan sistem kuota, dan kemudian diwawancara sebanyak tujuh kali dalam kurun waktu Mei sampai November. Distrik Erie dipilih untuk studi ini karena samapai saat studi tersebut dilangsungkan, hasil pemilu presiden di Erie hanya sedikit saja menyimpang dari hasil pemilu nasional. Bagaimanapun juga *Colombia School* paham bahwa tidak ada suatu "stereotip county America", dan oleh karenanya hasil studi di Erie County tidak dapat dijadikan dasar bagi kesimpulan umum yang berlaku bagi seluruh Amerika (Lazarfeld et al. 1968).

Maksud awal para peneliti pemilu yang mengacu kepada Lazarsfeld adalah untuk meneliti perubahan pandangan politis dan motif mengikuti pemilu selama kampanye pemilu pemilihan presiden. Untuk memenuhi tujuan ini, para responden yang merubah pandangan politis dan partai pilihannya selama kampanye diperbandingkan dengan kelompok responden lain yang jauh lebih besar, yaitu kelompok konstan secara politis. Baik kelompok responden pertama ("suka berubah") maupun kelompok kedua ("konstan") menunjukkan tedensi yang sama: pihak-pihak yang berasal dari kelompok sosial tertentu memiliki sikap politis yang cukup homogen. Hal ini terutama dapat dibuktikan dalam perilaku pemilu : memberikan suara dalam pemilu pada dasarnya adalah suatu pengalaman kelompok ("*voting is essentially a group experience*")¹⁰⁶. Perubahan perilaku pemilu seseorang cenderung mengikuti arah predisposisi politis lingkungan sosial individu tersebut. Pengaruh terbesar berasal dari keluarga dan lingkungan rekan/sahabat erat individu terkait. Menurut pandangan peneliti-peneliti dalam studi ini, sebelum pemilu diadakan, masing-masing anggota diikat kepada predisposisi kelompoknya. ("*thus are party voters born*",¹⁰⁷

Untuk menggaris bawahi fakta bahwa determinasi perilaku pemilu seseorang berkenaan dengan kelompok sosial dari mana individu tersebut berasal, *Colombia School* mengem-

106 Ibid, 137

107 Ibid, 142

bangkan suatu indeks predisposisi politis, yang memiliki nilai perkiraan yang tinggi. Pada akhirnya, indeks ini hanya terdiri atas kombinasi dari tiga faktor : status sosioekonomis, agama dan daerah tempat tinggal. Berdasarkan tingginya relasi antara predisposisi politis sesuai struktur sosial dan keputusan yang diambil berkenaan dengan pemilu, para peneliti sampai pada suatu kesimpulan yang sering dikutip : seseorang berpikir politis sebagaimana ia berpikir secara sosial. Karakteristika sosial menentukan kecendrungan politis. (*"A person thinks politically as he is socially. Social characteristics determine political preference"*)¹⁰⁸.

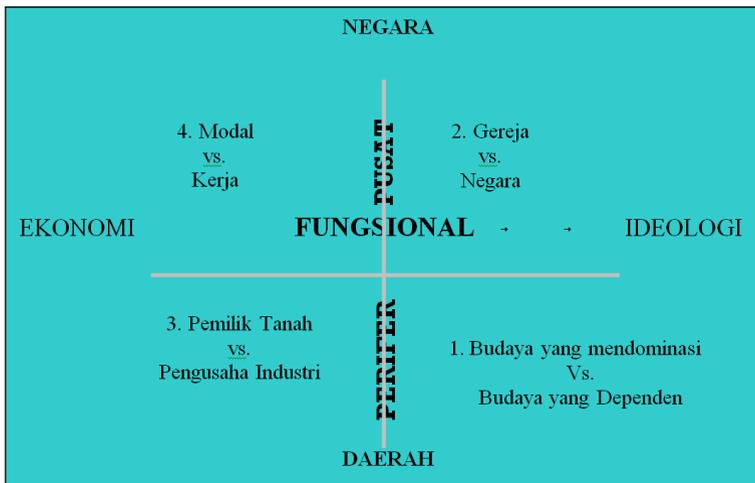
Studi empiris lebih lanjut dari Barelson et al. (1954) membuktikan bahwa tiap orang berusaha untuk mempertahankan homogenitas lingkungan sosialnya demi menghindari konflik. Para penulis ini bahkan berpendapat mereka berhasil menemukan suatu dasar bagi fakta bahwa individu memilih teman-teman dan rekan dengan pandangan politis yang kurang lebih sama. Pada akhirnya hal ini membawa konsekuensi bahwa kandidat yang diunggulkan akan dihubungkan dengan titik-titik tolak pandangan tertentu yang dirasa sesuai, sementara informasi politis hanya diterima secara selektif agar keharmonisan yang ada tetap terjaga. Melalui formulasi ini Barelson telah mandahului Festinger dengan teori disonansi kongnitifnya, yang baru dirumuskan pada tahun 1957

Homogenitas lingkungan sosial seperti yang diusulkan *colombia school* jarang ditemukan dalam masyarakat modern karena masyarakat ini memiliki mobilitas ruang dan sosial yang kuat, hal mana pada akhirnya kecendrungan mengakibatkan putus/hilangnya hubungan-hubungan yang ada. Keterkaitan individu dengan beberapa medan kekuatan sosial (yang kadang juga saling bertentangan satu sama lain) disebut *cross pressure*. Inkonsistensi seperti ini sekurang-kurangnya dapat menyebabkan seseorang menunda keputusan dalam pemilu, namun juga dapat membuat seseorang menghindari pemilu dan berpengaruh terhadap kemunduran ketertarikan politik individu yang bersangkutan. Dalam studi-studi *Colombia School berikutnya*, pengaruh predisposisi politis dan situasi *cross pres-*

¹⁰⁸ Ibid, 27

sure terus menerus kembali terbukti. Penggunaan model ini dinegara-negara lain termasuk Jerman kembali menunjukkan pengaruh kuat dari faktor-faktor/ciri-ciri struktur sosial terhadap perilaku politis seseorang, hal mana tetap sah hingga kini. Kritik terhadap mazhab Colombia menyangkut fakta bahwa para penulisnya tidak menawarkan penjelasan konkrit atas pengamatan mereka¹⁰⁹. Tuduhan semacam ini tidak dapat dilakukan terhadap model konflik dari Lipset dan Rokkan.

Model penjelasan makrososiologis dari Lipset dan Rokkan mengacu kepada konflik-konflik mendasar yang bisa muncul di masyarakat, yang kesetimbangannya perlu dipertahankan dalam sebuah demokrasi. Para penulis mengacu pada klasifikasi sistem sosial dari Talcott Parson. Menurut teori Parson, sistem-sistem kemasayarakatan memiliki dimensi fungsional dan teritorial hal mana dapat ditampilkan dalam bentuk skema dengan empat medan dan proses diantaranya (*lihat gambar 2.1*). Pada proses teritorial, negara (pusat) diperhadapkan dengan daerah (bidang pinggiran/perifer). Proses fungsional dibentuk oleh ekonomi di satu sisi dan ideologi di sisi lainnya¹¹⁰



gambar 3.4 : Model Garis Konflik menurut Lipset dan Rokkan

¹⁰⁹Falter, Jürgen W/Siegfried Schumann/Jürgen Winkler, 1990, *Erklärungsmodelle von Wahlverhalten*, APuZ 37-38, hal 3 - 13

¹¹⁰Lipset, Seymour M/Stein Rokkan, 1967, *Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments*, dalam : Party systems and Voter Alignments : Cross-National Perspectives, New York/London, hal 1-64

Konflik stereotip ideal menurut model ini adalah konflik mengenai kontrol atas sistem politis pada sisi atas poros teritorial, oposisi lokal melawan elit nasional yang dominan di sisi bawah poros teritorial, konflik ekonomi berkenaan dengan sumber daya, produksi dan laba di sisi kiri poros fungsional, serta konflik kawan-kawan pada sisi kanan poros fungsional¹¹¹. Bagi Lipset dan Rokkan, konflik teritorial merupakan hasil pembentukan negara-negara Eropa pada abad 18 dan 19. dari segi waktu. Konflik-konflik ini muncul terlebih dahulu dibandingkan konflik fungsional, yang merupakan produk revolusi industri pada abad 19.

Menurut Lipset dan Rokkan, sejarah Eropa sejak awal abad 19 dapat dilihat sebagai dampak hubungan timbal balik antara dua perubahan revolusioner sebagaimana diterangkan diatas. Seperti yang telah dikemukakan oleh Stein Rokkan pada tahun 1980, maka pengenalan pertama yang penting adalah fakta bahwa perpecahan /perpisahan mendasar yang dapat ditemukan di segenap lapisan masyarakat Eropa, menyediakan dasar bagi pembentukan sistem partai nasional dengan cara dan kombinasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu diusahakan untuk menemukan suatu model yang berlaku umum, yang memungkinkan adanya transisi dari "struktur pemisahan atas sistem partai-partai sampai kepada pembagian perilaku individu"¹¹²

Empat macam pemisahan mendasar (selanjutnya disebut *cleavages* atau garis konflik) dapat dibahas lebih lanjut. Dua *cleavages* dominan dibidang budaya/ideologi, dua lainnya dominan di bidang ekonomi. kesemuanya merupakan pernyataan protes terhadap elit nasional yang telah memiliki kedudukan yang mapan beserta hegemoni budaya mereka. *Cleavages* ini sekaligus mewakili gelombang partisipasi dan mobilisasi yang meluas¹¹³. Di sini terdapat tendensi bahwa dimasing-masing dua sisi skema dengan empat medan terlihat pemisahan menuju pusat poros teritorial, pemisahan lainnya menuju daerah perifer. Empat konflik utama tersebut adalah :

111Ibid, hal 10

112 Rokan, Stein, 1980, Eine familie von Modellen fur die vergleichende Geschichte Europas, Zeitschrift fur Soziologie, hal 120

113 Lipset/Rokkan, at al, hal 23

1. Konflik antara kelompok elit pusat yang berkuasa dan kelompok masyarakat di daerah yang tergantung secara etnis, bahasa atau keagamaan.
2. Konflik antara tuntutan atas kekuasaan sekuler negara dan *privileg* Gereja yang diperoleh secara historis
3. Konflik antara kepentingan agraris dan industri komersial
4. Konflik antara kelompok masyarakat berada dan kaum pekerja.

Dengan menggunakan definisi Weber mengenai "kelas" konflik di sisi ekonomi pada poros fungsional dapat didefinisikan sebagai konflik kelas pekerja. Konflik ini terjadi antara pengusaha dan kelompok yang tergantung pada pemberi kerja atau juga konflik kelas pemilik, yaitu antara sektor primer dan sekunder¹¹⁴

Partai-partai muncul seiring dengan ketegangan yang timbul karena proses modernisasi masyarakat industri barat sejak pertengahan abad 19. sejarah terbentuknya partai harus digambarkan sebagai berikut : individu-individu yang terlibat dalam konflik kemasyarakatan membentuk kelompok berdasarkan persamaan kepentingan. Kelompok ini mencari partner agar mampu mengartikulasikan diri dan mencapai tujuannya di berbagai tingkat pengambilan keputusan politik, terutama di tingkat nasional. Partner tersebut adalah elit partai yang dalam fase mobilisasi membentuk koalisi dengan partner pihak lawan demi memperoleh kekuasaan¹¹⁵.

Karena deskripsi konflik diatas hanya mencakup beberapa pertentangan mendasar dalam masyarakat, jumlah partai yang terbentuk sedikit sementara jangka waktu koalisi dengan kelompok makrososial tinggi. Hal ini menjelaskan tingginya persistensi sistem partai barat dan ruang gerak yang terbatas bagi pendirian partai baru. Selain itu partai baru menghadapi rintangan-rintangan tambahan yang berasal dari imanensi sistem, rintangan-rintangan mana yang sebenarnya hanya dapat diatasi dalam masa revolusi. Partai baru harus membuk-

114 Emmer, Thomas/Dieter Roth, 1995, *Zur wahlsoziologisschen Bedeutung eines Modells sozialstrukturell verankerter Konfliktlinien im vereinten Deutsch land*, Historical Social Reseach, hal 123

115 Pappi, Franz U, 1977, *Sozialstruktur, gesellschaftliche Wertorientierungen und Wahlabsicht*, PVS 18, hal 195

tikan pada calon pemilihnya :

- bahwa kritik yang diartikulasikan sudah pada tempatnya dan tidak hanya dipandang sebagai protes persengkokolan yang dapat diabaikan begitu saja oleh pemerintah (ambang legitimasi)
- bahwa mereka mampu mencapai status yang mampu memberikan mereka posisi dan kesempatan yang sama kuat dalam berkonfrontasi dengan pihak lain (ambang integrasi)
- bahwa mereka sendiri cukup kuat untuk memberi pengaruh di tingkat pengambil keputusan politis tanpa harus bergabung dengan kelompok-kelompok yang telah ada terlebih dahulu (ambang representasi)
- bahwa mereka mampu memenuhi ketentuan mengenai suara mayoritas, yang juga berarti bahwa kesuksesan mereka dalam pemilu harus cukup kuat agar mereka dapat menimbulkan perubahan struktural yang cukup besar dalam sistem nasional (ambang mayoritas).

Selain batasan yang dikemukakan Lipset dan Rokkan¹¹⁶, yang juga digunakan oleh mereka dalam menyatakan tipologi persyaratan bagi perkembangan sistem kepartaian, pada umumnya masih ada rintangan dalam peraturan perundang-undangan pemilu nasional yang masih sulit diatasi oleh partai-partai baru. Hal-hal ini misalnya berupa sistem pemilu proporsional ataupun mayoritas, ambang batas pemilu (di Jerman sebesar 5%), atau proses perhitungan suara lainnya dalam menentukan perolehan jumlah kursi di parlemen yang menyimpang dari prinsip representatif.

Tentu saja "partai-partai yang lama" dapat bereaksi terhadap kritik ataupun tuntutan jaman, sehingga pembentukan partai-partai baru tidak lagi dibutuhkan. Namun biasanya partai-partai yang sudah mapan justru tidak bereaksi seperti ini. Seperti yang sudah seringkali terbukti, organisasi-organisasi seperti ini sangatlah kaku dan pada dasarnya tidak fleksibel baik secara struktural maupun personal.

116 Lipset dan Rokkan, at al, hal 27

Dengan demikian sistem-sistem partai di negara-negara industri Barat menunjukkan duarabilitas yang tinggi, yang diistilahkan Lipset dan Rokkan sebagai suatu sistem partai yang beku. Oleh karena itu sistem-sistem partai tahun enam puluhan tetap dapat mencerminkan garis-garis konflik tahun dua puluhan, dengan sedikit pengecualian¹¹⁷

Cikal bakal konflik-konflik keagamaan dapat ditelusuri kembali sampai kepada masa reformasi. Beberapa setelah negara nasional Jerman terbentuk, maka konflik budaya di daerah kekaisaran Jerman antara Bismarck dan Katolisme semakin meruncing, konflik mana semakin memperkuat posisi politik kaum katolik. Namun situasi ini berubah total sejak Perang Dunia II berakhir. Oleh karena banyaknya migran dari daerah Timur maka komposisi umat beragama mengalami banyak perubahan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Partai-partai Union yang baru terbentuk cenderung memandang diri mereka sebagai partai yang berorientasi Kristen Protestan, dan bukan sebagai wakil dari "sosialisme katolik". Dengan demikian, CDU sebagai partai rakyat Kristen justru sengaja mendekati warga negara Jerman yang memeluk agama Kristen Protestan.¹¹⁸

Berangkat dari garis konflik konfesional yang pada awalnya ditemui antar umat katolik dan protestan, berkembanglah sebuah garis konflik religius¹¹⁹ yakni konflik antar pemilih yang berorientasi religius atau terikat pada Gereja dengan para pemilih yang tidak religius atau kurang memiliki ikatan keagamaan. Hingga pemilu-pemilu terakhir di Jerman, garis konflik religius ini tetap menunjukkan stabilitas yang tinggi.

Model *lifestyle*/gaya hidup yang berasal dari survey pasar dan konsumsi yang diadakan awal tahun delapan puluhan, kini juga mulai ditawarkan sebagai dasar pemikiran dalam menjelaskan perilaku pemilu¹²⁰ Dengan berkurangnya ika-

117 Ibid hal 50

118 Mielke, Gerd, Des Kirchturms langer Schatten, dalam : Landeszentrale Fur Politische Bildung, penerbit Wahlverhalten, Stuttgart,1991, hal 139-165

119 Pappi, franz U, Die konfessionell-regiose Konfliktlinie in der deutschen Wahlerschaft-Entstehung, Stabilitat und Wandel, dalam : Oberndorfer, Dieter et al. penerbit : Wirtschaftlicher Wandel, religioser Wandel und Wertwandel. Folgen fur das politische Verhalten in der Bundesrepublik Deutschland, Berlin, 1985, hal, 265-290

120 Eith, Ulrich/Gerd Mielke : Wahlforschung, : Zur Bedeutung und Methodik empirischer Sozialwissenschaft in der Politikwissenschaft, dalam : Mols, Manfred, penerbit :

tan-ikatan kelompok masyarakat yang besar seperti serikat dan gereja, makna pendekatan sosial struktural dalam menjelaskan perilaku pemilu juga semakin melemah. Sebagai kompensasi, dicarilah ikatan-ikatan subyektif yang baru terhadap kelompok-kelompok *lifestyle* tertentu. Upaya ini memang patut dihargai, namun bagi analisa pemilu, pemahaman yang diperoleh atas ikatan kelompok yang tercipta ini tetap kurang berarti. sehingga kini cukup ditarik kesimpulan bahwa model gaya hidup tersebut hanya dapat dinilai sebagai upaya untuk mengadakan pendekatan konsepsional terhadap perubahan masyarakat yang ada sebuah model sosial struktural yang subyektif.

Determinan sosial struktural dari perilaku pemilu masih dapat diamati secara jelas hingga hari ini, bahkan dalam masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi seperti di Republik Federal Jerman pada masa sekarang. Sepanjang sejarah Jerman, ketajaman garis batas masyarakat yang memisahkan antara modal/kerja dan religius/tidak religius, hampir tidak berkurang. Namun *melieu* (lingkungan) spesifik, dimana ikatan-ikatan tersebut berakar telah jauh bertambah kecil.

Biasanya penilaian status sosial struktural dilakukan dengan melihat keaggotaan seseorang dalam berbagai kelompok profesi yang ada. Sejak pendirian Republik Federal Jerman, kelompok-kelompok profesi ini banyak mengalami perubahan. Awal tahun limapuluhan, kelompok profesi yang mendominasi adalah pekerja (51%), sementara pada tahun 2005 yang mendominasi adalah karyawan dan pegawai negeri (57%), kelompok pada tahun 1950 besarnya hanya 21%. Awal abad ke-21 jumlah pekerja hanya mencakup 33% dari semua tenaga kerja yang ada, sementara jumlah orang yang berwiraswasta, yang pada tahun limapuluhan masih mencakup 28%, kini telah menurun hingga 11%. Perubahan struktur besar-besaran semacam ini tentu membawa perubahan ke dalam hasil pemilu.¹²¹

Politikwissenschaft : eine Einfuhrung, Munchen, 1994, hal 278-306

121 Dieter Roth, (Penterj) Denise Matindas, (ed) Dodi Ambardi, *Studi Pemilu Empiris* : sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode, Lembaga Survei Indonesia, 2008, hal 31-32

Apabila ditinjau secara keseluruhan, maka pendekatan sosial struktural dapat memberi penjelasan yang sangat baik mengenai perilaku pemilu yang konstan. Hal ini disebabkan baik karena kerangka struktural bagi masing-masing individu hanya berubah secara perlahan-lahan, maupun karena sistem partai yang adamemiliki stabilitas yang tinggi, hal mana dipengaruhi oleh adanya konflik dasar yang sama secara terus-menerus. Namun teori sosial struktural tetap tidak dapat memberi penjelasan mengenai penyebab pindahnya seorang individu kepada partai lain.

b. Pendekatan Sosial Psikologis

Dua pendekatan terdahulu menempatkan pemilih pada waktu dan ruang kosong baik secara implisit maupun eksplisit. Pemilih ibarat wayang yang tidak mempunyai kehendak bebas kecuali atas kemauan dalangnya. Pemilih seakan-akan pion catur yang mudah ditebak langkah-langkahnya. Mereka beranggapan bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika ada di bilik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelum kampanye dimulai. Karakteristik sosiologis, latar belakang keluarga, pembelahan kultural atau identifikasi partai melalui proses sosialisasi dan pengalaman hidup, merupakan variabel yang secara sendiri-sendiri maupun komplementer mempengaruhi perilaku atau pilihan politik seseorang.

Tetapi pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bias saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang.¹²² Hal ini berarti menunjukkan bahwa ada variabel-variabel lain yang ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu. Dengan begitu, pemilih bukan hanya pasif, melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak terbelenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertin-

¹²² Lihat *ibid.*, hal. 62

dak. Faktor-faktor situasional, bias berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, mempunyai peranan yang penting dalam menentukan pilihan politik seseorang. Oleh karena itu, dalam pendekatan rasional ini penilaian terhadap isu-isu politik dan kandidat merupakan faktor yang sangat penting dalam menjelaskan pilihan politik seseorang. Di sinilah para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional.¹²³

Sementara peneliti pemilu dari Columbia School lebih mengaitkan perilaku pemilu dengan konteks kemasyarakatan dimana individu tersebut bernaung, maka sekelompok ilmu sosial dari University of Michigan di Ann Arbor lebih menempatkan sang individu itu sendiri sebagai pusat perhatian mereka. Menurut Ann Arbor School, persepsi dan penilaian pribadi terhadap sang kandidat atau tema-tema yang diangkat (pengaruh jangka pendek) sangat berpengaruh terhadap pilihan pemilu yang dijumpai. Selain itu, "keanggotaan psikologis" dalam sebuah partai yang dapat diukur dalam bentuk variabel identifikasi partai, turut mempengaruhi pilihan pemilu, hal mana merupakan hasil berbagai pengaruh jangka panjang. Oleh karena itu keputusan pemilu masing-masing individu secara primer tidak ditentukan secara sosial struktural, melainkan lebih merupakan hasil pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terhadap sang individu.

Angus Campbell, Gerald Gurin dan Warren E. Miller dari Institute for social Research mengembangkan konsep model penjelasan social psikologis atas perilaku pemilu dalam kaitannya dengan pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1948 dan 1952¹²⁴. Beberapa tahun kemudian terbitlah karya utama para peneliti pemilu dari Ann Arbor tersebut, yakni *The American voter*¹²⁵. Karya ini dilengkapi dengan hasil penelitian mereka terhadap pemilu kongres pada tahun 1954 dan pemilu presiden tahun 1956. Untuk menguji dan menyempurnakan konsep awal mereka, maka tim Campbell ini melakukan survey terhadap pemilih yang sama, sebelum dan sesudah pemilu

123 M. Asfar, *op.cit.*, hal. 51-52.

124 Campbell, Angus/Gerald Gurin/Warren E, Miller, : *the Voter Decides*, Evanston, 1954

125 Campbell at al, *The American Voter*, New York, 1960

presiden tersebut. Survey ini dilakukan diseluruh negara bagian. Dengan demikian mereka pertama kali berhasil untuk menarik kesimpulan atas perilaku pemilu di seluruh Amerika Serikat, hal mana membedakan studi ini dari studi regional lazarsfeld. Para responden tidak dipilih berdasarkan kuota, melainkan berdasarkan sistem acak yang baru pertama kali digunakan beberapa tahun sebelumnya.

Pendekatan sosial psikologis berusaha untuk menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemilu jangka pendek atau keputusan yang diambil dalam waktu yang singkat. Hal ini berusaha dijelaskan melalui trias determinan, yakni identifikasi partai, orientasi kandidat orientasi isu/tema. sementara itu faktor-faktor lainnya yang sudah ada terlebih dahulu (seperti misalnya keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu) dianggap memberi pengaruh langsung terhadap perilaku pemilu. Inti dasar pemikiran ini dituangkan dalam bentuk sebuah variabel yakni identifikasi partai (party identification). Variabel ini digunakan untuk mengukur jumlah faktor-faktor predisposisi pribadi maupun politik yang relevan bagi seorang individu. Apabila faktor-faktor predisposisi (seperti misalnya pengalaman pribadi atau orientasi politik) diumpamakan sebagai suatu aliran yang ditungkan melewati sebuah corong, maka identitas partai yang merupakan semacam keanggotaan psikologis partai, dapat diumpamakan sebagai sebuah saringan dalam corong kausal ini (funnel of causality)¹²⁶

Identifikasi dengan sebuah partai tertentu biasanya tidak berjalan seiring dengan keanggotaan formal/resmi seorang individu dalam sebuah partai. Oleh karena itu keanggotaan partai secara psikologis juga disebut dengan orientasi partai yang efektif. Sebuah definisi yang sama sekali tidak menggunakan istilah "keanggotaan". Identitas partai seringkali diwariskan orang tua kepada anak-anak mereka¹²⁷. Seiring dengan bertambahnya usia, identitas partai menjadi semakin stabil dan intensif. Identitas partai merupakan orientasi yang permanen, yang tidak berubah dari pemilu ke pemilu. Namun apabila seseorang mengalami perubahan pribadi yang besar (misalnya

126 Ibid, hal 24-32

127 Ibid, hal 146-148

menikah, pindah profesi atau tempat tinggal) atau situasi politik yang luar biasa (seperti krisis ekonomi atau perang), maka identifikasi partai ini dapat berubah.

Pendekatan sosial psikologis membedakan antara kekuatan, arah dan intensitas orientasi, baik dalam orientasi isu maupun orientasi kandidat¹²⁸. Tema-tema khusus hanya dapat mempengaruhi perilaku pemilu individu apabila memenuhi tiga persyaratan dasar : tema tersebut harus dapat ditangkap oleh pemilih, pada akhirnya pemilih harus mampu menggolongkan posisi pribadinya (baik secara positif atau negatif) terhadap konsep pemecahan permasalahan yang ditawarkan oleh sekurang-kurangnya satu partai¹²⁹.

Operasionalitas konsep isu berlangsung dalam dua tahap. Pertama-tama berbagai pertanyaan diajukan seputar tujuh tema yang ditentukan dalam kampanye pemilu. Pemilihan tema dilakukan sedemikian rupa sehingga mencakup baik tema-tema politik dalam negeri maupun luar negeri, perbedaan-perbedaan jangkang panjang maupun jangka pendek yang dimiliki partai dan pertentangan ideologis maupun ekonomis yang ada¹³⁰

Pandangan diatas menunjukkan adanya hubungan antara besarnya partisipasi politik dan arah keputusan pemilu yang diambil. Pada intinya dapat disimpulkan bahwa semakin pemilih menyadari serta menganggap penting tema-tema tertentu, kemungkinan ia akan berpartisipasi dalam pemilu pun semakin besar. Apabila tawaran solusi yang diberikan oleh sebuah partai atau kandidat semakin mendekati cara pandang pemilih tersebut, semakin besar pula kemungkinannya bahwa ia akan memilih partai/kandidat yang bersangkutan.

Sejak akhir tahun tujuh puluhan, tema-tema khusus dalam studi pemilu dibedakan antara position issues dan valence issues¹³¹. Apabila tema yang dibahas merupakan sebuah tema dimana masing-masing partai mewakili posisi yang berbeda,

128 Campbell, at al, 1954, hal, 112-143

129 Campbell, at al, 1960, hal 170

130 Campbell, at al, 1954, hal, 116

131 Lihat Stokes, Donald E, Some Dynamic Elements of Contests for the Presidency, APSR 60, 1966, hal 19-28, dan Klingemann, Hans-Dieter, Issue-Kompetenz und Wahlentscheidung, PVS 14, 1973, hal 227-256.

yaitu dimana tujuan politiknya saling bertentangan (misalnya soal aborsi atau tenaga atom), maka ini merupakan sebuah position issue. Apabila kadar kepentingan sebuah tema serta urgensi pemecahan permasalahannya masih diperdebatkan, jadi apabila tujuan politik yang dimiliki masing-masing partai identis, namun apabila cara untuk menyelesaikan masalah tersebut berbeda (misalnya dalam mempertahankan stabilitas harga atau menangani masalah pengangguran), maka tema ini sebuah valence issue. Pada dasarnya position issue lebih mempengaruhi keputusan pemilu dibandingkan valence issue¹³². Namun position issue tetap sering dihindari oleh partai dalam kampanye pemilu, oleh karena risiko bahwa hal ini akan menimbulkan polarisasi bahkan diantara pengikutnya sendiri, dinilai sangat tinggi. Hal ini terutama berlaku dalam antara partai-partai besar yang banyak pengikutnya.

Dalam orientasi kandidat pun berlaku ketentuan: semakin sering sang pemilih mengambil posisi terhadap kandidat-kandidat yang ada, semakin besar pula kemungkinan bahwa ia akan berpartisipasi dalam pemilu. Bila posisi/pandangan sang pemilih semakin cocok dengan kandidat sebuah partai tertentu, maka semakin besar pulalah kemungkinan bahwa ia akan memilih kandidat tersebut.

Para peneliti pemilu dari Ann Arbor berpandangan bahwa preferensi kandidat dan orientasi isu lebih tergantung kepada perubahan dan fluktuasi dibandingkan dengan identitas partai. Oleh karena itu, dalam pandangan Campbell sejak tahun 1960 sudah memandang identitas partai sebagai sebuah ikatan psikologis dan stabil, yang tidak lagi dipengaruhi oleh faktor pengaruh jangka pendek.

Apabila orientasi kandidat dan orientasi isu mencakup hal yang sama, maka menurut Philip E. Converse¹³³ kita berbicara tentang pemilu biasa (normal vote), dimana keputusan pemilu seseorang sesuai dengan identitas partainya. Apabila orientasi jangka pendek berbeda dari identifikasi partai jangka panjang, misalnya apabila pemilih memiliki preferensi (semen-

132 Burklin, Wilhelm P. *Wahlverhalten und Wertewandel*, Opladen, 1988, hal 60

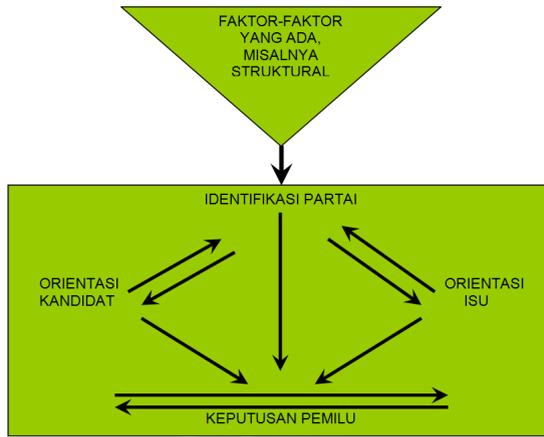
133 Philip E. Converse, 1966, *the Concept of a Normal Vote*, dalam : Campbell et al.,: elections and the Political Order, New York, hal 9-39.

tara) terhadap calon partai A, sementara ia memiliki identitas diri (jangka panjang) dengan partai B, maka keputusan pemilu tidak dapat ditentukan begitu saja.

Situasi yang dialami pemilih seperti yang digambarkan diatas dapat dibandingkan dengan situasi cross-pressure dalam model Colombia School. Berbeda dengan pendekatan mikrososiologis, maka sikap abstain pemilu bukan merupakan satu-satunya pilihan yang tersisa dari situasi cross-pressure, karena apabila ketiga faktor pengaruh model tersebut turut dipertimbangkan, maka apa yang sebenarnya yang ingin dipilih oleh si pemilih, terkadang dapat tetap ditentukan. Namun dalam model sosial psikologis, faktor pengaruh yang berkonflik akan dihubungkan dengan hubungan mula-mula dengan sikap abstain dalam pemilu, keraguan menentukan pilihan dan pemberian suara bagi berbagai partai atau kandidat dalam pemilu yang sama (*divided vote*) Hal ini merupakan sebuah vonis yang buruk terhadap warga yang sebetulnya dia-suksikan memiliki pengetahuan yang cukup dewasa.

Apabila dilihat secara keseluruhan, maka pendekatan sosial psikologis dapat memberikan tambahan yang berarti kepada model penjelasan sosial struktural bagi perilaku pemilu. Dengan demikian, maka pengaruh jangka pendek harus dapat dipertimbangkan dalam menilai perilaku pemilu, terutama dalam menjelaskan perilaku pemilu yang berubah-ubah. Para ahli ilmu sosial dari Michigan terutama mengkeritik permasalahan yang dimiliki dalam menimbang bobot ketiga faktor pengaruh dan konsep identifikasi partai. Seperti yang diakui oleh Campbell, Gurin dan Miller, bobot penjelasan yang dimiliki masing-masing determinan senantiasa berubah-ubah dari pemilu yang satu ke pemilu yang lain. Atas dasar ini, maka perkiraan pemilu yang tepat yang semata-mata di dasarkan kepada ketiga faktor penjelasan yang ada dalam model Ann Arbor, tidaklah mungkin.

Gambar 3.5: Model penjelasan Sosial Psikologis terhadap Perilaku pemilih



Trias Determinan

Sumber: Dimodifikasi menurut Burklin (1988: 56 dst.)

Kritik utama atas model identifikasi partai ini adalah asumsi yang menyertainya, yang beranggapan bahwa identitas partai tetap stabil dalam jangka waktu panjang dan oleh sebab itu jauh lebih mempengaruhi faktor-faktor penjelasan lainnya, dibandingkan sebaliknya. Fluktuasi identitas partai yang tinggi sudah dapat diamati di Amerika Serikat sejak akhir tahun lima puluhan. Dengan demikian kesangsian yang timbul apakah operasionalitas konsep sudah berlangsung dengan tepat, memang sudah pada tempatnya¹³⁴ Bahkan model non-rekursif sekalipun, yang kembali menyatakan bahwa ketergantungan identitas partai terhadap faktor-faktor lain cukup kuat, masih kurang mengindahkan kritik ini.

c. Pendekatan rational-choice (perilaku pemilu yang "rational")

Pusat perhatian berbagai pendekatan teoritis mengenai perilaku pemilu yang rasional terletak pada perhitungan biaya dan manfaat (cost and benefit). Menurut pendekatan rational choice, yang menentukan dalam sebuah pemilu bukanlah adanya ketergantungan terhadap ikatan sosial struktural atau ika-

¹³⁴Samuel, Popkin: Comment: What Have You Done for Me Lately? Toward An Investment Theory of Voting, APSR 70, 1976, hal 791

tan partai yang kuat, melainkan hasil penilaian rasional dari warga yang cakap. Pada awal tahun enam puluhan, V.O. Key menuding bahwa kedua pendekatan untuk menerangkan perilaku pemilu yang selama ini berlaku, merendahkan rasionalitas manusia. Pemikiran ini ia tuangkan dalam bukunya *The Responsible Electorate*, dimana ia menulis: "The pervarse and anorthodox argument of this little book is that voters are not fools."¹³⁵.

Menurut Key, masing-masing pemilih menepatkan pilihannya secara trospektif, yaitu dengan menilai apakah kinerja partai yang menjalankan pemerintahan pada periode legislatif terakhir sudah baik bagi dirinya sendiri dan bagi Negara, atau justru sebaliknya. Penilaian ini juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap pemerintah di masa yang lampau. Apabila hasil penilaian kinerja pemerintah yang berkuasa (juga bila dibandingkan dengan pendahulunya) positif, maka mereka akan dipilih kembali. Apabila hasil penilaiannya negatif, maka pemerintahan tersebut tidak akan dipilih kembali.

Keputusan pemilu sang pemilih yang rasional senantiasa berorientasi kepada hasil yang dicapai partai atau kandidat tertentu dalam politik, baik hasil yang dipersepsikan maupun yang diantisipasi. Apabila dalam model Key yang menentukan keputusan pemilu hanyalah jumlah semua prestasi yang dicapai pemerintah, maka model-model berikut dibedakan berdasarkan masing-masing bidang politik¹³⁶. dengan demikian, maka model-model yang disebutkan terakhir dapat dipahami sebagai perkembangan spesifik lebih lanjut dari sebuah cabang pendekatan sosial psikologis, yakni orientasi isu dan penilaian terhadap kompetensi masing-masing partai dan kandidat dalam memecahkan permasalahan. Namun cukupan pembatasan terhadap issue voting dalam masing-masing model perilaku pemilu yang rasional senantiasa berbeda-beda.

Salah satu teori klasik antara pendekatan *rational-choice*, yang tidak hanya terbatas bagi studi pemilu adalah teori

135Valdimer O. key : *The Responsible electorate, Rationality in Presidential Voting 1936-1960*, Cambridge, 1966, hal 7

136Friorina, Morris P., *Retrospective Voting in American National Elections*, New Haven, London, 1981, hal, 12

ekonomi Anthony Downs¹³⁷ mengenal demokrasi (1957). Melalui deskripsinya mengenai *homo economicus*, beliau menjadi orang yang pertama dan mnuhkin yang paling konsekuen mengambil jarak dari dasar penjelasan yang dicetuskan oleh Columbia dan Michigan School. Menurut Downs, sang pemilih yang rasional hanya menuruti kepentingannya sendiri atau walaupun tidak, akan senantiasa mendahulukan kepentingannya sendiri diatas kepentingan orang lain. Ini disebut juga dengan *self-interest axiom*. Walaupun menurut Downs, tidak semua orang merupakan orang yang egois, "bahkan dalam politik sekalipun," namun ia tiba pada kesimpulan bahwa "sosok-sosok heroik" ini dari segi jumlah dapat diabaikan. Manusia bertindak egois, terutama oleh karena mereka ingin mengoptimalkan kesejahteraan material mereka, yakni pemasukan atau harta benda mereka. Jika hal ini diterapkan kepada perilaku pemilu, maka ini berarti bahwa perilaku pemilih yang rasional akan memilih partai yang paling menjanjikan keuntungan bagi dirinya. Pemilih tidak terlalu tertarik kepada konsep politis sebuah partai, melainkan kepada keuntungan terbesar yang dapat ia peroleh apabila partai ini menduduki pemerintahan dibandingkan dengan partai lain. Untuk dapat memperkirakan atau menghitung keuntungan ini, yang diistilahkan oleh Downs sebagai "*utility maximation*," pemilih harus memiliki informasi mengenai kegiatan partai di masa lalu dan apa yang mungkin dilakukan partai di masa mendatang. Sebetulnya ia justru membutuhkan informasi yang lengkap.

Hal inilah yang merupakan permasalahan sesungguhnya dalam teori Downs. Dengan adanya informasi yang lengkap, alternatif-alternatif pilihan lebih mudah untuk dirumuskan. Partai yang akan dipilih adalah partai yang menawarkan keuntungan besar apabila partai tersebut berkuasa. Dalam hal dimana kegunaan yang ditawarkan sama saja diantara alternatif-alternatif yang ada, maka partai tersebut tidak akan dipilih. Namun pada kenyataannya informasi yang lengkap tidak akan tersedia, atau hanya dapat diperoleh melalui pengorbanan ekonomis yang besar. Oleh karena itu, pada umumnya pemilih

¹³⁷Anthony, Downs, *Okonomische Theorie der Demokratie, Tubingen (engl.: An Economic Theory of Democracy, New York, 1957, hal, 26*

harus mengambil keputusan dalam "ketidaktahuan". Namun pemilih memiliki berbagai keuntungan untuk membatasi ketidaktahuan ini. Salah satu kemungkinan yang ada adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai bidang-bidang yang ia rasa penting, dengan mengindahkan perilaku rasional. Dengan demikian pengeluaran yang ada dalam mengumpulkan informasi tersebut tidak boleh melampaui kegunaan yang dapat diperoleh dari informasi tambahan tersebut. Untuk mencapai hal ini, sang pemilih berusaha untuk melimpahkan sebagian besar biaya yang dikeluarkan dalam mengumpulkan, memilih, menyampaikan, menganalisa dan menilai informasi-informasi tersebut kepada pihak lain. Untuk itu ia memanfaatkan baik media, kelompok minat maupun partai itu sendiri, untuk pada akhirnya dapat mengambil keputusan. Apabila ia mendapati bahwa terdapat banyak persamaan anatar tujuan yang dimiliki dan tujuan suatu kelompok atau suatu lapisan masyarakat, jadi apabila terdapat suatu ikatan ideologis, maka ia dapat melimpahkan perwakilan kepentingan kepada partai yang mewakili kelompok tersebut tanpa mengadakan pemeriksaan lebih lanjut. Ini merupakan kemungkinan kedua untuk membatasi ketidaktahuan secara rasional. Di sini Downs cukup mendekati alasan-alasan yang dikemukakan Lipset dan Rokkan.

Menurut Downs, seorang pemilih bisa umumnya tidak memiliki informasi yang baik di bidang politik oleh karena hasil yang diperoleh dari informasi tersebut biasanya tidak setimbang dengan pengorbanan yang diberikan (dalam hal ini misalnya berupa waktu), sehingga bagi mereka ini tidaklah rasional. Oleh karena itu banyak pemilih tidak berusaha untuk mengetahui "pandangan mereka sesungguhnya," untuk kemudian dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Pembagian kerja dalam masyarakat akan mereka terima begitu saja. Mereka akan mengikuti para ahli politik, atau justru tidak memilih sama sekali. Seorang pemilih rasional yang tidak melihat kegunaan pilihannya, jadi yang tidak dapat mengunggulkan partai yang satu di atas partai lainnya dan tidak melihat adanya nilai/kegunaan partisipasi dalam jang-

ka panjang, akan bertidak seperti itu. Bentuk pemerintahan demokrasi yang pada dasarnya dinilai positif, menjadi alasan Dooens untuk memasukkan nilai partisipasi jangka panjang dalam terori tersebut. Hal ini membantu untuk meredam kritik terhadap model yang bersangkutan. Pada tahun tujuh puluhan saat teori ini sedang hangat didiskusikan, pemilih pada dasarnya memiliki tingkat informasi yang rendah. Tingginya tingkat partisipasi pemilu walaupun pemilih memiliki tingkat informasi yang rendah, tetapi tidak diterangkan oleh teori ini.

Namun teori Downs dapat membantu menjelaskan kemunduran tingkat partisipasi pemilu pada tahun delapan puluhan dan sembilan puluhan dan berbagai fase "pemilu protes" yang terjadi di Jerman tersebut. Franz Urban Pappi¹³⁸ mendeskripsikan pemilih pemrotes ini, yaitu mereka yang memilih partai kecil beraliran radikal yang sebenarnya tidak memiliki kesempatan meraih kekuasaan, namun yang memaksa partai-partai besar untuk mengubah politiknya guna menghindari terjadinya peningkatan di kubu ekstrim tersebut. Pada umumnya, sang pemilih pemrotes ini cenderung dekat dengan partai-partai rakyat. Melalui tindakan yang menyimpang tersebut, sang pemilih pemrotes berhasil mencapai tujuannya, yaitu bahwa "partainya" merubah politik yang dijalankan. Dengan demikian ia bertidak secara rasional. Dalam bentuk yang diperhalus, hal ini juga berlaku bagi sikap abstinen dalam pemilu, sebagai bentuk protes terhadap sikap-sikap partai.

Dasar pemikiran Keys dan Downs dikembangkan lebih lanjut oleh Morris P. Fiorina (1981) dalam model keputusan pemilu retrospektif. Dalam model tampak bahwa teori perilaku pemilu yang rasional dan pendekatan sosial psikologis untuk menjelaskan perilaku pemilih dapat dikombinasikan dengan baik. Dasar pemikiran Fiorina tidak hanya mempertimbangkan pemilihan yang retrospektif dan prospektif (Key dan Downs), namun juga konstruksi identifikasi partai yang merupakan jantung model Ann-Arbor. Yang disebutkan terakhir dirancang sebagai elemen yang sangat tergantung kepa-

¹³⁸Franz Urban, Pappi., *Die Republikaner im Parteiensystem der Bundesrepublik. Protester scheinung oder politische Alternative?*, APuZ 21/90, hal, 38

da pengaruh retrospektif, yang banyak mengalami perubahan melalui pengalaman politis baru. Oleh karena itu Fiorina tidak hanya membedakan antara masa lalu dan masa depan dalam komponen *rational-choice* (pilihan rasional), melainkan membagi identitas partai ke dalam iderntitas partai masa lalu dan identitas partai masa sekarang. Model tersebut pada dasarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Key dan model Downs, yang elemen intinya terdiri dari keputusan pemilu tradisional-retrospektif dan prospektif seperti gambar berikut ini.

Gambar 3.5: Model Fiorina mengenai keputusan pemilu retrospektif



Sumber: Fiorina (1981)

Kesangsian/keraguan mendasar yang ada pada model Downs adalah bahwa sikap pasar dapat diterjemahkan begitu saja dalam sikap politis hal ini dikemukakan oleh Geoffrey Brennan dan Loren Lomasky¹³⁹ dalam teori mereka mengenai perilaku pemilu ekspresif. Suara masing-masing pemilih hanya benar-benar menentukan dalam kasus-kasus tertentu, dan biasanya tidak memiliki relevansi bagi hasilnay serta tidak memiliki kegunaan langsung bagi individu itu sendiri. justru karnea itu tingginya tingkat partaisipasi dalam pemilu sulit dihubungkan dengan model Downs mengenai pemilih yang rasional. Menurut Brenen dan Lomansky, keputusan untuk memilih/memberikan suara dapat dipahami sebagai pernyataan minat/keinginan yang mendalam untuk ikut ambil bagian dalam tindakan memilih itu sendiri (intrinsik). Untuk seba-

¹³⁹Brennan, Geoffrey/Loren Lomasky., *Democracy and Decision. The pure theory of electoral preference*, Cambridge/MA, 1993, hal, 19

gian, keputusan individual untuk memilih.

Didasari oleh motivasi yang ekspresif dan bukan instrumental, hal mana tidak dapat diabaikan begitu saja. sebagai contoh, memilih dapat dibandingkan dengan atlit atau tim favorit yang disemangati oleh pendukung/suporternya, walaupun belum tentu ada hubungan antara semangat yang diberikan dengan keberhasilan yang dicapai.

Pada Negara-negara demokrasi, studi tentang memilih atas partai politik atau perilaku pemilih pada umumnya telah menjadi sub bidang studi. Menurut *Mujani dan Liddle*¹⁴⁰ dalam studi analitik berkaitan dengan mengapa seseorang memilih partai politik, ada tujuh faktor yang biasanya dilihat yakni agama, kelas social, kelompok etnik, keterikatan dengan tokoh-tokoh informal local, keterikatan dengan tokoh nasional, identifikasi diri dengan partai politik tertentu, serta evaluasi subjektif terhadap keadaan ekonomi pemilih dan nasional.

Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilaku pemilih, tapi terdapat pula sejumlah faktor penting lainnya. Sekelompok orang bisa saja memilih seorang kandidat politik karena dianggap sebagai representasi dari agama atau keyakinannya. Tetapi sekelompok lainnya memilih karena kandidat tertentu dianggap representasi dari kelas sosialnya. Ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada figur tertentu. Ada beberapa pendekatan untuk melihat perilaku pemilih yaitu : *Pendekatan sosiologis; Pendekatan psikologis; Pendekatan rasional; Pendekatan marketing.*¹⁴¹

Dalam *pendekatan sosiologis* menjelaskan, karakteristik dan pengelompokan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dan pemberian suara [voting] pada hakekatnya menurut *Dan Nimmo* [1993] adalah pengalaman kelompok.¹⁴² Model ini dikenal sebagai perilaku pemilih *Mazhab Colombia*¹⁴³.

Menurut mazhab Colombia, pendekatan sosiolo-

140Mujani dan Liddle, R.W, *Politik Aliran Memudar, Kepemimpinan Nasional Menentukan Pilihan Partai Politik*, lihat, Arif, Jurnal An-Nafs Fakultas Psikologi Univ.Islam Riau.

141Lihat dalam, Adman Nursal, *Political Marketing : strategi Memenangkan Pemilu sebuah Pendekatan Baru Kampanye DPR, DPD, Presiden*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Hlm. 54.

142Nimmo, Dan, terj. Tjun Surjaman, 1993, *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media*.

PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, dalam Nursal, Ibid, hlm. 55

143M. Asfar, *Beberapa Pendekatan dalam Memahami Perilaku pemilih*, dalam *Jurnal Ilmu Politik*, 16, , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

gis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial seperti usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal, memberi pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih.

Kelompok sosial tersebut memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang. Dalam banyak penelitian faktor agama, aspek geografis [kedaerahan], dan faktor kelas atau status ekonomi mempunyai korelasi nyata dengan perilaku pemilih.

Menurut *Bone dan Ranney*¹⁴⁴ ada tiga tipe utama pengelompokan sosial yaitu

Pertama; Kelompok kategorial, Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang memiliki satu atau beberapa karakter khas, tetapi tidak mengorganisasikan aktivitas politik dan tidak menyadari indentifikasi dan tujuan kelompoknya. Setiap kelompok memiliki ciri politik yang berbeda. Secara umum, perbedaan perilaku politik setiap kategori terjadi karena masing-masing kategori memberi reaksi yang berbeda terhadap berbagai faktor berikut ini.

- a. *Peristiwa politik*, misalnya dampak kebijakan pemerintah menghapuskan subsidi makanan pokok lebih dirasakan para ibu-ibu dibandingkan kaum laki-laki karena, dalam kultur Indonesia, umumnya alokasi pengeluaran untuk bahan pokok diatur ibu-ibu. Karena itu, kaum ibu-ibu lebih peka dengan isu-isu tersebut dibandingkan dengan kaum laki-laki.
- b. *Pengalaman politik*, misalnya bagaimana heroisme dan pahit getir mempertahankan kemerdekaan, lebih diraskan oleh pemilih usia tua dibandingkan dengan pemilih muda. Karena itu, para pemilih yang berusia tua lebih reaktif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan nasionalisme.
- c. *Peran-peran sosial*, misalnya, masih adanya anggapan bahwa masalah politik adalah urusan kaum laki-laki, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi, sehingga pola keputusan politik ditentukan

¹⁴⁴Bone, H.A., & Ranney, A. 1981, *Politics and Voters*, New York: McGraw-Hill Company, dalam Adman Nursal, op.cit., hlm.56

kan oleh suami dan isteri mengikuti pilihan suami. Dari karakteristik politik diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelompokan kategori terbentuk berdasarkan faktor-faktor perbedaan jenis kelamin, perbedaan usia, dan perbedaan pendidikan. *Kedua*, Kelompok Sekunder, Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang memiliki ciri yang sama yang menyadari tujuan dan identifikasi kelompoknya. Dan bahkan sebagian membentuk organisasi untuk memajukan kepentingan kelompoknya. Kekuatan pengaruh kelompok sekunder kepada para anggotanya tergantung pada 4 (empat) faktor psikologis : (1) kuat lemahnya identifikasi individu terhadap kelompok. Jika identifikasi individu terhadap kelompok kuat, maka pengaruh kelompok terhadap individu tersebut akan kuat pula; (2) berkaitan dengan lamanya seseorang menjadi anggota kelompok, semakin lama seseorang menjadi anggota sesuatu kelompok, semakin kuat keterlibatan psikologis yang bersangkutan dengan kelompok tersebut.; (3) pengutamaan politik bagi para pemimpin suatu kelompok, semakin penting makna politik, maka semakin kuat para pemimpin tersebut mendesak tindakan politik tertentu untuk meningkatkan loyalitas kelompok; (4) tingkat kepentingan politik bagi anggota-anggota individual.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kelompok sekunder dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu : pekerjaan; status sosio ekonomi dan kelas sosial; kelompok etnis yang meliputi ras, agama, dan daerah asal.

Ketiga, Kelompok Primer, Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang sering dan secara teratur melakukan kontak dan interaksi langsung. Kelompok primer memiliki pengaruh yang paling kuat dan langsung terhadap perilaku politik seseorang, khususnya dari keluarga dan teman dekat. Mereka yang termasuk dalam kelompok primer ini ialah : pasangan suami Isteri; orang tua dan anak-anak; kelompok bermain [peer groups].

Berbeda dengan pendekatan sosiologis diatas, *pendekatan Psikologis*¹⁴⁵ lebih dilandasi oleh konsep sikap dan sosialisasi, sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa jadi sejak seseorang calon pemilih masih berusia dini, pada usia dini seorang calon pemilih telah menerima pengaruh politik dari orang tuanya, baik komunikasi langsung maupun dari pandangan politik yang diekspresikan orang tuanya.

Kuatnya pengaruh pandangan politik terhadap perilaku pemilih berkaitan dengan fungsi sikap. Menurut *Greenstein* seperti dikutip *Asfar*¹⁴⁶ sikap memiliki 3 (tiga) fungsi. *Pertama*, fungsi kepentingan, bahwa penilaian terhadap suatu obyek diberi berdasarkan motivasi, minat, dan kepentingan orang tersebut. *Kedua*, fungsi penyesuaian diri, bahwa seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang tersebut untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disengani atau panutannya. *Ketiga*, fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, bahwa upaya untuk mengatasi konflik batin dan tekanan psikis, yang mungkin terwujud mekanisme pertahanan dan eksternalisasi diri seperti idealisme, rasionalitasasi.

Lebih lanjut, *Asfar* menguraikan sikap tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses yang panjang. Identifikasi partai merupakan faktor yang penting untuk memahami perilaku pemilih. Akan tetapi dengan teori identifikasi partai, seolah-olah semua pemilih relatif mempunyai pilihan yang tetap. Dengan sendirinya seseorang tidak berpengaruh oleh komunikasi politik menjelang dan saat masa kampanye.

Berdasarkan konsep tindakan komunikasi *Dan Nimmo* (1989)¹⁴⁷ para pemilih dipengaruhi oleh faktor identifikasi partai, ini digolongkan sebagai pemberi suara yang reaktif. Asumsi utama *Nimmo* adalah bahwa manusia beraksi terha-

145Pelopor pendekatan ini *August Campbell*, peneliti pada *Survey Research Centre*, lembaga penelitian *University Michigan* Amerika Serikat. Pendekatan ini disebut juga *Mazhab Michigan*. *Mazhab Michigan* menggarisbawahi adanya sikap politik para pemberi suara (voter) yang menetap.

146M. *Asfar*, *op.cit.*, hlm 60

147Dan *Nimmo*, Terj. *Tjun Surjaman*, *Komunikasi Politik Khalayak dan Efektif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 1989.

dap rangsangan secara pasif dan terkondisi. Perilaku pemberi suara dibentuk oleh faktor-faktor jangka panjang terutama faktor social, dan awal proses sosialisasi.

Jika pendekatan psikologis diatas menitik beratkan pada sikap pemilih maka, *pendekatan rasional* berkaitan dengan orientasi isu dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah, dari partai yang berkuasa kelak, sementara orientasi kandidat mengaju pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa peduli dari partai mana ia berasal.

Daya tarik isu dan kandidat tidaklah selalu permanent, melainkan berubah-ubah. Pengaruh isu dan kandidat berkaitan erat dengan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi, dan politik tertentu yang kontekstual. Sementara, pendekatan rasional terhadap kandidat bisa didasarkan pada kedudukan, informasi, prestasi, dan popularitas pribadi kandidat.

Kualitas kandidat memiliki dua variable.¹⁴⁸ *Pertama*, kualitas instrumental yakni tindakan yang diyakini pemilih akan direalisasikan oleh kandidat bila kelak menang, misalnya keyakinan pemilih terhadap kandidat akan memberantas korupsi, sekalipun kandidat tersebut tidak menyatakan demikian. *Kedua*, kualitas simbolis, yakni kualitas kepribadian seseorang yang berkaitan dengan integritas diri, ketegasan, ketaatan pada norma dan aturan, kebaikan, sikap merakyat, dan sebagainya.

Berkaitan dengan perilaku pemilih ini *Newman dan Shets (1885)*¹⁴⁹ dalam suatu *pendekatan marketing* mengembangkan model perilaku pemilih berdasarkan beberapa domain yang terkait dengan marketing. Dalam mengembangkan model tersebut, mereka menggunakan sejumlah kepercayaan kognitif yang berasal dari berbagai sumber seperti pemilih, komunikasi dari mulut ke mulut, dan media massa. Model ini dikembangkan untuk menerangkan dan memprediksi perilaku pemilih. Menurut model ini, perilaku pemilih ditentukan oleh tujuh domain kognitif yang berbeda dan terpisah, sebagai berikut : *Isu dan kebijakan politik [issues and polities]; Citra social [social ema-*

148Adman Nursal, *op.,cit.*,hlm.65

149Newman, B.I., & Shet, J.N, 1985, "A model of primary voter behavior," dalam Journal Of Consumer Research, 12, hlm. 178-187, dalam Adman Nursal, *op.cit.*, hlm. 69.

gery]; *Perasaan emosional [emotional feelings]*; *Citra kandifat [candidate personality]*; *Peristiwa mutakhir [current events]*; *Peristiwa personal [personal events]*; *Faktor-faktor epistemic [epistemic issues]*

Keempat pendekatan perilaku pemilih diatas saling menguatkan atau melengkapi satu sama lainnya. Untuk memudahkan kepentingan kajian ini, penulis akan menyederhanakan pendekatan tersebut menjadi sebuah rangkuman tentang variabel yang mempengaruhi perilaku pemilih dan sekaligus ini merupakan variabel yang akan diukur/dianalisa pada kajian ini. Adapun variabel tersebut adalah : *Kepribadian dan citra kandidat.*; *Penyatuan dukungan partai*; *Isu kampanye*; *Calon yang masih menjabat (incumbent)*; *Politik uang dan janji politik*

Berkaitan dengan pendekatan diatas maka Pilkada tidak hanya ditentukan oleh perilaku pemilihn sahaja tetapi ia merupakan sebuah sistem yang harus dijalankan, sebagaimana dikatakan David Easton bahwa suatu sistim selalu memiliki sekurangngnya tiga sifat. Ketiga sifat tersebut ialah (1) terdiri dari banyak bagian-bagian; (2) bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling tergantung; dan (3) mempunyai perbatasan [boundaries] yang memisahkannya dari lingkungannya yang juga terdiri dari sistim-sistem lain.¹⁵⁰

Sebagai suatu sistem, sistem Pemilihan Kepala Daerah langsung mempunyai bagian-bagian yang merupakan sistem skunder [*secondary sistim*] atau sub-sub sistim [*subsistims*]. Bagian-bagian tersebut adalah electoral regulation, electoral process dan electoral law enforcement.¹⁵¹ *Electoral regulation* adalah segala ketentuan atau aturan mengenai pemilihan Kepala Daerah langsung yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan, calon dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing. *Electoral process* dimaksudkan seluruh kegiatan yang terkait secara langsung dengan Pemilihan Kepala Daerah yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan baik. yang bersifat legal maupun teknikal. *Electoral Law enforcement* yaitu penegakan hukum terhadap aturan-aturan pemilihan Kepala Daerah baik

150Lihat Mohtar Mas'oe'd dan Colin Mac Andrews (ed.), *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1991, hlm.xii

151Joko J. Prihatmoko, *op.cit*, hlm.201

politis, administrative, atau pidana.

Ketiga bagian pemilihan Kepala Daerah langsung di atas sangat menentukan sejauhmana kapasitas sistim dapat menjabatani pencapaian tujuan dari proses awalnya. Masing-masing bagian tidak dapat dipisah-pisahkan karena merupakan suatu kesatuan utuh yang komplementer.

Lebih jauh dikatakan *Ben Reilly*,¹⁵² ada 3 [tiga] ukuran yang tak dapat dipisah-pisahkan yaitu (1) Sistem pemilihan menterjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan menjadi kursi; (2) Sistem Pemilihan bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menasih tanggungjawab pemimpin yang telah mereka pilih; (3) Sistem pemilihan memberi dorongan terhadap pihak-pihak yang saling bersaing pengaruh supaya melakukannya dengan cara yang tidak sama.

Sistem Pemilihan Kepala Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter¹⁵³ persaingan calon Kepala Daerah. Sistim pemilihan Kepala Daerah juga bisa dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena sistim pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi¹⁵⁴. Demikian halnya dengan sistem pemilihan Kepala Daerah Langsung memiliki ciri-ciri dan kecenderungan-kecenderungan yang menonjol dari jenis kompetisi yang dilakukan. Kecenderungan-kecenderungan tersebut mencakup implikasi terhadap legitimasi pemilihan, proses pemilihan dan pembiayaan. Oleh sebab itu, pilihan terhadap sistim pemilihan kepala daerah langsung seharusnya memperhitungkan dengan cermat kecenderungan tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk bagaimana menyaserasikan kepentingan elite dan tuntutan masyarakat, serta tarik menarik kepentingan anta relit dan antar kelompok masyarakat.

Sistim pemilihan Kepala Daerah Langsung pernah dit-

¹⁵²Ben Reilly, *Reformasi pemilu di Indoensia: sejunlah Pilihan*, dalam Almanak Parpol Indonesia, Jakarta, Yayasan API, 1999, hlm.18-19

¹⁵³Yang dimaksud watak dan karakter dalam tulisan ini adalah ciri-ciri dan kecenderungan-kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam Pemilihan kepala daerah berikutu implikasi dan konsekuensinya, biasanya diterjelaskan dalam kelebihan dan kekurangan.

¹⁵⁴Sebagai perbandingan lihat Andrews Reynolds, *Merancang Sistem Pemilihan Umum*, dalam Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi (eds), *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat-Belajar dari Kekeliruan Negara-negara lain*, Bandung, Mizan, 2001

erapkan di daerah-daerah di beberapa Negara dengan sistem pemerintahan Presidensial.¹⁵⁵ diantaranya *First Past the Post Systeem* merupakan sistem yang sederhana dan efisien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pemilihan kepala daerah dan menduduki kursi Kepala Daerah. Mengapa demikian? Karena sistem ini dikenal juga dengan sistem mayoritas sederhana [simple majority]. Konsekuensinya, calon Kepala Daerah dapat memenangkan pemilihan Kepala Daerah walaupun hanya meraih kurang dari separuh suara jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering dipersoalkan/diperbincangkan. Sistem ini memiliki legitimasi yang sangat rendah tetapi sangat efisien.

Kemudian ada *Preferential Voting Systeem* atau *Approval*, Cara kerja sistem ini adalah pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon-calon Kepala Daerah yang ada pada saat pemilihan. Seorang calon akan otomatis akan memenangkan pemilihan Kepala Daerah langsung dan terpilih menjadi Kepala Daerah jika perolehan suaranya mencapai tingkat pertama yang terbesar. Sistem ini dikenal sebagai mengakomodasi sistem mayoritas sederhana [simple majority] namun dapat membingungkan proses perhitungan suara di setiap tempat pemungutan suara [TPS] sehingga perhitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat.

Tetapi jika suaranya tidak mencapai tingkat pertama maka akan dilakukan *Two Round Systeem* atau *Run-off Systeem*, yakni sistem pemilihan dilakukan dengan dua putaran [run off] dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolute [lebih dari 50%) dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasangan calon Kepala Daerah dengan memperoleh suara terbanyak harus melalui pemilihan putaran kedua. Lazimnya, jumlah suara minimum yang harus diperoleh para calon pada pemilihan putaran pertama agar dapat ikut dalam pemilihan putaran kedua bervariasi, mulai dari 20% sampai 30%, sistem ini paling populer dinegara-negara demokrasi Presidensial.

Berbeda dengan dua sistem diatas, Sistem Electoral College

¹⁵⁵ Ibid, sebagai perbandingan lihat juga Ben Reilly, *Reformasi Pemilu di Indonesia : Sejumlah Pilihan, dalam Almanak Parpol Indonesia*, (Jakarta: Yayasan API, 1999)

lebih menekankan pada daerah pemilihan dimana setiap daerah pemilihan diberi alokasi atau bobot suara Dewan Pemilih [Electoral College] sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pemilihan Kepala Daerah, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap calon disetiap daerah pemilihan dihitung. Pemenang disetiap daerah pemilihan berhak memperoleh keseluruhan suara Dewan Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Calon yang memperoleh suara Dewan Pemilih terbesar akan memenangkan pemilihan Kepala Daerah langsung. Umumnya, calon yang berhasil memenangkan suara di daerah-daerah pemilihan dengan jumlah penduduk padat terpilih menjadi Kepala Daerah.

Seorang calon Kepala Daerah dinyatakan sebagai pemenang pemilihan Kepala Daerah apabila calon bersangkutan dapat meraih suara mayoritas sederhana [suara terbanyak di antara calon-calon yang ada].¹⁵⁶ Dan minimum 25% dari sedikitnya [dua pertiga] dari daerah pemilihan. Sistem ini diterapkan untuk menjamin bahwa Kepala Daerah terpilih memperoleh dukungan dari mayoritas penduduk yang tersebar di berbagai daerah pemilihan.

Memilih Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung, selalu mempertimbangkan aspek "*legitimiasi*" dan "*efisiensi*" yang selalu merupakan "*trade off*".¹⁵⁷ Artinya, memilih sistem yang memiliki legitimasi tinggi selalu mengandung konsekuensi sangat tidak efisien. Sebaliknya, kalau semata-mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan hasil Pemilihan Kepala Daerah yang legitimasinya sangat rendah. Faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan Kepala Daerah langsung adalah anggaran.¹⁵⁸ Dari segi anggaran dengan sistem perwakilan saja untuk satu kabupaten/kota diperlukan anggaran miliaran lebih, apalagi dengan sistem pemilihan langsung akan memerlukan biaya berlipat ganda. Belum lagi kalau dalam daerah kabupaten/kota terjadi pemilihan dalam dua kali

¹⁵⁶Bandingkan dengan *mayoritas absolut*, seorang calon dinyatakan sebagai pemenang pemilihan Kepala Daerah apabila meraih suara mayoritas, di mana perolehan suaranya mencapai lebih dari 50% jumlah pemilih.

¹⁵⁷Agus Pramusinto, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Mencermati Hasil Pemilu 2004*, (Jakarta: Jurnal Analisis CSIS Vol.33, No.2. Juni 2004, hlm, 240)

¹⁵⁸*Ibid*, hlm, 241

putaran.

Indonesia, sebagai Negara demokrasi memilih kebijakan yang bersifat eksperimental dengan memberlakukan sistem pemilihan langsung terhadap Kepala Daerah. Terhadap pemilihan Kepala Daerah Langsung oleh rakyat sekurangnya ada dua pandangan, yakni pandangan pesimistik dan optimistic.

Pandangan yang sering dikemukakan adalah bahwa dinegara-negara demokrasi dengan sistem pemerintahan yang relative mapan [established], seperti Amerika Serikat, Perancis, dan Hongaria, mekanisme atau sistem pemilihan Kepala Daerah tidak banyak menjadi sorotan perdebatan. Bahkan, dalam berbagai referendum diketahui sebahagian masyarakat di Negara-negara tersebut tidak menganggap perlu mengadakan pemilihan Kepala Daerah. Dalam pandangan mereka, apapun sistem yang dianut, sepanjang fungsi-fungsi pemerintahan daerah [protective, public service, development] dapat dilaksanakan secara optimal dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat, maka sistem yang dipilih apapun sama saja.¹⁵⁹

Dengan kalimat lain, pengisian jabatan Kepala Daerah hanyalah masalah "cara" dan bukan "substansi" bagi peningkatan demokrasi, prinsipnya rakyat harus menjadi subjek pemerataan keadilan dalam berbagai hal.¹⁶⁰ Di sini diandaikan bahwa mekanisme control, check and balances, bekerja baik atau sangat baik sehingga fungsi-fungsi pemerintahan dapat dijalankan dengan optimal.

Berbeda dengan Pandangan pesimistik diatas, dalam pandangan Optimistik

menekan bahwa Kepala Daerah membutuhkan legitimasi rakyat yang terpisah dari legislatif sehingga bertanggungjawab kepada rakyat. Pengisian jabatan Kepala Daerah melalui pemilihan langsung oleh rakyat bukan sekedar soal "cara" tapi masalah "substansi" untuk meningkatkan demokrasi daerah.

159Lihat, Kastorius Sinaga, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota dan Kabupaten: Beberapa Catatan Awal*, dalam Abdul Gaffar Karim (ed.), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Pustaka Pelajar, Agustus 2003, hlm.234.

160Lihat, M. Thalhan; Ni'matul Huda dalam Edy Sunandi Hamid dan Sobirin Malin (ed.), *Memperkokoh Otonomi Daerah-Kebijakan, Evaluasi dan Saran*, Yogyakarta: UII Press, Agustus 2004, hlm. 199-225

Dengan pemilihan langsung Kepala Daerah diandaikan bahwa mekanisme *check and balances*, bekerja baik atau sangat baik sehingga fungsi-fungsi pemerintah daerah dapat dijalankan dengan optimal.

Terlepas dari perdebatan teoritik diatas, perlu digaris bawahi bahwa pemilihan Kepala Daerah secara langsung tidak dengan sendirinya menjamin (taken for granted) peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi pada tingkat local memerlukan berbagai persyaratan. Dalam perspektif, efektivitas sistim pilkada langsung ditentukan oleh faktor-faktor atau sebutlah prakondisi demokrasi yang ada di daerah itu sendiri. Prakondisi demokrasi tersebut mencakup kualitas pemilih, kualitas dewan, sistim rekrutmen dewan, fungsi partai, kebebasan, dan konsistensi pers, dan keberdayaan masyarakat madani [civil society].¹⁶¹

3.5 Perilaku pemilih perspektif sikap

a. Perubahan Sikap

Perubahan sikap terjadi pada individu dapat dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan kognisi (*need for cognition*). Helmi (2000) menjelaskan bahwa sebagai makhluk sosial ada kebutuhan manusia untuk memahami orang lain. Sebagian orang memiliki kecenderungan untuk memikirkan secara mendalam tentang sesuatu yang terjadi pada diri sendiri dan orang lain. Hal yang dipikirkan tersebut bisa menyangkut dengan emosi yang dirasakan dan upaya untuk memperkirakan perilaku yang akan datang. Secara konkrit dicontohkan bahwa tendensi individu orang yang menjelaskan peristiwa yang tidak diharapkan atau tidak konsisten. Individu yang memiliki kebutuhan kognisi tinggi akan lebih besar terlibat dalam fikiran untuk menjelaskan penyebab sosial. Sebaliknya individu yang mempunyai kebutuhan kognisi rendah maka kurang terlibat dalam fikiran untuk menerangkan penyebab sosial. Selanjutnya individu yang memiliki kognisi tinggi akan mengingat peristiwa dengan baik dibanding dengan individu yang kognisinya rendah.

¹⁶¹Joko J. Prihatmoko, *op.cit*, hlm. 127.

Hasil penelitian dari *Lassiter, Briggs, dan Slaw* (dalam Helmi, 2000) membuktikan bahwa individu dengan kebutuhan kognitif tinggi lebih memperhatikan informasi sosial yang tidak konsisten. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kognitif tersebut maka perubahan sikap secara teoritik dapat dijelaskan oleh *Sears, Freedman, dan Peplau* (1994). Ahli-ahli tersebut mengungkapkan bahwa sikap merupakan keseimbangan kognitif mengenai suatu objek sikap. Sikap akan cenderung berubah jika tidak ada keseimbangan. Sikap meskipun diwarnai oleh afeksi, keseimbangan kognitif perlu ada. Teori mengenai sikap yang menggunakan pendekatan kognitif ini berfokus pada keseimbangan.

Heider (dalam Penrod, 1986) merupakan salah satu ahli yang menjelaskan teori keseimbangan. Teorinya dinamakan *balance theory*. Dalam teorinya Heider menyatakan bahwa individu memelihara konsistensi sikap yang menyangkut keseimbangan perasaan dan keyakinan dengan aspek yang berada pada lingkungannya.

Model Heider menyatakan bahwa individu terjadi perubahan sikap terhadap individu lain berkaitan dengan sikap yang sama atau tidak sama terhadap suatu objek, ide, peristiwa, atau situasi. Individu terja di keseimbangan atau harmoni apabila individu dengan individu lain bersikap sama terhadap suatu objek. Individu terjadi ketidakseimbangan atau tidak harmoni apabila individu dengan individu lain tidak memiliki sikap yang sama terhadap objek.

Ahli lain yang menerangkan adanya teori keseimbangan adalah *Osgood dan Tannenbaum* (dalam Penrod, 1986) dengan teorinya yang dinamakan *congruity theory*. Dalam teorinya *Osgood dan Tannenbaum* mengkaji tentang perubahan sikap terjadi ketika sumber membuat pernyataan mengenai fakta-fakta konsep. Pernyataan dari sumber terjadi keselarasan (konsisten) atau ketidakselarasan (tidak konsisten) dengan kerangka referensi dari individu. Teori keselarasan dari *Osgood dan Tannembraum* memiliki tiga variabel, yaitu : (1) sikap individu terhadap sumber pesan; (2) sikap individu terhadap evaluasi konsep atau isu terhadap sumber; (3) membuat

pernyataan mengenai konsep terhadap sumber. Proses selanjutnya adalah ide atau konsep yang berasal dari sumber sama dengan kerangka referensi individu maka terjadi keseimbangan. Sebaliknya apabila ide atau konsep yang berasal dari sumber tidak sama dengan kerangka referensi dari individu maka terjadi ketidakselarasan. Pengalaman individu mengenai ide dari individu yang tidak sama dengan pesan dari sumber mendorong individu tersebut untuk melakukan perubahan sikap yaitu menyesuaikan atau mengevaluasi pesan dari sumber.

Festinger (dalam Penrod, 1986) merupakan ahli berikutnya yang ikut memberi kontribusi untuk menjelaskan tentang teori keseimbangan. Teorinya dinamakan *dissonance*. Festinger menyatakan bahwa disonansi terjadi karena berasal dari sumber inkonsistensi logis, nilai-nilai budaya yang menentukan terjadi konsonan atau disonan, pendapat umum, dan pengalaman masa lalu. Terjadinya disonan tergantung dari tingkat kepentingan elemen-elemen yang saling berhubungan bagi orang yang bersangkutan dan jumlah disonan. Konsekuensi dari disonan tersebut akan melahirkan perubahan sikap dengan cara melakukan pengurangan disonan melalui pengubahan elemen tingkah laku, mengubah elemen kognitif lingkungan, dan/atau menambah elemen kognitif baru. Cara lain yang dilakukan dalam rangka proses perubahan sikap adalah menambah informasi baru yang menambah dukungan terhadap pendapat orang yang bersangkutan atau menambah elemen perbendaharaan kognitif.

Petty dan Cacioppo¹⁶² menerangkan secara rinci proses komunikasi persuasi yang menyebabkan perubahan sikap dengan menggunakan teori *Elaboration Likelihood Model*. Teori *The ELM Model of Persuasion* ini dapat digunakan untuk menerangkan secara spesifik mengenai persuasi untuk merubah sikap pemilih. Tahapan permulaan yang perlu diperhatikan untuk menjelaskan proses persuasi yang memiliki dampak bagi perubahan perilaku adalah pesan itu sendiri. Pesan yang disampaikan pada target tergantung pada pertimbangan proses membeberikan motivasi, relevansi dengan penerimaan, syarat personal,

¹⁶²Trenholm, S. *Persuasion and Social Influence*, New Jersey : Prentice Hall, 1989.

tanggung jawab, dan kebutuhan kognisi tinggi. Semua unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi maka pada tahapan berikutnya tergantung pada keterampilan untuk memproses informasi, distraksi (pengalihan perhatian), pengulangan, dan pengetahuan sebelumnya. Faktor-faktor tersebut dapat memenuhi syarat maka akan menentukan kualitas argumentasi yang menimbulkan dukungan, tidak mendukung, dan netral dari subjek. Proses pada tahapan dukungan, tidak mendukung, dan netral ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan struktur kognitif. Efek samping dari perubahan struktur kognitif apabila memunculkan dukungan maka akan terjadi perubahan sikap positif, sebaliknya apabila menimbulkan tidak adanya dukungan maka akan terjadi perubahan sikap negatif. Perubahan sikap positif dan negatif tersebut melalui suatu proses kognitif yang dinamakan *central route*. Proses kognitif yang melalui *central route* ini membuat sikap relatif permanen dan dapat memprediksi perilaku.

Petty dan Cacioppo (dalam Eagly dan Haiken, 1993) memberikan penjelasan lain yang berkaitan persuasi dan perubahan sikap. *The Elaboration Likelihood Model of Persuasion* tidak hanya melewati suatu proses *central route*, tetapi ada jalan lain yang dilalui pada proses persuasi yaitu *peripheral route* terjadi apabila pada tahapan proses permulaan persuasi yang mempertimbangkan proses memberikan motivasi, relevansi dengan penerimaan, syarat personal, tanggung jawab, dan kebutuhan kognisi tinggi tidak terpenuhi dengan baik. Tahapan berikutnya apabila pada bagian pemrosesan informasi, distraksi (pengalihan perhatian), pengulangan, dan pengetahuan sebelumnya tidak sesuai dengan harapan juga menyebabkan terjadinya *peripheral route*. Tahapan lain yang menyebabkan *peripheral route* jika pada kualitas argumentasi terjadi kenetralan yang membuat struktur kognitif relatif tidak berubah. Proses melewati *peripheral route* tersebut dapat membuat perubahan sikap atau sebaliknya tidak merubah sikap pada seseorang.

Baron dan Byrne¹⁶³ menjelaskan proses persuasi yang menyebabkan perubahan sikap didasarkan pada pendapat-

163Baron, R., and Byrne, D. *Social Psychology*, Eighth Edition. Boston : Allyn and Bacon, 1997

nya Petty dan Caccioppo. Baron dan Byrne menerangkan *the Elaboration Likelihood Model of Persuasion* yang berkonsentrasi pada berpikir dan tidak berpikir pada individu saat menerima pesan. Proses berpikir dan tidak berpikir ketika target menerima pesan tergantung dari argumentasi yang diberikan oleh sumber. Proses berpikir atau tidak berpikir itu yang menentukan individu dapat berubah atau tidak berubah sikapnya.

Barron dan Byrne¹⁶⁴ secara mendalam menerangkan adanya proses persuasi secara aktual terjadi. Penjelasan ini juga didasarkan pada teori *the Elaboration Likelihood Model of Persuasion* yang mengemukakan ada dua perbedaan proses kognitif ketika individu menerima pesan dari sumber. Perbedaan yang ada karena ada perbedaan usaha dalam kualitas berpikir untuk menginterpretasikan pesan yang diterimanya. Pertama adalah *central route* yang memiliki karakteristik bahwa individu menerima pesan dengan perhatian sungguh-sungguh, informasi itu dinilai penting, hubungannya dengan personal sehingga individu tersebut mencurahkan pikiran dan memanfaatkan pengetahuan sebelumnya untuk menilai pesan. Selanjutnya individu juga menguji isi pesan dengan hati-hati, berpikir secara mendalam, serta kritis dan rasional dalam mengevaluasi argumentasi yang disampaikan sumber. Proses seperti ini mampu merubah struktur kognitif yang hasilnya mendukung pernyataan dari penerima pesan dapat menyebabkan perubahan sikap maka akan menjadi bukti bahwa telah terjadi persuasi. Beda halnya jika penerima pesan tidak memperhatikan, tidak merasa terlibat, dan tidak termotivasi dengan hati-hati untuk memproses isi pesan itu, tetapi proses persuasi tetap berlangsung dinamakan *peripheral route*. Mengapa perubahan sikap tetap terjadi meski menempuh jalur *peripheral route*?

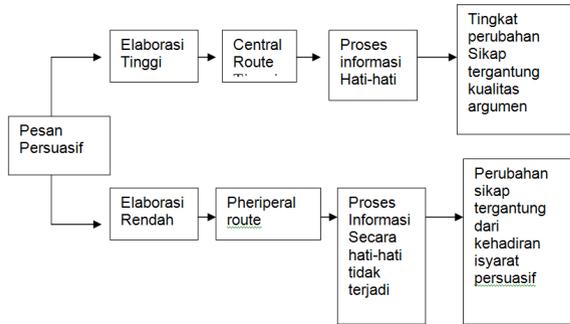
Lebih lanjut dikatakan *Baron dan Byrne*¹⁶⁵ bahwa di dalam diri penerima pesan telah terjadi perasaan positif dalam dirinya pada sumber pesan, diantaranya sumber amat menarik hati. Hal ini dapat terjadi karena sumber pesan lebih tinggi statusnya, kredibel, prestise, dan menarik secara fisik, sehingga perubahan sikap terjadi dipicu individu tidak kritis dominani

164 *ibid*

165 *ibid*

isi pesan yang disampaikan karena sudah terlanjur terpesona pada sumber.

Bagan berikut menjelaskan kerangka pikir dari Baron dan Byrne (1997) yang didasarkan pada *The Elaboration Likelihood Model of Persuasion* mengenai persuasi yang dapat merubah sikap:



Sumber : *The Elaboration Likelihood Model of Persuasion Baron and Byrne (1997)*

Rogers¹⁶⁶ menyodorkan teori tambahan untuk mengungkap proses persuasi yang menyebabkan perubahan sikap. Ada dua proses yang dikemukakan oleh Rogers dalam komunikasi persuasi yaitu *persuasi melalui pemrosesan otomatis* dan *persuasi melalui pemrosesan secara mendalam*. Persuasi melalui pemrosesan otomatis lebih menekankan sikap yang melibatkan kesadaran untuk merespon penilaian terhadap objek. Jenis perubahan sikap secara otomatis dilatarbelakangi proses penilaian yang memelihara pengaruh pada individu. Sikap seperti ini sering disebut sebagai sikap implisit. Pemrosesan secara otomatis ini berkaitan dengan atribusi, dimana pemrosesan otomatis dimana orang-orang merespon dan mengambil informasi dengan meminimalisir kesadaran dan sedikit upaya kognitif.

Selanjutnya Rogers (2003) menjelaskan bahwa pemrosesan otomatis juga melibatkan pemrosesan secara heuristik. Pemrosesan secara heuristik ini merupakan proses berpikir yang hanya sedikit melibatkan proses kognitif yang memiliki kecenderungan menyederhanakan kualitas pengukuran informasi yang diberikan. Contoh yang termasuk dari proses

¹⁶⁶Roger, S, W.,., *Social Psycology Experimental and Critical Approaches*. Maidenhead : Open University Press, 2003

ini adalah pernyataan: “Sesuatu yang terlihat baik adalah baik, Jika saya merasa baik maka hal lain juga baik, Jika saya setuju maka orang lain juga setuju, Saya percaya pada orang yang kredibel, dan Mayoritas selalu benar”.

Lebih jauh Rogers katakan bahwa heuristik pada umumnya terjadi karena motivasi yang rendah dan kesempatan yang rendah untuk mempertimbangkan penilaian secara hati-hati. Misalnya, orang-orang mengasumsikan seseorang yang cantik memiliki kebaikan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa daya tarik fisik menimbulkan peningkatan kepercayaan kepada publik. Pengiklan dapat dimaklumi saat memasarkan produknya menggunakan daya tarik fisik untuk mengajak konsumen agar membeli produknya. Proses yang bekerja kaitannya dengan hal ini diwujudkan dalam “cantik adalah baik” dan “saya setuju seperti orang-orang lain”. Proses tersebut pada dasarnya merupakan proses heuristik. Fakta-fakta empirik menunjukkan bahwa heuristik berpengaruh kepada sikap. Studi-studi dilakukan untuk membuktikan bahwa heuristik berpengaruh pada perubahan sikap.

Hovland dan Weiss¹⁶⁷ meneliti kredibilitas sumber dalam menyampaikan pesan persuasi memiliki pengaruh terhadap perubahan sikap seseorang. Hasil penelitian menyatakan bahwa orang-orang lebih melihat pada daya tarik fisik sumber yang berbicara dibanding dengan argumentasi (isi pesan) yang disampaikannya. Beda halnya dengan pemrosesan secara mendalam yang dapat menyebabkan perubahan sikap. Hal penting yang harus diperhatikan dalam proses secara mendalam pada suatu persuasi adalah bahan komunikasi.

Hovland¹⁶⁸ mengkoleksi ada tiga aspek kunci hubungan pada persuasi melibatkan sumber (*komunikator, pesan, dan audiens*). Tiga aspek dalam komunikasi tersebut dapat menyebabkan perubahan sikap apabila: pertama; Sumber (komunikator) memiliki berbagai kemampuan variasi. Misalnya : keahlian, derajat kepercayaan, daya tarik, artikulasi penyampaian, dan gaya penyampaian; Pesan yang berbeda. Misalnya argumen kuat; Audien. Pesan yang disampaikan tergantung kepada

¹⁶⁷Lihat, Roger., *ibid*

¹⁶⁸Lihat, Roger., *ibid*

perhatian dan harga diri orang-orang yang menerima pesan tersebut.

Hovland (dalam Rogers, 2003) mengidentifikasi empat proses dalam persuasi yaitu *perhatian, pemahaman, penerimaan, dan penyimpanan* untuk merubah sikap individu. Selama tiga puluh tahun lebih secara bertahap peneliti memfokuskan kepada kajian pengaruh proses dari komunikasi persuasi.

Kiesler dan Kiesler (dalam Rogers, 2003) meneliti sumber yang atraktif lebih dalam menyampaikan pesan persuasi sehingga memiliki potensi yang lebih besar untuk merubah sikap dibanding orang yang kurang atraktif. *Janis* (dalam Rogers, 2003) menyimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki harga diri rendah lebih mudah dirubah sikapnya dibanding dengan orang-orang yang memiliki harga diri tinggi.

*Hovland*¹⁶⁹ dengan teorinya konsistensi kognitif juga menerangkan bahwa dalam proses komunikasi dapat menimbulkan tekanan ke arah perubahan bila terdapat diskrepansi dengan pendapat awal dari target. Teori konsistensi menerangkan bahwa tekanan dapat dikurangi dengan berbagai cara, bila penerima atau target merubah sikapnya, yaitu mengurangi diskrepansinya, maka tekanan itu akan berkurang.

Sears, Freedman, dan Peplau (1999) memberikan contoh konkrit mengenai teori konsistensi kognitif dari Hovland yang berkaitan dengan perubahan sikap. Dalam suatu pemilihan gubernur ternyata individu telah memilih gubernur baru pada suatu wilayah. Sesudah gubernur terpilih kenyataan menunjukkan bahwa gubernur menunjukkan perubahan yang tidak disukai oleh pemilih tersebut, seperti menaikkan uang kuliah dan mengurangi dana untuk mahasiswa. Pemilih itu dihadapkan pada suatu inkonsistensi antara dukungan terhadap gubernur dengan kebijakan gubernur yang tidak anda sukai. Menurut teori konsistensi bahwa inkonsistensi akan terasa tidak menyenangkan bagi pemilih maka akan menunjukkan untuk melakukan perubahan sikap. Pemilih dapat merubah sikap terhadap kebijakan gubernur yang tidak disukai atau mengadakan perubahan sikap dukungan terhadap gubernur.

¹⁶⁹Lihat, Sears, O. D., Freeman, A. L & Peplau, A. L. *Psikologi Sosial* Jilid I. Jakarta : Penerbit Erlangga, 1999

Dalam penelitian ini perubahan sikap dapat diterangkan dengan menggunakan acuan pada *the Elaboration Likelihood Model of Persuasion*, pemrosesan secara otomatis, dan pemrosesan secara mendalam.

b. Komponen Sikap

*Franzoi*¹⁷⁰ menjelaskan tiga komponen sikap yaitu : *pertama*, Komponen kognisi yang merupakan representasi dari sesuatu yang dipercayai oleh individu; *kedua*, Komponen afeksi berkaitan dengan aspek emosional; *ketiga*, Komponen konasi berhubungan dengan aspek kecenderungan untuk bertindak.

*Mann*¹⁷¹ menyebutkan komponen sikap terdiri dari : Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu; Komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap objek sikap dan menyangkut masalah emosi. Komponen tersebut biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap. Selain itu aspek sikap yang paling berta han terhadap pengaruh-pengaruh yang akan mengubah sikap individu; Komponen perilaku yaitu tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu dengan cara -cara tertentu.

Eagly & Chaiken (1993) menerangkan bahwa komponen sikap merupakan predisposisi untuk menentukan perilaku yang terdiri dari kognitif, afektif, dan konatif. Ahli ini menyebut tiga komponen tersebut sebagai *the tripartate model of attitudes*. Dalam tiga unsur tersebut dapat dijelaskan lebih jauh bahwa komponen sikap adalah: *pertama*, Kognitif yang dinyatakan dalam seluruh kognisi yang dimiliki oleh individu mengenai objek sikap yang terdiri dari fakta, informasi, dan keyakinan tentang objek. Jumlah isi kognisi berasal dari berbagai objek sikap sehingga mengandung makna yang kompleks; *kedua*, Afektif yang berupa perasaan atau emosi terhadap objek sikap. Berbeda dengan kognitif yang memiliki dimensi kompleks, emosi relatif sederhana yang berhubungan nilai positif atau negatif, rasa suka dan tidak suka. Afektif ini merupakan

170Franzoi, L., *Social Psychology*. Third Edition. Boston : McGrawHill. 1997

171Lihat, Azwar, S., *Sikap Manusia. Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997

komponen utama karena mewarnai kognisi, memilih informasi, mengevaluasi informasi, dan mendorong untuk melakukan sesuatu; *ketiga*, Konasi merupakan kesiapan individu untuk melakukan sesuatu terhadap objek sikap. Hal ini sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh objek sikap tersebut, jika sikapnya positif maka memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu terhadap objek, sebaliknya apabila sikapnya negatif maka mempunyai kecenderungan untuk menolak sesuatu objek.

Walgito¹⁷² mengungkapkan tiga komponen sikap yaitu : pertama, Komponen kognisi (komponen perseptual) adalah komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan. Komponen ini berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap; kedua, Komponen afektif (komponen emosional) adalah komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Perasaan senang berkaitan dengan hal positif, sedang perasaan tidak senang berkaitan dengan hal negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap yang positif dan negatif; ketiga, Komponen konatif (komponen perilaku) adalah komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen tersebut menunjukkan intensitas sikap yang merupakan indikator besar atau kecilnya kecenderungan individu untuk bertindak terhadap objek sikap.

Sears, Freedman, dan Peplau (1999) menjelaskan komponen sikap yang terdiri dari : (1) Komponen kognitif yang berupa seluruh kognisi yang dimiliki seseorang mengenai objek , terutama berkaitan dengan penilaian. (2) Komponen afektif yang berupa seluruh perasaan atau emosi seseorang terhadap objek yang berkaitan dengan penilaian. (3) Komponen perilaku yang berupa kesiapan seseorang untuk bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak terhadap objek. Kognisi, afektif, dan konasi tersebut menjadi pondasi sikap pemilih pemula untuk menilai kampanye negatif dan menentukan pilihannya terhadap kandidat yang dipilihnya¹⁷³. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan oleh para ahli tersebut di atas maka dapat disimpul-

¹⁷²Walgito, B., *Psikologi Sosial [Suatu Pengantar]*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2003

¹⁷³Anam, A., *Pengaruh Kesamaan Komunikator dan Target dalam Kualitas Persuasi*, Thesis [tidak diterbitkan]. Yogyakarta : Program Studi Psikologi Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. 2000

Apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara pusingan pertama sampai ber-mula hari pemungutan suara pusingan kedua, tahap pelaksana-an pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditun-da paling lewat selama 30 hari.

BAB 4

Perilaku Pemilih di Indonesia

Perilaku pemilih Indonesia pada masa silam dapat dijadikan sumber penting untuk memahami perilaku pemilih Indonesia masa kini. Iklim sosio-politik saat ini sangat berbeza daripada sebelumnya. Ertinya kita tidak dapat membuat tanggapan bahwa pola perilaku saat ini serupa dengan masa silam. Ini berkaitan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebelum reformasi, Indonesia belum dapat dikatakan sebagai kawasan yang subur untuk menyemai amalan demokrasi. Sebagaimana yang dikatakan William Liddle²⁷, sebelum era reformasi, demokrasi cuma berkembang selama tujuh tahun [1949-1956]. Affan Gaffar²⁸ menegaskan bahwa proses politik di bawah orde baru bukanlah demokrasi, karena pemilu hanya bertujuan memperoleh legitimasi untuk tujuan pemerintahan dan membentuk kerajaan.

Perubahan lingkungan politik tersebut mengubah pengetahuan, keyakinan, dan pemaknaan para pemilih terhadap partai politik. Perubahan ini bermuara pada pembentukan pola sikap dan perilaku baru terhadap partai-partai politik dan calon pemimpin. Tentu sahaja, tahap perubahan itu berbeza, bergantung kepada individu atau kelompok yang menghadapi perubahan lingkungan politik itu.

Dalam pemilu 2004 dengan sistem pemilihan tanda gambar partai dan nama calon – sebagaimana yang telah dihurai-kan diatas – faktor calon legislatif akan memberi pengaruh besar terhadap perilaku pemilih. Lebih-lebih lagi pada pemi-

²⁷ Lihat, William Liddle, *Model Politik*, dalam Majalah Tempo, edisi 12, Oktober 1998.

²⁸ Lihat Affan Gaffar, *Javanes Voters, Case Study of Election Under Hegemonic Party Sistem*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

lihan presiden dan kepala daerah dengan sistem pemilihan langsung.

Dalam Pemilu 1999, kajian tentang perilaku pemilih sudah ikut mewarnai dinamika pemilu, namun tidak sesemarak seperti dalam Pemilu 2004. Hal ini disebabkan dua hal: *Pertama*, kajian-kajian tentang perilaku pemilih semakin mendapat tempat dan mempunyai pengaruh dalam merakam pandangan umum, termasuk kecenderungan perilaku pemilih. Bahkan di negara-negara maju, badan yang meninjau pandangan orang ramai dijadikan sebagai toggak kelima demokrasi, di samping badan-badan eksekutif, legislatif, perundangan dan akhbar.²⁹

Kedua, pemilu sekarang lebih menarik karena menempatkan rakyat sebagai "hakim tertinggi" dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Berbeza dengan pemilu sebelumnya yang dipegang oleh MPR, pemilih sekarang mempunyai kesempatan untuk secara langsung dan penuh memilih capres (calon) dan cawapres (pasangannya) yang dikehendaki. Tentunya ramai yang ingin mengetahui bahkan berkepentingan mengetahui kecenderungan arah suara pemilih dalam pemilu tersebut, terutama aktor-aktor politik yang ikut serta terlibat.

Sedangkan semasa era Orde Baru, kajian-kajian tentang perilaku pemilih dalam pemilu kurang mendapatkan ruang, walaupun ada kurang berkemampuan memberi erti yang tulen dalam merakam pandangan atau keinginan pemilih secara bebas. Seperti yang dikemukakan oleh William Liddle dan Saiful Mujani, meskipun analisis tentang perilaku pemilih sudah berkembang sejak tahun 1960an, perkembangannya hampir tidak relevan dengan konteks pemilu di Indonesia karena pemilu yang diselenggarakan semasa era Orde Baru tidak berjalan secara demokratik.³⁰ Hanya dalam suasana pemilu yang bebas, jujur dan adil suara pemilih dapat dirakam dengan tepat, jelas dan murni.

29 Saiful Mujani, "Survei dan Perilaku pemilih," Kompas, 14 Juni 2004.

30 William Liddle dan Saiful Mujani, "Politik Aliran Memudar, Kepemimpinan Nasional Menentukan Pilihan Partai Politik," Kompas, 1 September 2000.

Walaupun bagaimanapun, dalam Pemilu 2004, kehadiran badan yang meninjau pendapat ramai itu juga tidak terlepas daripada kritikan dan rasa curiga sebahagian masyarakat. Ada juga kalangan masyarakat yang berpendapat bahawa lembaga tersebut “bermain-main” dengan pandangan umum, mencari nama, bahkan sengaja merekayasa pandangan umum dalam Pemilu 2004 untuk mempengaruhi sikap pemilih terhadap partai atau calon tertentu.

Dalam sebuah masyarakat yang mempunyai tahap saling percaya yang rendah (*low trust society*) seperti bangsa Indonesia ini, kecurigaan seperti itu merupakan sesuatu yang mudah dan sering terjadi, apalagi dalam sebuah pemilu di mana ada pihak yang kurang mendapat manfaat atau terganggu dengan adanya badan tinjau pendapat tersebut.

Pemilu 2004 untuk pemilihan anggota badan legislatif sudah selesai. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat tujuh partai politik yang mendapat suara terbanyak dan mampu melewati ambang elektoral (*electoral threshold*), yaitu Partai Golkar yang mendapat 21.58% suara, diikuti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan 18.53%, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 10.57%, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 8.15%, Partai Demokrat (PD) mencatat 7.45%, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 7.34% dan Partai Amanat Nasional sebanyak 6.44%. Partai-partai politik lain tidak mampu melewati ambang 3% sokongan pemilih nasional yang ditetapkan oleh KPU. Secara keseluruhan, keputusan dapat dilihat dalam jadwal berikut ini :

Tabel 4.1: Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu 2004

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA	%
01	Partai Golkar	24,480,757	21.58%
02	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21,026,629	18.53%
03	Partai Kebangkitan Bangsa	11,989,564	10.57%
04	Partai Persatuan Pembangunan	9,248,764	8.15%
05	Partai Demokrat	8,455,225	7.45%
06	Partai Keadilan Sejahtera	8,325,020	7.34%
07	Partai Amanat Nasional	7,303,324	6.44%
08	Partai Bulan Bintang	2,970,487	2.62%
09	Partai Bintang Reformasi	2,764,998	2.44%
10	Partai Damai Sejahtera	2,414,254	2.13%
11	Partai Karya Peduli Bangsa	2,399,290	2.11%
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1,424,240	1.26%
13	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1,313,654	1.16%
14	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1,230,455	1.08%
15	Partai Patriot Pancasila	1,073,139	0.95%
16	PNI Marhaenisme	923,159	0.81%
17	Partai Persatuan Nahdatu Ummah Indonesia	895,610	0.79%
18	Partai Pelopor	878,932	0.77%
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855,811	0.75%
20	Partai Merdeka	842,541	0.74%
21	Partai Sarikat Indonesia	679,296	0.60%
22	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672,952	0.59%
23	Partai Persatuan Daerah	657,916	0.58%
24	Partai Buruh Sosial Demokrat	636,397	0.56%

Sumber : Komisi Pemilihan Umum, 2004

4.1. Perilaku Pemilih Sebelum Pemilu 2004

Apabila Pemilu 2004 menjelang, Indonesia sudah mempunyai pengalaman menyelenggarakan pemilu sebanyak lapan kali. Berdasarkan pengalaman tersebut, seharusnya terdapat banyak rujukan penting dan berguna dalam memahami perilaku pemilih dalam Pemilu 2004. Sayangnya tidak banyak kajian tentang perilaku pemilih yang didapati daripada pemilu tersebut. Hal ini disebabkan kebanyakan pemilu sebelumnya berlangsung secara tidak demokratik.

Sebelum menganalisis perilaku pemilih dalam Pemilu 2004, terlebih dahulu kita dipotretkan dinamika sosial yang berkembang menjelang pelaksanaan pemilu 2004, khususnya mengenai dinamika sosio-psikologikal pemilih menjelang pemilu anggota badan legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan tinjauan LSI,³¹ sekurang-kurangnya terdapat dua penemuan membimbangkan menjelang Pemilu 2004. Ini karena penemuan tersebut dinilai sebagai berupaya untuk menimbulkan kesan negatif terhadap kualiti pemilu yang akan dihasilkan dalam Pemilu 2004 ini. *Pertama*, ternyata bahwa alasan keikutsertaan mayoritas pemilih pada Pemilu 2004 lebih didasarkan karena faktor kewajiban lebih daripada hak walaupun ia penting dalam rangka mencari pemimpin dan kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan penemuan LSI pada bulan Januari 2004 tersebut, sekitar 46.5 % pemilih akan ikut memilih pada Pemilu 2004 karena memandangnya sebagai ritual yang wajib diikuti, sedangkan bilangan yang memandangnya sebagai hak berada di sekitar 20.6%. Yang cukup dikuatiri ialah sekitar 15.5% pemilih yang akan mengikuti pemilu memberi alasan ingin mencari pemimpin yang lebih baik, sementara 4% lainnya menjawab menginginkan kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan tinjauan tersebut, kita berkesimpulan bahwa tahap penyertaan dalam pemilu di Indonesia tidak terkait secara langsung dengan tingkat kualiti pemilu itu sendiri. Sebab, keikutsertaan mayoritas pemilih dalam pemilu lebih disebabkan karena kewajiban daripada menjadikan pemilu sebagai titik tolak atau sarana untuk melakukan perubahan sosial dalam rangka mencari pemimpin dan kehidupan yang lebih baik. Tujuan pemilu bagi mayoritas masyarakat Indonesia ialah penyertaan dalam pemilu itu sendiri.

Kedua, lambatnya usaha pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh kerajaan serta adanya ketidaksabaran di pihak masyarakat dalam menunggu hasil pembaikan tersebut. Ini membuatkan mayoritas pemilih cenderung menilai situasi dan keadaan pada era Orde Baru sebagai lebih baik berbanding dengan situasi dalam era Reformasi sekarang.

Adanya romantisme dan kerinduan sebahagian pemilih terhadap era Orde Baru ini dipandang sebagai sesuatu yang membimbangkan karena dapat membangkitkan kembali

31 Potret Buram Pemilih dan Peran Civil Society Menjelang Pemilu 2004: *Analisa Temuan Survey LSI*, Januari 2004. Dapat diakses di www.lsi.or.id.

kekuatan lama yang tidak sejajar dengan agenda reformasi yang telah digerakkan semenjak tahun 1998. Tokoh-tokoh masa lalu yang pandai memanfaatkan sentimen pemilih ini tentunya akan mempunyai peluang kembali ke pentas politik nasional.

Persoalannya, kenapa setelah lima tahun Reformasi, gambaran yang diberikan tentang pemilih masih suram? Jawabannya merupakan gabungan daripada banyak kegagalan. Antaranya ialah kegagalan kerajaan dalam memenuhi janji-janji reformasi dan kegagalan komunikasi politik dalam menjelaskan kesulitan yang ada hingga kepada kegagalan partai politik dalam melakukan pendidikan politik.³²

Kajian autentik tentang perilaku pemilih hanya dapat dijalankan dalam pemilu yang demokratis. Pemilu yang terjadi waktu Orde Baru tidak dapat dijadikan sebagai rujukan yang bermakna karena pemilu jelas berlangsung secara tidak demokratik, penuh rekayasa, tekanan dan ugutan. Pemilu Orde Baru merupakan pemilu yang semu karena keputusan sudah hampir diketahui sebelum pemilu diselenggarakan. Pemilu bukan merupakan sarana untuk pemindahan kekuasaan secara demokratik. Tujuan pemilu hanya untuk memperoleh legitimasi formal bagi kelompok yang berkuasa dalam meneruskan kekuasaan mereka.

Walau bagaimanapun, ada dua pengalaman pemilu yang dijalankan secara demokratik, yaitu pemilu 1955 dan pemilu 1999. Walaupun Herbert Feith³³ berpandangan bahwa pemilu 1955 berlangsung secara telus, jujur dan adil, tiada kajian sistematik dijalankan terhadapnya. Ini menyebabkan kita tidak berupaya untuk membuat satu generalisasi kukuh daripada pemilu tersebut.

Kajian yang dilakukan terhadap pemilu 1955 lebih bersifat deskriptif daripada analitis. Era Reformasi pada 1998 melahirkan kembali pemilu yang demokratis pada tahun 1999 dan memberikan kesempatan untuk dijalankan satu kajian yang lebih sistematik tentang perilaku pemilih. Kajian tersebut bukan sahaja dapat memberi sumbangan yang bererti untuk keperluan praktikal pada masa kini, tetapi juga dapat memban-

³² Ibid

³³ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, 1999. Hal. ix-x

tu meramal perilaku pemilih dalam pemilu yang akan datang.

Dalam satu kajian tentang perilaku pemilih dalam pemilu 1999, William Liddle dan Saiful Mujani membuat dua kesimpulan penting tentang perilaku pemilih.³⁴ *Pertama*, semakin pudarnya politik aliran dikalangan pemilih. Mereka sudah kurang mempedulikan aliran partai politik. Malahan pemilih dari kalangan santri (alim agama) sudah cukup toleran dan mampu membezakan wilayah politik dan wilayah keagamaan, dua wilayah yang sering dikaburkan oleh elit politik dalam menggerakkan sokongan rakyat.

Kedua, ketokohan tetap menjadi pemboleh ubah yang sangat penting dalam menarik sokongan pemilih. Para pemilih memilih partai tertentu bukan karena sokongan terhadap partai dan programnya, tetapi karena tokoh dalam partai tersebut. Oleh itu, hanya partai politik yang mempunyai tokoh terkemuka sahaja berjaya mendapatkan sokongan ramai dalam pemilu.

Para pemilih memilih Partai Golkar [Golongan Karya], PDI-P [Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan], PKB, [Partai Kebangkitan Bangsa], atau PAN [Partai Amanat Nasional] bukan karena visi, misi dan program kerja yang dikemukakan partai-partai tersebut, sebaliknya karena tokoh-tokoh politik nasional terlibat dalam partai-partai politik tersebut.³⁵

4.2. Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2004

Sebelum menganalisis ciri-ciri perilaku pemilih dalam pemilu 2004, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu dinamika sosial yang berkembang menjelang pelaksanaan pemilu 2004, khususnya dinamika psikologi sosial pemilihan umum menjelang pemilu anggota badan legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan tinjauan LSI [Lembaga Survey Indonesia],³⁶ sebelum pemilu 2004, sekurang-kurangnya ada dua dapatan yang membimbangkan karena dapatan ini dilihat sebagai boleh menimbulkan kesan negatif terhadap kualiti pemilu tersebut.

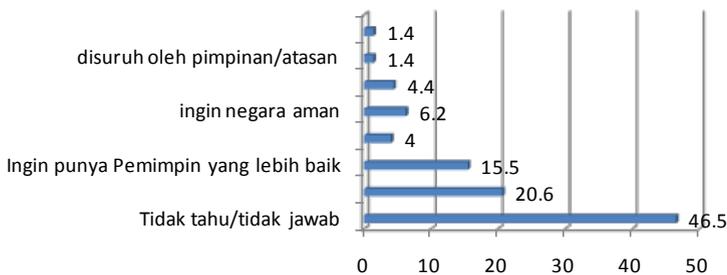
34 Liddle dan Mujani, *op.cit.*

35 Lihat Liddle dan Mujani, *op.cit.*

36 Potret Buram pemilih dan Peran Civil Society Menjelang Pemilu 2004: *Analisa Temuan Survey LSI*, Januari 2004. Dapat dilihat di www.lsi.or.id.

Pertama, mayoritas pemilih menyatakan mereka akan memilih disebabkan oleh faktor kewajiban lebih daripada faktor hak atau usaha untuk mendapatkan pemimpin dan kehidupan yang lebih baik. LSI mendapati pada bulan Januari 2004, sekitar 46.5% pemilih akan memilih karena memandangnya sebagai kewajiban, sedangkan yang memandangnya sebagai hak sekitar 20.6%. Yang cukup membimbangkan hanya sekitar 15.5% pemilih memberi alasan ingin mencari pemimpin yang lebih baik, sementara 4% memberikan jawapan bahwa mereka ingin kehidupan yang lebih baik. Dapatan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1 : Sebab-sebab Memilih



Sumber : Lembaga Survey Indonesia [LSI]

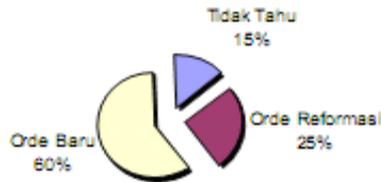
Berdasarkan tinjauan tersebut, boleh disimpulkan bahwa tahap keterlibatan yang tinggi dalam pemilu di Indonesia tidak berkait secara langsung dengan tahap kualiti pemilu itu sendiri kerana kebanyakan pemilih memandang pilih mereka lebih sebagai kewajiban, dan bukannya sebagai satu cara untuk mencari pemimpin yang boleh melakukan perubahan.

Kedua, kelambatan usaha pemulihan ekonomi oleh kerajaan dan ketidaksabaran masyarakat dalam menunggu hasil pemulihan tersebut membuatkan kebanyakan pemilih lebih cenderung melihat bahawa situasi dan keadaan era Orde Baru sebagai lebih baik jika dibandingkan dengan situasi dan keadaan dalam era Reformasi.

Kerinduan sebahagian pemilih terhadap era Orde Baru dianggap membimbangkan kerana ia dapat membangkitkan kembali sentimen yang tidak selaras dengan agenda reformasi

yang telah dijalankan semenjak tahun 1998. Tokoh-tokoh masa lalu yang pandai memanfaatkan sentimen ini tentunya akan mempunyai peluang muncul kembali ke pentas politik nasional.

Gambar 4.2 : Perilaku Pemilih Tentang Periode Pemerintahan di Indonesia



(Sumber : Lembaga Survey Indonesia (LSI))

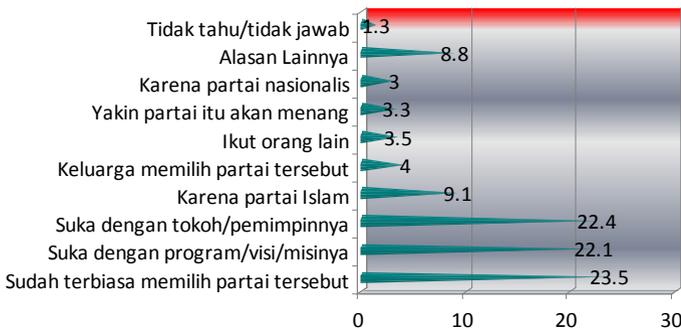
Mengapakah selepas lima tahun Reformasi, keadaan pemilih masih tidak memberangsangkan? Jawapan kepada persoalan ini merupakan gabungan daripada beberapa kegagalan. Ia bermula daripada kegagalan kerajaan dalam memenuhi janji-janji reformasi dan ditambah dengan kegagalan komunikasi politik dalam menjelaskan masalah yang dihadapi dan kegagalan partai politik dalam mendidik masyarakat.³⁷

4.3. Perilaku Pemilih dalam Pemilu 2004

Sebulan menjelang Pemilu Legislatif 2004, LSI mengadakan tinjauan peringkat nasional mengenai pilihan pemilih dalam pemilu legislatif 2009. Responden dipilih supaya mencerminkan masyarakat Indonesia seperti yang terdapat dalam data Badan Pusat Statistik [BPS] tahun 2000. Dalam tinjauan tersebut pemilih memberikan beberapa alasan yang boleh digolongkan bagi mewakili pendekatan sosiologi (seperti aliran politik, pengaruh keluarga, teman, dll.), psikologi (seperti kebiasaan memilih, ketokohan, dll.) dan alasan rasional (seperti berdasarkan visi/misi dan program partai politik). Hasil dapatan tersebut diringkaskan dalam gambar berikut:

37 David Moon, The Determinants of Turnout in Presidential Election, *Political Behavior*, Vol.14 No.2, 1992

Gambar 4.3 : Perilaku pemilih Memilih Partai Tertentu



Sumber : Lembaga Survey Indonesia [LSI]

Berdasarkan gambar di atas, unsur psikologi merupakan unsur yang paling dominan mempengaruhi pemilihan pemilih dalam pemilu legislatif 2004.

Alasan kebiasaan (23.5%) dominan melatarbelakangi pilihan politik para pemilih, ditambah dengan alasan ketokohan sebanyak 21.4%, diikuti alasan yakin bahwa partai tersebut akan menang (3.3%). Gabungan ketiga alasan tersebut menunjukkan sekitar 48.2% pemilih memberikan alasan psikologi sebagai dasar pemilihan.

Alasan berbentuk rasional berada di tempat kedua. Jika dianggap kecenderungan ini tidak berubah, sekitar 22.1% pemilih membuat pilihan berdasarkan alasan tertarik dengan visi, misi dan program partai politik. Walaupun alasan rasional lebih kecil dibandingkan dengan alasan psikologi, namun itu merupakan perkembangan yang menggembirakan memandangkan wujudnya keraguan terhadap unsur rasional dalam pemilu 2004 lalu.

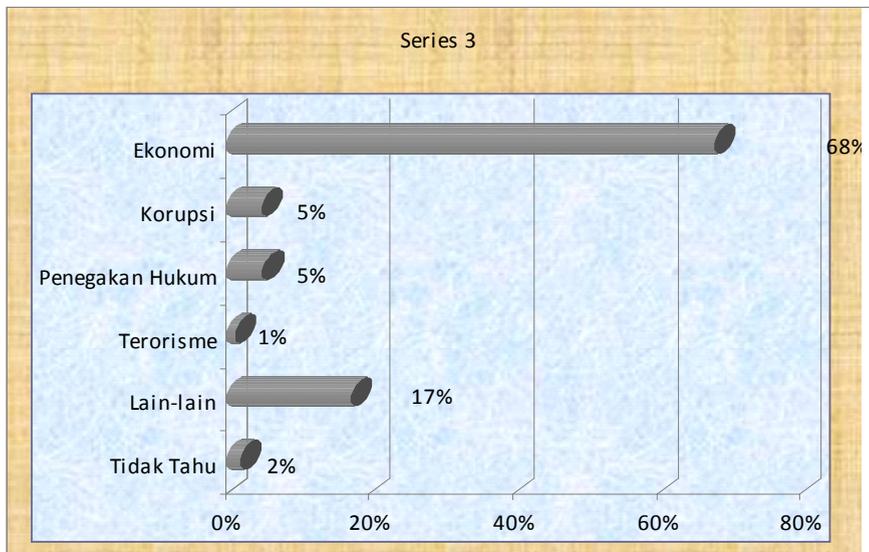
Sementara itu, sekitar 19.6% pemilih sahaja yang cenderung membuat pemilihan berdasarkan unsur sosiologi; dengan sekitar 9.1% akan memilih partai Islam, 4.0% karena mengikut ahli keluarga, 3.5% karena mengikut orang lain, dan 3.0% memberikan alasan karena partai bersifat nasional. Kecenderungan unsur sosiologi yang rendah ini amat menghairankan dan menolak pandangan ramai para pemerhati politik tentang dominasi

politik aliran dalam pemilu legislatif 2004. Tinjauan tersebut menunjukkan perkembangan pengaruh politik aliran sangat kecil.

Pertanyaannya sekarang, dengan unsur rasional mengatasi unsur sosiologis dalam pemilu 2004, apakah visi dan program yang digemari oleh pemilih tersebut? Berdasarkan tinjauan, didapati bahwa mayoritas pemilih (68%) cenderung memilih masalah ekonomi (pengangguran, kenaikan harga barangan, dll) sebagai isu yang membantu mereka membuat pemilihan.

Perhatian mayoritas pemilih terhadap isu ekonomi tersebut dilatari kekecewaan masyarakat terhadap kelambatan usaha pemulihan ekonomi. Krisis ekonomi yang berpanjangan dari tahun 1997 hingga sekarang secara langsung telah membuat pemilih cenderung untuk menempatkan isu tersebut sebagai isu dominan.

Gambar 4.4 : Isu-Isu Dominan Mempengaruhi Perilaku Pemilih



Sumber : Lembaga Survey Indonesia (LSI)

Perhatian berlebihan terhadap isu ekonomi tersebut membuat pemilih cenderung meminggirkan isu lain yang sama

penting yang berpotensi untuk menyumbang kepada krisis ekonomi, seperti isu korupsi dan keadilan perundangan. Berdasarkan tinjauan tersebut, hanya sekitar 5% dan 5.2% pemilih sahaja yang menempatkan korupsi dan keadilan perundangan sebagai isu utama padahal kedua isu tersebut penting bagi memastikan negara bebas daripada Korupsi Kolusi dan Nepotisme [KKN].

Bila dapatan tersebut kita disesuaikan dengan hasil pemilu legislatif selepas diumumkan Komisi Pemilihan Umum [KPU], terdapat kesesuaian yang menjelaskan sebab kemenangan Partai Golkar.

Pertama, masih kuatnya unsur kebiasaan pada pemilih dalam pemilihan partai politik. *Kedua*, sejarah Partai Golkar yang sudah lama sebatu dengan masyarakat dan kerinduan mereka pada era Orde Baru yang menguntungkan partai tersebut.

Penurunan mendadak PDI-P boleh dikatakan disebabkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja partai tersebut, khususnya terhadap pentadbiran Megawati dalam bidang ekonomi. Berdasarkan tinjauan LSI pada April 2004, walaupun pencapaian ekonomi makro menunjukkan peningkatan, sekitar 44.7% pemilih berpandangan bahwa keadaan ekonomi sangat "buruk", sedangkan sekitar 27.2% memberikan penilaian "sedang", dan 16.0% menilai sebagai "sangat buruk". Hanya sekitar 7.3% sahaja yang memberikan nilai keadaan ekonomi sebagai "baik". Hasil tinjauan jelas menggambarkan kekecewaan rakyat terhadap partai politik yang berkuasa pada waktu itu dan menghukumnya pada pemilu legislatif yang lalu. Tinjauan yang dilakukan oleh LP3ES, FRI, YAPPIKA dan NDI menjawab persoalan tentang ke mana larinya para pemilih PDI-P dalam Pemilu 2004. 8% pemilih berpindah kepada Partai Demokrat dan 7% beralih kepada partai Golkar.

Dalam tinjauan tersebut juga didapati bahwa peningkatan sokongan terhadap Partai Keadilan Sejahtera [PKS] merupakan hasil perpindahan pemilih partai berasaskan Islam yaitu 9% daripada PPP dan 16% daripada PAN. Selain itu, manifesto "*bersih dan lebih peduli*" serta kampanye meraih simpati PKS

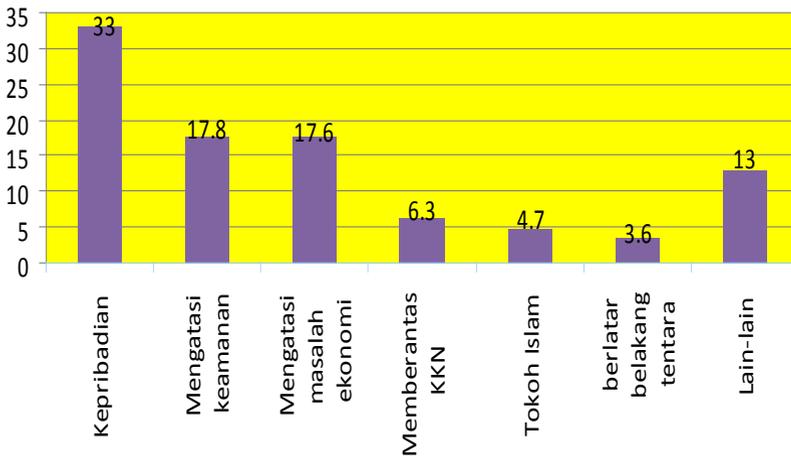
ternyata mampu menarik orang ramai, khususnya di kalangan penduduk bandar. Faktor lain yang dapat dikesan ialah sifat setia yang tinggi oleh pendukung tetap PKS.

Sokongan terhadap partai baru yaitu Partai Demokrat menunjukkan ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang semakin popular di kalangan para pemilih. Peristiwa beliau meletak jabatan daripada kabinet Megawati berjaya meraih simpati masyarakat dan menyumbang kepada peningkatan sokongan terhadap beliau dan beliau mampu memanfaatkan momentum tersebut.

Persoalannya, selain Partai Demokrat dan PKS, mengapa partai politik baru lainnya tidak mampu walaupun untuk melewati *electoral threshold*? Faktor *kebiasaan* dalam memilih partai serta faktor ketokohan membuatkan partai politik baru kurang dikenali oleh para pemilih. Umumnya, mereka tidak mempunyai tokoh yang dikenali pada peringkat nasional selain daripada jangka masa kampanye yang pendek yang menyebabkan mereka tidak berkesempatan memperkenalkan partai kepada masyarakat.

Perilaku pemilih dalam pemilu presiden juga cenderung didominasi oleh unsur psikologi berbanding unsur rasional dan sosiologi. Dapatan LSI menjelang pemilu presiden dan wakil presiden pada 5 Julai 2004 menunjukkan kebanyakan pemilih (33%) memberikan alasan 'keperibadian' sebagai sebab mereka memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sebanyak 17.8% memilih 'kemampuan mengatasi konflik' sementara alasan 'kemampuan mengatasi masalah ekonomi' mencatatkan 17.5%. Seperti juga dengan pemilu legislatif, alasan 'kemampuan memberantas korupsi' hanya mendapatkan 6.3%, dan 4.7% lagi menghendaki tokoh Islam.

Gambar 4. 5 : Alasan Pemilihan Calon Presiden (%)



Sumber : Lembaga Survey Indonesia (LSI)

Konsep keperibadian yang dimaksudkan oleh kebanyakan pemilih ialah calon yang berwibawa, mendahulukan rakyat dan jujur. Di antara lima calon presiden yang bertanding dalam pemilu yang lalu, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan calon yang dianggap mempunyai keperibadian paling baik berbanding dengan calon presiden yang lain. Persepsi tentang keperibadian tinggi SBY dibantu media yang membuat liputan meluas tentang beliau sebelum dan semasa pemilu. Selain itu, perhatian pemilih terhadap isu keamanan dan ekonomi membuatkan SBY semakin popular dalam kalangan masyarakat pemilih.

4.4 Pemilih Muslim Semakin Bersifat Sederhana

Pemilu 2004, juga menunjukkan semakin surutnya populariti parti-partai yang berlandaskan agama, khususnya parti-partai Islam. Jumlah pemilih yang beragama Islam yang ramai (89%) ternyata tidak membantu parti-partai Islam seperti PPP, PKS, PBB, PBR, PPNUI dan PSI dan organisasi sosial Islam seperti NU dan Muhammadiyah, yaitu PKB dan PAN mendapat sokongan.

Seperti dalam pemilu 1999, 2004 dan 2009 sokongan yang diberikan kepada parti-partai Islam berada jauh di bawah sokongan terhadap parti-partai kebangsaan seperti Partai

Golkar dan PDI-P. Walaupun sokongan terhadap partai-partai Islam tersebut digabungkan, masih mampu mengatasi sokongan terhadap partai-partai kebangsaan. Jumlah keseluruhan pilihan kepada partai-partai Islam hanya mencapai 22.44% (PPP - 8.15%; PKS - 7.34%; PBB - 2.62%; PBR - 2.44%; PPNU - 0.79%; dan PSI - 0.60%).

Jika dibandingkan dengan pemilu 1955, penurunannya amat ketara. Pada pemilu 1955, gabungan sokongan terhadap partai Islam mencapai 43.5%, dengan Masyumi (20.9%), NU (18.4%), PSII (2.9%) dan Perti (1.3%), sementara partai-partai kebangsaan memperoleh sebanyak 58.42% sokongan. Penurunan sokongan terhadap partai-partai Islam membuktikan bahwa faktor keagamaan semakin kurang signifikan, sekaligus menunjukkan bahwa politik agama tidak mendapat tempat seperti sebelumnya dalam kalangan pemilih.

Sokongan kepada PPP bukan karena keIslamannya, tetapi karena faktor sejarah dan kebiasaan pada sebahagian pemilih. Sementara sokongan terhadap PKS juga bukan disebabkan faktor Islam, tetapi manifesto “bersih dan lebih peduli” yang banyak menarik perhatian pemilih. Ini berbeza dengan partai-partai yang memainkan sentimen Islam - PBB, PBR, PPNU - tidak langsung berjaya meraih sokongan. Partai-partai yang berasaskan Pancasila seperti Golkar, PDI-P, Partai Demokrat, juga PKB dan PAN lebih berjaya mendapat tempat dihati pelbagai lapisan pemilih.

Kecenderungan yang sama dalam pemilu legislatif juga tergambar dalam pemilu presiden. Calon presiden Islam, terutama yang sering memainkan sentimen Islam tidak begitu popular jika dibandingkan dengan calon-calon yang jarang atau tidak pernah menggunakan sentimen agama seperti Susilo Bambang Yudhoyono.

Terdapat tiga faktor yang menyebabkan pemilih Muslim bertukar menjadi lebih sederhana. *Pertama*, keberkesanan budaya politik Orde Baru yang menindas politik Islam dalam medan awam. Penerapan Pancasila pada tahun 1985 membawa kepada peminggiran Islam di kalangan pemilih Muslim. *Kedua*, wujudnya sifat kesederhanaan dan penerimaan plu-

realisasi dalam kalangan dua organisasi besar Islam, NU dan Muhammadiyah. Kalangan elit daripada kedua organisasi tersebut sering memperkatakan tentang keselarasan ajaran Islam dengan prinsip demokrasi. Akibatnya, wacana negara Islam dan Piagam Jakarta menjadi semakin tidak popular dan tidak relevan. *Ketiga*, peranan cendekiawan Muslim seperti Nurcholis Madjid atau Jaringan Islam Liberal menanamkan kesedaran pluralisme dalam Islam yang banyak mempengaruhi warga Muslim bandar.

Selain faktor-faktor di atas, kegagalan partai-partai Islam tersebut juga disebabkan oleh kinerja dan program partai Islam itu sendiri yang tidak mendapat sambutan. Isu-isu yang dekat di hati masyarakat seperti isu ekonomi, kurang mendapat perhatian daripada partai-partai Islam. Akibatnya, mereka semakin jauh dan terasing daripada pemilih.

Daripada huraian di atas dapat disimpulkan bahwa krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia sedikit banyak membawa kesan positif. Sekarang, mulai muncul alasan rasional dan sikap pragmatik pada perilaku pemilih di Indonesia, walaupun pada waktu awal menjelang pemilu wujud keadaan yang membimbangkan. Sekarang, para pemilih melakukan pilihan berdasarkan pertimbangan yang rasional meskipun unsur psikologi masih tetap merupakan unsur yang paling dominan dalam perilaku pemilih pada pemilu 2004. Yang cukup menarik, politik aliran atau unsur sosiologi dalam perilaku pemilih tidak mencatat jumlah yang signifikan dibandingkan dengan persepsi yang selama ini membimbangkan sebahagian pemerhati politik.

Yang cukup menggembirakan sekaligus menyedihkan adalah fenomena yang terjadi pada pemilih Muslim. Ia menggembirakan karena sokongan terhadap politik aliran semakin berkurangan. Pemilih Muslim bertindak semakin pragmatik dengan mengetepikan ideologi. Yang menyedihkan ialah penurunan sokongan terhadap partai-partai Islam ini didominasi di tengah-tengah pemilih yang mayoritasnya beragama Islam.

Kenyataan tersebut seharusnya mendapatkan perhatian tokoh-tokoh partai politik yang berasaskan Islam jika mereka ingin untuk terus hidup dan berjaya dalam pemilu selanjutnya

karena mereka tidak akan dapat menggunakan sentimen agama untuk tujuan meraih kekuasaan dan jabatan.

4.5. Perilaku pemilih Pemilihan Kepala daerah Di Riau

Daripada pengamatan penulis, keadaan masyarakat di Riau tidak jauh berbeza dengan daerah lain di Indonesia dari segi agama jantina, umur, pekerjaan, aktiviti ekonomi, dan tahap pendidikan. Oleh karena itu, perilaku pemilih Riau hampir sama dengan perilaku pemilih di daerah lain di Indonesia. Walau bagaimanapun, perbezaan boleh didapati jika dibandingkan penduduk dari kawasan luar bandar dengan bandar karena jurang perbezaan perilaku pemilih lebih banyak dipengaruhi faktor-faktor ekonomi seperti pekerjaan, tahap pendidikan, dan tahap pembangunan kabupaten/kota.

Dalam pemilihan kepala daerah di Riau tahap keikutsertaan pemilih dalam kegiatan pungutan suara amat rendah. Masalah ini harus diteliti karena keikutsertaan pemilih merupakan faktor penentu pemilihan pemimpin yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di sana. Jadwal berikut ini menunjukkan tahap keikutsertaan pemilih di Riau

Tabel 4.2 : Keikutsertaan Pemilih dalam Pilkada Langsung di Riau 2005-2006

NO	KABUPATEN/ KOTA	Pemilih TERDAFTAR				JUMLAH
		MEMILIH		TIDAK MEMILIH		
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bengkalis	275,779	70.19	117,109	29.81	392,888
2	Dumai	98,463	66.29	50,068	33.71	148,531
3	Indragiri Hulu	127,567	68.50	58,655	31.50	186,222
4	Kampar	256,802	71.55	120,080	28.45	385,882
5	Kuantan Singingi	139,398	79.28	36,468	20.72	175,866
6	Pekanbaru	242,481	55.35	195,550	44.65	438,031
7	Pelalawan	111,575	71.48	44,509	28.52	156,084
8	Rokan Hilir	204,997	70.11	87,365	29.89	292,362
9	Rokan Hulu	174,302	74.78	58,766	25.22	233,068
10	Siak Sri Indrapura	137,971	72.23	53,044	27.77	191,015
11	Indragiri Hilir	-	-	-	-	-

Sumber : Data KPUD Kabupaten/Kota se-Riau

Konsep perilaku pemilih yang tidak memilih merujuk kepada mereka yang memiliki hak memilih tetapi tidak memilih. Ini berlaku mungkin karena tidak bermotivasi untuk memilih atau karena dihalang daripada memilih. Ada daripada mereka yang pergi ke tempat pemilihan dijalankan tetapi tidak menunaikan tanggungjawab tersebut dengan baik, contohnya merosakkan kertas pilih dengan sengaja.

Terdapat dua pendekatan teoritis utama dalam menjelaskan perilaku pemilih tidak memilih, yaitu: (1) yang melihat kepada aspek sosial dan psikologi pemilih dan aspek institusi sistem pemilu, dan (2) yang melihat kepada aspek harapan pemilih tentang soal untung/rugi atas pilihan mereka. Pendekatan ini menyatakan jika pelaburan yang dikeluarkan untuk tidak memilih lebih kecil daripada keuntungan yang akan diperoleh, keputusannya akan cenderung untuk tidak memilih.

Mengamati data pemilu kepala daerah langsung Riau tahun 2005-2006 menunjukkan bahwa ketidakhadiran pemilih berlaku karena beberapa sebab. *Pertama*, ketidakhadiran pemilih mempengaruhi tahap legitimasi calon yang menang bertanding. *Kedua*, tiada hubungan yang kuat antara ketidakhadiran dengan faktor-faktor jantina, latar belakang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan pemilih. *Ketiga*, ada perhubungan antara keputusan pemilih untuk tidak hadir dengan faktor-faktor psikologi seperti anomia (*anomy*) dan bukannya apati (*apathy*). *Keempat*, belum terdapat data yang memadai untuk menghubungkan kecenderungan pilih rasional dengan tahap ketidakhadiran pemilih. *Kelima*, terdapat perhubungan antara pemboleh ubah penyelenggaraan pilkada dan faktor kepentingan calon yang mempertahankan jabatan dengan ketidakhadiran pemilih. Ketidakhadiran pemilih dalam jumlah yang besar mempengaruhi secara langsung tahap legitimasi yang dimiliki oleh calon yang berjaya.

Jadwal 4.3 : Perbandingan antara Jumlah Pemilih yang Tidak Memilih dengan Jumlah Pilih Diraih Pemenang dalam Pemilihan Kepala daerah Langsung di Riau Tahun 2005-2006.

NO	KABUPATEN/ KOTA	Pemilih				JUMLAH
		TIDAK Memilih		PEROLEHAN SUARA PEMENANG PILKADA		
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bengkalis	117,109	29.81	106,615	27.13	392,888
2	Dumai	50,068	33.71	52,211	35.15	148,531
3	Indragiri Hulu	58,655	31.50	65,125	34.97	186,222
4	Kampar	120,080	28.45	107,521	27.86	385,882
5	Kuantan Singingi	36,468	20.72	61,679	35.07	175,866
6	Pekanbaru	195,550	44.65	82,962	18.93	438,031
7	Pelalawan	44,509	28.52	64,373	41.24	156,084
8	Rokan Hilir	87,365	29.89	68,911	23.57	292,362
9	Rokan Hulu	58,766	25.22	69,116	29.65	233,068
10	Siak Sri Indrapura	53,044	27.77	62,282	32.60	191,015
11	Indragiri Hilir	-	-	-	-	-

Sumber : Data KPUD Kabupaten/Kota se Riau

Data di atas menunjukkan ada empat daerah yang jumlah pemilih tidak keluar memilih lebih tinggi daripada persen-pemilih yang memberikan kemenangan kepada calon kepala daerah yang menang dalam pemilu tersebut. Daerah-daerah tersebut ialah Kabupaten Bengkalis (selisih 2%), Kabupaten Kampar (selisih sekitar 1%), Kabupaten Rokan Hilir (selisih sekitar 6%), dan Kota Pekanbaru (selisih sekitar 25%). Daerah-daerah yang mana jumlah pilihan kepada pemenang mengata-si jumlah pemilih yang tidak keluar memilih ialah Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hulu, Rokan Hulu dan Siak Sri Indrapura. Namun, jumlah tersebut juga tidak jauh berbeza. Hanya pe-menang di Kabupaten Pelalawan dan Kuantan Singingi men-catat perbedaan yang agak jauh.

BAB 5

Orientasi Faktor Pemilihan

Perilaku spesifik pemilih Indonesia dimasa silam dapat dijadikan sumber informasi penting untuk memahami perilaku pemilih Indonesia masa kini. Iklim sosial politik saat ini sangat berbeda dengan sebelumnya, artinya kita tidak bisa begitu saja berasumsi bahwa pola perilaku saat ini identik dengan masa silam. Faktor ini dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebelum reformasi, Indonesia belum dapat dikatakan sebagai lahan subur untuk menyemai praktek demokrasi. Sebagaimana dikatakan William Liddle¹ sebelum era reformasi, demokrasi cuma berkembang tujuh tahun [1949-1956]. Hal ini dipertegas oleh Affan Gaffar² menyatakan proses politik dibawah orde baru bukanlah demokrasi, karena pemilu hanya bertujuan memperoleh legitimasi pemerintah untuk menata irama politik dan ekonomi.

Perubahan lingkungan politik tersebut mengubah pengetahuan, keyakinan, dan pemaknaan para pemilih terhadap partai politik. Perubahan ini bermuara pada pembentukan pola sikap dan perilaku baru terhadap partai-partai politik dan calon pemimpin. Tentu saja, tingkat perubahan itu berbeda, tergantung pada individu atau kelompok yang menghadapi perubahan lingkungan politik itu.

5.1. Orientasi Agama

Agama merupakan salah satu faktor penting pembentukan perilaku pemilih di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beber-

1 Lihat, William Liddle, *Model Politik*, dalam Majalah Tempo, edisi 12, Oktober 1998.

2 Lihat Affan Gaffar, *Javanese Voters, Case Study of Election Under Hegemonic Party sistim*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

apa kajian yang pernah dilakukan seperti kajian Affan Gaffar [1992], Hernoe [1994], dan Suwondo [1997], menunjukkan pola aliran keagamaan masih cukup berpengaruh pada seseorang dalam menentukan pilihannya. Sejak orde baru, korelasi antara tingkat kesolehan dikalangan pemeluk Islam dan pilihan politik mencair. Ketaatan beribadah dan keterikatan terhadap jaringan komunikasi kiai, mubaligh, dan pengajian tidak berkaitan dengan perilaku politik umat Islam.

Gejala sosial umat tahun 1987³ memberikan petunjuk bahwa tidak tepat mengukur kesolehan seseorang muslim dengan melihat dukungannya kepada partai Islam. Lebih jauh dijelaskan, fenomena itu berkaitan dengan pergeseran strategi perjuangan dan sosialisasi Islam. Memudarnya Ideologi Islam dalam kancah politik, selain disebabkan oleh kuatnya dominasi pemerintah juga karena lemahnya posisi sosio ekonomi umat. Kemiskinan, kesulitan ekonomi dan pendidikan, merupakan faktor penting bagi umat untuk tidak lagi memutlakkan agama dalam ideology politik.

Janji ideologis dan teologis dianggap tidak efektif membentuk perilaku pemilih tanpa diiringi bukti kemampuan memberikan solusi atas berbagai persoalan nyata yang dihadapi umat. Sebaliknya bila partai yang tidak berideologikan Islam, mampu memberikan jawaban yang konkrit terhadap masalah yang dihadapi, maka pihak tersebut akan mendapat dukungan umat Islam jika memang secara jelas partai ini tidak menyudutkan atau memusuhi Islam.

a. Faktor Kelas Sosial

Kajian terdahulu menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi nyata antara tingkat pendidikan, kekayaan, dan pekerjaan dengan perilaku pemilih, kecuali untuk para pemilih partai Golkar. Perilaku kaki tangan kerajaan memilih Golkar tampaknya tidak dapat disimpulkan sebagai faktor kelas. Perilaku kaki tangan kerajaan tersebut sangat ditentukan oleh faktor pengaruh pemimpin. Sebab mereka mempertimbangkan kemudahan-kemudahan yang diperoleh dari birokrat, jika me-

³ Lihat Mulkhan, *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Tahun 1965-1987 dalam Perspektif Sosiologis*, Jakarta : Rajawali Press, 1995

milih dan tidak memilih Golkar. Ada ketentuan tidak tertulis, bahwa pengusaha dan kalangan bisnis yang banyak berhubungan dengan kerajaan, jika tidak mendukung Golkar, cenderung tidak akan mendapatkan proyek dan fasilitas yang menguntungkan perusahaan mereka.

Faktor kelas patut dianggap penting oleh partai politik, walau belum dibuktikan oleh kajian ilmiah. Dukungan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya dikaitkan dengan faktor wong cilik (masyarakat kelas bawah), menurut Bahtiar Effendi⁴ selama ini Partai Demokrasi Indonesia lebih disosialisasikan, paling tidak pada masa kampanye sebagai partai yang membela orang kecil. Faktor social lain yang perlu mendapat perhatian ialah usia, jentina, dan pemilih muda.

b. Faktor Kepemimpinan dan Ketokohan.

Kajian tentang perilaku pemilih di pedesaan Jawa, pemimpin informal dan formal member pengaruh terhadap para pemilih. Para pemilih yang dekat dengan aparat pemerintah desa cenderung memilih Golkar, sekitar 40 persen responden mengatakan, mereka memilih Golkar karena mengikuti garis pemimpin mereka [kepala Desa, lurah, kepala dukuh dan lain sebagainya] sedangkan para pemilih yang dekat dengan pemimpin agama cenderung memilih Partai Persatuan Pembangunan [PPP], karena meneladani pemimpin mereka dan menganggap melakukannya adalah bahagian dari ibadah.

Kajian Suwondo⁵ menyimpulkan para pemilih baik yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), cenderung berorientasi paternalistic dan kurang mandiri dalam menentukan semua keputusan yang hendak diambilnya. Para pemilih masih memandang para pemimpin sebagai figure yang harus dipatuhi dan dipanuti segala tindakan dan perilakunya. Apakah kepemimpinan tersebut akan tetap menjadi faktor yang penting pada pembentukan perilaku pemilih yang akan datang?

4 Lihat, Bahtiar Effendi, *PDI, Mega, dan Islam*, dalam Tabloid Tekad Nomor Perkenalan, 26 Oktober 1998.

5 Lihat, Suwondo, *Perilaku Pemilih Masyarakat Perkotaan pada Pemilu 1997: Studi di Kodya Dati II Bandar Lampung* makalah disajikan dalam Seminar Nasional XV dan Kongres Nasional IV Asosiasi Ilmu Politik Indonesia di Bandung, 23-25 september 1997.

Dalam satu tulisan⁶ menyebutkan para ulama, terutama yang kharismatik, diperebutkan oleh partai politik. Hal ini dilakukan sebagai bahagian strategi untuk merebut simpati para pemilih yang mayoritas beragama Islam.

Strategi posisi ulama menurut Malik Fajar⁷ merupakan satu diantara lima pilar penting kekuatan Islam yang mengakar dalam masyarakat, empat pilar lainnya adalah tempat ibadah, tradisi keagamaan, lembaga pendidikan, dan lembaga social lainnya yang melekat dan identik dengan kehidupan ulama. oleh karena itu peranan kiai dalam pembentukan perilaku pemilih tidak bias diabaikan.

Faktor kepemimpinan tidak boleh lepas dari ketokohan seorang pemimpin, sebagaimana studi yang dilakukan Liddle dan Mujani (2000), menyimpulkan faktor ketokohan menjadi tulang punggung untuk meraih suara. Ketokohan Habibie di Golkar berpengaruh pada perolehan suara Golkar di Sulawesi pada pemilu 1999 sangat besar yakni 67% dibandingkan daerah-daerah lain. Begitu juga dengan ketokohan Megawati berperan besar terhadap perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDIP]. Demikian juga faktor ketokohan Amin Rais di Partai Amanat Nasional [PAN], termasuk ketokohan Gur Dur dalam Partai Kebangkitan Bangsa [PKB].

5.2. Orientasi Isu

Pada pemilu masa orde baru, orientasi isu tampaknya tidak member pengaruh yang besar terhadap perilaku pemilih. Hal ini terjadi di kalangan pemilih yang dapat digolongkan sebagai komunitas pemilih rasional-kritis. Pada pemilu 1992, hubungan antara faktor orientasi isu dan program dengan perilaku pemilih tidak menunjukkan pengaruh yang kuat, terutama yang memilih Partai Demokrasi Indonesia [PDI]. Sebahagian pemilih tertarik pada isu dan program Partai Demokrasi Indonesia [PDI], tetapi sebahagian besar justru memilih Golkar karena tidak percaya bahwa partai tersebut mampu memperjuangkan isu dan program yang ditawarkan⁸.

6 Lihat, Tabloid *Tekad*, edisi 18-24 Januari 1999.

7 Lihat, Adman Nursal, *Op Cit*, hlm, 91

8 Lihat, Harnoe, R, *Tinglah Laku Memilih di Kalangan Mahasiswa UI pada Pemilu 1992*. Skripsi Sarjana Ilmu Politik Universitas Ilmu Politik.

Lemahnya pengaruh isu pada perilaku pemilih pada waktu itu tampaknya tidak terlepas dari lingkungan social politik orde baru. Dengan posisi sebagai subordinat pemerintah, partai politik tidak bebas mengemukakan dan menghadapi kesulitan besar untuk memperjuangkan perwujudan isu atau program yang khas “tawaran partai” dan berbeda dengan kebijakan pemerintah. Sebab itu, tawaran program dan isu yang diajukan pada masa kampanye, tampaknya tidak banyak berpengaruh pada perilaku pemilih.

Pada pemilu era reformasi sekarang ini, faktor isu dan program member pengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih, terutama pada pemilih kalkulatif. Di samping karena besarnya perhatian masyarakat terhadap persoalan yang dihadapi bangsa, yakni krisis berbagai bidang, strateginya faktor isu disebabkan juga oleh kebebasan setiap partai politik mengemas isu dan programnya. Dalam keadaan krisis, pilihan-pilihan isu terbentang luas, semakin tingginya pendidikan masyarakat, yang meningkatkan daya kritis masyarakat, merupakan faktor yang menyebabkan pentingnya peranan isu dan program.

5.3. Orientasi Kandidat.

Pengaruh orientasi kandidat terhadap pola perilaku pemilih politik tidak tampak pada pemilu pada masa zaman orde baru. Dengan sistim pemilu yang memilih partai, umumnya para pemilih tidak memperhatikan kandidat saat pencoblosan. Sebahagian kandidat legislatif saat itu tidak mengakar dalam kehidupan masyarakat di wilayah pemilihan mereka. Hal ini disebabkan penetapan kandidat merupakan kebijakan pusat yang sering tidak memperhatikan aspirasi daerah. Sebahagian besar pemilih tidak mengetahui siapa yang akan mewakili mereka di parlemen setelah hasil pemilu diketahui.

Perilaku pemilih pada pemilu 1999, walaupun masih sistim pencoblosan lambang partai, tapi dipengaruhi faktor kandidat. Proses pemilu yang demokratis membuat partai politik bebas mengajukan kandidatnya. Selain itu, dalam persaingan yang ketat itu, pemimpin partai ditingkat wilayah diberi ruang untuk mengajukan figure yang dikenal para pemilih di

unit wilayah pemilihan bersangkutan. Sebahagian partai juga mengkomunikasikan kandidat yang diajukan untuk wilayah meskipun sebahagian lainnya lagi tidak melakukan hal yang sama.

Pada pemilu 2004 dengan sistim pemilihan tanda gambar partai dan nama kandidat, sebagaimana telah diuraikan diatas, faktor kandidat legislatif akan member pengaruh besar terhadap perilaku pemilih. Terlebih-lebih pada pemilihan presiden dan kepala daerah dengan sistim pemilihan langsung.

Pada Pemilu 1999 sebenarnya studi tentang perilaku pemilih tersebut sudah ikut mewarnai dinamika pemilu saat itu, namun tidak sesemarak seperti pada Pemilu 2004. Hal ini karena disebabkan dua hal : *Pertama*, studi-studi tentang perilaku pemilih semakin mendapat tempat dan mempunyai peran penting dalam merekam opini publik, termasuk kecendrungan perilaku pemilih. Bahkan di negara-negara maju, lembaga jajak pendapat justru dijadikan sebagai sokoguru demokrasi kelima, di samping lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers.⁹ *Kedua*, pemilu saat ini lebih menarik karena menempatkan rakyat sebagai "hakim tertinggi" dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang dipegang oleh MPR, saat ini massa pemilih mempunyai kesempatan untuk secara langsung dan penuh dalam memilih capres dan cawapres yang dikehendakinya. Tentunya banyak kalangan yang ingin mengetahui bahkan berkepentingan mengetahui kecenderungan arah suara pemilih dalam pemilu tersebut, terutama aktor-aktor politik yang ikut bermain.

Sedangkan pada era Orde Baru studi-studi tentang perilaku pemilih dalam pemilu kurang mendapatkan ruang sama sekali, dan walaupun ada kurang bisa memberi arti yang otentik dalam merekam opini atau keinginan pemilih secara bebas. Seperti yang dikemukakan oleh *William Liddle* dan *Saiful Mujani*, meskipun analitis tentang perilaku pemilih sudah berkembang sejak tahun 1960an, tetapi perkembangannya hampir tidak ada relevansinya dengan konteks pemilu di Indonesia

9 Saiful Mujani, "Survei dan Perilaku Pemilih," Kompas, 14 Juni 2004.

karena pemilu yang diselenggarakan pada era Orde Baru tidak berjalan demokratis.¹⁰ Hanya dalam suasana pemilu yang bebas, jujur dan adil suara pemilih dapat direkam dengan akurat, jelas dan murni. Meski demikian, pada Pemilihan raya 2004 ini keberadaan lembaga-lembaga jajak pendapat itupun tidak terlepas dari kritik dan kecurigaan sebagian kalangan masyarakat. Ada juga kalangan masyarakat yang mencurigai lembaga tersebut “bermain-main” dengan opini publik, mencari popularitas atau bahkan sengaja melakukan rekayasa terhadap opini publik pada Pemilu 2004 ini dalam rangka mempengaruhi sikap pemilih terhadap partai atau calon tertentu. Pada sebuah masyarakat yang mempunyai tingkat saling percaya yang rendah (*low trust society*) seperti bangsa Indonesia ini adanya kecurigaan seperti itu merupakan sesuatu yang mudah dan sering terjadi, apalagi dalam sebuah pemilu di mana ada pihak kurang diuntungkan atau terganggu dengan adanya hasil jajak pendapat tersebut.

Saat ini Pemilu 2004 untuk pemilihan calon anggota badan legislatif sudah selesai. Berdasarkan hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat tujuh partai politik yang mendapatkan suara terbanyak dan mampu melewati ambang elektoral (*electoral threshold*), yaitu Partai Golkar yang mendapatkan suara terbanyak sebesar 21,58 % suara. Kemudian secara berturut-turut diikuti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebesar 18,53%, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 10,57%, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 8,15% Partai Demokrat (PD) sebesar 7,45%, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 7,34% dan Partai Amanat Nasional (6,44%). Sedangkan partai-partai politik lainnya tidak mampu melewati ambang yang ditetapkan oleh KPU sebesar 3% suara pemilih secara nasional tersebut. Secara keseluruhan dapat dilihat pada table berikut ini :

¹⁰ William Liddle dan Saiful Mujani, “Politik Aliran Memudar, Kepemimpinan Nasional Menentukan Pilihan Partai Politik,” Kompas, 1 September 2000.

Tabel 5.1 : Urutan Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu 2004

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA	%
01	Partai Golkar	24,480,757	21,58%
02	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21,026,629	18,53%
03	Partai Kebangkitan Bangsa	11,989,564	10,57%
04	Partai Persatuan Pembangunan	9,248,764	8,15%
05	Partai Demokrat	8,455,225	7,45%
06	Partai Keadilan Sejahtera	8,325,020	7,34%
07	Partai Amanat Nasional	7,303,324	6,44%
08	Partai Bulan Bintang	2,970,487	2,62%
09	Partai Bintang Reformasi	2,764,998	2,44%
10	Partai Damai Sejahtera	2,414,254	2,13%
11	Partai Karya Peduli Bangsa	2,399,290	2,11%
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1,424,240	1,26%
13	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1,313,654	1,16%
14	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1,230,455	1,08%
15	Partai Patriot Pancasila	1,073,139	0,95%
16	PNI Marhaenisme	923,159	0,81%
17	Partai Persatuan Nahdatu Ummah Indonesia	895,610	0,79%
18	Partai Pelopor	878,932	0,77%
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855,811	0,75%
20	Partai Merdeka	842,541	0,74%
21	Partai Sarikat Indonesia	679,296	0,60%
22	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672,952	0,59%
23	Partai Persatuan Daerah	657,916	0,58%
24	Partai Buruh Sosial Demokrat	636,397	0,56%

Sumber : Komisi Pemilihan Umum, 2004

5.4. Perilaku pemilih Sebelum Pemilu 2009

Sampai menjelang Pemilu 2004 lalu sebenarnya kita sudah mempunyai pengalaman delapan kali menyelenggarakan pemilu. Berdasarkan pengalaman pemilu tersebut, seharusnya kita telah mempunyai banyak referensi penting dan berguna dalam memahami perilaku pemilih pada Pemilu 2004. Sayangnya tidak banyak studi tentang perilaku pemilih yang didapatkan dari pemilu masa lalu tersebut. Hal ini disebabkan karena sekalipun kita sudah delapan kali punya pengalaman mengadakan pemilu, tetapi kebanyakannya berlangsung tidak demokratis.

Sebelum menganalisis karakteristik perilaku pemilih pada Pemilu 2004, ada baiknya terlebih dahulu kita memotret dinamika sosial yang berkembang menjelang pelaksanaan Pemilu 2004, khususnya mengenai dinamika sosio-psikologis massa pemilih menjelang pemilu anggota badan legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Berdasarkan survei LSI,¹¹ setidaknya terdapat dua temuan yang cukup mengkhawatirkan menjelang Pemilu 2004. Disebut mengkhawatirkan karena temuan-temuan tersebut dinilai bisa menimbulkan dampak negative terhadap kualitas pemilu yang akan dihasilkan pada Pemilu 2004 ini. **Pertama**, ternyata alasan keikutsertaan mayoritas pemilih pada Pemilu 2004 lebih didasarkan karena faktor kewajiban daripada hak maupun alasan dalam rangka mencari pemimpin dan kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan temuan LSI pada bulan Januari 2004 tersebut, sekitar 46,5 % pemilih akan ikut memilih pada Pemilu 2004 karena memandangnya sebagai ritual yang wajib diikuti, sedangkan yang memandangnya sebagai hak sekitar 20,6%. Yang cukup mengkhawatirkan ternyata hanya sekitar 15,5% pemilih saja yang akan ikut pemilu karena alasan ingin mencari pemimpin yang lebih baik dan 4% lainnya ingin kehidupan sehari-hari yang lebih baik.

Berdasarkan survei tersebut, kita menemukan makna bahwa ternyata tingginya tingkat partisipasi dalam pemilu di Indonesia tidak terkait secara langsung dengan tingginya tingkat kualitas pemilu itu sendiri. Sebab, keikutsertaan mayoritas pemilih dalam pemilu lebih disebabkan karena kewajiban daripada menjadikan pemilu sebagai momentum atau sarana untuk melakukan perubahan sosial dalam rangka mencari pemimpin dan kondisi yang lebih baik. Tujuan pemilu bagi mayoritas masyarakat Indonesia adalah partisipasi pemilu itu sendiri. **Kedua**, lambannya usaha perbaikan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini di satu sisi, serta adanya ketidaksabaran masyarakat dalam menunggu hasil perbaikan tersebut di sisi lain, membuat mayoritas pemilih cenderung memandangi situasi dan kondisi pada era Orde Baru dinilai lebih

11 Potret Buram pemilih dan Peran Civil Society Menjelang Pemilu 2004: *Analisa Temuan Survey LSI*, Januari 2004. Dapat dilihat di www.lsi.or.id.

baik dibandingkan dengan situasi dan kondisi di era Reformasi saat ini. Adanya romantisme dan kerinduan sebagian pemilih terhadap era Orde Baru tersebut dipandang sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan karena dapat membangkitkan kembali kekuatan lama yang tidak sejalan dengan agenda reformasi yang telah digulirkan sejak tahun 1998. Tokoh-tokoh masa lalu yang pandai memanfaatkan sentiment pemilih ini tentunya akan mempunyai peluang maju kembali ke pentas politik nasional.

Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa lima tahun Reformasi tersebut justru menghasilkan potret buram pemilih? Jawabannya ini merupakan gabungan dari banyak kegagalan. Mulai dari kegagalan pemerintah dalam memenuhi janji-janji reformasi, kegagalan komunikasi politik dalam menjelaskan kesulitan yang ada, sampai kegagalan partai politik dalam melakukan pendidikan politik.¹²

Padahal hanya pada pemilu yang demokratis otentisitas studi tentang perilaku pemilih dapat diungkap dengan baik. Sedangkan pemilu yang terjadi pada masa Orde Baru tidak dapat dijadikan sebagai rujukan yang berarti karena jalannya pemilu berlangsung semu, tidak demokratis, penuh rekayasa, tekanan dan intimidasi. Pemilu Orde Baru merupakan pemilu yang semu sebab sudah hampir diketahui hasilnya sebelum pemilu diselenggarakan. Pemilu bukan merupakan sarana untuk rotasi kekuasaan secara demokratis. Tujuan pemilu hanya untuk memperoleh legitimasi formal bagi kelompok yang berkuasa dalam melanggengkan kekuasaannya.

Meski demikian, kita mempunyai dua pengalaman Pemilu yang demokratis, yaitu Pemilu 1955 dan Pemilu 1999. Namun pada pemilu 1955, sekalipun *Herbert Feith*¹³ menyebutnya sebagai pemilu yang paling luber [langsung, umum, bebas dan rahasia] dan jurdil [jujur dan adil], tetapi tidak ada studi yang sistematis dengan metodologi yang ketat hingga generalisasi yang realistis yang dapat ditarik dari pemilu tersebut.

Karakteristik studi pada pemilu 1955 lebih bersifat deskriptif daripada analitis. Munculnya era Reformasi pada 1998 mela-

¹² Ibid

¹³ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, 1999. Hal. ix-x

hirkan kembali suatu pemilu yang demokratis pada 1999 yang lalu sehingga memberikan kesempatan bagi dimulainya studi analitis tentang tingkahlaku pemilih secara lebih sistematis. Studi tersebut bukan saja dapat memberi sumbangan yang berarti untuk kebutuhan-kebutuhan praktis saat ini, tetapi juga dapat membantu memperkirakan perilaku pemilih pada pemilu selanjutnya.

Dalam studi tentang tingkahlaku pemilih pada pemilu 1999, *William Liddle* dan *Saiful Mujani* menemukan dua kesimpulan penting dalam memahami perilaku pemilih pada pemilu tersebut.¹⁴ *Pertama*, semakin mudarnya politik aliran di tingkat massa pemilih. Massa pemilih cenderung sudah kurang memperdulikan aliran dari masing-masing partai politik. Massa pemilih dari kalangan santripun sudah cukup toleran dan mampu membedakan wilayah politik dan wilayah keagamaan, dua wilayah yang sering dikaburkan oleh elit politik dalam memobilisasi dukungan massa. *Kedua*, ketokohan tetap menjadi variabel yang sangat penting dalam menarik dukungan massa pemilih. Para pemilih memilih partai tertentu bukan karena daya tarik terhadap partai dan programnya, melainkan lebih karena ketertarikan terhadap tokoh yang ada di partai tersebut. Oleh karenanya hanya partai politik yang mempunyai tokoh terkemuka saja yang mendapatkan suara signifikan pada pemilu tersebut. Para pemilih memilih Partai Golkar [Golongan Karya], PDI-P [Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan], PKB, [Partai Kebangkitan Bangsa], atau PAN [Partai Amanat Nasional] bukan karena daya tarik terhadap visi, misi dan program kerja partai-partai tersebut, melainkan lebih karena adanya tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam partai politik tersebut.¹⁵

5.5. Perilaku pemilih Menjelang Pemilu 2009

Sebelum menganalisis karakteristik perilaku pemilih pada Pemilu 2004, ada baiknya terlebih dahulu kita memotret dinamika sosial yang berkembang menjelang pelaksanaan Pemilu 2004, khususnya mengenai dinamika sosio-psikologis mas-

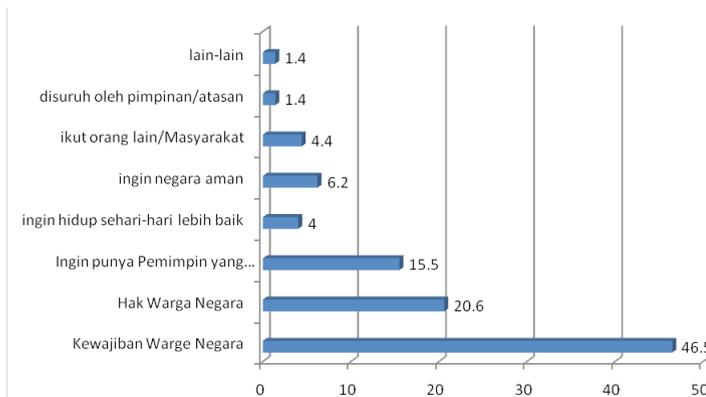
14 Liddle dan Mujani, *op.cit.*

15 Lihat Liddle dan Mujani, *op.cit.*

sa pemilih menjelang pemilu anggota badan legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Berdasarkan survei LSI [Lembaga Survey Indonesia],¹⁶ setidaknya terdapat dua temuan yang cukup mengkhawatirkan menjelang Pemilu 2004. Disebut mengkhawatirkan karena temuan-temuan tersebut dinilai bisa menimbulkan dampak negative terhadap kualitas pemilu yang akan dihasilkan pada Pemilu 2004 lalu.

Pertama, ternyata alasan keikutsertaan mayoritas pemilih pada Pilihan 2004 lebih didasarkan karena faktor kewajiban daripada hak maupun alasan dalam rangka mencari pemimpin dan kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan temuan LSI pada bulan Januari 2004 tersebut, sekitar 46,5 % pemilih akan ikut memilih pada Pemilu 2004 karena memandangnya sebagai ritual yang wajib diikuti, sedangkan yang memandangnya sebagai hak sekitar 20,6%. Yang cukup mengkhawatirkan ternyata hanya sekitar 15,5% pemilih saja yang akan ikut pemilu karena alasan ingin mencari pemimpin yang lebih baik dan 4% lainnya ingin kehidupan sehari-hari yang lebih baik. Lebih lengkapnya temuan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.1 : Alasan Perilaku ikut Memilih



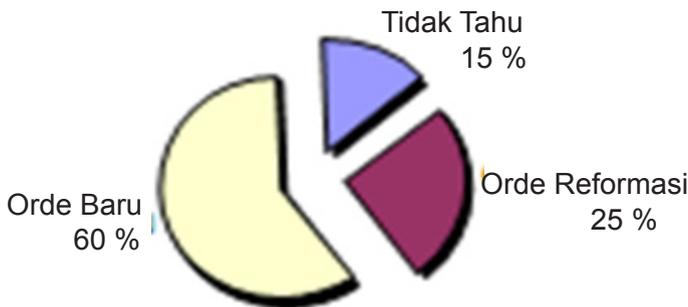
Sumber : Lembaga Survey Indonesia [LSI]

¹⁶ Potret Buram pemilih dan Peran Civil Society Menjelang Pemilu 2004: *Analisa Temuan Survey LSI*, Januari 2004. Dapat dilihat di www.lsi.or.id.

Berdasarkan survei tersebut, kita menemukan makna bahwa ternyata tingginya tingkat partisipasi dalam pemilu di Indonesia tidak terkait secara langsung dengan tingginya tingkat kualitas pemilu itu sendiri. Sebab, keikutsertaan mayoritas pemilih dalam pemilu lebih disebabkan karena kewajiban daripada menjadikan pemilu sebagai momentum atau sarana untuk melakukan perubahan sosial dalam rangka mencari pemimpin dan kondisi yang lebih baik. Tujuan pemilu bagi mayoritas masyarakat Indonesia adalah partisipasi pemilu itu sendiri.

Kedua, lambannya usaha perbaikan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini di satu sisi, serta adanya ketidaksabaran masyarakat dalam menunggu hasil perbaikan tersebut di sisi lain, membuat mayoritas pemilih cenderung memandang situasi dan kondisi pada era Orde Baru dinilai lebih baik dibandingkan dengan situasi dan kondisi di era Reformasi saat ini. Adanya romantisme dan kerinduan sebagian pemilih terhadap era Orde Baru tersebut dipandang sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan karena dapat membangkitkan kembali kekuatan lama yang tidak sejalan dengan agenda reformasi yang telah digulirkan sejak tahun 1998. Tokoh-tokoh masa lalu yang pandai memanfaatkan sentiment pemilih ini tentunya akan mempunyai peluang maju kembali ke pentas politik nasional.

Gambar 5.2 : Kondisi Perilaku Pemilih pada Periodisasi Pemerintahan



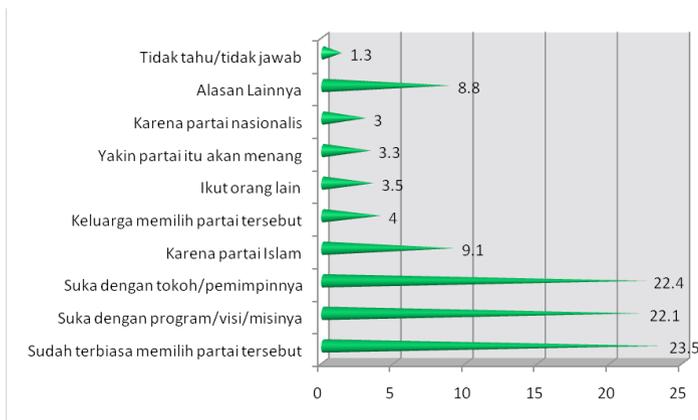
Sumber : Lembaga Survey Indonesia [LSI]

Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa lima tahun Reformasi tersebut justru menghasilkan potret buram pemilih? Jawabannya ini merupakan gabungan dari banyak kegagalan. Mulai dari kegagalan pemerintah dalam memenuhi janji-janji reformasi, kegagalan komunikasi politik dalam menjelaskan kesulitan yang ada, sampai kegagalan partai politik dalam melakukan pendidikan politik.

5.6. Perilaku pemilih Pada Pemilu 2009

Satu bulan menjelang Pemilu Legislatif 2004, LSI mengadakan survei tentang alasan para pemilih dalam menjatuhkan pilihannya pada Pemilu Legislatif 2009 dengan melibatkan responden secara nasional yang mencerminkan miniatur masyarakat Indonesia seperti yang terdapat dalam data Badan Pusat Statistik [BPS] tahun 2000. Dalam survei tersebut ditawarkan beberapa alasan pemilih dalam menjatuhkan pilihan politiknya pada pemilu legislatif, baik alasan-alasan yang mewakili pendekatan sosiologis (seperti aliran politik, pengaruh keluarga, teman, dll), psikologis (seperti kebiasaan memilih, ketokohan, dll) maupun rasional (seperti berdasarkan visi/misi dan program parpol). Adapun hasil temuan survei tersebut seperti tergambar dalam gambar di berikut ini.

Gambar 5.3: Alasan Perilaku Pemilih Memilih Partai Tertentu



Sumber : Lembaga Survey Indonesia [LSI]

Berdasarkan temuan seperti yang tergambar pada gambar di atas, ternyata unsur psikologis merupakan unsur yang paling dominan yang mendasari pemilih dalam menjatuhkan pilihan politiknya pada Pemilu Legislatif 2004. Hal itu terlihat dengan dominannya alasan kebiasaan (23,5%) yang melatarbelakangi pilihan politik para pemilih. Selain itu, ditambah pula dengan alasan ketokohan yang mencapai 21,4% dan alasan karena yakin partai tersebut akan menang, sebesar 3,3%. Dengan demikian, jika ketiga alasan tersebut digabungkan maka akan terdapat sekitar 48,2% pemilih akan menjatuhkan pilihan politiknya pada Pemilu 2004 berdasarkan unsur psikologis.

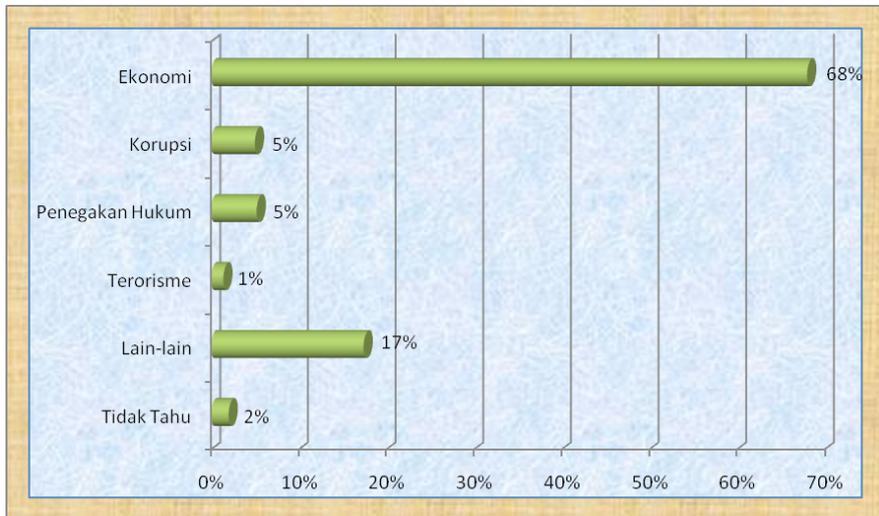
Namun, ternyata alasan rasional cenderung menempati alasan kedua yang mendasari pemilih dalam menjatuhkan pilihan politiknya pada pemilu legislatif. Bila kecenderungan dalam survei ini tidak berubah, maka pada Pemilu Legislatif 2004 ada sekitar 22,1% pemilih yang telah memilih partai berdasarkan alasan kesukaannya terhadap visi, misi dan programnya.

Sekalipun kecendrungan alasan rasional tersebut lebih kecil dibanding alasan psikologis, namun hal itu merupakan perkembangan yang menarik sekaligus menggembirakan di tengah-tengah adanya keraguan pada unsur rasional dalam Pemilu 2004 lalu. Sedangkan di sisi lain, ternyata hanya sekitar 19,6% pemilih saja yang cenderung akan menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan unsur sosiologis, yaitu gabungan dari sekitar 9,1% dari yang akan memilih partai Islam, sekitar 4,0% karena ikut keluarga, sekitar 3,5% karena ikut orang lain, dan sekitar 3,0% karena partai nasionalis. Kecilnya kecenderungan unsur sosiologis yang mendasari pemilih tersebut tentunya cukup mengherankan bila dikaitkan dengan banyaknya para pengamat politik yang memperkirakan masih dominannya politik aliran dalam Pemilu Legislatif 2004. Namun kenyataannya berdasarkan survei tersebut kecenderungan berkembangnya politik aliran sangat kecil.

Pertanyaannya sekarang, bila kecenderungan unsur rasional cukup signifikan dibanding unsur sosiologis dalam pemilu 2004, visi dan program apa saja yang cenderung disu-

kai mayoritas pemilih? Berdasarkan survei menjelang Pemilu Legislatif 2004, ditemukan bahwa mayoritas pemilih (68%) cenderung memilih masalah ekonomi (seperti sulitnya mencari lapangan kerja, mahalnya harga sembako, dll) sebagai isu yang paling menarik dibandingkan dengan isu-isu lainnya. Besarnya perhatian mayoritas pemilih terhadap isu ekonomi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kekecewaan masyarakat terhadap pemulihan ekonomi yang sampai saat ini belum dapat dirasakan oleh banyak kalangan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1997 sampai saat ini secara langsung telah membuat pemilih cenderung menempatkan isu tersebut sebagai isu yang sangat dominan dan segala-galanya.

Gambar 5.4 : Isu-Isu Dominan Perilaku Pemilih



Sumber : Lembaga Survey Indonesia (LSI)

Adanya obsesi yang berlebihan terhadap isu ekonomi tersebut membuat mayoritas pemilih cenderung meminggirkan isu lain yang sebenarnya juga tidak kalah pentingnya, bahkan sudah menjadi penyakit kronis bangsa Indonesia sekaligus sebagai faktor yang mempunyai andil besar dalam menyebabkan krisis ekonomi, seperti isu korupsi dan penegakan hukum. Berdasarkan temuan survei tersebut, ternyata hanya sekitar 5%

dan 5,2% pemilih saja yang menempatkan isu korupsi dan penegakan hukum sebagai isu utama. Padahal kedua isu tersebut merupakan isu yang sangat penting, baik dalam memberantas penyakit kronis bangsa Indonesia maupun dalam membangun sebuah fondasi negara modern pada masa mendatang yang bebas dari unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme [KKN].

Bila kecenderungan-kecenderungan temuan tersebut kita sesuaikan dengan hasil pemilu legislatif yang belum lama ini diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum [KPU], terdapat kecocokan yang melandasi mengapa Partai Golkar meraih suara lebih banyak dibanding partai politik lainnya, termasuk PDI-P. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, masih kuatnya unsur kebiasaan pada pemilihan dalam menjatuhkan pilihan politiknya pada Pemilu, *kedua*, Hal ini wajar jika terjadi pada Partai Golkar yang sudah lama berkiprah dan mengakar sampai ke pedesaan. Adanya kecenderungan romantisme pada era Orde Baru memberikan keuntungan tersendiri terhadap partai tersebut. Di sisi lain, penurunan yang sangat drastis pada PDI-P disebabkan karena banyaknya kekecewaan masyarakat terhadap kinerja partai tersebut, khususnya terhadap pemerintahan Megawati dalam bidang ekonomi. Berdasarkan survei LSI pada April 2004, sekalipun secara makro ekonomi terlihat adanya peningkatan, akan tetapi sekitar 44,7% pemilih memandang “buruk” terhadap kondisi ekonomi nasional pada pemerintahan saat ini, sedangkan sekitar 27,2% memberikan nilai “sedang”, 16,0% lainnya memberikan nilai “sangat buruk”, dan hanya sekitar 7,3% saja yang memberikan nilai “baik”. Dari hasil survei tersebut terlihat gambaran kekecewaan terhadap partai politik yang berkuasa saat itu dan memberikan hukumannya pada pemilu legislatif yang lalu.

Dalam survei yang dilakukan oleh LP3ES, FRI, YAPPIKA dan NDI terdapat analisa temuan mengenai ke mana larinya para pemilih PDI-P dalam Pemilu 2004. Dalam survei tersebut terdapat temuan bahwa turunnya suara PDI-P pada Pemilu 5 April 2004 karena banyaknya pemilih yang lari ke partai lain, yaitu sebesar 8% pemilih lari ke Partai Demokrat dan 7% be-

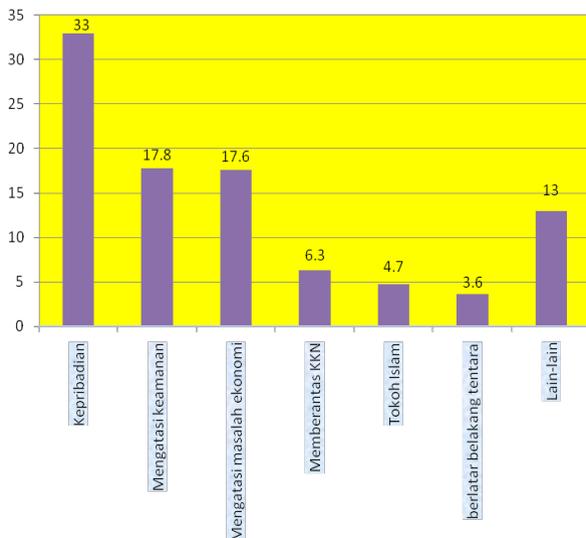
ralih ke partai Golkar. Dalam survei tersebut juga ditemukan keterangan bahwa naiknya suara Partai Keadilan Sejahtera [PKS] merupakan hasil pengalihan suara pemilih partai berbasis Islam lainnya di luar PKB, yaitu sebesar 9% dari yang memilih PPP dan sekitar 16% dari yang memilih PAN pada Pemilu 1999 sebelumnya. Selain itu, jargon "*bersih dan lebih peduli*" serta kampanye simpatik yang dibangun oleh PKS selama ini ternyata mampu menarik simpati banyak kalangan, khususnya di kalangan perkotaan. Faktor lain yang mampu mendongkrak perolehan suara PKS adalah karena tingginya loyalitas pemilih PKS pada Pemilu 1999 untuk tetap memilih partai tersebut.

Sedangkan perolehan suara yang signifikan pada Partai Demokrat, sekalipun merupakan partai baru, merupakan dampak ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono yang semakin lama semakin populer di kalangan para pemilih. Peristiwa dramatis yang membuat SBY ke luar dari Kabinet Megawati merupakan titik tolak munculnya simpati dan dukungan yang luar biasa dari banyak kalangan di masyarakat. Dalam konteks inilah unsur psikologis banyak bermain, dan SBY mampu memanfaatkan momentum tersebut.

Pertanyaan yang muncul kemudian, berbeda dengan fenomena Partai Demokrat dan PKS, mengapa partai politik yang baru lainnya tidak mendapatkan suara signifikan bahkan tidak mampu melewati *electoral threshold*. Jawabannya dapat mengacu pada temuan-temuan survey di atas yang mengatakan dominannya faktor *kebiasaan* dalam memilih partai serta pentingnya unsur ketokohan dalam partai politik membuat partai politik baru kurang dikenal oleh para pemilih. Partai baru umumnya tidak mempunyai tokoh nasional yang benar-benar sudah dikenal secara luas. Selain itu, adanya pembatasan kampanye hanya beberapa minggu sebelum pemilihan sangat merugikan partai-partai baru tersebut. Sebab, mereka tidak punya waktu dan sarana untuk mengenalkan partainya terhadap masyarakat selain hanya pada saat masa kampanye, sedangkan partai-partai besar secara tidak langsung sering melakukan kampanye terselubung.

Tidak jauh berbeda dengan unsur yang dominan pada pemilu legislatif, tingkah laku pemilih dalam pemilu presiden juga cenderung lebih didominasi oleh unsur psikologis, dibandingkan unsur rasional maupun sosiologis. Berdasarkan survei LSI menjelang pemilu presiden dan wakil presiden pada 5 Juli 2004, ternyata alasan “kepribadian” merupakan alasan yang disukai mayoritas pemilih dalam menjatuhkan pilihannya pada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu sebesar 33%. Sedangkan alasan kemampuan dalam mengatasi masalah keamanan dipilih oleh sekitar 17,8% dan alasan kemampuan dalam mengatasi masalah ekonomi dipilih sekitar 17,5%. Tidak jauh berbeda dengan pemilu legislatif, alasan kemampuan dalam memberantas korupsi hanya mendapatkan dukungan dari sekitar 6,3% saja, dan hanya sekitar 4,7% saja yang menghendaki dari kalangan tokoh Islam sekalipun mayoritas pemilih adalah Muslim.

Gambar 5.5 : Rasionalitas Memilih Calon Presiden (%)



Sumber : Lembaga Survey Indonesia (LSI)

Secara lebih spesifik, kepribadian yang dipersepsikan oleh mayoritas pemilih adalah kandidat yang mempunyai kewibawaan, perhatian pada rakyat dan jujur. Di antara kelima

kandidat presiden yang berkompetisi dalam pemilu yang lalu, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan kandidat yang dipandang mempunyai kepribadian paling baik dibandingkan dengan calon presiden lainnya oleh mayoritas pemilih. Kualitas kepribadian SBY tersebut terekspos dan diekspos secara luas di berbagai media massa sebelum dan pada saat pemilu. Selain itu, besarnya perhatian pemilih terhadap isu keamanan dan ekonomi membuat SBY semakin populer di masyarakat pemilih dibandingkan dengan kandidat lainnya.

5.7. Pemilih Muslim Semakin Moderat

Pemilu 2004, selain menunjukkan besarnya unsur psikologis pada perilaku pemilih, juga menunjukkan semakin surutnya popularitas partai-partai yang berlandaskan agama, khususnya partai-partai Islam. Besarnya jumlah pemilih yang beragama Islam (89%) ternyata tidak membuat perolehan suara partai-partai Islam menjadi dominan, bahkan sebaliknya. Yang dimaksud partai-partai Islam disini adalah partai politik yang diri berasaskan Islam. Partai yang masuk ke dalam kategori ini adalah PPP, PKS, PBB, PBR, PPNU dan PSI. Selain keenam partai Islam formal tersebut, ada pula partai yang secara sosiologis bisa digolongkan ke dalam partai Islam karena berakar dan berbasiskan kepada organisasi sosial Islam seperti NU dan Muhammadiyah, yaitu PKB dan PAN. Sekalipun kedua partai tersebut menyatakan diri sebagai partai terbuka untuk semua jenis agama dan golongan, dan secara formal tidak menyatakan diri sebagai partai Islam, tetapi kuatnya peranan dan pengaruh kedua organisasi masyarakat Islam tersebut membuat secara sosiologis kedua partai tersebut dapat disebut sebagai partai Islam.

Tidak jauh berbeda dengan Pemilu 1999, 2004 dan 2009 perolehan suara partai-partai Islam berada jauh di bawah perolehan suara partai-partai kebangsaan seperti Partai Golkar dan PDI-P sekalipun mayoritas pemilih beragama Islam. Sekalipun perolehan suara partai-partai Islam tersebut digabungkan, tetap tidak mampu mengungguli perolehan gabungan suara kedua partai kebangsaan tersebut, apalagi jika ditambah dengan partai kebangsaan lainnya seperti Partai Demokrat, dll.

Sebab, jumlah total perolehan suara partai-partai Islam hanya mencapai 22,44% yang berasal dari PPP (8,15%), PKS (7,34%), PBB (2,62%), PBR (2,44%), PPNUI (0,79%) dan PSI (0,60%). Dibandingkan dengan hasil Pemilu 1955, nampak sekali terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada Pemilu 1955 gabungan perolehan suara partai Islam mencapai 43,5%, yang berasal dari Masyumi (20,9%), NU (18,4%), PSII (2,9%) dan Perti (1,3%). Sekalipun suara partai Islam formal tersebut ditambah partai Islam sosiologis seperti PKB dan PAN, tetap saja mereka tidak mampu mengungguli gabungan perolehan suara partai-partai kebangsaan yang mencapai 58,42% suara.

Kecilnya perolehan suara partai-partai Islam tersebut membuktikan bahwa unsur sosiologis keagamaan mempunyai pengaruh yang kurang signifikan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa politik aliran yang berdasarkan agama tidak mendapatkan tempat pada mayoritas pemilih. Besarnya perolehan suara PPP bukan karena keIslamannya, melainkan karena adanya unsur “kebiasaan memilih” pada sebagian pemilih sehubungan partai tersebut sudah lama keberadaannya. Sedangkan besarnya perolehan suara PKS juga bukan karena partai tersebut semata mata partai yang berasaskan Islam, melainkan akibat kampanye dengan jargon “bersih dan lebih peduli” yang banyak menarik perhatian pemilih. Sedangkan perolehan suara partai-partai Islam yang lebih sering memainkan sentimen Islam – seperti PBB, PBR, PPNUI – justru memperoleh suara yang sangat kecil bahkan tidak lolos *electoral threshold* yang ditetapkan KPU. Sedangkan perolehan suara partai-partai yang tidak memainkan sentimen Islam – yaitu partai-partai yang berasaskan Pancasila seperti Golkar, PDI-P, Partai Demokrat, juga PKB dan PAN – justru lebih mendapatkan tempat di mata pemilih, bahkan juga mungkin di kalangan pemilih muslim yang religius.

Kecenderungan pada pemilu legislatif tersebut juga terjadi pada pemilihan raya presiden. Calon presiden yang murni berasal dari kalangan Islam, dan terutama yang sering memainkan sentimen Islam tidak begitu populer. Mereka kalah populer dibandingkan kandidat-kandidat yang jarang atau tidak pernah memainkan sentimen agama seperti Susilo Bambang

Yudhoyono.

Setidaknya terdapat tiga faktor penyebab semakin moderatnya pemilih Muslim yang mengakibatkan semakin tidak populernya partai-partai Islam tersebut. *Pertama*, budaya politik Orde Baru yang sangat represif terhadap politik syariat Islam di wilayah publik telah bekerja secara efektif. Penerapan asas tunggal Pancasila pada tahun 1985 membuat syariat Islam mengalami marginalisasi bahkan di kalangan pemilih Muslim yang religius sekalipun. *Kedua*, terjadinya moderasi dan pluralisasi di kalangan dua organisasi besar Islam sendiri, NU dan Muhammadiyah. Kalangan elit dari kedua ormas tersebut sudah sering mempararelkan ajaran Islam dengan demokrasi. Akibatnya, wacana negara Islam dan Piagam Jakarta pun menjadi semakin tidak populer dan tidak relevan. *Ketiga*, peran cendekiawan Muslim sendiri yang menanamkan kesadaran pluralisme dalam Islam banyak mempengaruhi warga Muslim perkotaan seperti yang sering dilakukan oleh Nurcholis Madjid atau Jaringan Islam Liberal di kalangan kaum muda.

Selain faktor-faktor di atas, kegagalan partai-partai Islam tersebut juga disebabkan oleh karena kinerja dan program partai Islam itu sendiri yang tidak populis, melainkan lebih sering bergerak dalam tataran ideologi dan bahkan cenderung normatif. Sedangkan isu-isu nyata yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti isu ekonomi, seringkali kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya, partai-partai Islam semakin jauh dan terasing dari habitatnya sendiri yang bergulat dengan susah payah untuk memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan dasarnya.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa krisis multidimensional yang sudah terjadi di Indonesia sedikit banyak membawa dampak positif berupa mulai munculnya rasionalitas dan sikap pragmatis pada perilaku pemilih di Indonesia, sekalipun pada awal-awal menjelang pemilu terdapat hal-hal yang mengkhawatirkan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin menguatnya kecenderungan para pemilih menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional dalam memperbaiki keadaan.

Meskipun demikian unsur psikologis masih tetap merupakan unsur yang paling dominan pada perilaku pemilih pada Pemilu 2004 . Yang cukup menarik, ternyata politik aliran atau unsur- unsur sosiologis dalam perilaku pemilih jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan persepsi yang selama ini dikhawatirkan oleh sebagian pengamat politik. Sedangkan yang cukup menggembirakan sekaligus menyedihkan adalah fenomena yang terjadi pada pemilih Muslim. Disebut menggembirakan karena dengan semakin lemahnya kecenderungan politik aliran pada pemilih dalam menjatuhkan pilihan politiknya, pemilih Muslim bertindak semakin pragmatis dan non ideologis. Sedangkan disebut menyedihkan sehubungan kecilnya perolehan suara partai-partai Islam di tengah-tengah pemilih yang justru mayoritas beragama Islam. Partai-partai Islam semakin tidak populer justru di kandangnya atau di habitatnya sendiri. Kenyataan tersebut seharusnya harus benar-benar mendapatkan perhatian tokoh-tokoh partai politik yang berasaskan Islam bila ingin tetap eksis dan berkkiprah pada pemilu selanjutnya. Sebab, mereka tidak akan lagi mampu memainkan sentimen agama hanya demi meraih kekuasaan dan jabatan.

Data diatas menunjukkan ada empat daerah yang memenangkan Pilkada dipilih oleh pemilih yang jumlahnya tidak mengungguli pemilih yang tidak memilih. Pemenang di Kabupaten Bengkalis selisih 2%, Kabupaten Kampar selisih sekitar 1%, Kabupaten Rokan Hilir selisih sekitar 6%, dan Kota Pekanbaru selisih jauh yaitu sekitar 25%. Pemenang di Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hulu, Rokan Hulu dan Siak Sri Indrapura tidak jauh mengungguli pemilih yang tidak memilih. Hanya pemenang di Kabupaten Pelalawan dan kuansing yang mampu mengungguli agak jauh pemilih yang tidak memilih.

Bab 6

Realisasi Pemilih Rasional dan Irasional

6.1. Pemilih Rasional

Faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan sikap memilih ialah aspek keseriusan kandidat dalam menyampaikan visi, misi dan program kerjanya¹. Dalam penyelenggaraan sebuah kampanye politik, penyampaian visi dari kandidat kepala daerah mempunyai peranan yang signifikan dalam proses suara. Bagi pemilih yang rasional, visi yang disampaikan akan dipertimbangkan semasa dia menentukan pilihan politiknya. Bahan/isi dari visi dan kaedah penyampaian harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat. Bahan pernyataan misi yang menyentuh keadaan masyarakat boleh menarik masyarakat untuk memilih kandidat tersebut. Kaedah penyampaian visi yang dilakukan secara berulang-ulang melalui media visual amat berpengaruh semasa kampanye pemilu.

Semasa menganalisis perilaku pemilih melalui pendekatan pilihan rasional (*rational choice*), didapati bahwa hal yang akan menentukan pilih dalam sebuah pemilu bukanlah ikatan sosial struktural ataupun ikatan partai yang kukuh tetapi hasil penilaian rasional dari pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh kandidat. Pilihan-pilihan rasional ini dilakukan dengan pendekatan penilaian terhadap visi, program, isu yang dibawa oleh seseorang kandidat, penilaian terhadap kualitas pribadi kandidat maupun partai politik yang pendukung kandidat, serta situasi-situasi politik tertentu yang berkaitan dengan salah satu kandidat yang akan dipilih oleh pemilih.

¹ Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, cetakan IV, Penerbit Fokus Media, Bandung. 2003, hlm, 118-119

Memandangkan visi merupakan iktisar dari rangkaian tindakan (*action*) yang akan dilakukan oleh kandidat, visi memainkan peranan yang penting dalam memberikan kefahaman kepada pemilih umum tentang seseorang kandidat, khususnya tentang masalah yang akan dibuat oleh kandidat yang masuk bertanding. Dasar dari rumusan visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh kandidat dalam tempo waktu tertentu.

Masalah yang sering terjadi ialah semasa merumus visi mereka, para kandidat kepala daerah didapati kurang memahami dan mendalami keadaan yang sebenarnya yang dihadapi oleh para pemilih di sebuah daerah. Alhasil, visi yang dibawa tidak mencerminkan realitas atau kelihatan hambar dan sangat normatif. Hal ini menyebabkan pemilih tidak begitu tertarik terhadap visi yang dibawa oleh seseorang kandidat kepala daerah semasa kampanye pemilihan dijalankan, walaupun pemilih tersebut merupakan pemilih yang rasional.

Hasil ini membuktikan bahwa pemilih tidak mempertimbangkan visi sebagai alasan dalam menentukan pilihan mereka terhadap kandidat kepala daerah. Terdapat pelbagai hal yang mempengaruhi kenyataan di atas, antaranya termasuklah keakraban hubungan, serta ikatan-ikatan budaya dan emosi yang kuat sehingga menewaskan faktor rasionalitas.

Kelompok yang tidak rasional mengakui bahwa mereka tahu secara umum visi yang disampaikan oleh setiap kandidat kepala daerah tetapi mereka mengabaikan visi tersebut kerana pada pendapat mereka yang penting ialah kandidat dapat memberikan kesejahteraan kepada mereka tidak peduli apa saja retorika yang digunakan oleh kandidat. Dalam hati mereka, mereka sudah menetapkan kandidat yang mana yang akan mereka dukung.

Penyampaian visi semasa kampanye politik berjalan mempunyai peranan yang penting dalam proses pungutan suara atau pilih bagi kandidat kepala daerah dalam proses pilkada. Visi yang dimaksudkan boleh membina karakter para kandidat sehingga ia menjadi pengikat antara kandidat kepala daerah dengan para pemilih.

Kandidat kepala daerah sewajarnya memberikan bayangan kepada para pemilih bahwa dirinya layak untuk dipilih menjadi pemimpin. Salah satu bentuk bayangan ialah visi dirinya jika terpilih menjadi pemimpin. Apabila masyarakat pemilih tidak memahami visi para kandidat kepala daerah, maka pemilih tidak akan mempunyai bayangan visi kandidat yang boleh membantu pemilih membuat pilihan politiknya.

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan peranan komunikasi politik dalam kampanye pilkada, dapat dikatakan bahwa tujuan para kandidat memberikan gambaran visi bagi membolehkan pemilih menentukan pilihan politiknya tidak mencapai sasaran. Pemaparan visi kandidat kepala daerah bukan hanya sekadar memberikan pertimbangan kepada pemilih bagi meraih pilih, tetapi ia juga menunjukkan kemampuan para kandidat mewujudkan komunikasi dengan para pemilih dalam cara atau bentuk komunikasi yang berbeda seperti menggunakan media visual.

Kelemahan-kelemahan para kandidat kepala daerah dalam mewujudkan komunikasi dengan para pemilihnya seperti yang dapat dilihat dengan kurangnya pengetahuan pemilih tentang visi para kandidat kepala daerah boleh disebabkan oleh :

1. Pemilih tidak faham maksud visi itu sendiri dari aspek bahasa.
2. Pengalaman pemilih tentang kegagalan kandidat kepala daerah yang sebelum ini gagal merealisasikan visi mereka secara konkrit.
3. Masalah teknis seperti waktu yang singkat antara waktu kampanye dengan proses pemungutan suara menyebabkan kandidat kepala daerah mempunyai masa yang pendek untuk berkomunikasi dengan para pemilih.
4. Kesadaran politik pemilih yang sudah memahami prinsip proses kampanye politik para kandidat kepala daerah.

Hasil konkrit yang terlihat dari pemaparan visi seseorang kandidat kepala daerah ialah adanya semangat berkobar-kobar dari pemilih untuk menggunakan hak pilihannya terhadap kandidat kepala daerah tersebut. Walaupun visi yang baik bukan satu-satunya faktor yang mendorong pemilih membuat

pilihannya tetapi hal ini penting terutama sekali bagi menarik pemilih yang berfikir semasa membuat pilihan, khususnya pemilih yang berpendidikan tinggi.

Meskipun visi dari para kandidat kepala daerah menjadi pegangan kepada para pemilih dalam menentukan pilihan politik mereka, namun terdapat juga pegangan lain yang digunakan oleh para pemilih dalam menetapkan pilihan politiknya dalam pilkada seperti program kerja, latar belakang suku dan agama, dan beberapa pegangan lain

Visi dan misi seseorang kandidat pemimpin lazimnya menggambarkan masalah yang ingin dicapai oleh pemimpin dan strategi-strategi yang akan diupayakan demi mencapai tujuannya. Dalam melaksanakan sesuatu visi, mis harus lebih bersifat penjelasan, ringkas, padat, dan tepat.

Penyampaian misi mengandung beberapa tujuan yaitu ;

1. Ia merupakan sebagian dari usaha seseorang kandidat kepala daerah bagi meyakinkan khalayak pemilih bahwa visi yang disampaikan adalah ilmiah dan realistik. Penyampaian misi seharusnya dapat mempengaruhi pilihan khalayak pemilih dalam memilih seseorang kandidat.
2. Ia memberi gambaran yang konkrit kepada khalayak pemilih tentang visi/ pandangan seorang kandidat kepala daerah terhadap suatu keadaan beserta rancangan-rancangan masa hadapan yang ingin dilaksanakan bagi mengekalkan keadaan tersebut atau mengubah keadaan semula.
3. Ia bertindak memberi pengetahuan politik kepada khalayak pendidik dengan menjelaskan misi seseorang kandidat kepala daerah. Dengan adanya misi, khalayak pemilih boleh memahami apa juga permasalahan yang dihadapi oleh daerah mereka dan mencari jalan penyelesaiannya. Dengan ini, diharapkan khalayak pemilih akan mempunyai daya kritis bagi bersikap rasional.

Dalam konteks pilihan rasional, apabila seseorang pemilih merasa bahwa dia tidak akan mendapat apa-apa manfaat dari kandidat kepala daerah yang sedang bersaing, pemilih tersebut tidak akan memilih pilihannya dalam pemilu (Downs 1957:261). Keputusan ini dibuat berlandaskan pengi-

raan ekonomi yakni pengiraan biaya yang dikeluarkan adalah lebih besar berbanding apa yang akan diterimanya kelak. Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa kandidat kepala daerah yang bersaing akan berusaha untuk mengemukakan pelbagai program bagi menarik simpati dan minat pemilih untuk memilih dirinya. Namun, apabila kandidat kepala daerah itu gagal mempromosikan programnya kepada pemilih, maka pilihan untuk tidak memilih merupakan hal yang rasional kepada pemilih.

Seseorang pemilih yang rasional tentunya akan berusaha memahami misi seseorang kandidat kepala daerah dengan teliti tetapi hal ini tidak dialami oleh para pemilih yang kurang mepedulikan aspek-aspek rasional yaitu faktor-faktor simbol ketokohan seseorang pemimpin, ikatan-ikatan sosiobudaya dan harapan pragmatik yang lebih menonjol berbanding misi yang disampaikan. Dalam setiap pelaksanaan kampanye pemilu, baik semasa pemilihan kepala daerah maupun dalam kampanye pemilihan legislatif, penyampaian visi dan misi para kandidat kepala daerah berperanan dalam mendapatkan suara yang banyak. Walaupun terdapat beberapa kasus yang memperlihatkan kandidat-kandidat tidak menyampaikan visi dan misi mereka dalam kampanye secara terbuka, namun bagi para pemilih, visi dan misi para kandidat tetap menjadi pegangan utama yang mereka pertimbangkan dalam menentukan pilihan politik mereka. Sama seperti peranan penyampaian visi para kandidat dalam pilkada, penyampaian misi juga berperanan dalam melahirkan komunikasi politik antara para kandidat dengan pemilihnya. Kegagalan mewujudkan komunikasi politik yang baik antara para kandidat dengan pemilihnya akan meninggalkan masalah terhadap suara dalam sebuah pemilu.

Tingkat kepercayaan pemilih terhadap misi seorang kandidat kepala daerah juga cukup tinggi. Walaupun terdapat banyak faktor yang menyebabkan hal ini, antaranya faktor pemilih yang lebih melihat aspek kredibilitas seseorang kandidat kepala daerah, sehingga apa-apapun misi yang disampaikan kemudiannya oleh kandidat kepala daerah ini, misi tersebut lazimnya dikaitkan dengan kredibilitas peribadi kandidat kepala

daerah tersebut.

Selain dari visi dan misi mereka, komponen yang menjadi nilai pelaris bagi seseorang kandidat kepala daerah ialah penyampaian program-program kandidat kepala daerah itu sendiri. Kandidat kepala daerah lazimnya menonjolkan program-program politik, ekonomi dan sebagainya dalam kampanye politiknya. Program-program ini seterusnya mampu menjadi komunikasi politik yang baik antara kandidat kepala daerah dengan para masyarakat pemilih. Ini karena program-program yang direncanakan oleh kandidat kepala daerah dan dilaksanakan oleh kandidat kepala daerah apabila memenangi pemilu akan selalu dikenang oleh para pemilihnya.

Pendekatan rasional yang dipopularkan oleh Downs (1957) mengandaikan bahwa pemilih pada dasarnya bertindak secara rasional ketika membuat pilihan dalam tempat pemungutan suara (TPS), tanpa mengira agama, jenis kelamin, kelas sosial, latar belakang orang tua, dan lain sebagainya. Dalam konteks pilihan rasional, apabila pemilih merasa tidak mendapat faedah dengan memilih partai atau kandidat kepala daerah yang sedang bersaing, dia tidak akan melakukan pilihan pada pemilu (Downs 1957:261). Hal ini dilandaskan pada perkiraan sosial ekonomi, yakni masa yang terbuang tidak akan menguntungkan dirinya. Oleh itu jalan terbaik bagi pemilih ialah dengan melakukan kegiatan atau aktivitas hariannya (Pappi 1996).

Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa kandidat kepala daerah atau partai yang bertanding akan berupaya dan berusaha untuk menyarankan pelbagai program bagi meraih simpati dan keinginan pemilih untuk memilih. Namun, apabila partai atau kandidat kepala daerah gagal mempromosikan programnya kepada pemilih, maka pilihan untuk tidak memilih adalah rasional bagi pemilih. Dalam hal ini, program yang bersesuaian, cara penyampaian program yang berkasusan, dan contoh teladan yang baik serta konsistensi dalam melaksanakan program merupakan kunci kejayaan seseorang kandidat kepala daerah dalam menjadikan faktor program sebagai pertimbangan yang akan menyebabkan pemilih memilih kandidat tersebut sebagai kepala daerah.

Model proses yang menitikberatkan rangkaian-rangkaian aktivitas dimulakan dengan *fase kasusedaran*, *fase analisis* dan *fase tindakan*. Ini berarti pemilih perlu mengenal para kandidat kepala daerah semasa kampanye berjalan dan menganalisis program yang direncanakan sebelum mengambil apa-apa keputusan. Jika hal ini tidak dilakukan, pemilih akan menyesal apabila hasil dari alternatif yang dipilih dengan hasil pilihan tidak sejalan dengan keputusan yang ditetapkan. Ini akan melahirkan model '*decisional balance*' yaitu akibat dari alternatif yang dipilih dalam satu pemutusan khususnya akibat untung dan rugi kepada pemilih itu sendiri.

Enelow dan Hinich (1981) meneliti pengaruh isu dan masalah dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam kajian mereka, mereka menyimpulkan bahwa pemilih memberi perhatian yang mendalam terhadap cara kandidat (partai politik atau kandidat perwakilan) mengemukakan penyelesaian sebuah isu permasalahan. Semakin efektif kandidat merencanakan penyelesaian yang tepat untuk mengurai permasalahan, semakin tinggi kemungkinan kandidat dipilih oleh para pemilih. Para pemilih cenderung untuk tidak memilih partai politik atau kandidat yang tidak berupaya menawarkan program kerja dan hanya bergantung kepada spekulasi dan atribut partai politik.

Semasa kampanye pemilu sedang berlangsung, hampir kasusemua kandidat mengunjungi segala pelosok kampung bagi menyampaikan program-program politik atau semasa berdialog dengan para pemilih, kandidat kepala daerah sering mengungkap kata-kata berikut: "saya tidak menjanjikan sesuatu tapi kita lihatlah nanti seandainya saya dipercaya masyarakat". Pernyataan ini menunjukkan bahwa seseorang kandidat itu tidak bertanggungjawab dan tidak tahu apa yang akan dilaksanakan demi kemajuan daerah dan kemakmuran rakyat yang dilawatinya.

Ada juga kandidat dalam ucapannya membuat pernyataan yang meragukan dan tanpa kepastian seperti "iuran sekolah akan kita bebaskan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah." Kalau benar mau diberi pengecualian iuran, hal ini harus

dilaksanakan tanpa perlu mengaitkan pengecualian ini dengan kemampuan anggaran daerah. Jika tidak akan timbul keraguan tentang pelaksanaan program ini. Pernyataan-pernyataan begini boleh diperdebatkan kebenarannya dan hanya coba mendapatkan simpati pemilih tetapi tidak mempunyai perancangan yang jelas. Ada juga kandidat yang menyadari masalah di daerah masing-masing tetapi tidak boleh memikirkan jalan penyelesaian. Hal ini menunjukkan bahwa kandidat tidak berupaya untuk membela kepentingan dan nasib rakyat jelata

6.2. Pemilih Irasional

Faktor latar belakang sosial yang sama sering dijadikan rujukan utama dalam menentukan pilihan seseorang pemilih. Kajian empiris yang dijalankan oleh . Barelson et al. (1954) membuktikan bahwa setiap orang akan berusaha untuk mempertahankan sifat homegen (persamaan/kasuseragaman) lingkungan sosialnya bagi mengelak dari berlakunya konflik.

Para sarjana ini berpendapat bahwa mereka berhasil mengetahui satu fakta bahwa individu memilih rakan-rakan dan tema-teman yang berbagi pandangan politik dan mempunyai sifat yang lebih kurang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kandidat yang dipilih itu akan dikaitkan dengan ciri-ciri persamaan tertentu dan informasi politik yang ada diterima secara selektif saja bagi memastikan yang keharmonian tetap terpelihara.

Hakikatnya masalah begini bukan saja berlaku dalam masyarakat kita. Sikap apatis dan skeptis terhadap satu proses politik seperti pemilu sering berlaku. Hal ini disebabkan oleh berbagai-bagai faktor, termasuklah tidak ada pengetahuan yang mencukupi tentang budaya yang membuatkan pemilih tidak memahami antipati proses politik seperti pilkada. Kurangnya pengetahuan juga menyebabkan pemilih bersifat acuh tidak acuh.

Selain itu, peristiwa-peristiwa politik atau dasar pemerintah yang merugikan yang berlaku berulang kali juga boleh mempengaruhi pemilih. Pemilih boleh jadi kecewa atau trauma atas kegagalan dasar yang dilaksanakan. Atau dalam pe-

merintahan yang berwenang, pemerintah tersebut dengan sengaja dan secara sistematis tidak memberi pendidikan politik kepada rakyatnya (depolitisasi) sehingga timbul keadaan politik dalam kalangan masyarakat. Ini menyebabkan pemilih tidak memainkan peranan penting dalam proses pemilihan dan walaupun pemilih terlibat, pemilih hanya memainkan peranan yang pasif.

Pemilih yang lebih memilih kandidat kepala daerah yang memiliki latar belakang sifat yang sama, beranggapan bahwa kandidat kepala daerah yang memiliki persamaan sifat dengannya dianggap lebih dapat memahami kepentingan pemilih. Kandidat begini dilihat dapat mengutamakan kepentingan pemilih apabila terpilih menjadi kepala daerah. Faktor persamaan sifat ini kurang menitik beratkan faktor rasionalitas seperti kandungan visi dan misi maupun program yang direncanakan, aspek pengalaman, integritas, dan usaha kandidat kepala daerah. Faktor-faktor ikatan yang terbentuk dari dasar persamaan sifat ini lebih dipertimbangkan.

Hal ini menunjukkan bahwa persamaan faktor pendidikan kurang diperhatikan. Ini karena mayoritas pemilih beranggapan bahwa pendidikan formal yang tinggi bukanlah satu jaminan yang kandidat kepala daerah tersebut berupaya menjadi pemimpin yang baik atau tidak. Secara empirisnya, mereka memperhatikan bahwa terdapat beberapa pemimpin negara atau daerah yang tidak berpendidikan tinggi tetapi masih dapat memimpin dengan baik dan menjalankan amanah mereka sebagai pemimpin.

Faktor latar belakang pendidikan yang sama bukanlah suatu pengaruh yang kuat bagi seorang pemilih untuk menentukan pilihannya. Hal ini karena persamaan latar belakang kelulusan tidak mengukuhkan ikatan psikologi dan sosiologi antara pemilih dengan kandidat kepala daerah. Asumsi bahwa pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kemampuan seseorang kandidat kepala daerah untuk memimpin adalah bersifat lebih formal dan prosedural. Aspek ini tidak begitu diutamakan oleh pemilih dalam membuat pilihannya. Namun begitu ada juga pemilih yang berpandangan bahwa hal ini

penting untuk menaikkan nama sekolah mereka dahulu.

Keadaan ini memang sering terjadi karena kebanyakan kasusetiaan masyarakat terhadap partai bukanlah disebabkan faktor ideologi seperti persamaan visi dan program perjuangan tetapi lebih kepada hal-hal pragmatik seperti sebab-sebab ekonomi, pengaruh media massa, serta lingkungan sosial yang menyumbang besar dalam membentuk persepsi pemilih. Ini karena mayoritas partai politik yang ada belum lagi memainkan peranannya untuk melakukan agregasi politik dan memberikan pendidikan politik. Hal ini menyebabkan kasusetiaan pada partai politik masih bersifat pragmatik dan sementara. Terdapat juga kasusetiaan pada partai politik didorong oleh kasusetiaan pada tokoh dalam partai politik tersebut. Hal ini wajar terjadi karena dalam masyarakat praindustri seperti Indonesia, budaya feodal seperti patron-klien dan pengagungan yang berlebihan terhadap seseorang tokoh masih mendominasi kasusedaran pemilih.

Selain hal di atas, faktor persamaan latar belakang agama dan kepercayaan juga berperanan dalam persepsi pemilih bagi menentukan pilihannya terhadap salah satu kandidat kepala daerah. Malah hingga kini, isu perbedaan agama sering dimunculkan untuk mencemarkan nama baik salah seorang kandidat kepala daerah.

Agama merupakan aspek penting dalam pembentukan perilaku pemilih di Indonesia. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa agama memiliki korelasi yang jelas dengan perilaku pemilih. Beberapa kajian yang dilakukan pada era orde baru dengan iklim politik yang jauh berbeda dengan situasi pada hari ini menunjukkan terdapat penurunan dalam aspek faktor agama sebagai pembentukan perilaku pemilih.

Dalam pemilu yang relatif demokrasi pada tahun 1955, jumlah pendukung gagasan partai Islam berhubung erat dengan tingkat ketaatan pemilih menjalankan ibadah (Mulckhan : 1995). Kenyataan ini dikukuhkan lagi oleh kajian terhadap perilaku pemilih di luar Pulau Jawa (Gaffar : 1992) dan perilaku pemilih masyarakat bandar di Bandar Lampung (Suwondo : 1997).

Menurut Gaffar, orientasi sosio-agama mempunyai korelasi yang nyata terhadap perilaku pemilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Golongan santri (alim agama) cenderung memilih partai Islam dan kaum abangan (mereka yang tidak begitu mematuhi agama mereka) memilih partai yang tidak mempertahankan dan memajukan Islam. Dalam pemilu tahun 1982, pemilih "santri kuat" pendukung partai Islam, sementara "abangan kuat" pendukung PDI. Pemilih yang turut memilih dalam pemilu 1997 juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Elemen-elemen pertengahan dari santri dan abangan memberi jumlah terbesar kepada para pemilih Golkar.

Antara pemilih kajian tersebut, pemilih PPP yang dianggap sebagai partai Islam mempunyai landasan ideologi yang kukuh. Mereka berpendirian bahwa seorang muslim yang baik berpegang teguh pada Islam secara menyeluruh. Ini termasuk memilih partai Islam. Sementara kalangan pemilih PDI tidak menunjukkan alasan ideologi yang jelas. Sejumlah 32 persen memilih partai PDI karena tidak menyukai partai Golkar dan PPP.

Selain itu, perbedaan santri dan abangan datang dari perbedaan institusi yang menaungi mereka. Institusi masjid dan mushola (surau) membentuk sikap dan perilaku para santri. Masjid merupakan tempat penanaman nilai-nilai yang membentuk dasar kepaduan (solidaritas) dan persaudaraan umat. Kelompok santri memiliki hubungan yang kuat dengan para pemimpin agama seperti kiyai dan haji yakni tokoh yang menjadi pemimpin yang menyatukan umat Islam.

Sebaliknya, peranan institusi yang serupa dengan masjid dan musola (surau) tidak wujud dalam kalangan abangan. Kelompok abangan ragu-ragu untuk berkumpul di surau dan masjid karena mereka percaya bahwa surau atau masjid hanya untuk golongan santri. Kelompok abangan tidak memiliki semangat perpaduan berdasarkan nilai bersama seperti Islam yang dengan sendirinya tidak mempunyai apa-apa doktrin politik atau landasan ideologi yang dapat dijadikan tujuan bersama. *Kejawen* (pandangan hidup orang Jawa yang bersi-

fat mistik) sebagai tiang sistem kepercayaan abangan tidak menyediakan doktrin dan platform tersebut.

Dari tinjauan antropologi, faktor jenis kelamin cukup kuat untuk menjadi variabel yang berpengaruh terhadap keputusan pemilih dalam memilih kandidat kepala daerah. Dalam masyarakat patriarki, pemimpin ditentukan berdasarkan jenis kelamin yaitu kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Hal ini juga diperkuat oleh pelbagai ajaran agama yang pendukung anggapan ini meskipun pandangan ini tidak lagi sekuat dulu memandangkan masyarakat sudah berubah seiring dengan perubahan waktu dan terdapat banyak bukti di pelbagai daerah bahwa pemimpin wanita juga boleh memimpin selayaknya. Seterusnya kita akan melihat sama ada jenis kelamin menjadi pegangan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya

Hal yang berbeda mungkin berlaku terhadap pemilih wanita. Terdapat keadaan khusus, di negara-negara sedang berkembang, misalnya, golongan wanita dipinggirkan dalam bidang politik dan masyarakat umum. Hal ini disebabkan budaya feodal-patriarki yang masih kuat, yang menempatkan kedudukan wanita dalam alam rumah tangga semata-mata atau sebagai wakil laki-laki karena kodratnya sebagai seorang wanita. Persamaan jenis kelamin wanita akan membuat pemilih lebih memilih kandidat kepala daerah wanita dengan asumsi bahwa kaum wanita yang paling memahami dan dapat memperjuangkan kepentingan wanita.

Hal ini juga banyak diajarkan oleh sebahagian intelektual beraliran *feminim* yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dengan wanita. Walaupun demikian, pandangan seperti di atas juga banyak ditentang, baik dari kalangan masyarakat maupun dari golongan intelektual itu sendiri. Ini karena jenis kelamin bukanlah faktor mutlak dalam menentukan kepekaan seseorang dalam persoalan diskriminasi gender.

Persamaan jenis kelamin wanita yang boleh menjaga kepentingan wanita bukanlah alasan utama yang mendorong pemilih wanita memilih kandidat tersebut. Persepsi ini wajar, karena persoalan diskriminasi terhadap wanita sebenarnya bu-

kanlah disebabkan perbedaan jenis kelamin tetapi masalah dari persoalan sosial, ekonomi dan politik yang kompleks. Baik kandidat wanita maupun laki-laki, kedua-duanya berupaya untuk memahami dan memperjuangkan kepentingan perempuan tersebut.

Pemilih perempuan memiliki strategi istimewa dalam mendapatkan suara yang banyak. Mereka boleh mengolah masalah khas menjadi isu politik karena jumlah pemilih wanita lebih 50 persen dari jumlah populasi pemilih. Kaum wanita turut memberikan sumbangan besar dalam proses pembangunan. Mereka menjadi tenaga kerja terbesar dalam industri pembuatan yang berorientasi ekspor.

Indonesia merupakan negara yang berpegang pada paham demokrasi. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan demokrasi, Indonesia mengakui hak-hak warga negaranya termasuk hak wanita dalam politik. Indonesia telah memberikan ruang yang cukup banyak berhubung dengan isu wanita dalam bidang politik. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perhatian yang cukup kepada golongan wanita. Terdapat hari khusus bagi kalangan wanita seperti hari Ibu, ada Menteri khusus peranan wanita hingga terwujud undang-undang yang memelihara golongan wanita seperti Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Pencegahan dan Perlindungan terhadap Perdagangan Anak dan Perempuan.

Jika dilihat dalam konteks politik, sebenarnya kaum wanita sudah terlibat secara langsung dalam proses pembuatan keputusan politik. Hal ini dapat dibuktikan melalui penglibatan kaum wanita dalam pemilu secara langsung. Namun jika diamati penglibatan wanita dalam organisasi politik dan pemerintah, penglibatan kaum ini masih dominan bukan saja di Indonesia tetapi juga di negara-negara seperti China, Korea Selatan, Laos, Turkmenistan, dan Vietnam dengan hanya memiliki 20-26% wakil perempuan di Parlemen [Soeseno, 2002].

Hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia, hak demokratik yang bersifat proporsional bagi kaum perempuan,

sama ada hak untuk memilih (*right to vote*) maupun hak untuk dipilih dalam pemilu (*right to stand for election*), dalam bentuk yang terjamin serta penglibatan penuh wanita dalam bidang politik masih belum cukup signifikan.

Menurut Vina Salviana (2006) dalam Prasetyo (2007), tindakan pendukung (*affirmative action*) merupakan faktor yang dianggap sebagai satu strategi bagi mempromosi wanita sebagai pembuat keputusan, selain faktor-faktor lain yang berkaitan dengan sistem pemilu, peranan organisasi partai-partai politik serta penerimaan dari segi budaya.

Hal seterusnya yang perlu dilakukan oleh kaum wanita setelah mendapat dukungan dari pemilih perempuan untuk berpolitik secara rasmi ialah dengan membuktikan peranannya. Peranan politik wanita dalam struktur politik formal adalah seperti berikut:

Pertama, anggota partai politik wanita perlu menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi yang mengkaji masalah wanita serta para penggiat aktivis wanita. Hasil kajian organisasi tersebut boleh membantu ahli politik wanita membuat keputusan. Hal ini penting, karena selama ini banyak dasar yang tidak sesuai dengan keperluan kelompok sasaran disebabkan kegagalan anggota partai politik memahami informasi yang diperlukan.

Kedua, mewujudkan otonomi politik dalam proses pembuatan keputusan politik. Selama ini otonomi politik kaum wanita sulit didapati. Kita perlukan kaum wanita yang berpolitik dengan prinsip yang kukuh tanpa dibayangi kaum laki-laki ataupun partai politiknya.. Emansipasi dalam bidang politik dapat diwujudkan dalam waktu yang singkat.

Ketiga, dalam memainkan peranan politik formalnya, ahli politik wanita harus menjaga kasetaraannya dengan kaum laki-laki. Peluang untuk berpolitik secara formal bagi kaum wanita merupakan suatu bentuk penglibatan politik yang wajar. Hakikatnya kelangsungan hidup politik bangsa turut memerlukan peranan wanita sama ada sebagai subjek ataupun objek. (Pujiyono, 2004)

Hal yang sama turut dikemukakan oleh Mariana Amiruddin dalam *Prabawati* (2004). Paling kurang pun terdapat **empat strategi dan tindakan** yang perlu diambil bagi meningkatkan peranan dan penglibatan kaum wanita dalam bidang politik umum.

Pertama, strategi dan tindakan politik terhadap negara. Di Indonesia terangkum pada lembaga-lembaga negara, parlemen dan partai politik. Lembaga-lembaga negara dalam hal ini adalah pihak pemerintah dan birokrasi yang merupakan institusi yang berkuasa dalam mendapatkan penglibatan dan perwakilan kaum wanita dalam dunia politik.

Kedua, strategi dan tindakan terhadap masyarakat. Masyarakat di sini meliputi keluarga, komuniti, badan pendidikan dan keagamaan, organisasi sosial, serta kelompok budaya. Strategi dan tindakan di sini dilaksanakan sosialisasi tentang perihal pentingnya penglibatan dan perwakilan kaum wanita dalam politik.

Ketiga, membuat jaringan aktivis wanita yang ada dalam struktur perundangan, eksekutif serta kehakiman. Jaringan yang kukuh pada hari ini termasuklah Kaukus Politik Perempuan Indonesia [KPPI]. Organisasi ini menampung aktivis wanita dari pelbagai partai politik [tetapi mereka tidak mewakili partai dan tidak bergantung terhadap atribut partai politik masing-masing]. Organisasi ini berjuang untuk meningkatkan penglibatan dan perwakilan kaum wanita dalam politik. Sebagai anggota partai, kaum wanita berpeluang untuk melobi partai politik masing-masing bagi meningkatkan penglibatan dan perwakilan kaum wanita dalam arena politik.

Keempat, gabungan gerakan wanita di Indonesia. Selama ini gerakan wanita seering berpecah-pecah khususnya antara aktivis wanita karena aliran-aliran yang mempengaruhi pola gerakan mereka. Hal ini membuat gerakan wanita tidak bersatu dan terpisah-pisah mengikut kepentingan dan orientasi para aktivisnya. Selain itu gerakan kaum wanita di Indonesia lebih eksklusif berbanding dengan gerakan-gerakan pro-demokrasi dari sektor lain. Sudah tiba masanya gerakan wanita di Indonesia menentukan strategi dan tindakan bersama

tanpa mengambil kira aliran atau mazhab yang mencorak latar belakang setiap aktivis maupun pertubuhan wanita.

Struktur budaya yang bersifat patriarki serta keadaan sosial politik sedia ada dilihat belum lagi pendukung sepenuhnya usaha kaum wanita untuk tampil bersaing maju. Sedangkan hakikatnya dalam kebanyakan bidang, jumlah kaum wanita lebih tinggi berbanding laki-laki yakni sebanyak 52% mengikut data BPPS 2000. Implikasi data ini menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan akan terus meningkat jauh lebih daripada kaum laki-laki.

Peranan politik kaum wanita masih belum kuat. Fakta menunjukkan bahwa pada pemilu 1999 ini saja tingkat perwakilan kaum wanita secara kuantitatif di DPR-RI hanya mencapai 9,% lebih kecil berbanding pemilu 1997 yang mencapai kira-kira 11%. Perwakilan ini baru dilihat pada tahap kuantiti dan belum lagi pada tahap kualitas. Kalau dari segi kuantiti, kaum wanita masih belum cukup diwakili, bagaimana pula dari segi kualitas. Sedangkan hampir 51% daripada jumlah khalayak pemilih dalam setiap pemilu terdiri dari kaum wanita dan hal ini sangat ironi karena dari jumlah yang besar ini wanita hanya mewakili 9% saja. [*laily Khainur, 2004*]

Halangan utama yang membataskan langkah wanita dalam arena politik ialah cara laki-laki dan wanita memandang dan memperlakukan kaum wanita. Budaya patriarki dalam kalangan masyarakat mengawal dan mendominasi kehidupan. Malah dalam lingkungan sosial paling minimum seperti keluarga, suara kaum laki-laki lebih dominan, apa lagi di tingkat pedesaan. Alhasil kaum wanita yang kuat semangat masih dilihat sebagai kaum yang lemah, tidak memberi manfaat dan masih terkongkong secara turun temurun. Kaum wanita dilihat sebagai golongan kelas kedua yang seharusnya duduk diam dan 'disenandungkan' dengan konsumerisme serta hidonisme dalam cengkaman kapitalisme.

Kaum wanita yang lemah tidak sewajarnya berjuang dalam dunia politik yang sarat dengan kekerasan dan kekasaran permainan kuasa. Kaum wanita dinilai sebagai tidak berupaya memimpin dan membuat dasar karena mereka dilihat sebagai

begitu emosional dan tidak bersikap rasional. Persepsi negatif ini dikaitkan dengan kaum wanita sehingga kaum wanita dan kaum laki-laki sering melihat imej wanita sebagai kaum yang lemah.

Budaya patriaki menilai wanita dengan mitos tidak munasabah begini. Hakikatnya kaum wanita mempunyai otonomi mutlak ke atas dirinya. Sebagai manusia yang kedudukan yang setara untuk memimpin di muka bumi ini, kaum wanita berhak dan mempunyai tanggungjawab yang sama sebagai warga negara dalam mengatur kesejahteraan manusia.

Realitasnya, ketimpangan kaum wanita dan kaum laki-laki amat jelas dalam masyarakat di Indonesia. Dalam struktur keluarga yaitu unit terkecil, umpamanya, apa-apa keputusan penting masih dibuat oleh bapa yang bertindak sebagai simbol kepala keluarga. Budaya yang sudah meresap ke dalam masyarakat tidak boleh ditentang atau diubah serta merta dengan cara menolak budaya yang sudah lama dominan. Perbincangan keluarga masih perlu dilakukan.

Selain persamaan jenis kelamin, faktor lain yang seringkali menjadi rujukan pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap kandidat kepala daerah ialah persamaan suku. Secara sosiologi, persamaan suku merupakan faktor yang membuat masyarakat terikat kuat dan faktor yang mewujudkan rasa perpaduan yang tinggi hingga ada masanya menyebabkan perpaduan yang tidak rasional.

6.3. Perilaku Pemilih Orientasi Karakter Tokoh

Hal yang tidak boleh diabaikan dalam pembicaraan perilaku pemilih ialah berkenaan dengan isu yang mempengaruhi fikiran pemilih. Isu-isu ini sering dilontarkan kepada kepala daerah. Tekanan politik terhadap tokoh-tokoh dan partai tertentu pada masa silam dapat mewujudkan rasa simpati sebahagian pemilih. Penderitaan terhadap ketidakadilan oleh rezim yang berkuasa pada masa lampau menjadi simbol penderitaan sebahagian pemilih, sehingga pemilih tersebut akan mengidentifikasikan dirinya dengan tokoh-tokoh atau organisasi yang menjadi korban.

Gerakan reformasi merupakan peristiwa yang menjadi perhatian sebahagian masyarakat. Oleh karena itu, sumbangan dan keterkaitan tokoh-tokoh dan organisasi tertentu pada zaman gerakan reformasi jelas mempengaruhi perilaku pemilih.

Tokoh gerakan reformasi dan partai yang dilihat sebagai memberi sumbangan besar dalam peristiwa reformasi lazimnya didukung oleh sebahagian pemilih yang proreformasi. Tokoh-tokoh dan organisasi yang dilihat sebagai menentang dan menghalang gerakan reformasi tidak mendapat solongan dari pemilih yang proreformasi. Perilaku sebaliknya pula ditonjolkan oleh sebahagian pemilih yang antireformasi.

Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perilaku pemilih tidak selalu mempunyai jangkauan nasional. Peristiwa-peristiwa lokal (daerah) tertentu sangat mempengaruhi perilaku pemilih pada peringkat lokal. Peristiwa-peristiwa tempatan tersebut mempunyai dimensi tertentu yang lazimnya hanya difahami oleh masyarakat setempat dan cirinya berbeda dengan peristiwa yang berlaku di peringkat nasional.

Kajian yang dilakukan oleh Liddle dan Mujani (2000) merumuskan bahwa faktor ketokohan menjadi sebab utama kemenangan tokoh Habibie di Golkar. Hal ini menjelaskan mengapa jumlah pemilih Golkar di Sulawesi pada pemilu 1999 sangat besar (67%) jika dibandingkan daerah-daerah lain. Ketokohan Megawati juga berperanan besar dalam pemerolehan pilih PDI Perjuangan. Demikian juga faktor ketokohan Amien Rais untuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan Gus Dur untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Kandidat kepala daerah merupakan kandidat pemimpin pemerintah di daerah tempat dia mengadi. Seorang kepala daerah juga menjadi pemimpin yang bertanggungjawab terhadap seluruh proses administrasi pemerintahan di daerah tersebut. Seorang pemimpin perlu mempunyai watak tertentu dan jenis-jenis kepimpinan yang sesuai bagi menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik seperti yang diutarakan oleh Soemijo, W (1994:22) bahwa 'seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat dan watak yang menunjukkan keunggulan, seh-

ingga menyebabkan pemimpin tersebut mempunyai pengaruh terhadap bawahan'.

Berhubung dengan penjelasan di atas, maka sifat dan watak kepemimpinan harus ada dalam pribadi seseorang kandidat kepala daerah. Seseorang kandidat kepala daerah harus memiliki syarat-syarat karakter tokoh pemimpin yang sesuai sehingga boleh menjadi contoh terbaik kepada orang bawahan dan masyarakat yang dipimpinnya. Hal ini karena kepala daerah perlu berinteraksi dengan orang bawahan dan masyarakatnya untuk mencapai hasil yang diinginkan seperti yang diungkapkan oleh Sondang Siagian (1994:2) dalam bukunya *Teori dan Praktek Kepemimpinan* bahwa "seorang pemimpin harus dapat menyentuh berbagai kehidupan cara manusia, seperti cara hidup, kesempatan berkarya, bertetangga, bermasyarakat dan bahkan bernegara."

Kelebihan pemilihan kepala daerah secara langsung ialah ia membolehkan para pemilih mengetahui dengan jelas karakter perbagai kandidat kepala daerah yang akan dipilihnya. Dalam teori rasionalitastas, ada dua bentuk penilaian yang boleh dilakukan oleh para pemilih semasa menilai para kandidat yang akan dipilihnya. Pemilih boleh melakukan penilaian instrumental dan penilaian kualitas simbol terhadap setiap kandidat. Penilaian kualitas instrumental merupakan penilaian pemilih terhadap usaha kandidat untuk memenuhi harapan pemilih mesipun harapan ini tidak disuarakan oleh pemilih. Penilaian terhadap kualitas simbol dilakukan dengan menilai kualitas pribadi seseorang yang berkait dengan integritas diri, ketegasan, kejujuran, ketaatan pada norma dan aturan, kebaikan, sikap mesra rakyat dan sebagainya.

Penilaian yang lebih mengutamakan aspek intrumental merupakan hal yang wajar karena walau apapun proses pemilu, pemilih mengharapkan masa hadapan serta kepentingan mereka terbela dan terpelihara. Meskipun demikian, seseorang kandidat kepala daerah harus berhati-hati terhadap perilaku (*behavior*) sebelum dia masuk bertarung sebagai kandidat dalam pilkada. Hal ini karena lawan-lawan kandidat akan berusaha mencari keburukan kandidat dengan tujuan untuk

menghancurkan karakter tokoh atau kualitas simbolik seseorang kandidat kepala daerah. Sering kali popularitas seseorang kandidat menurun setelah terperangkap dengan skandal yang cukup memalukan.

Hal tersebut belum tentu menjanjikan perubahan orientasi pemilih terhadap kandidat yang berkaitan.

Karakter tokoh yang ada pada watak seseorang kandidat kepala daerah bukan saja dicitra oleh usaha dan integritas mereka tetapi juga dipengaruhi oleh kredibilitas mereka atau apa-apa yang kandidat lakukan sebelum waktu pemilihan. Namun begitu, dalam menentukan pilihan mereka, pemilih lebih memperhatikan masa depan atau hasil yaitu sama ada proses pilkada tersebut akan melahirkan seseorang kepala daerah yang berupaya membawa masyarakat ke jalan yang lebih baik atau tidak.

Perlu diketahui bahwa karakter tokoh muncul bukan dari sebab tetapi hasil dari interaksi sosial. Soemijo, W dalam bukunya *Pemimpin dan Kemimpinan*, menegaskan bahwa "Kepemimpinan sebagai suatu hasil proses sosial, merupakan hubungan antar peribadi, dimana pihak lain melakukan penyesuaian."

Kepemimpinan bukanlah satu sebab tetapi sebagai satu akibat atau hasil daripada perilaku kelompok karena kepemimpinan timbul dari proses interaksi kelompok itu sendiri" (Soemijo, 1994 ; 2). Perbincangan di atas menunjukkan bahwa karakter plin-plan, tidak konsisten dan munafik lahir dari suatu interaksi antara masyarakat. Oleh karena pemimpin lahir dari proses interaksi dalam masyarakat, maka perubahan-perubahan yang dialami oleh karakter tersebut berlaku dengan adanya perubahan pola interaksi antara pemimpin dengan yang dipimpin. Yang termasuk dalam pola interaksi yang dimaksudkan ialah meningkatkan mekanisme kontrol (*check and balance*), membuka ruang aspirasi dan kritikan seluas-luasnya, mewujudkan komunikasi yang efektif dan membangunkan penglibatan secara aktif masyarakat dalam proses pentadbiran.

6.4. Perilaku pemilih Orientasi Keakraban Hubungan

Paul F. Lazarsfeld dalam bukunya *The People's Choice. How the Voter Makasus Up His Mind in a Presidential Campaign* menyebut bahwa seseorang pemilih hidup dalam konteks tertentu, yaitu status ekonominya, agamanya, tempat tinggalnya, pekerjaannya dan usianya. Konteks ini ditakrif sebagai lingkaran sosial yang mempengaruhi keputusan pemilih. Setiap lingkaran sosial memiliki normanya tersendiri yaitu ketaatan pemilih terhadap norma-norma tersebut akan menghasilkan integrasi pemilih terhadap lingkaran sosialnya.

Setiap pemilih hidup dalam suatu kelompok-kelompok sosial yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Dalam *pendekatan sosiologis* ada dijelaskan bahwa ciri-ciri dan pengelompokan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dan suara pemilih [voting]. Dan Nimmo dalam bukunya *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media* [1993] adalah pengalaman kelompok.

Dari dua uraian di atas dapat dirumuskan bahwa keputusan seseorang pemilih terhadap kandidat kepala daerah yang akan dipilihnya bebas sepenuhnya atau bebas dari kelompok sosial tetapi dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses keputusan yang diambil oleh pemilih. Selain dari pengaruh kelompok sosial yang membataskan dirinya, keputusan seseorang pemilih turut dipengaruhi oleh isu kampanye setiap kandidat kepala daerah apakah pesan (janji) kampanye tersebut sampai dan menjadi pertimbangan pemilih.

Peranan media khalayak dalam membentuk pandangan umum juga mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemilih. Selain faktor di luar individu, keputusan pemilih dalam membuat pilihannya juga turut dipengaruhi oleh tahap penghayatan dan pemilih dalam memahami serta memilih nilai dan janji-janji kampanye yang diterima dalam dirinya.

Sewaktu memutuskan pilihannya, seseorang pemilih melakukan proses identifikasi yaitu kandidat yang mana yang paling akrab dengan identitas sosialnya baik sebagai individu atau sebagai kelompok. Semakin erat hubungan antara pemilih den-

gan kandidat kepala daerah, semakin besar peluang pemilih memilih kandidat kepala daerah tersebut.

Onong Uchjana (1992) menegaskan bahwa “komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media”. Dan Nimmo (1989) pula menyatakan bahwa “komunikasi bukan sekadar penerusan informasi dari satu sumber kepada publik; ia lebih mudah difahami sebagai penciptaan kembali gagasan-gagasan informasi oleh publik jika diberikan petunjuk dengan simbol, slogan atau tema pokok”.

Dari petikan-petikan di atas, dapat dilihat bahwa komunikasi merupakan faktor utama bagi kandidat kepala daerah bagi membentuk perspsi dan meyakinkan seorang pemilih untuk memilihnya. Bagi pemilih pula, komunikasi merupakan satu wahana yang membolehkan mereka mengenal dan menilai kandidat kepala daerah dengan lebih mendalam lagi. Tanpa ada komunikasi yang baik, keakraban komunikasi tidak akan bermakna.

Yang berlaku selama ini ialah proses komunikasi antara kandidat kepala daerah dengan pemilih tidak berjalan dengan baik. Interaksi antara kandidat kepala daerah dengan masyarakat hanya berlaku semasa kampanye berlangsung saja dengan ruang waktu yang sempit dan ruang berkomunikasi yang terbatas. Malah yang sering berlaku juga ialah kandidat kepala daerah hanya sekadar menyampaikan pesan tanpa melakukan usaha untuk mendapatkan respon balik (*feedback*) dari pemilih.

Faktor keakraban secara sosial antara kandidat kepala daerah dengan pemilih bukan satu jaminan bahwa pemilih memilih kandidat tersebut secara otomatis apatah lagi jika kandidat tersebut kurang aktif dalam mewujudkan komunikasi dengan khalayak pemilih.

Keakraban sosial juga dapat dilihat dari keakraban hubungan berdasarkan keberhasilan pemilih dan keluarga pemilih dengan keberhasilan salah seorang kandidat kepala daerah.

Para pemilih lebih arif tentang kelemahan mereka yang mempunyai keberhasilan yang sama dengan mereka dan hal

ini menyebabkan mereka pesimis bahwa kandidat yang mempunyai keberhasilan yang sama dengan mereka boleh memimpin dengan baik.

Pendekatan Psikososial melihat pandangan pemilih di atas berkait rapat dengan pengalaman keberhasilan pemilih yang kurang menyenangkan. Pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan ini akan diinternalisasi menjadi sesuatu hal yang buruk. Pengalaman buruk ini akan digeneralisasi dan dikaitkan dalam bentuk kehidupan sosial mereka. Semasa pemilih bertindak sebagai pemilih, pengalaman masa lalu akan menjadi rujukan pemilih dalam menentukan pilihannya. Pengalaman masa lalu pemilih sedikit banyak menjadi variabel dalam menentukan pilihannya terhadap salah seorang kandidat.

Selain itu terdapat juga faktor situasi yakni faktor peristiwa-peristiwa sosial yang mempengaruhi persepsi pemilih seperti kasus korupsi atau sogokan yang dilalui oleh kepala daerah, dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kepala daerah yang merugikan dirinya dan sebagainya. Faktor situasi menjadi variabel yang mempengaruhi orientasi pemilih dalam menentukan pilihannya, terutama sekali apabila pemilih berhadapan dengan situasi sama ada untuk memilih semula kandidat kepala daerah yang pernah memegang jabatan ini atau kandidat yang baru.

Hal yang mempengaruhi pemilih dalam mengubah pilihan politiknya dapat dianalisis melalui pendekatan struktural dan psikologi. Secara struktural, mobilitas struktur sosial yang dialami oleh pemilih memberi dampak kepada pola perilaku pemilih yang kemungkinan besar akan mengubah pilihannya. Ini karena struktur sosial yang baru akan membuat pemilih akan memilih kandidat kepala daerah yang dapat mewujudkan aspirasinya berdasarkan kepentingan struktur sosial yang baru dari pemilih.

Secara psikologi, perubahan situasi sosial yang ditafsirkan oleh pemilih akan mengubah pilihan pemilih. Ini termasuklah tafsiran pemilih terhadap praktis pemimpin kepala daerah lama yang kurang memuaskan pemilih.

Menurut V.O Key dalam bukunya *The Responsible electorate, Rationality in Kepala Daerahial Voting 1936-1960*, setiap pemilih menepatkan pilihannya secara perspektif yaitu dengan menilai prestasi partai politik dalam kiprahnya selama ini sudah cukup baik untuk dirinya dan negaranya atau sebaliknya. Penilaian ini turut dipengaruhi oleh penilaian terhadap pemerintah pada masa yang lalu. Apabila hasil penilaian prestasi pemimpin yang berkuasa (juga bila dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya) positif, maka mereka akan dipilih kembali. Apabila hasil penilaiannya negatif, maka pemerintahan tersebut tidak akan dipilih lagi.

Dalam konteks yang dialami oleh pemilih di atas, sebenarnya pemilih mau adanya perubahan karena perubahan-perubahan struktur sosial yang dialami oleh pemilih serta tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan kepala daerah yang lama agak rendah. Namun begitu pemilih tidak mempunyai informasi yang mencukupi tentang profil kandidat kepala daerah yang baru dan kekurangan ini tidak boleh membantunya membuat keputusan. Hal ini juga boleh menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilihannya.

Kandidat *incumbent* dapat dikenal pasti dengan mudah oleh pemilih karena faktor keakraban sosial selama ini semenjak kandidat memegang tanggungjawab sebagai kepala daerah. Hal ini berlaku secara relatif terhadap kandidat baru karena kandidat baru boleh dikenal pasti dengan mudah jika beliau pernah dikenal sebelum ini oleh pemilih atau kandidat baru ini mungkin kurang dikenali karena beliau belum lagi akrab dengan pemilih sama ada dari segi biologi, sosiologi, ataupun politik.

Kandidat *incumbent* akan kembali terpilih jika selama masa pemerintahannya dilihat memberi kepuasan kepada para pemilih. Namun sekiranya kepuasan tersebut kurang, besar kemungkinan kandidat lama ini tidak akan terpilih kembali. Dalam masyarakat dinamis yang mobilitas sosial dan heterogenya tinggi, ada kemungkinan perilaku pemilihnya berubah-ubah. Hal ini karena masyarakat seperti ini berharap hal-hal baru dalam kehidupan sosial mereka.

Hal ini berlawanan dengan perilaku pemilih dalam masyarakat yang homogen dan lebih tertutup. Keakraban hubungan sering menjadi pegangan utama mereka dalam menentukan pilihan. Menurut *Paul F. Lazarsfeld*, "seorang pemilih yang hidup dalam lingkaran sosial tertentu yang memiliki seperangkat aturan dan norma, dikontrol oleh lingkaran sosial tersebut dengan cara memberikan tekanan agar sang individu menyesuaikan diri, sebab pada dasarnya setiap orang ingin hidup dengan tenang, tanpa bersitegang dengan lingkarannya" (*Lazarsfeld, The People's Choice. How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign* .148).

Justru, seseorang pemilih dalam masyarakat tertutup lebih cenderung untuk memilih kandidat kepala daerah yang mempunyai hubungan sosial maupun emosional dengan dirinya.

Pemilih yang memilih tidak setuju menyatakan keakraban emosi dengan kepala daerah penting karena ini akan memudahkan kepala daerah menyerap aspirasi mereka dan juga memudahkan pemilih untuk mengawal kandidat dan meningkatkan kandidat akan aspirasi pemilih. Penglibatan dalam proses pilkada penting karena proses ini akan menentukan siapa yang akan menjadi kepala dalam masa pemerintahan seterusnya pemilih akan terus menggunakan hak mereka walaupun tidak ada kandidat kepala daerah mempunyai keakraban hubungan secara emosi dengan pemilih.

Perbincangan di atas jelas menunjukkan bahwa pemilih mengaitkan dirinya ke dalam lingkungan sosialnya dengan begitu erat hingga pilihan yang dibuat akan didasarkan pada keakraban hubungan yang sudah terjalin, baik secara sosial maupun secara emosional. Kajian empiris yang mendalam yang dibuat oleh *Barelson et al. (1954)* membuktikan bahwa setiap orang berusaha untuk mempertahankan homogen lingkungan sosialnya bagi mengelak konflik. Para peneliti ini berpandangan bahwa mereka mendapati bahwa individu memilih kandidat yang merasal dari rteman-teman pemilih dengan pandangan politik yang sama.

Masalahnya ialah kandidat yang diunggulkan akan dikaitkan dengan titik tolak pandangan tertentu yang dirasakan

sesuai. Salah satu daripada titik pandangan ini ialah faktor keakraban emosil, manakala informasi politik hanya diterima secara selektif untuk memastikan keharmonisan yang ada tetap terpelihara.

Dalam konteks penglibatan pemilu pula, pemilih juga boleh berperanan aktif dalam menentukan identifikasi dan interpretasi terhadap setiap kandidat. Dalam pendekatan psikologi, pemilih boleh menentukan pemilihannya dengan menilai peribadi kandidat yang ada serta situasi sosial yang sedang berkembang. Jika pemilih masih tidak menemui rujukan kandidat yang dilihat sebagai mewakili dirinya dan lingkungannya, pemilih mungkin akan menggunakan hak pilih untuk memilih salah satu kandidat yang ada.

Tahap ppartisipasi pemilih dalam suatu proses pemilihan seperti pilkada akan menjadi lebih tinggi berbanding pemilihan presiden. Hal ini disebabkan faktor-faktor keakraban sosiologi dan politik antara pemilih dengan kandidat kepala daerah, ataupun semasa kandidat terpilih menjadi kepala daerah. Ini menyebabkan rangsangan politik bagi pemilih untuk memilih jauh lebih mendalam.

Hal ini mengukuhkan penjelasan sebelumnya yaitu keputusan pemilih untuk menggunakan hak pilihannya bukan saja karena pemilih mengetahui salah satu kandidat yang ada tetapi juga karena pengaruh lingkungan sosial pemilih. Hal ini sejajar dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti dari *Columbian School*, yang menyatakan bahwa perilaku pemilu seseorang cenderung mengikuti arah predisposisi politis lingkungan sosial individu tersebut. Pengaruh terbesar datang dari keluarga dan lingkungan teman rapat individu berkenaan.

Mengikuti peneliti dalam kajian ini, sebelum pemilu diadakan, setiap anggota terikat dengan predisposisi kelompoknya. Selain itu, memilih dalam pemilu juga pada dasarnya merupakan satu pengalaman kelompok (*"voting is essentially a group experience"*), hinggakan pengaruh kelompok setempat juga boleh menyumbang kepada penglibatan pemilih dalam pilkada.

Selain dari itu, keengganan pemilih untuk memilih seseorang kandidat sebenarnya juga merupakan satu bentuk protes

kelompok masyarakat terhadap sistem yang sedang dilaksana. Reaksi protes dengan tidak menggunakan hak pilih menunjukkan bahwa kelompok masyarakat tersebut sedang mendelegitimi sistem yang berlaku. Ini bermakna bahwa walaupun tiada banyak informasi tentang seseorang kandidat kepala daerah, namun hal ini bukanlah faktor yang utama yang menyebabkan pemilih tidak memilih kandidattersebut.

Daftar Pustaka

- Abrams, Robert., 1973, *Some Conceptual Problems of Voting Theory*, Sage Publications, Beverly Hill,
- Adisubrata, Winarna Surya, 2003, *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia- Sejak Proklamasi sampai Awal Reformasi*, jilid 1, Aneka Ilmu, Semarang
- Aidt, T.S., 2000, *Economic voting and information*, electoral studies, (19) 2-3
- Aldrich, J.H. 1993, *Rational Choice and Turnout*, American Journal of Political Science, (37),
- Amal, Ichlasul, 1988, *Kedudukan dan Peran Parpol sebagai Komponen Pelaksanaan Demokrasi Pancasila*, Yogyakarta
- Amirudin dan A. Zaini Bisri, 2006, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Anam, A., 2000, *Pengaruh Kesamaan Komunikator dan Target dalam Kualitas Persuasi*, Thesis [tidak diterbitkan]. Yogyakarta : Program Studi Psikologi Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.
- Ananta, Aris, Evi Nurvidya Arifin dan Leo Suryadinata, 2004, *Indonesian Electoral Behavior: A Statistical Perspective*, Indonesia's Population Series No. 7, Singapore, Institute of Southeast Asian Studies
- Andre, Siegfried, 1913-1949, *Tableau politique de La France de l'Ouest sous La Troisieme Republique*, Paris: Aemand Colin.
- Anshari, H. 1996, *Kamus Psikologi*, Usaha Nasional, Surabaya
- Antar, Venus, 2004, *Manajemen Kampanye*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung
- Asfar, Muhammad, "Beberapa Pendekatan dalam Memahami Perilaku Pemilih", *Jurnal Ilmu Ilmu Politik*, 16. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Apter, David E., 1996, *Pengantar Analisa Politik*, LP3ES, Jakarta
- Apter, David dan Charles F. Andrian, ed. 1972, *Contemporary Analytical Theory* (Englewood N.J.: Prentice Hall)
- _____, : 1973, "Comperative Government: Developing New Nations." Dalam David E. Apter, *Political Change: Collected Essays* (London: Frank Cass.
- Azwar, S., 1997, *Sikap Manusia. Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Barbie, E. 1990, *Survey research methods.*, Belmont CA : Wadsworth Company,
- Baron, R., and Byrne, D. 1997, *Social Psycology*, Eighth Edition. Boston : Allyn and Bacon,
- Berg, Bruce L., 1989, *Qualititative Research Methodes for The Sosial Science*, Indiana Univerity of Pennsylvania, Boston
- Bernard, Berelson, 1954. *Voting*, University of Chicago Press, Chicago
- Berghe, Pierre van den, "Dialectic and Functionalism," *Amarican Sociological Review*, 28 (October 1963), 695-705
- Bhakti, Ikrar Nusa dan Riza Sihbudi (eds), 2001, *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat-Belajar dari Kekeliruan Negara-negara lain*, Mizan, Bandung
- Bogdan, C Robert, dan Sari Knopp Biklen, 1982, *Qualitatitf Research for Educaation: An Introduction to Theory and Methode*, Boston: Allyn and Bacon, Inc
- Boudon, R., 1996, "The 'cognivist model': a generalized 'rational-choice model', *Rationality and society*, (8),
- Brennan, Geoffrey/Loren Lomasky. 1993, *Democracy and Decision. The pure theory of electoral preference*, Cambridge/ MA
- Breen, R., 1999, "Beliefs rationa choice and Bayesian Learning," *Rationality and Society*, (11), 4
- Brown, A.R. Radcliffe "On the Concept of Function in Social Science," *Amarican Anthropologist*, 37 (Juli-September 1935)
- Budiardjo, Meriam, 1993, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta

- Burklin, Wilhelm P. 1988, *Wahlerverhalten und Wertewandel*, Opladen
- Blumer, Herbert, "Suggestions for the Study of Mass Media Effects, dalam Burdick dan Brodbeck, ed., *American Voting Behavior*.
- Bryne, D., Clore., & Worchel, P. 1986, "The effect of economic similarity-dissimilarity on interpersonal attraction," *Journal of Personality and social Psychology*, (4)
- Cassell, Chaterine, dan Symon Gillian (ed), 1994, *Qualitative Methodesin Organization Research, A Pratical Guide*, Sage Publication, Singapore
- Campbell, Angus/Gerald Gurin/Warren E, Miller, 1954, *The Voter Decides*, Evanston
- _____, 1960, *The American Voter*, New York
- _____: 1966, *Elections and the Political Order*, New York
- Casey, Goegory, '1976, Popular Perceptions of Supreme Court Rulings:, *American Politics Quarterly*, January
- Chan, K., & Drasgow, F, 2001, Toward a Theory of Individual Differences and Leadership : Understanding the Motivation to Lead, *Journal of Applied Psychology*
- Chater, N., Oaksford, M., Naksia, R., & Redington, M., 2003, "Fast, frugal, and rational : how raional norms explain behavior," *Organisational Behavior and Human Decision Process*, (90),1
- Chapman, R.G., & Palda, K.S., 1983, "Elektoral turnout in rational voting and consumptions perspectives," *Strategic Management Journal*, (9),3,
- Child, J., 1972, "Oraginizational structure and strategies control: a replication of the Aston study, " *Adminisistrative Science Quarterly*, (17)
- Converce, P., 1968, "The nature of Belief sistims in mass publics." In : Luttberg, N. [ed.], *Public opinion and public policy*, Homewood Ill: The Dorsery Press.
- Cresswell, J. W. , 1994, *Research Design : Qualitative and Quantitative approaches*, Newbury Park: Sage Publications Inc.

- Dermawan, Rizki, 2005, *Pengambilan Keputusan*, , Alfabeta, Bandung
- Djohan, Djohaermansyah, 1990, *Problematik Pemerintahan dan Politik local*, Bumi Aksara, Jakarta
- Downs, Anthony., 1957, *Okonomische Theorie der Demokratie, Tubingen (engl.: An Economic Theory of Democracy*, Harper and Row, New York
- Easton, David, 1965, *A Framework for Political Analysis* (Englewood Cliff, N.J.: Prentice Hall,
- _____,1971,*The Political Sistim*, ed, 2 (New York: Alfred A. Knopf,)
- _____,1984, *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, Bina Aksara, Jakarta.
- Eith, Ulrich/Gerd Mielke : 1994, Mols, Manfred, penerbit : Politikwissenschaft : eine Einfuhrung, Munchen,
- Emmer, Thomas/Dieter Roth, 1995, *Zur wahlsoziologischen Bedeutung eines Modells sozialstrukturell verankerter Konfliktlinien im vereinten Deutsch land*, Historical Social Reseach.
- Eulau, Heinz, 1965, *The behavioral Persuasion in politics* (New York: Random House, 1963) hlm. 38-109; David Easton, A Framework for Political Analysis (Englewood Cliff, N.J.: Prentice Hall
- Evans, J.St.B.T., & Over, D.E. 1996, *“Rationality in reasoning*, Hove, Sussex: Psychology Press.
- Faizal, Sanapiah, 2001, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Faisal, Mohd Syam Abdol Hazis, 2002, *Tingkah Laku Pemilihan Dalam Pemilu Parlemen Sarawak*, Samarahan Sarawak Universiti Malaysia Sarawak
- Falter, Jurgen W/Siegfried Schumann/Jurgen Winkler, 1990, *Erklarungsmodelle von Wahlerverhalten*, APuZ 37-38
- Feith, Herbert, *“Pemilihan Umum 1955 di Indonesia”*, Jakarta : PT.Gramedia, 1999.
- Finkle, Jason L. and Richard W. Gable, 1971, *Political Development and Social Change*, second edition, John Wiley & Sons, Inc.,

- New York-London-Sidney-Toronto
- Fiorina, Morris P., 1981, *Retrospective Voting in American National Elections*, New Haven, Yale University Press, London
- Fishbein, W. dan Ajzen, D., 1975, *Belief, Attitude, Intention, and Behaviour*, Philipines : Addison-Wesley
- Franklin, C.H. 1991, *Eschewing obfuscation? Campaigns and the perceptions of U.S. senate incumbents,*" American Political Review, (85)
- Franzoi, L., 1997, *Social Psychology*. Third Edition. Boston : McGrawHill.
- Gaffar, Affan, 1992, *Javanes Voters, Case Study of Election Under Hegemonic Party sistim*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Gay, D., & Diehl, E. 1990, *Research Methods*, New York : Academic Press
- Gigerenzer, G., & Goldstein, D., 1996, *Reasoning the fast and frugal way: models of bounded rationality,*" Psychological Review, (103)
- Golder, M., 2005, Democratic electoral sistims around the world, 1946-2000, " *Electoral Stuies*, (24), 1,
- Granovetter, M., 1985, "Economic action and social structure : the problem of embeddedness," American Journal of Sociology, (78),
- Greenstein, Fredrick-Nelson W. Polsby, 1975, *Handbook of Political Science*, Vo.2 Addison Wesley, Reading Massachussets
- Green, D., & Shapiro, I., 1994, "Pathologies of rational choice theory: a critique of applications in political science, New Haven, CT: Yale University Press,.
- Hakim, Luqman, (terj), 1992, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta,
- Hamid, Edy Sunandi dan Sobirin Malin (ed.), 2004, *Memperkokoh Otonomi Daerah-Kebijakan, Evaluasi dan Saran*, Yogyakarta: UII Press.
- Harjono, 1996, *Peningkatan Harga Diri Melalui Pelatihan Pengambilan Keputusan*, Tesis [tidak diterbitkan Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM,

- Harnoe, R, 1994, *Tinglah Laku Memilih di Kalangan Mahasiswa UI pada Pemilu 1992*. Skripsi Sarjana Ilmu Politik Universitas Ilmu Politik.
- Hofstetter, C.R., Zukin, C., & Buss, T., 1978, "Political imagery and information in an age of televion," *Journalism Quarterly*, (55),
- Hopkins, N., & Kahani-Hokins, V, 2004, Identity Construction and British Muslims' Political activity Beyond Rational Actor Theory, *the British Journal of Social Psicology*, 43,
- Hurwitz L, 1979, *Introduction to Politics, Traditionalism to Postthebahavioralisme in Theory and Practice*, Nelson-Hall, Chicago.
- Huntington, Samuel P., 1968, *Political Order in Changing Societies*, New Haven, Conn.; Yale University Press
- Imawan, Riswandha, 1997, *Membedah Politik Orde Baru*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- James, Anderson, A., et.al, 1998, *Strategies of Qualitative Inquiri*, New Delhi, Sage Publication, Inc,
- J.Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi*, Jilid 1, Edisi ke 6, Erlangga, Jakarta,
- Kaloh, J, 2003, *Kepala Daerah-Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah, dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta
- Karim, Abdul Gaffar, (ed.), 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Karp, J.A., Vowles, J., Banducci, S.A., & Donovan, T. 2002, "Strategic voting, party activity, and candidate effect: testing explanation for split voting in New Zealand's new mixed sistim," *Electoral Studies*, (21), 1
- Keban, Yeremias, 1998, *Metode Penelitian Administrasi Negara*, Modul Kuliah S2 Administrasi Negara Fisipol, UGM, Yogyakarta
- Key, Valdimer O.: 1966, *The Responsible electorate, Rationality in Presidential Voting 1936-1960*, Cambridge,

- _____, dan Frank Munger, 1959, "Social Determinism and Electoral Decision : The Case of Indiana", dalam Leugene Burdick dan Arthur Brodbeck, ed., *American Voting Behavior*, The Free Press, New York,
- King, Dwight Y, *Half-Haltered Reform: 2001, Electoral Institution and the Struggle for Democracy in Indonesia*, Wesport, Connecticut, Praeger
- Klingemann, Hans-Dieter, 1973, *Issue-Kompetenz und Wahlentscheidung*, PVS 14,
- Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*, 1995, edisi sebelas, PT.Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta,
- Kuper, A dan J. Kuper, 2000, *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial : Machiavelli-World Sistim*, edisi kedua. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Lanoue, J.D dan Bowler, S, 1996, *New Party Challeges and Partaisan Change: The Effects of Party Competition on Party Loyalty*. *Political Behavior*, Vol.18, No.4
- Lazarsfeld, Paul., 1944, *The People's Choice*, Colombia University Press, New York,
- Lembaga Survey Indonesia, "Potret Buram Pemilih dan peran Civil\52 Demokrasi & HAM, Vol.4, No. 1, 2004
- Levy, Marion J. Jr., *Modernization and the Structure of Sosieties*, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1968
- _____, "Structural-Functional Analysis," *International Encyclopedia of Social Science*, vol 6
- Lipset, Seymour M/Stein Rokkan, 1967, *Cleavage Structures, Party Sistim, and Voter Aligments*, dalam : *Party sistims and Voter Aligments : Cross-National Perspectives*, New York/ London
- Liddle, William, 1998, *Model Politik*, dalam *Majalah Tempo*, edisi 12, Oktober 1998
- Liddle, William dan Saiful Mujani, "Politik Aliran Memudar, Kepemimpinan Nasional Menentukan Pilihan Partai Politik", *Kompas*, 1 September 2000.
- , 2003, *The Power of Leadership: Explaining Voting Behavior in the New Indonesian Democracy*, Laporan penelitian

- Lindenberg, S., 1985, *"An assessment off the new political economy : its potential for the social sciences and sciology in partaicular,"* Sociological Theory, (3)
- Lingkaran Survey Indonesia, *Perilaku Pemilih Muslim : Isu Presiden, Partai dan Demokrasi"*, Analisa Temuan Survey LSI, November 2003
- Lingkaran Survey Indonesia, *Pemenang pemilu Presiden Putaran Pertama 5 Juli 2004"*, Analisa Temuan Survey LSI Tentang *Pemilih Indonesia ke-5*, 2 Juni 2004.
- Mallarangeng, Andi, 1997, *Contextual Analysis on Indonesian Electoral Behavior*, Disertasi doktoral pada Departement of Political Science, Northern Illinois University
- Martin Lipset, Seymour., *Political Man*, Doubleday and Co., Garden City, N.Y., 1959
- Mas'ood, Mohtar dan Colin Mac Andrews (ed.), 1991, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Mendelsohn, Harold,. & Garret J. O'Keefe, 1976, *The People Choose a President*, Praeger Publishers, New York,
- Mielke, Gerd, 1991, *Des Kirchturms langer Schatten*, dalam Landeszentrale Fur Politische Bildung, penerbit Wahlverhalten, Stuttgart
- Mithcell, William C., *Sociological Analysis and Politics: The Theories of Talcott Parsons* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1967)
- Milone, P.D, 1966, *Urban Areas in Indonesia: administrative and Census Concepts*, [Berkeley: Institute of International Studies, University of California
- Moleong, Lexy J., 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Moon, David, 1992, *The Determinants of Turnout in Presidential Election*, *Political Behavior*, Vol.14 No.2,
- Mujani, Saiful, *"Survei dan Perilaku Pemilih"*, *Kompas*, 14 Juni 2004.
- Mulkhan, A.M, 1995, *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Tahun 1965-1987 dalam Perspektif Sosiologis*, Jakarta : Rajawali Press,

- Mustaqfirin, 2003, *Teori-teori Utama Psikologi Kognitif*. Makalah Sosial II [tidak terbit], Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Hairany, Naffis (penyit), 1993, *Amalan Politik Malaysia*, Bangi, UKM
- Nazir, Mohammad, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta
- Nawawi, Hadari, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Newcomb, T.M., 1978, "The acquaintance process : looking mainly backwaed", *Journal of Personality and Social Psychology*, (36)
- Newman, I.B [ed], 1985, *Hand book Of Political Marketing*, California: Sage Publication.
- Niemi, R.G. 1976, *Costs of voting and nonvoting*, "Public Choice, (17)
- Nursal, Adman, 2004, *Political Marketing : Strategi Memenangkan Pemilu sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pamudji, 1988, *Perbandingan Pemerintahan*, Bina aksara, Jakarta.
- Palmer, Monte, 1973, *Dilemmas of Political Development*, Florida : F.E. Peacock Publishers, Inc.
- Pappi, Franz U, 1977, *Sozialstruktur, gesellschaftliche Wertorientierungen und Wahlabsicht*, PVS 18
- _____, 1985, *Oberndorfer, religiöser Wandel und Wertwandel. Folgen für das politische Verhalten in der Bundesrepublik Deutschland*. penerbit : Wirtschaftlicher Wandel
- _____, 1990, *Die Republikaner im Parteiensystem der Bundesrepublik. Protester scheinung oder politische Alternative?*, APuZ 21/90
- Paul F. Lazarsfeld; Bernard Berelson; Hazel Gaudet, 1968 : *The People's Choice. How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign*. New York
- Popkin, Samuel: 1976, *Comment: What Have You Done for Me Lately? Toward An Investment Theory of Voting*, APSR 70
- _____, 1991, *The reasoning voter: voter communication and persuasion in presidential elections*, Chicago: University of Chicago Press

- Popper, K.R., 1974, "*Bernay's plea for a wider notion of rasion-
alitatasy,*" in Schilpp, P>A [ed.], *The Philosophy of Karl
Popper*, open Court : La Salle.
- Pomper, Gerald., 1975, *Voter' Choice, Dodd, Mean and Co.*, New
York
- Prihatmoko, J. Joko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung,
Filosofi, sistim dan Problema Penerapan di Indonesia*, Lembaga
Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat
[LP3M] Universitas Wahid Hasyim, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta
- Quist, R.M., & Crano, W.D, 2003, *Assumed policy similarity and
voter preference*, "*The journal of social Psychology*, (143),2,
- Razali Mat Zain dan rakan-rakan. 1998, Faktorial validity of
Meyer and Allen's three-component model of organization-
al commitment: A test in a Malaysian sample. *Kertaskerja*
dibentangkan di International Confrence: The State in the
Asia-Pacific Region,
- Reilly, Ben, 1999, *Reformasi Pemilu di Indonesia : Sejumlah Pilihan,
dalam Almanak Parpol Indonesia*, Yayasan API, Jakarta.
- Ridha, A, 2003, *Cara Cerdas Mengambil Keputusan*. Tarmana
[penerj], Bandung: PT.Syaamil Cipta Media
- Rifda, Ida, 2006, *Pengaruh Political Marketing Terhadap Keputusan
Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Walikota Pekanbaru*, Tesis,
[tidak diterbitkan] Pasca Sarjana Universitas DR. Soetomo,
Surabaya.
- Roger, S, W., 2003, *Social Psychology Experimental and Critical
Approaches*. Maidenhead : Open University Press
- Rohrchrneider, R., 2002, "Mobilizing versus chasing: how do
partaies target voters in election campaigns?" "*Electoral
Studies*, (21), 3
- Rokan, Stein, 1980, Eine familie von Modellen fur die vergle-
ichende Geschichte Europas, *Zeitschrift fur Soziologie*
- Roth, Dieter,(penterj) Denise Matindas, 2008, *Studi Pemilu
Empiris: Sumber, Teori-Teori, Instrumen dan Metode*, Lembaga
Survei Indonesia, Jakarta
- Salossa, S, Daniel, 2005, *Pilkada Langsung menurut UU No.32
Th.2004*, Media Pressindo, Yogyakarta,

- Sastroatmojo S. 1995, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sears, O. D., Freeman, A. L & Peplau, A. L. 1999, *Psikologi Sosial* Jilid I. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Semin. R dan Fiedler.K, 1996, *Applied Social Psychology*, London : Sage Publication Thousand Oaks
- Schumpeter, A., 1966, *Capitalism socialism and democracy*, London : Unwin University Books
- Schwenk, C.R. 1984, *Cognitive Simplification Process in Strategic Decision Making*," *Strategic Management Journal*, (5), 2
- Sijito, 1982, *Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jilid I, Pradnya Paramita, Jakarta
- Simon, H.A. 1960, *The new science of management decision*. Prentice-Hall inc. New Jersey
- Snelbecker, Glenn, E., Learning, 1974, *Theory and Psychoeducational Design*, New York: McGraw Hill Book Company
- Sniderman, P.M., Brody, R.A., & Tetlock, P.E., 1991, *Reasoning and choice: exploration in political psychology*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Stinchcombe, Arthur L., 1968, *Concstruting Social Theories* (New York: Harcourt Brace, and World,)
- Stokes, Donald E, 1966, *Some Dynamic Elements of Contests for the Presidency*, APSR 60,
- Stuart A Rice, 1928, *Quantitative Methods in Politics*, New York
- Sumarwan, Ujang, *Perilaku konsumen*,2002, Ghalia Indonesia, Bogor
- Surbakti, Ramlan1992, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta
- Surjaman,Tjun, [terj], 1993, *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Survey LP3ES, FRI, YAPPIKA dan NDI, "Pemilih PDIP Beralih ke Partai Demokrat, Suara PPP dan PAN Bocor Memilih PKS" di www.lp3es.or.id
- Sutrisno, Eddy, 2004, *Perilaku Memilih Warga NU dalam Pemilihan Presiden 2004*, Tesis, [tidak diterbitkan] Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.

- Suwondo, *Perilaku Pemilih Masyarakat Perkotaan pada Pemilu 1997 : Studi di Kodya Dati II Bandar Lampung*" makalah disajikan dalam Seminar Nasional XV dan Kongres Nasional IV Asosiasi Ilmu Politik Indonesia di Bandung, 23-25 September 1997.
- Somit, Albert dan Joseph Tanenhaus, 1967, *The development of Amerika Political Science*, Boston : Allyn and Bocon,
- Syafrudin, Ateng, 1994, *Kepala Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Syaukani, HR, Afan Gaaffar,. M.Ryaas Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah dam Negara Kesatuan*, Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajjian Etika Politik dan Pemerintahan, Yogyakarta
- Trent, J.S., Short-Thompson, C., Mongeeau, P.A., Nusz, A.K., & Trent, J.D.,2001, " Image, media massa, and voter characteristics," *the American Behavioral Scientist*, (44), 12
- Tabloid *Tekad*, edisi 18-24 Januari 1999.
- Trenholm, S. 1989, *Persuasion and Social Influence*, New Jersey : Prentice Hall,.
- Vallier, Ivan, (ed). 1971, *Comparative Methods in Sociology* (Berkeley, Cliff.: The Univercity of California Press,)
- Walgito, B.,2003, *Psikologi Sosial [Suatu Pengantar]*, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Walker, Edward L., "Relevant Psycology is a Snark" *American Psycologist*, 25 (December, 1970), 1085-1086
- Wasistiono, Sadu, 2003, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, cetakan IV, Penerbit Fokus Media, Bandung.
- Weber, M., 1978, *Economy and society : an outline of interpretative sociology*, Edited by Roth, G., & Mittich, C. Berkely : Univercity of California Press
- Wolin, Sheldon S., "Political Theory Trends and Goals, " *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol.12,
- Wingjosoebroto, Soetandyo, 2004, *Desentralisasi dalam tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda- Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia {1900-1940}*, Bayumedia, Malang
- Yin, Robert K, 2003, *Studi Kasus (desain dan Metode)*, Rajawali Press, Jakarta

Jurnal *Analisis*, CSIS, Vol.33, No.2. Juni 2004
Jurnal *Analisis CSIS*, Tahun XXVIII, No.2
Jurnal, *Analisis Social*, Vol.9 No.3, Desember 2004
Jurnal, *Penelitian Politik*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
Vol.1, No.1, Tahun 2004
Jurnal Ilmu Politik, 16, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Jurnal *An-Nafs* Vol.02 No.01, Fakultas Psikologi Universitas
Islam Riau
Jurnal *Demokrasi & Otonomi Daerah*, Volume 5/Nomor 1/Juni
2007



Dr. H. Syafhendry, M.Si. Lahir di Bengkalis Propinsi Riau tanggal 07 Desember 1966, menamatkan Sarjana tahun 1991 di Fisipol Universitas Islam Riau, kemudian melanjutkan program Magister Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1995 dan tamat tahun 1997, dan pada tahun 2005 melanjutkan program Doktor di Universiti Utara Malaysia selesai tahun 2010. Profesi sebagai dosen digeluti sejak tahun 1992 hingga sekarang. mengajar pada program Sarjana dan Magister Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Islam Riau. Selain mengabdikan di almamaternya, juga diminta sebagai dosen luar biasa di IPDN kampus Riau. Aktif menulis karya ilmiah yang dimuat diberbagai media, aktif mengisi seminar diberbagai kesempatan sebagai pemakalah, pernah menduduki berbagai jabatan struktural mulai dari Sekretaris Jurusan hingga menjadi Dekan dua periode. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau. Dan aktif di berbagai organisasi profesi dan ormas.

Buku ini diangkat dari disertasi Penulis yang berjudul *Gelagat Pengundi : Analisis Rasionaliti Pengundi Dalam Memilih Ketua Daerah di Propinsi Riau*. buku ini memberikan pemahaman menyeluruh dalam setiap pembahasan mengenai perilaku pemilih baik dalam konteks teori maupun praktek. Melalui buku ini pembaca diajak untuk mengetahui, menelusuri, dan memahami perkembangan kajian Politik di Indonesia, khusus terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah, perkembangan sejarah peraturan pemerintah tentang pengangkatan kepala daerah di Indonesia. Perubahan paradigma inilah yang mendorong penulis membuat disertasi perilaku pemilih. Makna dan pesan dari buku ini, agar pembaca memiliki sandaran ilmiah dalam menganalisis perilaku pemilih (*voting behavior*) dalam pemilihan umum. Baik pemilu Legislatif, Pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah. Buku ini sangat penting dibaca oleh kalangan yang terkait dengan kehidupan politik pemerintahan, para kandidat kepala daerah, tim sukses, termasuk akademisi dosen dan mahasiswa.

ISBN 978-602-6982-23-0



9786026982230